

Ibu Sumiyati salah satu contoh SDM Kemenkeu, pengelola keuangan di sektor pemerintah, yang benar-benar punya integritas, kompetensi, dan *all-out* dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Bu Sum layak menjadi contoh dan teladan bagi insan Kemenkeu.

Mulia Nasution, *Sekjen Kemenkeu 2006-2011; Ketua Umum Persatuan Purnabakti Pegawai Kemenkeu 2019-2024*

Ibu Sumiyati senang bila temannya sukses, dan senang bila bisa menyiapkan penerusnya. Dalam berkariier, Ibu Sum mengedepankan prinsip saling mendukung, saling menghargai, tanpa sikut kanan-kiri. Pada puncak kariernya sebagai Kepala BPPK dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Ibu Sum melakukan berbagai terobosan, dan bukan *business as usual*.

Sonny Loho, *Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan 2011- 2015; Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu 2015-2017*

Ibu Sumiyati adalah sosok yang *humble*, menjaga integritas, dan *smart*, dalam arti menguasai detail, dan asyik untuk diajak berdiskusi. Saat berdiskusi, pembawaan Bu Sum juga tenang, malah membuat nyaman.

Binsar Simanjuntak, *Deputi Kepala BPKP 2005-2017; Ketua Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2004-2017*

Buku “Sumiyati, Srikandi Perubahan, Inspirasi Bagi Perempuan — Dari Reformasi Keuangan Negara, Perencanaan dan Penganggaran, Sampai Corpu” merupakan biografi profesional Sumiyati, perempuan pertama yang menjabat Inspektur Jenderal di Kementerian Keuangan.

Sumiyati, anak desa dari Sragen, Jawa Tengah dalam pengabdianya selama 39 tahun 4 bulan, meninggalkan banyak “legacy” yang bermanfaat bagi insan Kemenkeu, di antaranya mendirikan Corporate University (Corpu) — yang kini “benchmark” bagi kementerian dan lembaga lain di Indonesia, dan mengubah status STAN menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN. Selain itu Penganggaran Berbasis Kinerja (“Best Practice Guide”/BPG) juga “legacy”-nya.

Buku ini juga memuat perjalanan hidup Sumiyati yang sulit dan keras sejak awal di Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dan perjuangannya untuk tetap bisa mengenyam pendidikan tinggi gratis di STAN. “Kalau pendidikanku tidak dibiayai negara, aku hanyalah Sumiyati, perempuan penanam padi di sawah di Tanon,” kata Sumiyati, yang kemudian mewakafkan seluruh hidupnya untuk negara. Buku ini layak dibaca generasi muda Kementerian Keuangan dan juga anak-anak di pelosok Indonesia.

Ibu Sumiyati mengakhiri karier puncak di Kemenkeu sebagai Inspektur Jenderal dengan reputasi sangat baik. Perjalanan Ibu Sumiyati yang lengkap selama 39 tahun 4 bulan mencerminkan perjalanan perempuan ulet, yang memiliki integritas luar biasa dan profesional. Pengalaman kerjanya beragam dan reputasi yang dibangunnya membuat Ibu Sum berwibawa dan dikagumi, sekaligus menjadi aset penting bagi Kementerian Keuangan.

Saya berharap ke depan, lahir dan tumbuh generasi muda pengganti Ibu Sum — yang memiliki kemampuan berkarya dengan tekun dan menjalankan tugas dengan dedikasi dan loyalitas yang tak pernah terkompromikan. Integritas yang dijaga Ibu Sum tidak hanya membangun reputasi pribadinya tetapi juga reputasi Kementerian Keuangan dan Indonesia.

Sri Mulyani Indrawati, *Menteri Keuangan RI (2006-2010, 2016-sekarang)*



ROBERT ADHI KSP yang bernama lengkap Robert Adhi Kusumaputra adalah penulis buku —sebagian besar bergenre biografi. Buku biografi profesional “Sumiyati, Srikandi Perubahan, Inspirasi Bagi Perempuan” adalah buku ke-17 yang ditulisnya. Buku-buku lain Robert Adhi Ksp di antaranya adalah “Banjir Kanal Timur Karya Anak Bangsa” (Grasindo, 2010); “Marwanto Harjowiryono, Maestro Simfoni Perbendaharaan” (BPPK, 2020); M.R. Karlansyah, 30 Tahun Menekuni Pengendalian Pencemaran” (Ditjen PPKL, 2021).

**Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Kementerian Keuangan**
Gedung Soegito Sostroamidjojo
Jalan Purnawarman No. 99
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

ROBERT ADHI KSP

SUMIYATI

SRIKANDI PERUBAHAN,
INSPIRASI BAGI PEREMPUAN

SUMIYATI

SRIKANDI PERUBAHAN, INSPIRASI BAGI PEREMPUAN



ROBERT ADHI KSP

Meskipun hanya dua tahun memimpin BPPK, Ibu Sumiyati melahirkan dua karya yang luar biasa. Pertama, menghadirkan wajah baru BPPK dengan Corporate University (Corpu) Kemenkeu — pertama di Indonesia. Ibu Sum memberdayakan dan menghidupkan kembali BPPK sehingga menjadi lembaga pendidikan dan latihan disegani di Kementerian Keuangan. Kedua, mengubah STAN menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN.

Rahmadi Murwanto, *Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN*

Ibu Sumiyati bisa diajak ngobrol di mana saja karena tidak terlalu birokratis sehingga komunikasi dan hubungan kerja menjadi lebih cair.

Bambang Karuliawasto, *Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkeu*

Sebagai Inspektur Jenderal Kemenkeu dan Ketua Asosiasi Auditor Internal Pemerintahan Indonesia (AAIPI), Ibu Sumiyati membuat auditor internal berfungsi optimal dalam menjaga keuangan negara, baik di level pemerintah pusat maupun di level pemerintah daerah. Karena itulah Itjen Kemenkeu menjadi *trendsetter* dan menjadi pusat studi banding auditor internal kementerian dan lembaga, serta pemda dari berbagai daerah di Indonesia.

Lucia Widiarsanti, *Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat III; pernah Inspektur I Itjen Kemenkeu*

SUMIYATI

SRIKANDI PERUBAHAN,
INSPIRASI BAGI PEREMPUAN

Ibu Sumiyati mencetuskan gagasan melakukan pengawasan jarak jauh (*remote auditing*). Kegiatan audit dapat dilakukan jarak jauh, lebih efisien, bukan lagi dengan sampel tetapi populasi. Kalaupun turun ke lapangan, hanya hal-hal yang bersifat anomali. *Locus*-nya banyak namun langsung ke sumber masalah. Pengawasan jarak jauh di era digital ini sangat membantu jajaran Itjen bekerja pada masa pandemi Covid-19. Momentumnya bersamaan dengan masa tingginya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yaitu pada April 2020. Jajaran Itjen harus tetap bekerja dalam kondisi apapun.

Patrick Wahyudwisaksono,

Inspektur V, Inspektorat Jenderal Kemenkeu

Satu hal yang selalu saya kagumi dari Ibu Sumiyati adalah pengetahuannya yang komprehensif dan detail tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah, seperti ‘ensiklopedia berjalan’. Beliau hafal di luar kepala mengenai sejarah, latar belakang dan isi berbagai peraturan di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Beliau selalu menyampaikan penjelasan atau argumen dengan tata bahasa, kerangka logika, dan urutan kronologis yang baik, sehingga dapat dipahami oleh semua kalangan.

Mei Ling,

*Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu;
Anggota Kelompok Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*

Ibu Sumiyati adalah salah satu Kartini Indonesia multitalenta yang tetap rendah hati. Segudang karyanya menjadi warisan bagi generasi muda Kemenkeu. Ketika pertama kali menjadi staf Ibu Sum di Biro Perencanaan dan Keuangan, saya mendengar mimpi besar beliau yaitu mewujudkan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dengan Opini Terbaik Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan mewujudkan Laporan Keuangan terkonsolidasi. Ibu Sum mempersiapkan selangkah demi selangkah, dengan upaya keras dan terstruktur sampai akhirnya cita-cita itu terwujud. Ibu Sum tidak pernah lelah memberi semangat kepada kami semua. Kini Kemenkeu sudah meraih Opini Terbaik WTP untuk kali ke-11. Ibu Sumiyati mampu mewujudkan itu karena beliau pemimpin yang bukan *bossy*, tetapi merangkul bawahannya sebagai satu tim yang solid sebagai keluarga.

Anne Serfiana,

*Direktur Keuangan Umum dan Sistem Informasi
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan*

Saya mengibaratkan Ibu Sumiyati seperti mutiara atau berlian yang meskipun ditempatkan di lumpur sekalipun, tetap memancarkan kemilau. Ibu Sum tidak pernah mengeluh tentang jabatan beliau yang tersendat, tetap fokus untuk memberikan yang terbaik.

Edward UP Nainggolan,

Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kalimantan Barat

Best Practice Guide atau BPG adalah salah satu *legacy* atau warisan yang sangat berharga dari kepemimpinan Ibu Sumiyati sebagai usaha penyempurnaan perencanaan anggaran di Kementerian Lembaga dengan sangat humanis. Penyusunan panduan ini memerlukan waktu yang tidak sedikit, komitmen, dan konsistensi seluruh anggota di bawah kepemimpinan Ibu Sumiyati. Pada akhirnya, Biro Perencanaan dan Keuangan mampu menghasilkan panduan tepat waktu dan mendapat apresiasi sangat baik, Panduan ini sangat bermanfaat karena berisi hal-hal mendasar yang harus diketahui para manajer senior di Kementerian Keuangan dalam menyusun perencanaan anggaran berkualitas. Bagi praktisi yang bergerak di bidang perencanaan dan penganggaran, panduan ini memberikan kerangka konseptual dan praktis atas penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja.

Marudut Napitupulu,

Kepala Bagian Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan, Setjen Kemenkeu

Setelah purnatugas, Ibu Sumiyati tidak pernah sungkan untuk berbagi ilmu. Selain itu, sebagai pimpinan, atensi Ibu Sum tidak hanya terkait pekerjaan, dan selalu menyempatkan untuk menanyakan kepada stafnya tentang kondisi keluarga masing-masing. Hal ini guna memastikan setiap pegawainya bisa fokus bekerja dengan tidak terlalu dibebani masalah keluarga. Bila kami menghadapi masalah, Ibu Sum tidak segan untuk turun tangan langsung menawarkan bantuan.

Malul Azam,

*Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan;
Mahasiswa Program Doktorat Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Belgia*

Mbak Sumiyati pekerja keras. Di SMEA, ketika saya masih tidur, Mbak Sum sudah berangkat dengan sepedanya. Saya belum tiba di sekolah, Mbak Sum sudah tiba. Saya tidak heran dengan staminanya yang tinggi. Dia kuat bekerja sampai jam dua pagi, rekan-rekan kerjanya heran karena walau telah kerja sampai jam dua pagi, jam tujuh atau delapan pagi, dia sudah muncul di kantor lagi dalam keadaan segar. Saya tidak heran, karena sejak kecil Mbak Sum sudah terbiasa bekerja keras dan fokus.

Sistomo Siswoatmodjo,

*sahabat Sumiyati di SMEA Sragen dan STAN Jakarta;
Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)*

Kesederhanaan yang terpancar di balik deretan pencapaian Bu Sum —begitu beliau biasa disapa — meyakinkan saya bahwa perempuan bisa menjadi demikian ayu dan cantik dalam kesederhanaan. Saya mengagumi bagaimana beliau memancarkan aura kuat dan lembut, digdaya dan penuh kasih secara bersamaan. Saya menjadikan Bu Sum sebagai inspirasi untuk terus belajar. Tidak terhitung saya mendengar orang menceritakan betapa cemerlangnya Bu

Sum dalam perkara keuangan negara. Beliau mengingat apapun dengan seksama, bahkan di halaman berapa sebuah kalimat dalam sebuah buku. Beliau adalah sumber motivasi bagi banyak perempuan untuk menaruh usaha terbaik dalam hari-hari mereka --saya tidak terkecuali.

Nur Imaroatun Sholihat,

auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;

mahasiswa program Master of Commerce di UNSW Sydney, Australia

Kami tidak punya asisten rumah tangga di rumah. Sum sudah terbiasa mencuci sendiri pakaiannya dan pakaian keluarganya. Sum mencuci, saya yang menyeterika. Kami kan anak kampung yang pernah mengalami kehidupan yang sangat sulit. Jadi untuk pekerjaan semacam ini, kami tidak pernah mempersoalkannya. Demikian juga, soal makanan, kami tidak pernah mempermasalahkannya.

Hartono,

suami Sumiyati

Ibu tak pernah lupa bahwa beliau dapat menikmati pendidikan menengahnya (SMEP dan SMEA di Sragen) sampai pendidikan tinggi (STAN di Jakarta dan S2 di Australia) karena dibiayai negara. Karena itu tidaklah heran ketika mengabdikan di Kementerian Keuangan, ibu bekerja total sepenuh hati, dan juga tidak memanfaatkan jabatannya sebagai pejabat eselon I. "Nak, kita berutang pada negara," kata ibu kepada kami anak-anaknya berulang kali.

Budiaji Hartono,

anak sulung Sumiyati-Hartono

Hiburan kami adalah membaca buku di perpustakaan di rumah. Ibu menyediakan perpustakaan dengan berbagai aneka koleksi. Kami dibiasakan membeli buku di Gramedia secara rutin. Inilah yang membuat pengetahuan kolektif kami relatif banyak. Saya jarang nonton TV karena sudah terbiasa membaca buku. Bagi saya, menonton menghabiskan waktu, sedangkan membaca membuat saya bisa lebih berimajinasi.

Dwipa Harimurti,

anak kedua Sumiyati-Hartono

Saya dan tiga saudara tidak pernah tahu secara rinci pekerjaan ibu di kantor. Yang saya ingat adalah ketika saya masih SD, ibu bekerja ramai-ramai di satu ruangan. Setelah saya di bangku SMP, ibu mempunyai ruang kerja tersendiri dengan sekretaris. Sampai akhirnya saya menyadari jabatan ibu di Kemenkeu sudah tinggi. Ketika ibu masuk ke ruangan, semua orang berdiri. Selama ini ibu tidak menceritakan tentang pekerjaan di kantor. Ibu bahkan masih suka

mengurus sendiri administrasi kependudukan ke kantor kelurahan. Kami anak-anaknya tidak merasakan perbedaan dalam kehidupan kami karena gaya hidup ibu tetap sejak dulu sampai menduduki jabatan eselon I.

Triana Mustika Rukmi,

anak ketiga Sumiyati-Hartono

Ibu adalah *role model* yang luar biasa, yang mampu menyeimbangkan *work life* dan *family life*. Ibu bekerja keras karena harus rapat hingga larut malam bahkan dinihari. Namun pada pagi hari, ibu sudah menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Jam tujuh pagi, ibu sudah berangkat lagi ke kantor. Sesibuk apapun, ibu tetap memerhatikan keluarganya. Suatu hari jika saya sudah berkeluarga, saya ingin seperti ibu, menjadi Kartini di era modern.

Andyta Nalaresi,

anak keempat Sumiyati-Hartono

ROBERT ADHI KSP

SUMIYATI

SRIKANDI PERUBAHAN, INSPIRASI BAGI PEREMPUAN

DARI REFORMASI KEUANGAN NEGARA,
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN,
SAMPAI CORPU

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf c, Huruf d, Huruf f, dan/atau Huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf e, dan/atau Huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Kementerian Keuangan

Daftar Isi

SUMIYATI, SRIKANDI PERUBAHAN, INSPIRASI BAGI PEREMPUAN

DARI REFORMASI KEUANGAN NEGARA, PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN, SAMPAI CORPU

Copyright© 2022, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Kementerian Keuangan

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Kementerian Keuangan, 2022
Gedung Soegito Sostroamidjojo
Jalan Purnawarman No. 99
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Penulis: Robert Adhi Ksp
Editor: Robert Adhi Ksp
Desain grafis: MR Graphic Design
Foto sampul depan: Humas Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Hak cipta dilindungi oleh Undang Undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

328 hlm.; 15 cm x 23 cm

PENGANTAR

Sri Mulyani Indrawati: Integritas dan Loyalitas Sumiyati Membangun Reputasi Kementerian Keuangan.....	xvii
--	------

PROLOG

• Mulia P. Nasution: Sumiyati Sosok Berintegritas dan “All-out” Laksanakan Tugas	xxi
• V. Sonny Loho: Sumiyati, Pribadi Menyenangkan, “Low Profile”, Teman Sesungguhnya.....	xxvi
• Binsar Simanjuntak : Sumiyati Teman Diskusi di Komite Standar Akuntansi Pemerintahan	xxix

SATU

ANAK DESA DARI SRAGEN	1
• Anak Petani.....	1
• Bapakku Visioner.....	4
• Gendong Klenthing Demi Dapatkan Air Bersih.....	6
• Menjaga Asupan Gizi dari Pekarangan Rumah.....	8
• Belajar Masak Sejak Kecil	9
• Buku dan “Asupan Gizi” untuk Otak.....	9
• Pelajaran Budi Pekerti dalam “Serat Wedhatama” dan “Bhagavad-Gita”	11

• Bapak Belajar Memecahkan Masalah dari Mbah Putri	12
• Visi Bapak tentang Kesenjangan Gender	14
• Pelajaran tentang Pentingnya Menabung.....	16
• Belajar Bergaul dengan Orang Terpandang di Kampung.....	17
• Belajar Disiplin dan Kerja Keras.....	18
• Bapak Jarang Marah	19
• “Jangan Setengah-setengah!”	20
• Tak Pernah ke Dukun jika Sakit	21
• Tidak Berminat Jadi Bidan.....	21
• “Role Model” Mbakyu Sukemi	23
• Selalu Juara dan Dapatkan Beasiswa	25
• Setiap Hari Bersepeda 44 Kilometer Pergi-Pulang	26
• Bapak Mengajariku Tak Ada yang Instan	29
• Titik Balik Hidupku: Mengajari Pegawai Bank tentang Pembukuan.....	29
• Pak Guru Pardjanto Menumbuhkan Kepercayaan Diriku.....	31

Sistomo Siswoatmodjo

Mbak Sum Tahan Banting, Fokus, dan Jernih	32
• Mewakafkan Hidupnya untuk Negara.....	37

DUA

MENDALAMI AKUNTANSI DAN KEUANGAN NEGARA	39
• Mencoba ke UGM, tetapi Siapa yang akan Membiayai Kuliahku? ...	39
• Memilih Kuliah Gratis di Jakarta	41
• Angkatan ke-6 STAN 1980	44
• Tahun Pertama Kuliah, Tinggal di Rumah Petak Tanpa Listrik.....	45
• Tumbuh Bersama sebagai Satu Keluarga.....	46
• Saling Membantu	47
• Sebagian Besar Pengajar STAN adalah Pejabat	48
• “Kakak Buku, Adik Buku”	49
• Kampus Baru STAN di Bintaro	51
• Lulusan STAN Siap Kerja	52
• Diangkat Menjadi CPNS Pada 1 April 1982	53
• Mendalami Akuntansi Pemerintahan.....	54
• Mengapa Aku Memilih Menjadi Akuntan?	55

• “Kalau Tak Ada Beasiswa, Aku Hanya Sumiyati yang Menanam Padi di Sawah”.....	56
• Kebanggaan Menjadi Asisten Dosen STAN	57
• Menyelesaikan Program Diploma IV STAN Pada 1989	59

TIGA

PUNGGAWA KEUANGAN NEGARA.....	63
• Mengawali Karier sebagai Auditor di BPKP DKI	63
• Mengolah Data Masih Manual.....	66
• Langsung Menjadi Ketua Tim Auditor	68
• Surat Panggilan S-2 dari Australia ke Alamat Rumah yang Digusur.....	69
• Belajar dari Australia tentang Penanganan Ibu Hamil	70
• Tipe “Well-Planned”	74
• “Finance and Information System”	75
• “Work Hard, Play Hard”	77
• Mengandalkan Logika	78
• Pusdiklat Pengawasan di BPKP	79
• Akuntansi Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah.....	80
• Tim Asistensi Sistem Informasi Keuangan Daerah.....	81
• Tiada Hari Tanpa Sosialisasi, Sibuk Berkeliling Daerah di Indonesia.....	83
• Hasil Pelatihan: Banyak Daerah yang Dapatkan Opini WTP	85
• Mesin “Speedboat” Mati di Laut sampai Mandi dengan Air Bercampur Minyak.....	88
• “Kalau Ngasih Mestinya Rela, Kok Masih Dimintai Laporan?”	89
• Berkomunikasi dengan Pak Hekinus Manao Tanpa Sekat	90
• Memetakan Tim dan Membangun Komunikasi.....	91
• Setiap Episode Lahirkan Tantangan dan Pengalaman Baru	94
• Membangun Sistem di Direktorat Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	96
• Direktorat Pembinaan PK-BLU Bisa Menjadi Direktorat Jenderal Sendiri.....	100

Edward UP Nainggolan

“Ditempatkan Di Mana Saja, Berlian Tetaplah Berlian”	103
• Sosialisasi Keuangan Daerah ke Berbagai Daerah di Indonesia	104
• Membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah	106

• Direktorat Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	107
• Pendidik Terbaik yang Lakukan “Transfer of Knowledge”	108
• Bagi Ibu Sumiyati, Semua Orang Spesial.....	110
• Pemimpin Berintegritas	111

EMPAT

NAKHODA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN 115

• Ditelepon Pak Mulia P. Nasution, “Bu Sum ke Setjen ya, Pindah Jadi Kepala Bagian Akuntansi”	115
• Dulu Seakan Tak Punya Harapan, Kini Unit Kerja yang Hidup dan Dinamis	120
• “Ini Laporan Keuangan Satu Negara, Bukan Laporan Warung!”	121
• “Ibu Diminta Terbang ke Jakarta Karena akan Dilantik sebagai Kepala Biro”	123
• “Ini Bukan Biro Pencatatan Keuangan!”	124
• Belajar dari Australia	128
• Di Setiap Tempat, Memancang Tonggak Baru	129
• “Better Practice Guide”	131

“Best Practice Guide, Penganggaran Berbasis Kinerja” 133

• Sering Turun Langsung ke Lapangan.....	135
• Penghargaan Tertinggi dari Presiden untuk Pengarusutamaan Gender.....	139

Mei Ling

Sumiyati Soko Guru Akuntansi Pemerintahan di Indonesia 143

• Pelaku Sejarah Reformasi Keuangan Negara.....	143
• “Ensiklopedia Berjalan”	145

Marudut Napitupulu

Sumiyati Mendorong Perbaikan Tata Kelola Anggaran dari Hilir ke Hulu dengan Pendekatan Humanis..... 146

• BPG Merupakan “Legacy” Ibu Sumiyati.....	148
• Tiga Hal yang Patut Diteladani dari Sumiyati.....	149

Malul Azam

Sumiyati Tak Pernah Sungkan Berbagi Pengetahuan..... 150

Anne Serfiana

“Sumiyati, Kartini Indonesia Multitalenta” 155

• Memperbaiki Laporan Keuangan dari Hulu.....	155
• Memperbaiki Kemenkeu dari Sisi Pendidikan.....	157
• Tak Hanya Jadi Pengawas, Itjen Juga Mitra Seluruh Eselon I.....	157
• Sumiyati Tetap Memasak dan Mencuci Sendiri Pakaianya.....	157
• Sumiyati Hafal Kondisi Stafnya dan Keluarganya.....	158
• Prakarsai Pengarusutamaan Gender di Kemenkeu	159
• Daya Ingat yang Tajam	159

LIMA

GEBAKAN DI BPPK: DARI CORPU SAMPAI PKN STAN..... 161

• Memilih Menjadi “Kepala Sekolah”	161
• Ikut “Bidding” Lagi	162
• Perkuat SDM Kemenkeu Melalui Diklat	163
• Mewujudkan Corporate University Kemenkeu	164

Corporate University, Strategi Kembangkan Kompetensi

SDM Kemenkeu 168

• Menjadi “Arena Bermain”	169
• Mengubah STAN Menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN	170
• “STAN is The Best!”	171

Orasi Ilmiah Sumiyati

Tujuh Hal yang Wajib Dimiliki Mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN..... 172

• Skor BPPK Naik Pesat.....	175
• Menata Ulang dan Memberdayakan Widyaiswara	176
• “DNA-ku adalah Perubahan!”	178

Rahmadi Murwanto

Tiga “Legacy” Sumiyati di BPPK 180

• Menolak Kajian McKinsey yang Minta BPPK Dibubarkan	182
• STAN Berganti Nama Menjadi Politeknik Keuangan Negara.....	185
• Menempatkan Rahmadi sebagai Direktur PKN STAN.....	186

ENAM

MEMIMPIN AUDITOR INTERN PEMERINTAH	187
• Sri Mulyani: “Bu Sum Nanti Irjen, ya”	187
• Digitalisasi di Inspektorat Jenderal	190
• Auditor seperti Dokter	193
• Pengawasan dalam Pengarusutamaan Gender Masih Kurang	194
• Kerja Sama dengan Instansi Lain dan Aktif di Asosiasi Auditor Internal Pemerintah	195
• Berbagi Pengetahuan	196
• “Open Space” di Gedung Itjen	197
• Pengawasan Jarak Jauh	198
• “Menjaga Rumah” agar Kemenkeu Tetap Dipercaya	199

Bambang Karuliawasto

“Ibu Sumiyati, Atasan yang Tidak Birokratis”	201
• Mudah Beradaptasi dan Berkomunikasi	203

Raden Patrick Wahyudwisaksono

Sumiyati Membimbing dengan Hati dan Kasih Sayang	204
• Tetap Rendah Hati, Berkonsultasi dengan Adik Angkatan dan Mahasiswanya	207
• Menyatukan Semua Pusdiklat di Bawah BPPK	207
• Meningkatkan Peran APIP di Kementerian dan Lembaga	208
• Mendorong Itjen Lakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran	208
• Membedah Cara Kerja Itjen yang Lamban	209
• Mengoptimalkan Penggunaan Aplikasi Solusi Audit “TeamMate” ..	210
• Membentuk “Community of Practice”	212
• Menggagas dan mempraktikkan Pengawasan Jarak Jauh	212
• Memperkuat Kolaborasi Inspektorat dan Eselon I Kemenkeu	213
• Auditor Harus Memiliki “Interpersonal Skill” yang Baik dan Berkomunikasi dengan Jelas	214
• Selalu Menantang Stafnya Belajar Hal-hal Baru	214
• Apa Artinya Gelar jika Tak Bisa Membawakan Diri?	215

Lucia Widiarsanti

Sumiyati, Guru dan Mentor yang Hebat	216
• Memastikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi	219
• Pejabat yang Egaliter	220
• “Open Space” di Kantor Itjen Bukti Sumiyati Visioner	221
• Mengawal Reformasi di Ditjen Pajak	221
• Itjen Kemenkeu Menjadi “Trendsetter”	223
• Berupaya Perempuan di Kemenkeu Menjadi Pemimpin	223
• Guru dan Mentor dalam Segala Hal	224

Nur Imaroatun Sholihat

“Ibu Sumiyati Sumber Motivasi bagi Banyak Perempuan”	225
---	------------

TUJUH

“SIGARANING NYAWA” DAN GENERASI PENERUS	227
• “Garwo”	227
• Mendisiplinkan Anak-anak	228
• Perpustakaan di Rumah Tumbuhkan Minat Baca Anak-anak	229
• Menyiapkan Makanan Bergizi buat Anak-anak	231
• Kalau “Ngumpul” di Rumah, Obrolan Anak-anak Mirip Seminar ...	232
• Filosofi Jawa yang Memengaruhi Hidup	233

Dukungan “Belahan Jiwa”

• Tetangga Satu Desa	235
• Bertemu dalam Arisan Keluarga.....	235
• Berbagi Cerita tentang Karier Sumiyati.....	237
• Sebagai Suami Pejabat Teras Kemenkeu.....	239
• Berbagi Tugas di Rumah Tangga.....	239

Tiada Mengenal Pensiun untuk Mengabdikan dan Melayani

• Kilas Balik, Refleksi untuk Menata Diri	241
• Roda Pengabdian Terus Berputar	242

Empat Anak Bicara tentang Sang Ibu

• “Nak, Kita Berutang Pada Negara!”	250
• Tidak Memanfaatkan Jabatan.....	250
• Ibu Ingin “Membayar” Utang kepada Negara	254

• Sejak Kecil, Dididik dengan Disiplin Tinggi	255
• Hiburan di Rumah: Buku di Perpustakaan	256
• Ibu Memang Pendidik Andal.....	257
• Dianjurkan Kuliah di Lokasi Jauh dari Rumah.....	257
• Daya Tahan dan Etos Kerja.....	259
• Diajari Tanggung Jawab	260
• Masakan Ibu yang Bikin Kangen Rumah	261
• Sumiyati, “Role Model” bagi Anak-anaknya.....	262
CURRICULUM VITAE.....	265
SUMBER ISI BUKU DAN KEPUSTAKAAN.....	269
BAHAN BACAAN DAN KEPUSTAKAAN	272
CATATAN PENULIS.....	275
UCAPAN TERIMA KASIH	290
SEKILAS PENULIS.....	294

PENGANTAR

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Republik Indonesia (2006-2010 dan 2016-sekarang)

Direktur Pelaksana Bank Dunia/World Bank (2010-2016)

Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional/IMF (2002-2005)

Integritas dan Loyalitas Sumiyati Membangun Reputasi Kementerian Keuangan

Ibu Sumiyati sudah melakukan tugas secara paripurna setelah 39 tahun 4 bulan dalam perjalanan panjang dan beragam, dan mengakhiri karier puncak di Kemenkeu sebagai Inspektur Jenderal dengan reputasi yang sangat baik. Jabatan Inspektur Jenderal merupakan jabatan yang identik dengan akuntabilitas, tata kelola, dan kepercayaan publik yang harus dijaga. Inspektur Jenderal harus terus memperkuat dan meningkatkan akuntabilitas transparansi dan



Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI.

FOTO: DOKUMENTASI KEMENKEU

pertanggungjawaban keuangan negara secara kreatif, inovatif, dan sesuai dengan rambu-rambu akuntabilitas keuangan negara.

Perjalanan Ibu Sumiyati yang begitu lengkap mencerminkan perjalanan perempuan yang ulet, yang memiliki integritas yang luar biasa dan profesional. Ibu Sum selalu menceritakan bahwa dia berasal dari kota kecil, dididik oleh orangtuanya secara sangat terbatas, tetapi mempunyai tekad dan cita-cita besar.

Ibu Sum mengukir kariernya setapak demi setapak dan setiap tapakannya mencerminkan karakternya yang patut dijadikan contoh, terutama oleh kaum muda, generasi milenial, terutama para perempuan Kementerian Keuangan. Ibu Sum memiliki keuletan yang tanpa henti, yang mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas diri sesuai bidang yang dimiliki. Pengalaman kerjanya yang beragam dan reputasi yang dibangunnya membuat Ibu Sum berwibawa dan dikagumi, sekaligus menjadi aset penting bagi Kementerian Keuangan.

Tanggal 1 Agustus 2021, Ibu Sumiyati memasuki masa pensiun. Kementerian Keuangan sangat kehilangan sosok Ibu Sum. Saya berharap ke depan, lahir dan tumbuh generasi muda pengganti Ibu Sum — yang memiliki kemampuan berkarya dengan tekun dan menjalankan tugas dengan dedikasi dan loyalitas yang tak pernah terkompromikan. Integritas yang dijaga Ibu Sum tidak hanya membangun reputasi pribadinya tetapi juga reputasi Kementerian Keuangan dan Indonesia.

Saya dan seluruh jajaran Kemenkeu menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Sumiyati atas dedikasi, integritas, profesionalisme, prestasi dan inspirasi, yang sudah disumbangkan bagi Kementerian Keuangan. Ibu Sum telah membangun keuangan negara dan memperkuat sistem pengendalian internal Kemenkeu. Terima kasih yang tulus dan hormat saya atas pencapaian perjalanan karier yang luar biasa paripurna, dan semuanya berakhir dengan indah dan baik. Ibu Sumiyati adalah contoh dan *role model* untuk seluruh insan Kemenkeu, termasuk untuk saya sendiri.

Terima kasih kepada Ibu Sumiyati, kepada keluarga — suami dan anak-anak. Perjalanan panjang ini tidak mungkin dilakukan sendiri karena kontribusi keluarga pasti sangat besar.

“Ibu Sum memiliki keuletan tanpa henti, yang mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas diri sesuai bidang yang dimiliki. Pengalaman kerjanya yang beragam dan reputasi yang dibangunnya membuat Ibu Sum berwibawa dan dikagumi, sekaligus menjadi aset penting bagi Kementerian Keuangan”

— Sri Mulyani Indrawati





SUMBER FOTO: BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Salam sehat dan salam hangat untuk keluarga. Saya yakin, masih banyak yang bisa dikerjakan Ibu Sum untuk Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia.¹

Sri Mulyani Indrawati²

¹ Diolah dari berbagai sumber, yaitu testimoni Sri Mulyani dan sejumlah pejabat eselon I Kementerian Keuangan saat “melepas” Sumiyati yang memasuki masa purnabakti; sambutan Menkeu Sri Mulyani saat serah terima jabatan Irjen Kemenkeu 2 Agustus 2021; dan buku kenangan “Selamat Memasuki Masa Purnabakti” (2021)

² Sri Mulyani Indrawati yang lahir di Bandar Lampung, 26 Agustus 1962 adalah Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (1986); Master of Science of Policy Economics (1990) University of Illinois Urbana Champaign, Amerika Serikat; Ph.D of Economics (1992). Sri Mulyani pernah menjabat Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara/South East Asia/SEA Group (1 November 2002-Desember 2005); Direktur Pelaksana Bank Dunia (1 Juni 2010-Juni 2016). Saat ini Sri Mulyani Indrawati menjabat Menteri Keuangan (sejak 23 Oktober 2019) dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sri menjabat Menteri Keuangan pada periode pertama Presiden Jokowi sejak 27 Juli 2016, menggantikan Bambang PS Brodjonegoro. Sebelumnya Sri adalah Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (5 Desember 2005-Mei 2010).

PROLOG

Mulia P. Nasution

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (2006-2011)

Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu (2004-2006)

Sumiyati Sosok Berintegritas dan “All-out” Laksanakan Tugas



Mulia P. Nasution

Saya sudah mengenal Ibu Sumiyati sejak 20 tahun lalu, bahkan lebih. Dalam perjalanan waktu yang panjang, saya melihat Bu Sum salah satu contoh sumber daya manusia (SDM) Kemenkeu, pengelola keuangan di sektor pemerintah, yang benar-benar punya integritas, kompetensi, dan *all-out* dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Bu Sum layak menjadi contoh dan teladan bagi insan Kemenkeu.³

Dalam perjalanan kariernya dari eselon IV ke eselon III, Bu Sum menghadapi kendala kepangkatan. Setelah itu, karier Bu Sum menanjak, dan akhirnya Bu Sum menjadi pejabat teras, yang sudah teruji, bukan hanya saat memimpin Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), tetapi juga ketika menjabat Inspektur Jenderal — suatu jabatan yang tidak mudah. Bu Sum menunjukkan,

³ Diolah dari percakapan penulis dengan Mulia P Nasution, 16 Agustus 2022 melalui Zoom

bukan hanya gelar pendidikan yang disandangnya, tetapi juga integritas —hal terpenting yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan negara di sektor pemerintah.

Sebagai Kepala BPPK, Bu Sum melakukan berbagai perbaikan sehingga peran BPPK yang mempersiapkan SDM Kemenkeu, terutama melalui STAN dan Pusdiklat, dapat bersinergi dengan unit teknis yang membutuhkan. Langkah Bu Sum ini membuat widyaiswara atau instruktur benar-benar memberikan kontribusi yang diperlukan untuk memperkuat SDM Kemenkeu.

Awal Mula Bekerja Bersama Sumiyati

Ketika saya diangkat menjadi Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) pada tahun 2000, saya berusaha memperbaiki sistem akuntansi di sektor pemerintah. Sudah cukup banyak inisiatif yang dilakukan, termasuk dengan bantuan Bank Dunia. Karena itu, sebagai pimpinan baru BAKUN, kami perlu memperkuat sumber daya manusia di sana, dengan mengajak mereka yang memiliki keahlian akuntansi di sektor publik/pemerintah — yang kita tahu sangat langka. Akuntan adalah kualifikasi keahlian yang tidak hanya dibutuhkan di sektor pemerintah, tetapi dimanfaatkan sektor swasta. Banyak orang yang menyandang gelar akuntan lebih tertarik bekerja di perusahaan swasta sehingga sektor pemerintah kekekuran SDM yang ahli.

Saya kenal seorang alumnus STAN, yaitu (alm) Dr Hekinus Manao, yang ditugaskan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) — sama seperti Bu Sum. Saya melihat kedua sosok ini kelihatannya tidak terlalu diberdayakan secara optimal. Saya meminta Hekinus Manao —yang terlibat dalam penyusunan paket Undang-undang Keuangan Negara— untuk ditarik ke Kementerian Keuangan. Saya sudah mengenal Hekinus sejak di bangku kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Dia salah satu lulusan terbaik. Pada 1978-1979, Hekinus tingkat 1, saya sudah tingkat 4.

“Saya melihat Bu Sum salah satu contoh sumber daya manusia Kemenkeu, pengelola keuangan di sektor pemerintah, yang benar-benar punya integritas, kompetensi, dan all-out dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Bu Sum layak menjadi contoh dan teladan bagi insan Kemenkeu”

— Mulia P. Nasution



Ketika saya mengajak Hekinus, dia bertanya apakah boleh mengajak Bu Sum, sambil menyerahkan *curriculum vitae*-nya. Sebelumnya saya tidak mengenal langsung Bu Sum karena jarak saya masuk dan Bu Sum relatif cukup jauh, baik di STAN maupun di BPKP. Saya baru tahu Bu Sum setelah diperkenalkan Hekinus Manao. Bu Sum seorang yang potensial dengan rekam jejak yang baik.

Iniilah awal mula saya bekerja bersama Bu Sum. Ketika Ditjen Perbendaharaan dibentuk —setelah paket UU Keuangan Negara disetujui dan disahkan, Kemenkeu memperkuat SDM Ditjen Perbendaharaan dengan melakukan reorganisasi. Sebelum reorganisasi dilaksanakan, Hekinus dan Sumiyati adalah sosok yang memperkuat proses pembahasan UU tentang Keuangan Negara, terutama pengelolaan keuangan teknis, dalam sisi akunting, khususnya dalam sistem pelaporan dan audit. Kontribusi mereka sangat besar.

Apalagi kami harus mengatur sedemikian rupa agar pemeriksaan eksternal bisa diselenggarakan, bagaimana posisi Badan Pemeriksa Keuangan, peran pengawasan internal di sektor pemerintahan yang dijalankan BPKP. Di sini peran dan kontribusi Bu Sum sangat besar.

Setelah reorganisasi dan BAKUN dibubarkan, saya menjadi Dirjen Perbendaharaan. Bu Sum ikut memperkuat direktorat jenderal yang baru dibentuk ini. Kepangkatan Bu Sum sempat terkendala sehingga mentok di eselon III (karena ketika bertugas di Pusdiklat Pengawasan BPKP, kredit poinnya terlalu kecil). Setelah saya menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen), Bu Sum baru bisa dipromosikan menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. Meski pangkatnya masih di bawah (di eselon III), kami memberi kesempatan kepada Bu Sum sesuai standar BAKN. Setelah dua tahun menjadi pelaksana tugas (Plt), pangkatnya naik ke eselon II.

Pada periode berikutnya, Bu Sum menjadi koordinator perencanaan, termasuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat oleh Kemenkeu. Di sini, Bu Sum sangat berperan dan menjadi arsiteknya karena sangat menguasai bidang akuntansi. Semua ilmu dan rambu-rambu yang dituangkan dalam aturan. Bu Sum berperan

sebagai instruktur dan ahli. Menyusun dan menyiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tidaklah mudah karena dibutuhkan kerja sama semua sektor.

Saat itu kami baru saja melaksanakan pelaporan akuntansi sesuai standar. Dari sisi pemahaman, Bu Sum tidak diragukan lagi. Meski pangkatnya masih eselon III, Bu Sum bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Keuangan, bukan hanya di lingkup Kemenkeu, tetapi sebagai Bendahara Umum Nasional (BUN), Kemenkeu menghimpun laporan keuangan kementerian dan lembaga (K/L) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Setelah bertahun-tahun belum bisa mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akhirnya dengan kerja keras, Kemenkeu bisa meraih Opini WTP. Ini hasil konkret dari reformasi keuangan negara.

Bekerja Sama Lagi Setelah Pensiun

Sesudah pensiun, kami bekerja sama lagi, tentu di bidang yang berbeda. Saya diminta Marzuki Usman untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Persatuan Wredatama Republik Indonesia periode 2021-2026 — yang jumlah anggotanya saat ini sekitar 4 juta orang.

Saya memerlukan teman-teman yang bisa membantu wadah para pensiunan ini, selain meningkatkan kesejahteraan anggotanya juga tetap ikut berkontribusi kepada negara. Saya mengajak Bu Sum sebagai Kepala Departemen Pengelolaan Keuangan dan Investasi, dan Bu Sum mengajak Helmy Yahya, Suryo Alam, dan Ito Warsito, (almarhum, mantan Direktur Bursa Efek Indonesia).

Saya juga Ketua Umum Persatuan Purna Bakti Pegawai Kemenkeu (P2PB Kemenkeu) periode 2019-2024. Kami berusaha menjadi mitra pemerintah. menggelar seminar dan *workshop* yang berkaitan dengan kesejahteraan.⁴

⁴ Mulia P Nasution lahir di Panyabungam Sumatera Utara, 27 Agustus 1951, menjabat Sekretaris Jenderal Kemenkeu 2006-2011, dan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu 2004-2006. Saat ini Mulia Nasution menjabat Ketua Umum Persatuan Purna Bakti Pegawai Kemenkeu (P2PB Kemenkeu) periode 2019-2024, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Wredatama Republik Indonesia periode 2021-2026.

V. Sonny Loho

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (2011 - 2015)
Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu (2015-2017)

Sumiyati, Pribadi Menyenangkan, “Low Profile”, Teman Sesungguhnya



Sonny Loho

Saya kenal Ibu Sumiyati sejak tahun 1984 saat masih di kampus. Dia adik kelas yang dari awal sudah menunjukkan kualitas kecerdasannya. Kami berteman dan bekerja sama dalam pengembangan dan pelatihan akuntansi pemerintahan, dalam tim penyusun RUU Bidang Keuangan Negara yang kemudian menjadi 3 (tiga) UU sebagai landasan hukum reformasi keuangan negara, dan terus bersama di Kementerian Keuangan sampai purna

bakti dan setelahnya.

Kompetensi dan kegigihan Bu Sum untuk menyiapkan peraturan dan kebijakan sesuai kaidah-kaidah manajemen keuangan negara terbaik untuk dapat digunakan di Indonesia sangat nyata, kerja jauh melewati hari dan jam kantor merupakan hal yang biasa. Bu Sumiyati berperan aktif dalam tim penyusun beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah bidang keuangan negara dan selanjutnya konsisten menerapkan dalam pekerjaannya di Kementerian Keuangan.

“Bu Sumiyati senang bila melihat temannya sukses, dan senang bila bisa menyiapkan penerusnya. Ini contoh kesuksesan karier dengan prinsip saling mendukung, menghargai, tanpa sikut kanan kiri”

— V. Sonny Loho

Menyampaikan dan membahas ide dengan jelas, runtut berdasarkan konsep, disiplin keilmuan dan kemungkinan penerapannya, berargumentasi tanpa merendahkan pendapat yang berbeda merupakan ciri Bu Sumiyati yang membuat pihak lain paham dengan baik idenya, sependapat maupun tidak.

Perjalanan panjang Bu Sum dalam meniti karier dari bawah dengan beragam hal menyenangkan dan tidak menyenangkan membuatnya matang dan memegang prinsip-prinsipnya dengan konsisten. Komunikasi dan persahabatan tidak pernah putus malah semakin erat dan menyenangkan dalam kondisi apapun.

Bu Sumiyati orang yang senang bila temannya sukses dan senang bila bisa menyiapkan penerusnya, merupakan contoh kesuksesan karier dengan saling mendukung menghargai tanpa sikut kanan kiri. Pada puncak kariernya sebagai Kepala BPPK dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, berbagai terobosan dilakukan, bukan *business as usual*. Kesuksesannya tidak mengubah sikap *low profile* dan siap menolong teman seperti dari masa-masa awal bekerja.

Dari desa ke kota meniti karier dan mengukir prestasi untuk negeri dalam kapasitasnya dapat kita lihat pada Bu Sumiyati.

Kita harapkan apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan terus berlanjut karena hal-hal tersebut pastinya untuk kebaikan pengembangan keuangan negara.⁵

⁵ Vincentius Sonny Loho adalah kolega Sumiyati di STAN, Kementerian Keuangan, BPKP, dan KSAP; pernah menjabat Inspektur Jenderal Kemenkeu (2011-2015) dan Dirjen Kekayaan Negara (2015-2017)

Binsar Simanjuntak

Deputi Kepala BPKP 2005-2017
Ketua Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2004-2017

Sumiyati Teman Diskusi di Komite Standar Akuntansi Pemerintahan



Binsar Simanjuntak

Ibu Sumiyati adalah sosok —yang menurut saya— *humble*, menjaga integritas, dan tentunya *smart*, dalam arti menguasai detail, dan asyik untuk diajak berdiskusi. Saat berdiskusi, pembawaan Bu Sum juga tenang, malah membuat nyaman. Ibu Sum adalah sosok yang dipercaya untuk melaksanakan tugas.

Saya mengenal Bu Sum sejak awal kuliah di STAN karena dia adik kelas saya meski tidak terlalu dekat.

Setelah Bu Sum masuk kerja, setelah menyelesaikan kuliahnya di luar negeri, saya mulai sering bertemu dengannya di Pusdiklat Pengawasan BPKP. Bu Sum memberi masukan-masukan yang bermanfaat bagi perbaikan (inovasi) berdasarkan pengamatan. Setelah beliau meraih gelar Master, beliau memberi masukan bagi perbaikan, modul bagi Pusdiklat.⁶

⁶ Diolah dari percakapan penulis dengan Binsar H. Simanjuntak, 16 Agustus 2022 melalui Zoom

Saya melihat Bu Sum menata kariernya dari bawah sekali — sama seperti saya, yaitu sejak menjadi Ajun Akuntan. Saat itu Bu Sum sudah melakukan analisis yang bermanfaat bagi kantornya, terhadap temuan-temuan pemeriksaan. Bu Sum bekerja di bidang perencanaan analisa dan evaluasi, yang membuat hasil pemeriksaan menjadi bermanfaat.

Ketika Bu Sum pindah ke Kemenkeu, saya tetap di BPKP sampai pensiun. Di Kemenkeu, Bu Sum bekerja mulai dari pelaksana sampai akhirnya menjadi pejabat eselon I. Karier seseorang kita tidak tahu dan banyak variabelnya. Saya melihat karier Bu Sum diperoleh betul-betul karena kompetensi dan integritasnya yang menjadi satu, sehingga ada *trust* dari pimpinan Kemenkeu, yang memberinya kepercayaan menjabat posisi penting hingga Inspektur Jenderal.

Bu Sum membenahi akuntansi di Kemenkeu, bersama teman-teman lain. Dipandu pimpinan yang suportif, Bu Sum membangun sistem, dari manual dan terbelakang, menjadi modern. Kepercayaan yang didapatnya setingkat demi setingkat, mulai dari kepala seksi, kabag, kepala biro, dan kemudian melesat menjadi kepala badan (BPPK), dan Irjen. Itu hal yang luar biasa.

Saya menilai Ibu Sum tidak terlena, tidak merasa sombong, ataupun berlebihan. Dia tetap biasa-biasa saja, melaksanakan tugasnya dengan baik. Beliau *loyal* pada pimpinan, dan bisa dipercaya. Kariernya bagus. Itu yang saya lihat yang ada pada diri Bu Sum

Kami sering bertemu dalam Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) secara intensif. Setiap Rabu malam, kami bertemu dalam rapat dua-tiga jam di KSAP. Bu Sum tenang, sangat menguasai materi, dan persuasif. Setelah orang lain adu argumen, saat Bu Sum bicara, langsung ada solusi.

Ketika saya Ketua KSAP, Bu Sum anggota KSAP. Setelah saya pensiun, Bu Sum menjabat Ketua KSAP sejak 2017 sampai sekarang. Saya tahu persis kapasitas beliau. Bu Sum sangat menguasai materi. Kemampuan intelektualnya tampak dalam diskusi-diskusi. Sum

***“Ibu Sumiyati sosok yang humble,
menjaga integritas, dan tentunya smart,
dalam arti menguasai detail, dan asyik
untuk diajak berdiskusi.”***

— Binsar Simanjuntak



memberi banyak masukan, untuk menyempurnakan draft-draft yang disusun.

KSAP bertugas menyusun Standar Akuntansi Pemerintah untuk dijadikan standar bagi pemda membuat laporan keuangan. Pasca-era otonomi daerah, jumlah pemda menjadi 550 daerah, sedangkan jumlah kementerian dan lembaga 78. Semuanya diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi.⁷

⁷ Binsar H. Simanjuntak (65 tahun) adalah kolega Sumiyati di Komite Standar Akuntansi Pemerintahan; saat ini Staf Khusus Menteri PUPR; dan pengajar Akuntansi di beberapa perguruan tinggi. Binsar Simanjuntak pernah menjabat Deputy Kepala BPKP 2005-2017; Ketua Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2004-2017; Staf Khusus Menteri PUPR (sampai sekarang). Binsar Simanjuntak lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1985), melanjutkan program S2 di Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, AS, dan program S3 di Cleveland State University tahun 1995.

SATU

ANAK DESA DARI SRAGEN

Anak Petani

Aku dibesarkan di sebuah dukuh (kampung kecil) di Desa Gading, Kecamatan Tanon di Kabupaten Sragen, wilayah paling timur di Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Timur. Kampung tempat tinggalku didominasi oleh orang lanjut usia yang buta huruf, yang tidak bisa baca tulis.

Kedua orangtuaku bekerja sebagai petani, tetapi jangan bayangkan mereka petani yang memiliki sawah luas. Mereka petani sederhana termasuk warga desa yang tidak mengenyam bangku pendidikan. Bapakku, Mariyo Atmodimedjo, yang lahir sebelum tahun 1900, hanya sempat tiga hari menginjak sekolah, sedangkan ibuku, Marinah, yang lahir pada 1912, sama sekali tidak pernah menikmati pendidikan. Mereka lahir di wilayah kecamatan yang sama, tetapi di desa yang berbeda.

Ibuku sebenarnya “ibu sambungan”. Bapakku sudah memiliki satu anak lelaki dan tiga anak perempuan. Ini berarti empat kakakku berasal dari ibu yang berbeda namun bapak yang sama. Kakak laki-lakiku, Suwarno, sempat ikut anggota Pembela Tanah Air atau

PETA¹ sebagai polisi dan meninggal dalam usia 25 tahun akibat kecelakaan di Klaten pada 1946.

Kakak perempuanku, Suwarsi, yang lahir pada 1924 pernah menjadi bidan yang bertugas di wilayah Tegal. Dua kakak perempuanku lainnya, yaitu Warsiti (lahir pada 1927) tinggal di kampung sebagai petani dan Sukemi (lahir pada 1929) bekerja sebagai bidan di Tanon, Sragen.

Impian bapak adalah semua anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan. Jadi bapak selalu meminta anak-anaknya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi meski masa itu adalah masa sulit dan zaman perang.

Bapak selalu menasihati bahwa beliau tidak bisa membekali harta, oleh karena itu “Kamu harus bisa sekolah sampai selesai. Kamu pasti bisa kalau mau belajar,” bapak berulang kali menanamkan ini karena tidak ingin anak-anaknya menjalani kehidupan yang susah.

Kedua kakak perempuanku, Suwarsi dan Sukemi melanjutkan ke sekolah paramedis, sekolah Zending di Klaten, yang menjadi cikal-bakal Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Bapakku seringkali bercerita bahwa kakakku, Sukemi adalah pribadi yang cerdas, cukup tertib mengelola kehidupannya dan sering dijadikan *role model* oleh bapakku.

Setelah bapak berpisah dengan ibu yang melahirkan empat kakakku, bapak menikah lagi pada tahun 1937 dengan Marinah, ibu kandungku. Aku — satu-satunya anak mereka — lahir 25 tahun kemudian, ketika ibuku berusia 50 tahun, dan saat itu bapakku sudah sepuh. Beberapa tahun setelah sekolah orang tuaku menceritakan bahwa aku tidak dilahirkan di Sragen tetapi di Rumah

Sakit Dr Moewardi di Jebres, Solo. Data ini baru aku ketahui saat menemukan sebuah buku harian bapakku yang ditulis dengan Huruf Jawa lengkap dengan dokumen pendukung yang ditempel saat aku membongkar lemari Bapak.

Karena aku dilahirkan di Solo, maka saat aku mendaftar sekolah dan guru sekolahku mencari data diriku di Buku Induk Kelahiran di kelurahan tempat tinggalku tidak ditemukan. Ketiadaan data ini menjadi masalah ketika aku masuk sekolah dasar pada 1968.

“Namamu siapa? Kamu anak siapa?” tanya petugas pendaftaran. Aku menjawab sesuai yang aku ketahui.

Ketika aku diminta menunjukkan akta kelahiran, aku menjawab, “Tak ada surat-suratnya.”

Akhirnya, guru SD mengarang sendiri tanggal, bulan, dan tahun lahirku. Demikianlah kondisi dan situasi masa lalu di perdesaan, sehingga tidak heran hingga hari ini kalau data kependudukan kita masih banyak yang harus dibenahi.

Ibuku ingat hari dan pasaran serta bulan kelahiranku, sama lazimnya dengan orang tua di kampung pada masa itu. Orang-orang tua di masa lalu memasukkan lidi ke bambu, dan untuk mengetahui usia anaknya, mereka menghitung jumlah lidi yang ada dalam ruas bambu. Tetapi bapak dan ibuku tidak memiliki kebiasaan tersebut.

Dalam ijazah SD, tanggal lahirku tertulis 6 Juli 1960. Pada saat aku melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), diketahui bahwa aku sebenarnya lebih muda dibandingkan anak guru tersebut. Akhirnya dalam ijazah SMEP-ku ditulis tahun kelahiranku adalah 1961.

Setelah bapakku meninggal pada 1975 —ketika itu aku duduk di bangku kelas II SMEP — aku baru tahu bapak menyimpan satu buku tua yang diletakkannya di bagian atas lemari. Buku itu berisi catatan-catatan pribadinya sejak zaman kolonial Belanda dengan tulisan huruf Jawa. Bapakku mencatat kapan ibu hamil, kapan ibu memeriksakan diri ke rumah sakit, dan kapan ibu melahirkan. Bapak juga masih menyimpan dan menempel kupon-kupon rumah sakit di dalam buku tua tersebut. Dari buku tua itulah, aku mengetahui

1 PETA atau Tentara Sukarela Pembela Tanah Air adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang di Indonesia pada masa pendudukan Jepang, persisnya pada 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat “Osamu Seirei Nomor 44” yang diumumkan Panglima Tentara ke-16 Letnan Jenderal Kumakichi Harada sebagai Tentara Sukarela. Pelatihan pasukan PETA dipusatkan di kompleks militer Bogor, yang diberi nama “Jawa Boei Giyugun Kanbu Resentai”. PETA berperan besar dalam Perang Kemerdekaan Indonesia dan dianggap sebagai cikal-bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI). Beberapa tokoh nasional yang pernah bergabung dalam PETA di antaranya Jenderal Besar Sudirman dan Jenderal Soeharto (yang kemudian menjadi Presiden RI. Veteran-veteran PETA menentukan perkembangan dan evolusi militer Indonesia, setelah menjadi bagian penting pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Keselamatan Rakyat, Tentara Republik Indonesia (TRI) sampai akhirnya menjadi TNI. (Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Pembela_Tanah_Air)

kapan persisnya aku dilahirkan —setelah dua kali tercatat keliru, yaitu aku dilahirkan di Solo, tanggal 19 Maret 1962.

Bapakku Visioner

Meskipun hanya sempat tiga hari bersekolah, bapakku sosok ayah yang visioner. Pemikiran bapak memengaruhi pola belajarku. Bapakku memang tidak bisa menikmati pendidikan karena situasi perang yang sangat mencekam di kampung pada masa kecil bapak. Impian bapak untuk bersekolah terkubur tetapi semangat itu terus menyala dan ditanamkan ke anak-anaknya.

“Ekonomi keluarga kita pas-pasan. Satu-satunya cara agar kamu punya kehidupan yang lebih baik adalah kamu harus sekolah tinggi. Yang harus kamu lakukan adalah bersekolah sampai selesai,” demikian nasihat bapak yang selalu kuingat.

Sejak kecil, saat itu aku duduk di bangku kelas II SD, bapak mengajarku menulis dan membaca huruf-huruf Jawa, termasuk surat-menyurat dalam bahasa Jawa.

Bapak juga mengajarku berhitung dengan cara sederhana. Saat hujan turun dan kami tidak bisa beraktivitas di luar rumah, biasanya kami di dapur mengerjakan banyak hal, seperti merebus air, membuat teh, membakar singkong dan uwi (ubi kelapa) dengan tungku. Di samping tungku selalu tersedia gundukan abu sisa pembakaran dan tumpukan kayu bakar. Sambil berdiang, bapakku biasanya mengambil sepotong ranting kayu kecil kemudian menorehkan tulisan atau angka, mengajarku Huruf Jawa berikut angka dalam Huruf Jawa juga. Saat istirahat siang sambil duduk di emperan rumah yang berlantai tanah, bapak sering mengajarku berhitung, seperti gunggung susun, menuliskan angka-angka dengan pecahan genteng yang berserak di halaman rumah. Bapak mengajarku dengan memberi soal-soal berhitung kepadaku dan aku menjawab dengan cara yang sama, sampai aku betul-betul mengerti. Ini betul-betul pembelajaran yang sangat sederhana.

“Satu-satunya cara mengubah kehidupan yang kurang beruntung menjadi kehidupan yang lebih baik adalah dengan pendidikan. Kami harus sekolah tinggi, harus belajar dengan alat apapun dan di manapun. Itu pesan bapak kepadaku sejak aku masih kecil.”



Dengan cara sederhana itulah, aku belajar Bahasa Jawa dengan lengkap dan memahami aksara Jawa. Aku mulai menulis dan membaca surat dengan *hanacaraka*.

Teknik belajar mencongak lebih banyak kudapat dari ibuku. Beliau benar-benar buta huruf sehingga beliau sangat mengandalkan daya ingat dan budaya bertutur. Cara-cara mudah untuk kali, bagi, tambah, kurang, dikenal dengan *ping para lan suda* atau *pipalanda* dalam Bahasa Jawa beliau ajarkan. Misalnya saja 18×8 , teknik yang bapak ajarkan adalah menggunakan angka puluhan terdekat baru kemudian ditambah atau dikurang dengan selisihnya. Jadi kalau 18 akan digunakan 20, sehingga menjadi $(20-2) \times 8 = (20 \times 8) - (2 \times 8) = 160 - 16 = 144$. Jadi gampang dan cepat. Semua ini diajarkan sambil bekerja, misalnya saat berjualan hasil kebun.

“Satu-satunya cara mengubah kehidupan yang kurang beruntung menjadi kehidupan yang lebih baik adalah dengan pendidikan. Kamu harus sekolah tinggi, harus belajar dengan alat apapun dan di manapun,” pesan bapak kepadaku sejak aku masih kecil. Itu berarti di manapun aku berada, di kelas, di kantor, di tengah masyarakat, aku selalu mencermati banyak hal, dan memetik pelajaran dari sana.

Demikianlah, jiwa pendidikku turun dari bapakku, sedangkan semangat kerja kerasku menurun dari ibuku.

Gendong Klenthing Demi Dapatkan Air Bersih

Sejak kecil, aku sudah terbiasa bangun pagi dan mengerjakan banyak hal. Merebus air dan singkong, mengumpulkan sampah, dan menyapu kebun. Sebelum berangkat ke sekolah – pada pagi buta, aku dan warga kampung harus berjalan kaki untuk mengambil air di sendang atau mata air. Lokasi sendang di Dukuh Magersari, hanya dapat dijangkau dengan cara berjalan kaki. Aku harus melewati kuburan dan sungai kecil, di jalan tanah yang sangat licin – terutama jika hujan turun. Saat matahari sudah terbenam atau belum terbit, kami hanya mengandalkan sinar bulan untuk penerangan. Di sendang yang memiliki sumber mata air itulah, warga mengambil air untuk minum dan mandi. Kami biasa minum air langsung tanpa

direbus terlebih dulu, sangat segar karena airnya sangat bersih dan jernih. Kami membawa pakaian kotor dan mencucinya di sana.

Biasanya aku mengambil air dari sendang itu tiga kali bolak-balik sambil menggendong klenthing¹ Sejak duduk di bangku SD sampai berumur pun, klenthing yang terbuat dari tanah liat dan kugendong puluhan tahun itu tidak pecah. Sejak kecil, aku sudah belajar manajemen risiko dan memikirkan tingkat kehati-hatian yang tinggi.

Sungguh ini perjuangan yang berat mendapatkan air untuk berbagai kebutuhan mandi bapak dan ibuku, termasuk untuk memasak, menyiram tanaman di musim kemarau, dan kebutuhan lainnya. Pada musim kemarau, warga dukuh menghadapi kesulitan mendapatkan air. Kami harus antri dengan sabar. Sungguh tidak terbayangkan pada masa kecil, aku harus memenuhi kebutuhan dasar, mendapatkan air dengan cara seperti ini tetapi itulah yang aku alami. Air bersih sangat dibutuhkan untuk memelihara kehidupan. Mata air ini akan tetap hidup kalau alamnya dijaga. Alhamdulillah sekarang air PAM sudah masuk ke kampung kami.

Pada musim bunga, aku biasanya adu cepat dengan teman-temanku sekampung menuju sendang. Di kuburan di luar kampung, berdiri satu pohon bunga tanjung yang memancarkan wangi. Aku dan teman-teman sepantaran berlomba-lomba mengumpulkan bunga tanjung yang gugur berserakan dengan siwur² atau gayung yang terbuat dari tempurung kelapa.

Bunga tanjung yang terkumpul itu laku dijual dan uang penjualannya sejumlah Rp 1,00 atau satu ringgit (Rp 2,50) aku gunakan untuk membeli bubur. Jadi seperti pepatah menyebutkan, “sambil menyelam minum air”. Sejak kecil, aku terbiasa melakukan *multitasking*. Sambil mengambil air untuk memenuhi kebutuhan dasar, aku juga mengumpulkan bunga tanjung untuk dijual.

¹ Klenthing mirip genthong tetapi ukurannya lebih kecil. Masyarakat Jawa menggunakan klenthing untuk mengambil air dari sumber air seperti sumur, belik, pancuran, telaga, sendang, dan lainnya.

² Siwur adalah alat tradisional untuk memindahkan air, yang terbuat dari batok atau tempurung kelapa.

Menjaga Asupan Gizi dari Pekarangan Rumah

Bapakku selalu mengingatkanku akan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Bapak menekankan, “Untuk bisa belajar dengan baik, kamu harus sehat. Asupan makananmu harus memenuhi empat sehat lima sempurna.”³ Anjuran itu selalu kupegang teguh. Karbohidrat, protein, sayuran, buah dan susu selalu tersedia. Kebetulan sebagian besar orang kampungku tidak suka minum susu sehingga susu gratis yang disediakan UNICEF yang dibagikan kepada masyarakat, banyak yang tidak dimanfaatkan. Beberapa tetangga mengantarkan susu gratisan itu ke rumahku. Karena itulah sejak dulu, giziku selalu cukup.

Di pekarangan rumah, aku dan orang tuaku menanam sendiri ubi, buah-buahan, dan sayur-sayuran di kebun. Bapak kami memelihara ayam dan aku biasa mengambil telornya dari petarangan untuk lauk. Semakin aku rajin, makin banyak ayamku dan makin banyak telur atau ayam yang boleh dimasak. Semua asupan gizi yang dibutuhkan tubuh, sudah tersedia. Namun aku termasuk pemilih makanan yang bagus, memilih buah blewah, sawo, mangga yang tua, juga memilih pisang yang matang di pohon.

Jika memilih ikan, aku tidak mau mengambil ikan yang tidak segar lagi. Udang yang kupilih, harus udang yang sudah dikupas. Kalau makan tauge, aku tak mau yang ada ekor atau akarnya. Aku juga tak mau membeli tempe di pasar karena aku tahu proses pembuatan tempe yang sering diinjak dengan kaki. Jika aku ingin makan tempe, aku lebih suka membuatnya sendiri di rumah.

Aku memang anak kampung yang “aneh” tetapi sejak kecil aku selalu menjaga kualitas makananku. Aku mendapatkan penyuluhan ini dari mantri kesehatan. Jika ingin hidup sehat, kami dianjurkan memiliki “warung hidup”. Aku mematuhi dan berkomitmen melaksanakannya dengan disiplin.

³ Empat Sehat Lima Sempurna adalah kampanye yang dilakukan Pemerintah Indonesia sejak tahun 1955 untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pola makan yang benar. Dalam konsep “empat sehat lima sempurna”, makanan dibagi atas empat sumber nutrisi penting “empat sehat”, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur-mayur, buah-buahan, dan disempurnakan dengan susu bila mampu, menjadi “lima sempurna”. Konsep ini menekankan pentingnya empat golongan makanan berupa sumber kalori untuk tenaga, protein untuk pembangun, sayur dan buah sumber vitamin dan mineral untuk pemeliharaan.

Sejak kecil, aku sudah terbiasa makan makanan bergizi yang membuat tubuhku sehat. Semua bahan untuk makanan sehat itu tidak perlu aku beli dari pasar karena sudah tersedia di kebun dan pekarangan rumah —termasuk ayam dan telurnya. Dalam hal menu makanan, aku selalu memilih bagian yang bagus dan aku suka, misalnya dada ayam, bukan paha.

Belajar Masak Sejak Kecil

Aku belajar masak untuk kali pertama ketika duduk di bangku kelas II SD. Gara-gara ditinggal sendirian oleh bapak dan ibu di rumah, aku langsung belajar membuat nasi liwet. Menghidupkan api dari kayu bakar tidak mudah pada musim hujan, tetapi aku bisa menyalakan api untuk dua tungku, satu untuk menanak nasi dan satu lagi untuk memasak sayur. Nasi yang kumasak ternyata hasilnya lembek, tetapi itu bukan masalah.

Bagaimana dengan sayurannya? Aku mencabut singkong dan memetik daun ubi rambat di pekarangan rumah, lalu memberinya garam. Setelah matang, aku memberi makan untuk dua orang yang sedang bekerja, menggergaji kayu. Aku tidak makan sendirian tetapi juga memikirkan dua orang pekerja di rumah. Sejak kecil aku sudah memikirkan orang lain.

Pada masa itu, warung makan belum ada. Menyalakan api tidak dari korek api. Harga bensin relatif mahal bagi orang kampung. Jadi yang aku lakukan adalah menyalakan api dengan menggunakan daun kelapa kering. Aku meminta bara api dari tetangga — yang sudah lebih dulu menyalakan tungku.

Dalam kondisi seperti inilah, aku tumbuh. Tetapi situasi sulit ini tidak membuat aku patah semangat, namun justru menjadi pemacu semangat untuk belajar lebih keras agar bisa hidup lebih baik.

Buku dan “Asupan Gizi” untuk Otak

Aku mengagumi bapakku yang selalu mengingatkanku untuk rajin membaca. Selain tetap menjaga asupan gizi yang sehat, aku diminta

untuk wajib membaca buku karena itu kunci utama untuk berhasil dalam kehidupan.

Aku beruntung karena di desa tempat tinggalku, ada perpustakaan sederhana di kelurahan. Petugas penyuluh desa itu tetanggaku dan dia tahu aku senang membaca buku. Jika ada pasokan buku untuk perpustakaan desa, dia membawa beberapa buku ke rumahku. Biasanya dalam beberapa hari, buku-buku itu — umumnya buku cerita— sudah aku ‘lahap’ sampai selesai, dan aku kembalikan ke perpustakaan tersebut.

Bapakku juga peduli dengan kebutuhan sekolahku.

“Coba tanya pak guru, buku apa saja yang dibutuhkan? Lalu tanyakan berapa banyak buku tulis, buku gambar, pensil, pensil warna, *setip*, penggaris yang dibutuhkan dalam satu tahun?” tanya bapakku ketika aku duduk di bangku kelas I SD.

Di Sragen, belum ada toko buku yang menyediakan berbagai keperluan sekolah. Karena itulah bapak ke toko buku “Tiga Serangkai” di Solo ⁴, membeli semua kebutuhan sekolah dalam satu tahun sekaligus.

Buku-buku pelajaran SD sudah aku baca berulang kali. Ketika guru menjelaskan mata pelajaran, aku menganggapnya mendengarkan kaset berulang kali. Aku tidak pernah mencatat karena aku sudah hapal materinya di luar kepala. Jika guru memberi soal pekerjaan rumah, aku langsung mengerjakan jawabannya.

Saat aku duduk di bangku kelas IV SD, aku sering bermain di rumah tetangga, kakak kelasku — yang memiliki beberapa buku, buku apa saja, buku itu aku baca. Bukan hanya membaca buku-buku itu, aku juga menerima tantangan kakak kelasku yang sering

memberi soal-soal kelas VI SD. Aku menjawab soal-soal itu dengan mudah.

Pelajaran Budi Pekerti dalam “Serat Wedhatama” dan “Bhagavad-Gita”

Bapakku menanamkan pelajaran Budi Pekerti kepadaku sejak aku kecil. Aku diajari menulis dan membaca *hanacaraka* dengan cara sederhana. Setelah aku menguasai tulisan Jawa, bapak memintaku rajin membaca buku “Serat Wedhatama” yang ditulis KGPAA Mangkunegara IV.

Buku beraksara Jawa bercampur huruf latin itu memuat *pitutur* (pepatah Jawa kuno) yang berisi falsafah kehidupan, bagaimana hidup bertenggang rasa, menganut agama secara bijak, menjadi manusia seutuhnya, dan menjadi manusia berwatak ksatria.

“*Serat Wedhatama*” ⁵ terdiri dari 100 *pupuh* (bait, *canto*) tembang *macapat* yang terbagi dalam lima lagu yaitu Pangkur (14 *pupuh*), Sinom (18 *pupuh*), Pocung (15 *pupuh*), Gambuh (35 *pupuh*), dan Kinanthi (18 *pupuh*). Bapakku menjelaskan satu persatu maknanya sampai aku memahaminya.

Salah satunya yang termaktub dalam *Pocung* bait pertama:

Ngèlmu iku kalakoné kanthi laku (ilmu itu bermanfaat bila dilaksanakan) *Lekasé lawan kas* (dimulai dengan kemauan) *Tegesé kas nyantosani* (kemauan untuk menyejahterakan sesama) *Setya budya pangekesé dur angkara* (tabah mengembangkan, menaklukkan semua tantangan)

Selain *Serat Wedhatama*, Bapakku juga memintaku membaca *Bhagavad-Gita* (Nyanyian Sang Bhagawan), bagian dari kisah *Mahabrata* yang termasyhur dalam dialog yang tertuang dalam bentuk syair — berupa pengetahuan abadi tentang kehidupan. Sri Krishna menjadi pembicara utama yang menyampaikan ajaran-ajarannya, sedangkan Arjuna, sang murid, menjadi pendengarnya. Ketika itu Arjuna yang berada di tengah perang antara pasukan Kurawa dan Pandawa, bimbang karena lawannya adalah sanak-

4 Penerbit dan toko buku “Tiga Serangkai” (TS) didirikan pada 5 Januari 1959 oleh guru Sekolah Dasar (SD) di Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yaitu H. Abdullah Marzuki (alm) dan istrinya Hj Siti Aminah Abdullah. Tujuan mereka saat itu sangat sederhana, yaitu melakukan transfer ilmu. TS menerbitkan buku “Himpunan Pengetahuan Umum” dan “Himpunan Pengetahuan Alam” yang berkualitas, yang dapat diperoleh berbagai lapisan masyarakat (sumber: tigaserangkai.com). Mereka awalnya mencetak buku pertama di toko buku Tiga di Solo. Buku kumpulan soal itu laris manis di pasaran dan permintaan cetak meningkat. Atas usulan pemilik toko buku Tiga, pasangan guru ini mendirikan perusahaan penerbit dengan nama “Tiga Serangkai” dan memilih Sukoharjo sebagai lokasi usaha. Nama itu dipilih dengan mengambil kata dari toko buku “Tiga” yang dianggap berjasa menerbitkan buku pertama mereka. Penerbit “Tiga Serangkai” makin berkembang pesat dan sejak 1972, pindah ke Jalan Dr Supomo 23 di Surakarta. (sumber: bisnisukm.com)

5 Tentang “Serat Wedhatama”, selengkapnya baca https://id.wikipedia.org/wiki/Serat_Wedhatama



"Serat Wedhatama".

FOTO: ILLUSTRASI.

saudara, teman, dan guru-gurunya. Krishna kemudian memberi Arjuna pengetahuan tentang rahasia kehidupan spritual yaitu *Bhagavad-Gita*.

Pendiri Boedi Oetomo, Radjiman Wedyoningrat pernah berucap, "*Bhagavad-Gita* boleh dipandang sebagai riwayat kehidupan Kurawa dan Pandawa, atau perjalanan manusia menuju arah Sempurna. Sebagai ilmu, *Bhagavad-Gita* menguraikan perjalanan kalbu manusia menuju ke arah Kesempurnaan. Di sini terjadi pertempuran antara jiwa dan *keangkaramurkaannya*."

Bapak selalu memacu semangatku untuk membaca buku-buku tentang falsafah kehidupan, sambil menjelaskan, "dalam kehidupan, kita menemukan orang-orang seperti sosok A, B, C dan seterusnya." Inilah pelajaran awal tentang Budi Pekerti, tentang kehidupan, yang aku dapatkan dari bapak melalui buku bacaan.

Bapak Belajar Memecahkan Masalah dari Mbah Putri

Salah satu yang kukagumi dari bapakku adalah keberaniannya menghadapi masalah dan caranya menyelesaikan persoalan. Dari

berbagai cerita bapak yang pernah kudengar, sifat-sifat ini ada pada Mbah Putri (nenekku atau ibu dari bapakku).

Mbah Putri termasuk orang terpendang di kampung kami, mengelola kampung tidak asal-asalan, dan memperhatikan berbagai aspek untuk mendapatkan pilihan yang terbaik.

Jika terjadi perselisihan dalam keluarga maupun masyarakat sekitar, Mbah Putri ternyata menjadi seorang negosiator ulung, biasanya menjadi penengah dan dipatuhi. Jika terjadi sengketa tanah, Mbah Putri datang sendiri ke pengadilan.

Dari Mbah Putri, bapak juga belajar tentang bagaimana mengelola keuangan dan ekonomi keluarga. Bapak juga belajar cara menyeleksi orang saat perlu bantuan untuk mengerjakan sawah. Beliau bercerita bahwa akan mengambil orang yang tegap, makan banyak dan sigap. Hal-hal seperti ini sudah dipikirkan bapak, yang mencontoh dari ibunya. Dari sini rupanya aku mulai belajar bagaimana melakukan *profiling*, mencari orang yang tepat untuk suatu jabatan, dan ternyata sangat berguna saat menjadi panitia seleksi pejabat tinggi ataupun saat membangun *talent pool*.

Aku tidak pernah bertemu dengan Mbah Putri, tetapi dari cerita paman, Mbah Putri memiliki tujuh anak. Mbah Kakung adalah kepala desa yang berpengaruh pada masanya (tahun 1920-an). Mbah putri meninggal ketika anak ketujuhannya masih berusia tujuh bulan.

Mbah Putri sangat dikenal warga kampung-kampung yang lokasinya jauh di wilayah kecamatan yang sama karena sering tampil dalam urusan politik dan menangani konflik masyarakat.

Dari cerita paman pula, aku mengetahui bahwa keluarga bapak sejak dulu tidak pernah menomorduakan perempuan. Laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama, dididik dengan pola asuh yang sama sehingga perempuan tidak tinggal diam, ikut mengurus sawah, berdagang, dan tidak ada yang *minderan* (rendah diri).

Aku melihat adik perempuan bapak (aku memanggilnya *Bulik*) berani menghadapi orang dan menghadapi masalah, tetap bekerja keras dan tetap eksis, berkiprah dan tumbuh di "lahan tandus" maupun "lahan subur", bukan perempuan yang *nrimo* dan sebagai *konco wingking*.

Karena sejak kecil aku sudah mendapat pemahaman tentang hak dan kesempatan yang sama untuk perempuan dan laki-laki dari bapakku, dan aku belajar dari Mbah Putri (dari cerita paman dan cerita bapak), aku menjadi sangat peka jika melihat ada ketidakadilan gender.

Visi Bapak tentang Kesetaraan Gender

Visi bapak berbeda dengan visi warga yang tinggal sekitar 10 kilometer dari kampungku, banyak yang mengatakan, “Buat apa anak perempuan sekolah tinggi? Kalau sudah bisa baca tulis, sudah cukup umur untuk menikah.” Di kampung tetangga, perempuan yang sudah bisa baca tulis, langsung dinikahkan dan punya anak.

Tetapi di kampung kami, kondisinya berbeda. Anak perempuan bekerja keras itu biasa dan sudah menjadi pemandangan sehari-hari yang dianggap normal.

Bapakku selalu mengingatkanku bahwa anak perempuan dan anak laki-laki itu sama.

“Kamu memang anak perempuan tetapi kamu harus sekolah sampai selesai supaya kehidupanmu lebih baik,” kata bapak.

Masih banyak lelaki Jawa yang menganggap rendah perempuan karena perempuan hanya bagian dari citra dirinya. Bapak mengatakan pandangan itu keliru. Jika sudah terdapat sikap *rangkum-rinangkum* antara lelaki dan perempuan, akan tercipta suasana budaya yang *tan asipat kakung, tan asipat wanodya* (tidak lagi memperlihatkan dominasi kaum lelaki ataupun perempuan, tetapi prestasi intelektual setiap tokoh).

*Iya iku uriping bawana, jagat cilik jagad gedhe pan padha isinipun,
tinimbangken isini bumi, yen ilang warna ingkang,
jagat kabeh iku, saliring reka tan ana,
kinumpulken ono rupo kang sawiji, tan kakung tan wanodya
Demikianlah sebenarnya hidup di dunia ini, jagat kecil dan jagat besar
samalah isinya,*

*apalagi bila ditakar seluruh isi bumi ini, andai kata hilanglah warna
yang melingkupi,
maka lenyap pula niat dan inisiatif dari setiap jagat,
lain halnya bila semua gerak menyatu tunggal, lenyap perbedaan
kerja lelaki dan perempuan.* ⁶

Bapak memberi contoh *role model*, Nyi Ageng Serang, ⁷ perempuan pahlawan dari Jogja, panglima perang yang gigih melawan Belanda, yang menetap di kampung dekat tempat tinggalku. Menurut cerita bapak, Nyi Ageng Serang yang bersenjatakan alat-alat sederhana dan menggunakan daun talas untuk mengelabui musuh, adalah seorang panglima perang dan ahli strategi perang gerilya.

“Nyi Ageng Serang adalah contoh pemimpin perempuan yang hebat. Dia contoh bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin,” kata bapakku.

Bapak juga memberi contoh nyata yaitu kakak perempuanku (berbeda ibu) yaitu Sukemi, yang disekolahkan bapak sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang.

Bapak selalu mengingatkanku bahwa anak perempuan tidak boleh terbelakang dan pantang untuk menyerah. Banyak kaum perempuan yang menjadi pemimpin dalam bidang bisnis, menjadi camat, kepala puskesmas dan lainnya. Bapak sungguh memompa semangatku.

Meski aku bertemu bapak sampai usiaku 13 tahun, namun nilai-nilai yang ditanamkan bapak kepada diriku sangat dalam dan mengakar.

Adapun ibuku seorang pekerja keras. “Kamu tidak boleh bosan. Kalau kamu tidak betah dengan ibu, dengan siapa lagi kamu hidup?”

⁶ Serat Dewaruci

⁷ Nyi Ageng Serang (1752-1828) adalah Pahlawan Nasional Indonesia, yang dikenal juga sebagai Raden Ayu Serang. Namanya saat masih kecil adalah Raden Ajeng Retno Kursiah Edi. Setelah menikah, menjadi Bendoro Raden Ayu Kustiyah Wulaningsih Retno Edi. Salah satu keturunannya adalah Soewardi Soerjaningrat atau lebih dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara, yang juga Pahlawan Nasional. (Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Nyi_Ageng_Serang)

tanya ibu yang terus berusaha agar aku kerasan bersamanya. Aku mendampingi ibu sampai sepuh, dan meninggal pada usia 95 tahun.

Pelajaran tentang Pentingnya Menabung

Dalam menyampaikan pelajaran tentang kehidupan, bapak selalu mencarikan *role model* dan memberikan contoh-contoh untukku. Misalnya menjelaskan si A bekerja, tinggal di daerah, rajin menabung, bisa membeli sawah dan tanah, memelihara sapi, dan membuat warung. “Pendapatan si A tidak hanya dari gaji, tetapi dari berbagai sumber,” kata bapak sembari menegaskan pentingnya rajin menabung sejak kecil.

“Bapak *wis sepuh, ora kuat macul*. Kalau kamu bekerja, selalu usahakan untuk menabung,” bapak mengingatkanku tentang pentingnya menabung sejak aku duduk di bangku kelas II SD. Bapakku sudah tidak kuat lagi *nyangkul*, sedangkan kalau dikerjakan orang lain, biayanya menjadi lebih mahal. Bapak juga punya tiga ekor kerbau untuk membajak sawah, tetapi bapak tak kuat lagi *mengangon* kerbau. Akhirnya bapak menjual *tegal*, menabung uang hasil penjualan itu, menyimpannya dalam bentuk deposito di bank swasta kecil, Bank Nusaharta, mirip bank perkreditan rakyat (BPR).

“Bapak tidak kuat lagi bekerja di sawah. Uang ini nanti gunakan untuk uang sekolahmu sampai selesai ya,” pesan bapak. Ketika bapak masih kuat, bapak sangat melindungiku yang membantu *mengangon* kerbau pada sore hari dengan membuat *rumah-rumahan* dari anyaman bambu *slumpring* (kulit bambu) — yang bisa diangkat dan bisa digunakan sebagai tempat berteduh jika hujan turun.

Bapak masih memiliki tiga pohon cengkeh yang ketika panen, kami mendapatkan beberapa ratus rupiah. Di pekarangan rumah, aku tidak menanam jagung, tetapi lempuyang, kencur, lengkuas, jahe, dan bengkuang, yang mudah untuk dijual. Semua hasil itu kemudian ditabung lagi.

Pada tahun 1972, bank swasta kecil tempat bapak men-depositokan uangnya bangkrut, dan dinyatakan pailit. Semua uang bapak yang disimpan di sana hilang. Ketika itu aku duduk di bangku

kelas empat SD. Bapak kesal sekali menghadapi kenyataan tersebut karena uang hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun yang ditabung dan didepositokan hilang begitu saja.

Belajar Bergaul dengan Orang Terpandang di Kampung

Aku kagum pada bapak karena meskipun menghadapi persoalan yang berat, bapak masih memompa semangatku untuk menyelesaikan sekolah dan terus melanjutkan ke jenjang kuliah.

Bapak tidak pernah mengatakan kepadaku, “Kalau saya meninggal, kamu minta bantuan ke si A atau si B, atau ke siapa.” Bapak hanya meminta aku berpikir dan berusaha lebih keras untuk mewujudkan impiannya dan impianku juga. Bapak menanamkan kepadaku bahwa aku wajib sekolah tinggi, wajib membaca buku karena buku adalah kunci utama, dan wajib menjaga kesehatan dengan asupan gizi yang cukup.

Bapak tidak terlalu peduli jika pakaianku sobek atau sepatuku rusak. “Kalau pakaianmu sobek, ya dipermak saja yang penting bersih. Kalau buku harus lengkap, karena buku itu gudang ilmu untuk dipelajari” kata bapak.

Ada satu hal yang membuatku heran. Bapak menyiapkan satu setel pakaianku yang layak digunakan untuk pesta ala kampung. Setiap ada acara *kondangan* misalnya, yang bapak bawa untuk mendampinginya adalah aku, bukan ibu. Biasanya bapak duduk di kursi paling depan, di sebelah pak camat, pak kepala desa, dan carik. Kalau ada wayang, aku biasanya duduk di balik *kelir*.⁸

Dengan membawaku ke berbagai acara dengan pakaian dan sandal karet yang lebih pantas, bapak menanamkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menjadi anak pemalu, dan harus tampil sebagai pemberani. Bapak mengajarku bagaimana bergaul dengan orang-orang terpandang di kampung, dan terbiasa menghadapi mereka.

“Kalau kamu berkumpul dengan orang yang lebih tua, kamu boleh bertanya, tetapi tak boleh cerewet,” pesan bapak kepadaku.

⁸ Kelir dalam pagelaran wayang adalah sebuah layar berwarna putih berbentuk empat persegi dengan panjang 2 meter-12 meter dan lebar 1,5 meter-2,5 meter.

Bapak juga berpesan agar pakaian yang digunakan untuk menghadiri berbagai acara tidak boleh dicuci sendiri, tetapi harus dicuci di binatu, dibersihkan dan diseterika di sana.

Aku juga mengagumi bapakku yang sejak aku di bangku kelas II SD, sudah mengajarku makan dengan sendok dan garpu, padahal sehari-hari aku makan menggunakan tangan. Bapak mempunyai dua set sendok dan garpu, khusus untuk melatih dan membiasakan aku makan dengan benar. Di kampung banyak warga yang miskin, terbiasa makan tanpa menggunakan piring. Warga lebih sering menggunakan *layah* (piring yang terbuat dari tanah liat yang prosesnya dibakar, seperti kendi dan cobek). Sejak kecil aku tidak mau pakai layah. Kalau tak ada piring aku memilih menggunakan daun pisang.

“Kalau kamu sudah *gede*, kamu harus bisa makan bersama *penggede-penggede* menggunakan sendok, garpu, dan pisau. Kalau suatu hari kamu jadi *penggede*, kamu tidak boleh membuat malu,” pesan bapak seolah bapak sudah tahu masa depanku.

Belajar Disiplin dan Kerja Keras

Aku bersyukur dilahirkan ibuku, dibesarkan oleh ibu dan bapak. Dalam menjalani kehidupan, bapak sangat memperhatikan kebutuhanku. Mungkin karena aku anak yang sudah lama ditunggu-tunggu. Dari bapak, aku belajar *soft skill* tentang kehidupan, tentang budi pekerti. Bapak memintaku memperhatikan makanan empat sehat lima sempurna yang didengungkan sejak dulu, membaca banyak buku, mencari *role model*, serta membawaku ke berbagai acara penting di kampung.

Dari ibu, aku mewarisi bekerja keras di manapun dan kapanpun. Sejak bangun sampai menjelang tidur, selalu ada yang dikerjakannya. Bagi ibu, tak ada kata santai dalam hidupnya. Setiap hari, ada saja pekerjaan yang harus dikerjakan, misalnya aku diminta merontokkan jagung atau mengupas kacang. Karena di pekarangan rumah, kami memiliki pohon melinjo, ibu sering mengajarku membuat emping. Jika hujan turun dan kami tak bisa

beraktivitas di luar rumah, ibu mengajakku menumbuk padi atau *nggelepung* (membuat tepung).

Bapakku sangat disiplin. Bila saatnya makan, aku harus segera pulang. Bapak mencariku, menggendongku sambil bertutur, “Ini waktunya makan. Kamu tak boleh bermain.” Bapak sangat memperhatikan waktu istirahatku, kapan waktu ngobrol bersamanya, dan kapan waktuku bermain dengan teman. Kalau aku tidak membantu ibuku di rumah, bapak menyarakanku untuk beristirahat, tidur.

Bekerja keras adalah karakter ibuku. Ketika aku pulang sekolah tiba di rumah, ibu sudah memintaku membantunya menjemur padi di halaman. Melihat aku terlalu sering bekerja keras tanpa beristirahat, bapak menegur ibu dengan cara Jawa yang halus.

“Anakmu cuma satu. Perlakukan anakmu dengan baik. Anakmu tak akan sempat belajar jika diminta terus bekerja di rumah,” kata bapak.

Sebenarnya aku sudah terbiasa menyelesaikan pekerjaan rumah di sekolah. Aku selalu membaca dengan sangat cepat dan biasanya aku lakukan pada pagi hari. Aku tidak terbiasa membaca pada sore hari. Kebiasaanku, jika aku terjaga, aku mengingat-ingat apa saja yang sudah aku pelajari dan sudah sejauh mana pelajaran yang kuserap. Jika aku lupa, aku membuka buku pelajaran dari halaman depan. Tidaklah heran bila aku selalu hapal isi buku, termasuk gambar di dalamnya.

Bapak Jarang Marah

Kebiasaanku semasa kecil, setiap pagi, jika ke *sendang*, aku harus melalui jalan yang menurun dan terjal. Bapak sering menggendongku sebagai tanda kasih sayangnya kepadaku.

Jika aku bangun kesiangkan misalnya, bapak tidak pernah memarahiku. Bapak hanya memberi “peringatan” kepadaku dengan cara membuka pintu kayu dan pintu bambu, juga daun jendela sampai *mentok* ke dinding, atau bapak membunyikan centong.

Begitulah cara bapak memarahiku, sangat halus dengan cara Jawa. Tak pernah terucap dengan kata-kata kasar.

Sejak kecil aku diperlakukan seperti itu sehingga sampai sekarang perlakuan bapak kepadaku melekat pada diriku, dan menjadi pembawaan diriku sehari-hari. Aku juga meniru bapak, menyampaikan kemarahan tidak harus dengan kata-kata kasar. Karena aku merasakan jika aku marah, itu seperti menghantam diriku sendiri, menyerap energi yang luar biasa besarnya.

Aku diajari untuk berbicara *ngoko*⁹ tapi kromo¹⁰. Aku bercakap-cakap *ngoko* dengan teman-teman sekolah, tetapi berbicara *kromo* dengan orang yang lebih tua, untuk menghormati dan memberi respek kepada mereka. Di rumah, ketika masih kecil, aku berbicara *kromo* dengan orang tua dan semua kakakku.

“Jangan Setengah-setengah!”

Sebagai anak satu-satunya, aku tidak terlalu dimanja. Aku harus mampu membantu bapak dan ibu yang makin *sepuh*. Bapak dan ibu selalu mengingatkanku untuk selalu beraktivitas dan tak boleh berdiam diri. Kalau aku tidak sedang belajar, aku wajib membantu ibu di rumah. Jika tidak sedang membantu ibu bekerja di rumah, aku harus tidur karena tubuh juga butuh istirahat.

“Kalau kamu bekerja, bekerjalah dengan serius, dan jangan setengah-setengah. Kalau menanam padi di sawah, lakukan dengan benar,” pesan bapak kepadaku.

Pola pembelajaran dan pelajaran hidup dari bapak dan ibuku itu sungguh bermanfaat ketika aku dewasa dan memasuki dunia kerja. Aku sudah terbiasa hidup mandiri. Bahkan ketika aku sudah menjadi pejabat eselon I, aku tetap telaten mengurus rumah tangga, termasuk mempersiapkan makanan dan pakaian untuk anggota keluarga, karena itu sudah melekat dalam hidup keseharianku.

9 ngoko merupakan tingkatan bahasa terendah di bahasa Jawa yang digunakan untuk berbicara dengan orang yang sudah akrab, dengan orang yang lebih rendah kedudukannya, atau dengan orang lebih muda.

10 kromo merupakan tingkatan bahasa di bahasa Jawa yang termasuk ragam hormat.

Orangtuaku berupaya menyeimbangkan kinerja otak kiri dan otak kananku agar kehidupanku normal dan seimbang. Hari Minggu, aku dibiarkan bermain dengan anak-anak sebayaku — pada usia SD, untuk bermain gamelan dan tarian Jawa.

Bapak mengizinkan bermain yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler sekolah, tetapi melarangku menghabiskan waktu yang tidak jelas dan tidak produktif.

“Kalau kamu mau main, kunjungi kakakmu agar ada sesuatu yang bisa kamu pelajari di sana,” pesan bapak dan ibuku.

Tak Pernah ke Dukun jika Sakit

Bapak selalu mengingatkanku jika aku sakit, harus berobat yang benar, dan jangan pernah datang ke dukun.

“Kalau kamu mengalami gangguan kesehatan, jangan membeli sendiri obat atau jamu di warung. Kamu harus memeriksakan diri ke klinik,” kata bapak.

Suatu hari, bapak pernah merasa kurang sehat. Dia langsung berangkat ke Solo, melakukan *medical check-up*, minta semuanya dicek, termasuk urine dan darahnya — semuanya Rp 100.

Kata-kata bapak selalu kupegang teguh. Kalau aku atau anggota keluargaku sakit, kami memeriksakan diri ke dokter agar mengetahui dengan jelas dan tepat ihwal penyakitnya.

Tidak Berminat Jadi Bidan

Di kecamatan tempatku tinggal, ada SMEP dan dua SMP swasta (yaitu SMP PGRI dan SMP Muhammadiyah). Sebenarnya bapakku menginginkanku melanjutkan ke SMP, mengharapanku menjadi bidan, seperti kakakku, Mbakyu Sukemi. Kata bapak, menjadi tenaga kesehatan itu bisa menolong banyak orang karena pada masa itu (tahun 1950-an), jumlah dokter belum banyak.

Bidan menjadi pekerjaan mulia yang dibutuhkan dan dihormati masyarakat. Dari segi pendapatan pun, cukup untuk menghidupi keluarga. Mbakyu Sukemi selain memiliki rumah sendiri dan mendapatkan gaji dari pemerintah, juga memiliki tambahan

penghasilan untuk membeli tanah. Karena itulah bapak selalu memberi contoh Mbakyu Sukemi sebagai salah satu *role model*.

Namun ibuku yang buta huruf mengharapanku menjadi pegawai negeri. Dia tidak ingin anaknya menjadi petani. Apalagi luas sawah tak seberapa dan bila terkena hama atau memasuki musim kemarau, sawah tak bisa dipanen. Dalam benak ibuku, menjadi pegawai negeri itu sama dengan menjadi guru. Ibu melihat penampilan guru di luar rumah selalu rapi. Ibu melihat kakakku bekerja sebagai bidan, menjadikan rumah pribadinya sebagai Klinik BKIA. Masa itu Puskesmas memang belum ada. Yang membedakan antara praktik pribadi dan praktik kedinasan adalah jam kerja. Mbakyu Sukemi sering bekerja pada sore hingga larut malam, terutama membantu proses kelahiran.

Aku sebenarnya tidak ingin menjadi bidan maupun guru. Bekerja sebagai bidan di kampung sama dengan bekerja selama 24 jam. Aku tak mau bekerja tanpa henti seperti itu. Pernah aku melihat pagi-pagi sekali, rumah Mbakyu Sukemi sudah dipenuhi calon pasiennya — terutama perempuan yang akan melahirkan, padahal kakakku baru bangun tidur. Belum lagi warga yang mengantar orang yang akan melahirkan itu relatif banyak — istilah “diantar orang sekampung”. Kakakku juga harus menyediakan makanan dan minuman untuk mereka karena warung makan belum banyak atau mereka tidak mampu beli makanan. Aku tidak mau bekerja nonstop tanpa henti seperti kakakku. Aku ingin bekerja dengan jam kerja yang teratur.

Aku lebih tertarik masuk SMEP dan tanpa persetujuan bapak dan ibuku, aku mendaftarkan diri sendiri ke SMEP. Ketika bapak meninggal, aku masih duduk di bangku kelas II SMEP. Aku ditawarkan untuk ikut ujian persamaan SMP, tetapi aku tidak tertarik. Aku memang tidak tertarik menjadi guru maupun tenaga kesehatan. Aku lebih tertarik menjadi akuntan.

Di kelas III SMEP, aku mempelajari mata pelajaran Matematika untuk SMP. Aku mempelajarinya sendiri. Demikian juga saat di SMEA, aku juga terus mempelajari sendiri matematika untuk SMA IPS. Alhamdulillah, ketika pada tahun pertama di STAN, aku dan empat mahasiswa lainnya di kelasku langsung lulus ujian Matematika.

“Role Model” Mbakyu Sukemi

Semangatku untuk memahami pengelolaan keuangan negara dengan mendalami akuntansi tidak pernah pudar. Lulus dari SMEP, aku melanjutkan ke SMEA. Bapakku selalu memberi contoh *role model* kakak perempuanku, Mbakyu Sukemi, sosok yang nyata.

Bapak juga menceritakan tentang tokoh pahlawan perempuan, Nyi Ageng Serang yang berasal dari Keraton dan memimpin perang di daerah kami. Dengan segala keterbatasannya, Nyi Ageng Serang yang membawahi pasukan laki-laki dapat diterima di mana-mana.

Mengapa Mbakyu Sukemi yang sering dijadikan *role model* oleh bapakku? Karena Mbakyu Sukemi adalah tokoh perempuan yang paling maju di Kecamatan Tanon di Kabupaten Sragen, seorang bidan yang menguasai wilayah kerja di beberapa kecamatan. Mbakyu Sukemi membantu melahirkan beberapa orang — yang kelak di kemudian hari tumbuh menjadi pejabat. Salah satunya adalah Dirjen di Kementerian Dalam Negeri, Prof Sudarsono, yang juga bekerja di LAN Direktur Jenderal di Kementerian Dalam Negeri dan menjadi dosen Universitas Indonesia. Selain itu ada nama lain yaitu Pak Suminto di Kemenkeu, dan Prof. Dr. Sri Puryono Sekda Provinsi Jawa Tengah yang sekarang menjadi dosen Universitas Diponegoro Semarang.

Tanon di masa lalu memang daerah dengan sawah tadah hujan. Kalau air sungai di Bengawan Solo naik dan banjir, daerah kami ikut terkena dampaknya. Dalam kondisi seperti inilah, orangtua di tempat tinggalku —termasuk bapak dan ibuku— berupaya meningkatkan taraf hidup keluarga. Mereka berupaya agar anak-anaknya dapat mengenyam pendidikan di sekolah negeri. Dari daerah tandus ini, tumbuh orang-orang yang terus menghadapi tantangan, harus bekerja keras, dan berani mengambil risiko, akhirnya menghasilkan sejumlah orang yang mampu tumbuh dan berkembang sebagai orang-orang yang berhasil meraih *achievement* di bidangnya.

Walaupun aku tidak tertarik menjadi guru, namun rupanya ibuku yang tidak mengenyam pendidikan di sekolah berpikir menjadi PNS itu sama dengan menjadi guru sehingga ibuku berdoa

agar aku menjadi guru. Aku berpikir doa seorang ibu memang luar biasa. Meskipun aku bukan lulusan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) ataupun lulusan IKIP, nyatanya setelah lulus pendidikan D-IV di STAN, pekerjaanku di Kementerian Keuangan lebih banyak bergelut sebagai guru, sebagai asisten dosen, sebagai dosen. Perjalanan hidupku selalu berkaitan dengan “mengajari orang”. Oleh karena itu jangan pernah menyepelekan orang tua, doa seorang Ibu ternyata luar biasa.

Aku aktif mengajar sejak pertama kali bekerja sampai tahun 2015. Setelah menduduki jabatan sebagai Kepala BPPK, jadwalku relatif padat sehingga setelah enam bulan, aku lebih sering memberikan “kuliah umum”.

Kakak perempuanku, Mbakyu Kemi, sejak kecil memang pandai, bicara apa adanya, lugas, tidak ditutup-tutupi. Aku sering berdiskusi berdua dengannya. Mbakyu Kemi sering berbagi cerita dan pengalaman denganku.

“Kamu harus mengerti. Mbakyumu begini. Kita harus melakukan apa,” katanya. Ibuku —ibu sambung— setelah menikah dengan bapakku, 25 tahun kemudian baru melahirkanku. Saat itu Mbakyu Kemi sudah menjadi bidan.

Mengapa ketika ibu akan melahirkanku, ibu dikirim ke rumah sakit di Solo? “Karena kalau terjadi apa-apa pada ibu atau pada bayi yang dikandung, Mbakyu Kemi tidak disalahkan,” katanya menjelaskan. Meski Mbak Kemi sudah menjadi bidan, dia tidak mau menangani kelahiranku karena aku anak tiri dari ibumu, tuturnya. Dalam berbagai masalah yang kami hadapi bersama, Mbakyu Kemi memanggilku, kami bicara berdua, dan beliau menjelaskan ini seolah aku orang dewasa.

Mbakyu Kemi juga menasihati, “Kalau kamu nanti sudah punya duit, kamu harus begini begitu,” dan seterusnya. Diskusi kami sering *nyambung*. Dia betul-betul menjadi mentor bagiku, mengajarku cara menangani dan menyelesaikan berbagai masalah. Aku senang karena kami memiliki perspektif yang sama. Mbakyu Kemi mirip diriku. Aku selalu menjawab, “*Nggih*” dalam bahasa

kromo inggil. Kami memang jarang bertemu, namun kami memiliki *quality time*. Dia meninggal pada tahun 2002 pada usia 73 tahun.

Selalu Juara dan Dapatkan Beasiswa

Nasihat bapak yang sering aku dengar sejak aku masih kecil, selalu terngiang-ngiang di telingaku dan membangkitkan semangatku. Setelah bapak meninggal pada tahun 1975, aku tinggal bersama ibuku yang buta huruf dan tubuhnya semakin renta. Bapak hanya meninggalkan harta tidak seberapa, sawah seluas 3.000 meter persegi, yang hanya cukup untuk hidup berdua dengan ibu. (Ibu meninggal pada usia 95 tahun pada 2007, dan aku bersyukur ibu masih dapat melihat anaknya meraih sukses).

Aku langsung berpikir keras bagaimana caraku untuk tetap bersekolah sesuai impian dan cita-cita bapakku. Aku bertekad untuk belajar tekun dan rajin. Aku melahap habis semua buku pelajaran dan memahaminya sehingga aku selalu meraih juara kelas.

Belajar bersama anak-anak tetangga di sekitar rumah dengan penerangan lampu sentir merupakan kegiatan yang sering aku lakukan ketika aku masih kecil. Pernah kami belajar di bawah penerangan lampu sentir — yang terbuat dari kaleng atau botol, lalu dikasih sumbu dan minyak tanah. Belajar dengan lampu sentir merupakan suatu pengalaman tersendiri. Sering terjadi rambut kami terbakar atau muka kita berhiaskan corengan jelaga hitam dari lampu sentir.

Ketika duduk di bangku SMEP, aku bangga karena mampu mengerjakan soal-soal yang termuat di buku untuk siswa SMEA, yaitu buku berjudul “Tata Buku” karangan Amaniuli. Buku itu buku legendaris, ditulis pengarang legendaris. Ini membuat kepercayaan diriku kian tumbuh.

Setelah bapak meninggal, aku mendapatkan beasiswa Supersemar senilai Rp6.500 per bulan. Sementara uang sekolah di SMEP pada masa itu Rp 250 per bulan. Jadi uang sebesar ini cukup berharga bagi kami. Uang ini aku tabung untuk bekal biaya sekolah kelak.

Aku tidak pernah membeli seragam dan buku karena setiap kali ikut lomba, aku sering kali menang dan mendapatkan hadiah berupa seragam dan buku. Aku hanya membeli pakaian sehari-hari. Di kelas, aku selalu menjadi juara dan mendapatkan hadiah dari wali kelas dan guru. Setiap kali sekolah mengadakan berbagai lomba, mulai lomba membuat sanggul, lomba memasak, lomba mengarang, sampai lomba cerdas cermat, aku ikut serta. Kalau tidak meraih juara pertama, aku juara kedua. Aku lebih membutuhkan hadiah buku dan seragam dibandingkan piagam dan piala.

Setelah lulus SMEP, aku melanjutkan pendidikan ke SMEA dengan dana beasiswa. Di sini pun, aku masih “langganan” juara. Aku sudah bertekad, satu-satunya cara untuk memperbaiki kehidupan adalah dengan mengenyam pendidikan. Pesan bapak agar aku tidak boleh mengemis minta bantuan, aku taati. Aku hanya mengandalkan kemampuanku, juga mengandalkan Tuhan Sang Pencipta melalui doa-doa yang kupanjatkan setiap hari.

Ketika akan melanjutkan pendidikan ke SMEA, aku menghitung jumlah ayam yang aku harus pelihara agar hasil penjualan ayam dapat membantu biaya sekolahku. Aku bersyukur akhirnya aku masih mendapatkan beasiswa pendidikan SMEA. Aku sungguh tertolong dengan beasiswa itu.

Setiap Hari Bersepeda 44 Kilometer Pergi-Pulang

Selama 3,5 tahun, aku mengayuh sepeda dari rumah menuju sekolah, SMEA Negeri di Kota Sragen. Jarak tempuh saat berangkat sekitar 22 kilometer, dan pulang juga dengan jarak yang sama. Ini berarti setiap hari, aku mengayuh sepeda sepanjang 44 kilometer pergi dan pulang. Pada saat berangkat ke sekolah, kondisi jalan banyak turunan, dan saat pulang ke rumah, kondisi jalan sebaliknya, banyak tanjakan. Itu semua aku jalani dengan penuh semangat dan tidak pernah mengeluh.

Setiap pagi, aku sarapan yang kenyang agar kuat mengayuh sepeda. Aku berangkat pukul lima sebelum matahari terbit. Aku tidak singgah kemanapun juga, tidak juga untuk makan karena aku

hanya makan ketika tiba di rumah. Aku membawa uang secukupnya, hanya untuk berjaga-jaga jika ban sepeda kempis atau sepeda mengalami gangguan.

Setiap hari aku mengayuh sepeda melintasi Sungai Bengawan Solo. Pada musim hujan, terutama saat banjir, aku harus mengayuh sepeda di tengah terjangan banjir dan tiupan angin. Tak jarang, arus air yang deras atau tiupan angin yang kencang itu menyebabkan aku terjatuh dari sepeda. Tetapi bagiku, itu hal yang sangat biasa. Pakaianku basah, tetapi setelah tiba di sekolah, pakaianku sudah kering.

Saat ada kegiatan ekstrakurikuler aku keluar dari sekolah pukul 17.20. Saat matahari terbenam, dengan sisa-sisa tenaga, aku mengayuh sepedaku menuju rumah sejauh 22 kilometer. Waktu tempuh lebih panjang karena kondisi jalan lebih banyak menanjak. Yang aku takuti saat mengayuh sepeda pada malam hari bukan hantu, bukan pula kuburan yang angker. Aku hanya takut bila bertemu orang di jalan. Jarak antarkampung memang relatif jauh dan gelap tetapi yang kutakutkan bukan gelap, bukan *memedi*, ataupun lapar. Justru kalau terlihat lampu, aku malah takut dan berdoa agar tidak ada gangguan.

Tidak setiap orang di kampungku berani naik sepeda sejauh jarak yang aku tempuh. Ada seorang adik kelasku di sekolah yang sama, dan seorang lagi kakak kelas tetapi berbeda sekolah yang berangkat bersamaan dari kampung yang sama. Setelah empat kilometer, bertambah satu orang, dan setelah empat kilometer lainnya, bertambah satu perempuan pesepeda lagi. Kadang ada yang minta dibonceng karena tidak menemukan kendaraan umum. Jika ada yang minta dibonceng, aku siap membantunya. Karena aku tahu bagaimana rasanya saat tidak punya uang.

Aku dibelikan sepeda oleh bapak ketika aku duduk di bangku kelas VI SD. Boncengan sepedaku tidak pernah kosong. Pagi hari saat berangkat ke sekolah, aku membawa kompos, kadang nangka dan singkong ke pasar. Sepulang sekolah, aku singgah di sawah, membantu ibu dan bapak. Atau ketika akan ikut lomba cerdas

“Aku bersyukur memiliki ayah yang luar biasa, yang memompa semangat kepadaku dalam banyak hal. Bapak seorang visioner, ibu pekerja keras, dan keduanya menyayangiku. Bapak menanamkan nilai-nilai budi luhur, budi pekerti, dan mengajarku agar melatih kesabaran.”

cermat, aku mampir ke sawah dulu, baru bersepeda ke sekolah untuk ikut lomba.

Saat pulang dari sekolah, terutama pada hari Sabtu, aku membelikan ibu oleh-oleh, mulai dari kue, mie, kol, seledri, wortel, sampai tempe. Hal kecil yang membahagiakanku dan ibuku.

Bapak Mengajarku Tak Ada yang Instan

Suatu hari aku ingin makan bubur ketam hitam dan menyampaikan keinginanku kepada bapak.

“Kalau kamu mau makan ketan item atau kacang ijo, ya kita harus tanam dulu,” kata bapak yang kemudian menanam bibit-bibit untuk kacang ijo, ketan item dan ketan merah.

Awalnya aku berpikir mengapa harus susah-susah menanam karena banyak yang menjual bubur itu di pasar. Ternyata bapak mengajarku bahwa tak ada yang instan. Kalau menginginkan sesuatu, kita harus bekerja dulu, baru kemudian menikmatinya.

Bapak melatihku bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga ala orang kampung.

Aku bersyukur memiliki ayah yang luar biasa, yang memompa semangat kepadaku dalam banyak hal. Bapak seorang visioner, ibu pekerja keras, dan keduanya menyayangiku. Bapak menanamkan nilai-nilai budi luhur, budi pekerti, dan mengajarku agar melatih kesabaran.

Titik Balik Hidupku: Mengajari Pegawai Bank tentang Pembukuan

Sebagai anak kampung yang bersekolah di Sragen, aku sudah membulatkan tekadku untuk menyelesaikan sekolahku, meski saat itu aku belum tahu ukuran “selesai” seperti apa. Yang pasti aku bertekad untuk berjuang menggapai impianku. Aku menyadari meski memiliki banyak keterbatasan namun aku dikenal menguasai pengetahuan tata buku (pembukuan).

Ketika duduk di bangku kelas II SMEA, suatu hari, ada seseorang mencariku, memintaku mengajari sejumlah orang tentang

“pembukuan”. Aku kaget setelah tahu mereka adalah tiga lelaki yang sudah memiliki gelar sarjana muda (B.A dan B.Sc). Mereka rupanya pegawai bank di Sragen. Wow! Aku berpikir, mereka kan sarjana muda dari kota, bekerja di bank, dan perusahaan negara ternama, tetapi ternyata tidak terlalu menguasai “tata buku”. Sungguh ini membangkitkan kepercayaan diriku.

Aku diminta mengajari pegawai-pegawai bank itu tentang ilmu hitung dagang, tata buku, Bon A, Bon B, atau dalam istilah sekarang dikenal sebagai “akuntansi”. Aku terkejut dan heran karena aku baru memberi satu soal tata buku, mereka minta berhenti dulu karena harus merokok. Setengah hari, aku hanya menjelaskan dua soal tentang tata buku.

Selain itu, aku juga diminta salah satu koperasi di Sragen untuk membantu mereka mengerjakan pembukuan. Ternyata pegawai koperasi “buta” tata buku, tak paham dengan buku kas, penjualan, pembelian, dan lainnya. Dari “jasa” ini, aku menerima kue dan pakaian.

Sejak itu aku berpikir, aku sebenarnya sudah punya kemampuan dan pengetahuan untuk bekerja. Seandainya aku tidak bisa melanjutkan pendidikan tinggi, bekal sertifikat tata buku menjadi modaliku untuk mencari pekerjaan. Setidaknya aku sudah bisa mengukur kompetensiku. Untuk menjadi pegawai bank misalnya, seseorang harus lulus ujian bahasa Inggris, tata buku, bon A, bon B. Aku melihat ilmu dan pengetahuan tentang tata buku sangat dihargai.

Momen ini menjadi titik balik kehidupanku. Kepercayaan diriku makin kuat. Aku masih duduk di bangku kelas II SMEA mampu mengajari pegawai bank dan perusahaan negara, sarjana muda dari akademi keuangan dan bank, dan akademi akuntansi pada 1970-an.

Selama menjadi siswa SMEA, aku juga membantu tetanggaku siswa SD yang *drop-out*, yang tidak bisa membaca, dan diminta keluar karena menikah dini. Aku membuka pintu rumahku untuk mereka, mengajari mereka membaca, menulis, mengeja —seperti mengajari siswa SD. Energiku yang melimpah ruah ini kumanafaatkan untuk sesuatu yang berguna bagi orang lain.

Aku menilai anak-anak muda sekarang banyak yang rapuh, gampang patah, mudah menyerah, tidak ulet saat menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Padahal perjuangan hidup sekarang tidak sesulit zaman dulu. Kita harus berani mengambil keputusan dan mengambil risiko dan semua ini akan menjadikan kita sebagai orang yang tahan banting dan siap menghadapi tantangan.

Pak Guru Pardjanto Menumbuhkan Kepercayaan Diriku

Salah satu guruku di SMEA yang tidak pernah kulupakan adalah Pak Pardjanto, guru “Tata Buku”, yang memberi kesempatan kepadaku untuk menjadi asistennya, membantunya mengajari teman-teman sekelasku. Pak Pardjanto tidak memberiku uang tetapi memberiku kesempatan mengajar pelajaran Berhitung (Matematika) untuk siswa SMP. Aku sangat bersemangat mengajar adik-adik kelasku sehingga biaya ujianku dibayarinya.

Di SMEA, aku sangat rajin. Jika aku diminta maju ke depan, aku menjelaskan jawaban soal sangat rinci sehingga papan tulis penuh dengan tulisanku.

Pak Pardjanto membangun kepercayaan diriku bahwa aku mampu mengajar dengan baik. Pengalaman ini sangat berguna bagi diriku dan masa depanku.

Aku bersyukur di SMEA, guru-guruku memperhatikanku. Jika aku mendapatkan nilai sempurna (100), guru-guru menghadihkan pensil dan buku. Meski hanya satu pensil dan satu buku, tetapi jika banyak guru yang memberi hadiah yang sama, aku memiliki cukup banyak peralatan belajar tersebut. Karena itulah selama di SMEA, aku tidak pernah membeli buku dan pensil. Adapun, pakaian sekolahku juga dari hadiah. Pakaian selain seragam aku beli sendiri termasuk pakaian ibuku. Di SMEA juga, aku seolah mendapatkan “gaji” karena setiap bulan dana beasiswa cair.

(Ketika aku melanjutkan kuliah di Jakarta, Pak Pardjanto masih menjalin silaturahmi dan sering mengirimkan kacang untukku. Setelah aku menjadi pejabat di Kementerian Keuangan pada 2014

sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, aku menelepon Pak Pardjanto yang sudah sepuh, dan menawarinya umrah ke Tanah Suci.

“Mbak Sum mau *mbayari* saya?” tanya Pak Pardjanto. Ketika aku menjawab iya, beliau menangis, tak mampu berbicara.

Pak Pardjanto meninggal pada tahun 2021. Aku masih berkomunikasi dengan istri dan anak-anaknya).

Sistomo Siswoatmodjo

MBAK SUM TAHAN BANTING, FOKUS, DAN JERNIH



Sistomo Siswoatmodjo

Sistomo dan Sumiyati adalah sahabat dekat sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) di Sragen, Jawa Tengah. Orangtua mereka sudah mengukur kemampuan membiayai pendidikan anak dan berpikir praktis. Lulusan SMEA lebih cepat mendapatkan pekerjaan.

Sistomo dan teman-teman memanggil Sumiyati dengan sebutan “Mbak” karena postur tubuhnya yang relatif besar. “Mbak Sum mengenal seluruh anggota keluarga saya, dan saya mengenal keluarganya — meski tidak seluruhnya,” cerita Sistomo.¹¹

Sebelum mereka sekelas di SMEA, Sis mendengar cerita dari teman-teman bahwa Sumiyati seorang siswi yang pandai. “Saya sebenarnya juga juara kelas termasuk di kelas I SMEA. Di kelas I kami beda kelas tapi di kelas II kami satu kelas. Terus terang, selama kami satu sekolah, saya kalah dari sisi prestasi karena Mbak Sum selalu nomor satu dan saya nomor dua,” ungkap Sistomo.

¹¹ Diolah dari percakapan penulis dengan Sistomo Siswoatmodjo, Ak, SH, MM, CA, BKP, sahabat masa remaja Sumiyati, 26 Juli 2022 di Jakarta. Sistomo (61 tahun) adalah Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), anggota Perkumpulan Ahli Kepabebean Indonesia (PERAKI).

“Sis, kamu kan tahu, aku kan dari SMEP sampai S2 dapat beasiswa dari negara. Utang budiku kepada negara begitu banyaknya. Aku mau mewakafkan hidupku untuk negara, kata Sum. Saya terkesima. Mbak Sum tidak akan berpaling dari pengabdianya. Tidak heran jika dia all-out dalam pekerjaannya.”

— Sistomo

Perbedaan Sistomo dengan Sumiyati adalah, sejak SMEP Sumiyati sudah mendapatkan beasiswa dari negara, yang berlanjut saat ke SMEA, kuliah di STAN Jakarta, dan mengenyam pendidikan S2 di Australia. Sedangkan Sis sekolah atas biaya keluarga kecuali di STAN.

Sistomo dan Sumiyati sama-sama berasal dari Sragen. “Mbak Sum tinggal di desa yang jaraknya 22 kilometer dari kota Sragen, sedangkan lokasi SMEA di wilayah kota. Setiap hari Mbak Sum naik sepeda ontel, melintasi medan yang relatif berat. Bagi Mbak Sum, medan itu berat, tetapi bagi saya, sangat berat, terutama saat hujan dan banjir karena harus melewati Bengawan Solo,” kata Sis.

Di sini, Sistomo melihat betapa Sumiyati seorang perempuan yang tahan banting. “Bayangkan, dengan segala keterbatasannya, Mbak Sum selalu meraih juara umum di sekolah. Saya baru menyadari ini setelah kami satu kelas di kelas II SMEA. Di situlah saya mengakui level kepandaian saya jauh berbeda dibandingkan Mbak Sum,” ujarnya. Ketika Sis terpilih sebagai Ketua OSIS SMEA, dia mengajak Sum sebagai sekretaris.

Yang dikagumi Sistomo dari Sumiyati adalah kejernihan pikirannya, dan selalu fokus. “Dia tidak memandang remeh segala hal yang dipelajari. Dan itu sekaligus kelemahan saya. karena ketika merasa bisa, saya kurang serius dan berpikir *toh* dengan begini, saya sudah mendapat nilai bagus. Tetapi Mbak Sum berbeda. Meski dia sudah menguasai ilmu dan pengetahuan, dia sangat *concern* dan tetap penuh perhatian untuk belajar. Tidak heran bila dia juara umum. Itulah sebabnya saya menyebutkan bahwa level kepandaian kami berbeda. Saya mengungkapkan ini karena kami sering belajar bersama sehingga saya tahu kemampuan Mbak Sum,” urai Sistomo.

Selama di SMEA, Sis dan Sum terkesan dengan guru Tata Buku bernama Pardjanto — yang bukan sekadar guru, tetapi juga *entrepreneur*. Setelah jam sekolah usai, dia membuat kursus Tata Buku, sedangkan istrinya memiliki usaha rumah tangga (kacang telur) yang berkembang. Mereka ikut dalam kursus Tata Buku Pak Pardjanto.

“Yang membuat kami (dan juga banyak teman di Sragen) terkesan adalah jika Pak Pardjanto berhalangan mengajar, beliau meminta Mbak Sum atau saya menggantikannya untuk mengajar peserta kursus. Bayangkan, kami saat itu masih kelas II SMEA, sedangkan peserta kursus bukan hanya siswa, tetapi cukup banyak yang berstatus pegawai. Pak

Pardjanto menumbuhkan kepercayaan diri Mbak Sum dan saya karena kami ternyata mampu mengajar senior yang sudah bekerja,” cerita Sis.

Sampai mereka lulus SMEA, Sumiyati tetap juara umum. Mereka saling bertukar informasi tentang perguruan tinggi yang akan dimasuki. Mereka sempat ke Yogyakarta dan berupaya masuk ke Universitas Gadjah Mada (UGM). Bagi anak-anak muda dari desa di Sragen, kuliah di UGM adalah impian. Beberapa dari mereka ikut bimbingan tes, termasuk Sis dan Sum. Di tengah proses, Sumiyati dengan berbagai pertimbangan —salah satunya faktor ekonomi yaitu biaya kuliah— mengikuti seleksi masuk STAN di Jakarta.

Sum hanya mengikuti ujian masuk STAN. Sedangkan Sis tetap ikut ujian saringan masuk Perintis I, STAN, dan Perintis III. Sis mengambil ketiganya. Penerimaan mahasiswa baru STAN diumumkan lebih dahulu. Sis menerima surat bahwa diterima di STAN tetapi belum tahu Sum diterima atau tidak. Pada masa itu, komunikasi telepon masih sulit.

Sis meminjam motor tetangga, ke rumah Sum di Tanon, yang jaraknya sekitar 22 km dari kota Sragen. “Bagi saya, jarak itu sudah terasa sangat jauh. Bagaimana Mbak Sum sangat kuat menjalaninya setiap hari saat sekolah di SMEA? Mbak Sum memang tahan banting! Saya sangat salut pada keluarga Mbak Sum. Seorang ibu yang buta huruf melahirkan Mbak Sum yang sangat pandai,” ungkap Sistomo — yang setelah bertemu Sum, mengetahui bahwa Sum juga diterima di STAN.

Sistomo ke Jakarta, menumpang truk ekspedisi dari Solo ke Jakarta. Ayah Sistomo memang bekerja di perusahaan ekspedisi angkutan ayam kampung dari Solo ke Jakarta.

Mereka sama-sama mendaftar ulang untuk kuliah di STAN. Pada masa orientasi mahasiswa baru di STAN, Sis menerima pemberitahuan bahwa dia juga diterima di UGM, tetapi dengan persetujuan orang tua dia tetap memilih STAN. Sis sempat dimarahi mbah putri-nya yang ditumpangi saat seleksi Perintis I UGM. Kata mbah putri, “Anak lain antre untuk bisa masuk UGM, tetapi kok kamu tinggalkan begitu saja kesempatan itu?”

Meskipun Sis bukan dari keluarga berkecukupan, menurut pengamatannya waktu itu, keadaan ekonomi keluarganya lebih baik dari Sumiyati.

Ketika mereka kuliah di STAN, perbedaan antara Sis dan Sum adalah, “Mbak Sum tetap terlihat cemerlang dalam prestasi, sedangkan saya sedang-sedang saja, bodoh tidak, pandai juga tidak.”

Selama di Jakarta, Sis sempat dititipkan ke rumah saudara sebelum akhirnya mengontrak rumah bersama teman-teman di Jalan Madrasah Jaya, Kuningan Barat, Mampang Prapatan. Sedangkan Sum mengontrak rumah petak di Tulodong Bawah (sekarang menjelma menjadi kawasan SCBD) — yang dihuni empat orang. Itulah kondisi Sum ketika menjadi mahasiswa awal di STAN.

Sebagai anak kampung yang kuliah di Jakarta, mereka hanya punya uang pas-pasan sehingga harus mampu beradaptasi. Ketika di Tingkat II, mereka diangkat sebagai CPNS dan menerima 80 persen gaji, uang tersebut sangat membantu perekonomian mereka. “Nominalnya memang relatif kecil, tetapi bagi kami setidaknya untuk saya dan Mbak Sum, sangat berharga. Apalagi kuliah di STAN, semua kebutuhan *textbook* sudah kami dapatkan cuma-cuma. Uang tersebut kami gunakan untuk keperluan makan dan tempat tinggal,” cerita Sis.

Setelah selesai tingkat III, mereka lulus sebagai Ajun. Prestasi Sum bagus meski tidak juara umum. Tetapi nilai-nilai ujiannya sangat menonjol. Setelah lulus, Sum ditawari menjadi asisten dosen (asdos). “Saya lebih suka avonturir dan minta penempatan di Irian Jaya. Bapak saya seorang tentara yang pernah bertugas di Irian Jaya dan Kalimantan. Daerah-daerah itu, bagi saya sangat menarik dan menumbuhkan rasa ingin tahu. Saya ditempatkan di BPKP Perwakilan Irian Jaya, sedangkan Mbak Sum di Jakarta sebagai asisten dosen di STAN. Ketika saya di Jayapura, saya mendengar, Mbak Sum menikah dan berkeluarga,” ungkap Sis.

Sis dan Sum sama-sama ikut seleksi masuk Tingkat IV dan keduanya sama-sama lulus. Di tingkat IV sampai naik ke tingkat V, Sum sedang hamil anak kedua. Dia tinggal di daerah Kuningan dekat Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro (yang sebelumnya kawasan kumuh dan sekarang menjelma menjadi Menara Emporium dan sekitarnya). Selain menjadi asisten dosen di STAN, Sum juga dosen di berbagai perguruan tinggi, padahal saat itu masih Ajun.

Sistomo menceritakan pengalaman lain yang menarik bersama Sum yang ketika dia melahirkan, meminta Sis menggantikannya mengajar di sebuah perguruan tinggi. Sis mendapatkan bahan materinya, dan bisa membawakannya di depan mahasiswa. Dalam absensinya, Sis ditulis

dengan gelar Drs Sistomo, sebagai dosen pengganti Dra Sumiyati. Ternyata seorang dosen senior yang meminta sekretariat perguruan tinggi tersebut menulis gelar tersebut meski keduanya belum lulus dari STAN.

“Di tingkat V, Mbak Sum melahirkan anak kedua. Dia sangat sibuk mengurus dua anaknya yang masih kecil-kecil. Di sela-sela kesibukan sebagai ibu, Mbak Sum tetap rajin belajar dan tetap saja pintar,” papar Sistomo.

Setelah lulus sebagai Akuntan dari STAN, Sis ditempatkan di BPKP dan diperbantukan di Ditjen Pajak. Sedangkan Sum ditempatkan di BPKP yang kemudian diperbantukan di Kementerian Keuangan. “Saya tetap berkomunikasi dengan Mbak Sum. Saya mengajar di berbagai perguruan tinggi swasta dan mengampu mata kuliah sendiri. Sedangkan dalam perjalanan, Mbak Sum mendapat program S2 di Australia, dan ketika kuliah S2, dia hamil anak keempat,” urainya.

Sis diperbantukan di Ditjen Pajak, dan selama menjadi pemeriksa pajak, dia mendapat tawaran dari perusahaan yang diperiksanya untuk menjadi pegawai perusahaan swasta. Waktu itu banyak teman yang eksodus dari PNS tetapi Sis tetap bertahan sebagai PNS karena pesan orangtua, “kami berutang budi kepada negara.”

Setelah Sis ditarik kembali ke BPKP dan dimutasi keluar Jawa, Sis mengundurkan diri dari PNS. Sis ngomong ke Mbak Sum, “Maaf ya Mbak Sum, kalau saya tidak setia, saya mengundurkan diri dari PNS.”

Mewakafkan Hidupnya untuk Negara

Sum tetap bersikukuh menjalani pekerjaannya sebagai PNS di Kementerian Keuangan.

“Sis, kamu kan tahu, aku kan dari SMEP sampai S2 dapat beasiswa dari negara. Utang budiku kepada negara begitu banyaknya. Aku mau mewakafkan hidupku untuk negara,” kata Sum.

“Saya terkesima. Mbak Sum tidak akan berpaling dari pengabdianya. Tidak heran jika dia *all-out* dalam pekerjaannya,” kata Sis yang sampai sekarang masih mengingat ucapan sahabatnya sejak SMEA.

Menurut Sistomo, Sumiyati memang bekerja keras. Di SMEA, ketika dia masih tidur, Sum sudah berangkat dengan sepedanya. Sis belum tiba di sekolah, Sum sudah tiba. “Saya tidak heran dengan staminanya yang tinggi. Dia kuat bekerja sampai jam dua pagi, rekan-rekan kerjanya pada heran



26 Juli 2022: Sistomo Siswoatmodjo dan Sumiyati.

FOTO OLEH ROBERT ADHI KSP

karena walau telah kerja sampai jam dua pagi, jam tujuh atau delapan pagi, dia sudah muncul di kantor lagi dengan keadaan segar. Saya tidak heran, karena sejak kecil dia sudah terbiasa bekerja keras dan fokus,” ungkapnya.

Walaupun Sum sudah menjadi pejabat eselon I di Kemenkeu, rambutnya tetap bergaya ekor kuda. Sejak dulu, tubuhnya besar, penampilannya apa adanya, sikapnya tidak berubah.

“Anak-anak saya memanggilnya budhe. Suaminya, Mas Tono, tetangganya di Sragen. Saya menilai Mbak Sum berhasil mendidik empat anaknya, tiga orang lulusan ITB, dan anak bungsu dokter dari Undip. Mengapa Mbak Sum berhasil mendidik anak-anaknya? Saya tidak heran. Buah pasti tak jauh dari pohonnya, ibunya dikaruniai otak cerdas dan mbak Sum adalah seorang pekerja keras sejak muda. Mbak Sum saya jadikan *role model* bagi anak-anak saya,” kata Sistomo.

DUA

MENDALAMI AKUNTANSI DAN KEUANGAN NEGARA

Mencoba ke UGM, Tetapi Siapa yang akan Membiayai Kuliahku?

Setelah tamat SMEA di Sragen, aku bertekad mewujudkan impian bapak dan ibuku. Aku harus melanjutkan pendidikan tinggi. Karena aku besar dan tumbuh di Jawa Tengah, aku membayangkan kuliah di perguruan tinggi di sekitar tempatku, mulai dari Universitas Negeri Surakarta (UNS) di Solo, Universitas Diponegoro (Undip) di Semarang, sampai Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta.

Pada tahun 1980, setelah ujian akhir selesai, aku bertanya kepada teman-teman SMEA, siapa yang ingin kuliah di Yogyakarta? Ada beberapa orang, dan kami sepakat ke Yogyakarta untuk mencari informasi tentang UGM.

Selama dua minggu di Jogja, aku menumpang tinggal di rumah sepupuku yang bekerja sebagai *driver* (sopir) di Bank Indonesia di kota itu. Setelah mendapatkan berbagai informasi, aku bertanya dalam hati, kalau aku kuliah di UGM, siapa yang akan membiayai kuliahku? Bapak sudah meninggal, ibuku sudah sepuh. Lalu apakah memungkinkan bagiku untuk *nyambi*, mencari tambahan penghasilan di Yogyakarta untuk membiayai kuliahku? Tampaknya ini sulit untuk dilakukan.

“Aku bertanya dalam hati, kalau aku kuliah di UGM, siapa yang akan membiayai kuliahku? Bapak sudah meninggal, ibuku sudah sepuh. Apakah memungkinkan bagiku untuk nyambi, mencari tambahan penghasilan di Yogyakarta untuk membiayai kuliahku? Tampaknya ini sulit dilakukan.”

Aku kembali ke rumahku di Sragen. Tampaknya aku harus menghapus nama UGM dari daftar karena saat itu aku betul-betul terkendala biaya kuliah. Tak ada jaminan pembiayaan kuliahku bakal mulus.

Memilih Kuliah Gratis di Jakarta

Tiba-tiba aku teringat cerita guruku yang pernah mengungkapkan, Kementerian Keuangan¹ menyediakan kuliah gratis, dan lulusannya bisa menjadi pegawai Kemenkeu. Aku tidak tahu nama sekolah tinggi itu, tetapi aku membulatkan tekad untuk mencari tahu. Dari stasiun, aku naik kereta ke Jakarta.

Aku betul-betul “buta” tentang situasi dan kondisi Jakarta, tetapi aku bertekad bisa mengatasi semua persoalan — seperti yang pernah diajarkan bapak kepadaku. Aku juga yakin ibuku membantuku melalui doa-doanya.

Setibanya di Stasiun Gambir, aku bertanya kepada polisi yang bertugas di sana.

“Pak, saya mau bertanya, di mana kantor Departemen Keuangan?”

“Oh, dekat dari sini. Anda naik bajaj saja dari Gambir ke Depkeu kira-kira tiga ratus rupiah,” jawab polisi itu.

Aku ke kantor Depkeu di Lapangan Banteng, dan bertanya kepada petugas jaga di depan tentang sekolah tinggi milik Depkeu.

“Oh itu Institut Ilmu Keuangan. Dari sini, Anda harus naik bus ke Jalan Senopati,” jelasnya. Aku baru tahu nama sekolah tinggi

¹ Perubahan nomenklatur Departemen Keuangan menjadi Kementerian Keuangan mengacu pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 juncto Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 yang menyebutkan perubahan nomenklatur yang semula Departemen Keuangan menjadi Kementerian Keuangan. Pasal 105 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan telah disahkan pada 3 November 2009 menyebutkan, penyesuaian terhadap Peraturan Presiden ini diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan sejak ditetapkan. Dalam buku ini, penulis menggunakan Kementerian Keuangan, menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur dan kondisi saat ini, meski sebagian kisah dalam buku ini pada saat nomenklatur masih Departemen Keuangan.

itu Institut Ilmu Keuangan.² Tetapi sebenarnya nama IIK sudah berubah menjadi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN.³

Pendaftaran STAN baru dibuka pada hari ketiga. Aku menumpang menginap di rumah salah satu kerabat di Jakarta. Aku mendaftarkan diri dengan membayar uang pendaftaran ke Kantor Kas Negara di Jalan Tebah. Aku menggunakan bajaj sebagai alat transportasi, pergi-pulang biayanya Rp 700. Salah satu syarat dalam pendaftaran itu adalah surat bebas narkoba. Diantar kerabatku yang tinggal di Jakarta, aku memeriksakan diri ke RS Fatmawati di Jakarta Selatan. Setelah semua persyaratan pendaftaran kuselesaikan, aku kembali ke Stasiun Gambir, menuju Sragen.

Aku memilih kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara karena ditanggung negara dan aku tidak perlu mengeluarkan biaya kuliah. Aku sempat membeli buku kumpulan soal ujian masuk STAN seharga Rp 300. Setelah kupelajari soal-soal ujian masuk itu, aku sangat yakin, aku mampu menjawabnya. “Kalau soal-soal ujian masuk seperti ini sih oke,” gumamku yakin.

Di Sragen, aku singgah ke rumah temanku, Sistomo, yang mendaftar ke UGM. Aku meninggalkan sepucuk surat yang memberitahunya bahwa aku tidak jadi mendaftarkan diri ke UGM karena aku sudah mendaftarkan diri ke STAN di Jakarta. Aku menceritakan persyaratan masuk STAN dan waktu tes ujian masuknya. Sistomo tertarik dengan ceritaku. Dia ikut mendaftarkan

diri ke STAN, dan membatalkan diri ke UGM. Dia memfotokopi buku kumpulan soal ujian masuk STAN.

Beberapa hari kemudian, aku kembali ke Jakarta untuk mengikuti tes ujian masuk STAN. Ujian itu diadakan di Stadion Utama Senayan, dan tempat dudukku di Sektor 15. Tes masuk terdiri dari tiga materi yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pengetahuan Umum tentang Tata Buku. Aku mendapatkan tes tentang Tata Buku karena aku lulusan SMEA.

Aku sangat yakin mampu mengerjakan soal-soal tes ujian masuk tersebut — yang jumlahnya 50 soal dan aku menyelesaikannya dalam waktu 75 menit. Itu pun aku masih sempat memeriksa ulang jawaban-jawabanku.

Setelah menyelesaikan ujian masuk di Senayan, aku memutuskan untuk langsung kembali ke stasiun. Aku naik bus nomor 12, tetapi salah satu ban bus tersebut pecah dalam perjalanan. Aku sempat khawatir terlambat mengejar kereta pulang ke Sragen. Tetapi aku bersyukur akhirnya aku tiba di stasiun tepat waktu.

Selama perjalanan pulang, aku menebar senyum karena aku sangat yakin lulus ujian masuk ke STAN. Tiba di rumah esok harinya, aku langsung ikut dan nyoblos di pemilihan kepala desa (pilkades) di kampungku.

Kakak perempuanku, Sukemi, yang sering dijadikan *role model* oleh bapakku, bertanya.

“Bagaimana tes ujian masuk di Jakarta?”

“Aku merasa yakin lulus karena mampu menjawab soal-soal tes, Mbakyu,” jawabku.

“Kamu memilih sekolah apa?” Sukemi bertanya.

“Sekolah kedinasan Kementerian Keuangan,” jelasku.

“Bayar nggak kuliah di sana?” tanya kakakku.

“Kalau lulus ujian masuk, kuliah di sana dibiayai negara,” jawabku.

Kakakku khawatir dengan biaya kuliahku di Jakarta karena dia tahu bapak sudah meninggal, harta tidak seberapa, dan aku tinggal berdua dengan ibu yang sudah sepuh.

2 Institut Ilmu Keuangan (IIK) merupakan peleburan dari Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Negara (STIKN), Akademi Treasury Negara (ATN), dan Akademi Dinas Pemeriksa Keuangan (ADPK) dan telah berbentuk perguruan tinggi setara dengan perguruan tinggi lainnya yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Namun pada akhirnya IIK dibubarkan pada tahun 1975.

3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara awalnya bukan merupakan perubahan dari IIK. STAN adalah salah satu Pusdiklat di bawah Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 jo. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1967. Pada 17 Maret 1975 melalui Surat Keputusan Nomor 13495/MPK/1975 diperoleh izin penyelenggaraan pendidikan akuntan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun pertama, penyelenggaraan pendidikan STAN masih menggunakan kampus Purnawarman. Kampus STAN Bintaro mulai digunakan pada 1988 atau dua tahun setelah diresmikan Menteri Keuangan RI (saat itu) Radius Prawiro pada 16 Juli 1986. Sejak saat itu Kampus Bintaro menjadi kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau yang dikenal juga dengan nama kampus Ali Wardhana. Nama kampus Ali Wardhana diberikan sebagai penghargaan kepada Menteri Keuangan era tahun 1968 hingga 1983. (Sumber <https://www.pknstan.ac.id/sejarah-pkn>)

Aku menjelaskan aku kuliah di STAN dengan status ikatan dinas. Artinya setelah lulus, aku wajib berdinas di Kementerian Keuangan selama waktu tertentu. Kakakku bangga terhadap diriku yang dinilainya sangat mandiri. Meski “dilepas” sendirian ke Jakarta, aku mampu mengatasi berbagai tantangan dan persoalan dengan tenang. Kakakku bangga padaku karena meskipun kondisi ekonomi keluarga tidak stabil, aku tetap memikirkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, juga memikirkan keuangan keluarga dengan memilih sekolah tinggi berstatus ikatan dinas.

Angkatan ke-6 STAN 1980

Kabar gembira itu pun tiba. Aku menerima berita melalui teleks (telegram) bahwa aku diterima di STAN. Daftar nama yang lulus ujian ditempel di kampus, namun Senat Mahasiswa mengabarkan ini melalui teleks karena berkepentingan dengan jadwal kegiatan orientasi mahasiswa baru, yang dikenal dengan Ospek. Aku termasuk satu dari 380 orang yang diterima di STAN dan merupakan bagian dari angkatan ke-6 STAN 80.

Awalnya, aku khawatir nilai Pengetahuan Umumku kurang karena aku anak kampung yang jarang membaca surat kabar (karena tidak mampu berlangganan koran), tidak pernah nonton berita di televisi (karena tak punya televisi di rumah), dan juga tidak menyimak kabar di radio. Alhamdulillah, aku akhirnya lulus. Tetanggaku di Sragen, Sistomo, yang pernah menjadi Ketua OSIS SMEA, juga lulus.

Aku tak punya koper maupun tas besar, dan aku tidak mau meminta bantuan pada kakaku perempuanku. Aku membawa tas plastik besar bermerek Garuda Indonesia Airways untuk membawa beberapa helai pakaianku.

Di Jakarta, aku tinggal di rumah adik sepupu, kerabatku, Sukamto, di Johar Baru selama beberapa bulan. Aku sempat singgah di rumahnya ketika aku mendaftarkan diri ke STAN. Sukamto pernah menawariku untuk tinggal di rumahnya jika aku diterima di STAN.

Kegiatan perkuliahan STAN dimulai bulan Agustus. Memasuki musim penghujan, aku menghadapi persoalan baru, yaitu banjir di sejumlah lokasi di Jakarta, yang sering menghambat perjalananku ke kampus STAN di Jalan Purnawarman di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (sekarang menjadi Gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan/BPPK Kementerian Keuangan). Akhirnya aku memutuskan untuk mencari tempat kos atau rumah kontrakan di dekat kampus STAN.

Tahun Pertama Kuliah, Tinggal di Rumah Petak Tanpa Listrik

Jadwal kuliah di STAN relatif padat dan ketat. Jika aku tinggal di tempat yang agak jauh, itu cukup merepotkanku. Apalagi ada kendala banjir dan macet. Aku mencari kontrakan di wilayah Tulodong (yang sekarang menjelma menjadi kawasan SCBD yang mewah). Pada tahun 1980, sebagian wilayah Tulodong merupakan proyek MHT (Muhammad Husni Thamrin) ⁴ dan sebagian lagi jalannya masih jalan tanah.

Aku memilih rumah kontrakan yang harga sewanya relatif murah, tanpa listrik, dan masih menggunakan lampu *teplok*. ⁵ Aku lebih sering belajar di perpustakaan STAN bersama teman-teman kuliahku. Perpustakaan STAN buka pukul 07.15 dan tutup pukul 16.00, menyesuaikan dengan jam kerja di Kementerian Keuangan.

Banyak rumah petak yang tidak dialiri listrik di Tulodong yang lokasinya tidak jauh dari kampus Purnawarman menjadi tempat tinggal mahasiswa STAN saat itu. Sebagian kawan kuliahku juga tinggal di rumah-rumah petak semacam ini. Kami jalan kaki

⁴ Proyek MHT atau Muhammad Husni Thamrin merupakan proyek perbaikan kampung (Kampung Improvement Project) yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin (1966-1977). Ali Sadikin memperbaiki kampung-kampung kumuh di sejumlah lokasi Jakarta, tak hanya memperbaiki kondisi jalan, tetapi juga memperbaiki saluran pembuangan air, membangun jembatan, merehabilitasi rumah, mendirikan dan memperbaiki MCK, membangun sekolah, puskesmas, tempat sampah. Proyek MHT memberi dampak positif di antaranya mendorong kebersihan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di sana. Selengkapnya baca biografi Ali Sadikin, Ramadhan KH, “Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1992.

⁵ Lampu teplok yang digunakan sejak ribuan tahun lalu adalah lampu minyak yang menghasilkan cahaya, menggunakan sumber bahan bakar minyak.

bersama, ke kampus, berangkat ataupun pulang, sehingga kami sangat akrab. Tinggal di rumah petak ini kami lalui selama masa kuliah D III STAN.

Tumbuh Bersama sebagai Satu Keluarga

Memasuki tahun kedua, aku pindah ke lokasi yang relatif lebih baik. Aku mengontrak satu rumah petak yang memiliki dua kamar, dan setiap kamar dihuni dua orang. Ruang depan memiliki empat meja untuk penghuninya belajar, sedangkan ruang belakang berfungsi untuk dapur dan cuci pakaian. Kami merasa sebagai satu keluarga. Di sini, kami membuat KTP Jakarta dan kartu keluarga sendiri.

Sejak awal kuliah di STAN, kami sudah ditanamkan bahwa semua yang ada di kampus akan menjadi keluarga. Mereka inilah yang akan menjadi teman kerja dan tumbuh bersama, bahkan menua dan pensiun bersama. Karena itulah kami harus selalu bekerja sama, harus saling bersinergi, saling membantu sama lain. Hal ini ditekankan sejak awal kami masuk STAN sehingga ikatan kami sampai sekarang sangat kuat dan erat.

Ketika aku masuk kuliah, nama STAN lebih dikenal dibandingkan nama BPPK (dulu Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan). Direktur STAN pada masa itu adalah T. Sembiring⁶, seorang akuntan yang berkarisma, sangat disiplin, dan sangat disegani, yang memimpin STAN pada periode awal.

Dari 380 orang di angkatanku, tinggal 265 orang yang lulus D III, dan sepertiga lainnya *drop out* (DO), putus kuliah. Sampai sekarang, STAN memberlakukan sistem DO. Mahasiswa yang kuliah di STAN harus memenuhi syarat tertentu, di antaranya nilai ujian tidak boleh D dan angka Indeks Prestasi (IP) minimum untuk kelulusan. Kelulusan mahasiswa juga dilihat dari persentase kehadiran, dan pelanggaran yang dilakukan (misalnya ketahuan *nyontek* saat ujian). Mereka yang tidak memenuhi syarat akan dikeluarkan dari sekolah

⁶ Direktur STAN pertama adalah Drs. T. Sembiring (1984-1990), sebelumnya menjabat Ketua Jurusan Akuntansi pada Institut Ilmu Keuangan (IIK). Ketika perkuliahan di STAN Jurangmangu dimulai, sekretariat akademik masih berlokasi di STAN Purnawarman karena mahasiswa tingkat dua dan tiga saat itu masih mengikuti perkuliahan di kampus Purnawarman Jakarta. (Sumber: "Kampus Ali Wardhana yang Berputar 180 Derajat", Majalah "Edukasi Keuangan" Edisi 20/2015 halaman 15)

atau dikenal DO, mengingat kuliah di STAN dibiayai negara. Ini yang menjadi momok mahasiswa STAN sehingga mendorong mereka belajar keras, malu kalau harus pulang kampung karena DO.

Masa kuliah dan kelulusanku dianggap standar yaitu 9 tahun. Setelah tiga tahun mengikuti kuliah, aku bekerja dengan ikatan dinas selama tiga tahun, setelah itu aku melanjutkan kuliah lagi selama dua tahun, dan sisa waktu satu tahun untuk menyelesaikan skripsi. Kuliah di STAN memang lama dalam perjalanannya namun itulah tuntutan untuk menjadi akuntan yang profesional dan siap langsung bekerja.

Saling Membantu

Sebagai anak kampung yang datang dari daerah, aku tidak mengalami guncangan budaya (*culture shock*) pada saat kuliah di STAN. Kami sama-sama beradaptasi menapaki kehidupan di Ibu Kota.

Aku berusaha tampil percaya diri. Aku lulusan SMEA yang menguasai pengetahuan tata buku, kuliah di STAN yang lebih mendalami ilmu akuntansi. Aku tidak terlalu sulit mengikuti kegiatan perkuliahan di STAN. Tetapi aku menyadari kelemahanku. Aku tidak pernah belajar matematika secara terstruktur, padahal pengetahuan ini berkorelasi dengan mata kuliah Manajemen Keuangan dan untuk menganalisis keuangan. Jadi pada tahap awal, konsentrasiku adalah belajar Matematika secara benar.

Aku bersyukur aku mendapatkan tutorial gratis dari teman-teman kuliahku di STAN, lulusan SMA jurusan IPA. Mereka tidak pelit berbagi ilmu pengetahuan tentang Matematika, membantu kawan-kawan dari kelas mana pun yang membutuhkan bantuan. Aku termasuk pertama yang lulus mata kuliah ini, dan dosennya dari Universitas Indonesia.

Selain itu, aku menyadari aku kurang membaca buku-buku berbahasa Inggris sehingga perbendaharaan kataku (*vocabulary*) kurang. Di SMEA, sedikit sekali buku berbahasa Inggris di perpustakaan. Kalaupun ada, hanya buku stensilan. Menyadari

kekuranganku, aku berkonsentrasi belajar Bahasa Inggris secara benar, sampai menguasai lebih banyak *vocabulary*. Setelah dua hal ini aku kuasai, aku tidak kesulitan mengikuti proses perkuliahan STAN tahap berikutnya.

Sebagian Besar Pengajar STAN adalah Pejabat

Pada era 1980-an, sebagian besar pengajar STAN adalah pejabat-pejabat Kementerian Keuangan. Pengajaran di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Akuntansi misalnya dilaksanakan melalui STAN. Karena itu, STAN benar-benar diasuh oleh para pejabat Kemenkeu. Para pengajar STAN adalah orang-orang hebat di bidangnya, tidak hanya menguasai bidang keilmuan, tetapi juga kaya dengan pengalaman, serta sebagai pelaku dan praktisi.

Di STAN, kami tak hanya mendapatkan ilmu dan pengetahuan dengan contoh-contoh nyata (misalnya proyek-proyek pemerintah), tetapi juga pembentukan karakter dan *leadership* yang bermanfaat bagi masa depan kami.

Banyak pengajar STAN yang merupakan pejabat senior di pemerintahan terlibat dalam penyusunan peraturan pemerintah. Mereka menceritakan latar belakang dan sudut pandang *why* (mengapa) suatu peraturan pemerintah diterbitkan. Bagiku, kisah pengalaman mereka yang luar biasa ini sungguh memberikan pengalaman luar biasa. Belum tentu dosen-dosen hebat di perguruan tinggi lainnya tahu tentang seputar itu.

Pengalaman ini sangat membekas dalam diriku, membawa dampak besar, sampai kelak di kemudian hari aku menjadi pejabat di Kementerian Keuangan untuk memperjuangkan reformasi dan melakukan berbagai perbaikan. Untuk menjadi seorang pengelola keuangan negara yang baik, tidak cukup hanya diajari hal-hal teknis, namun pengalaman dari dunia nyata yang berasal dari pelaku merupakan pelajaran yang berharga dan membuat kita semakin kaya. Ini menjadi pengalaman yang terus hidup, tak pernah padam; menjadi proses pembelajaran yang sangat baik, yang mewarnaiku

ketika membangun reformasi untuk membangun pengelolaan keuangan negara yang kuat.

Karena banyak pengajar STAN adalah pejabat, dan pada masa itu tahun anggaran dimulai 1 April dan berakhir 31 Maret, maka tiga bulan menjelang tahun anggaran berakhir, banyak pejabat yang sibuk menyelesaikan pekerjaan dan tugas di kantor masing-masing. Ini berdampak pada kegiatan belajar-mengajar di STAN. Mereka ada yang tak bisa hadir memberikan perkuliahan.

“Kakak Buku, Adik Buku”

Pada masa itu, mahasiswa STAN berusaha untuk belajar mandiri, menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia, juga memanfaatkan kakak-kakak senior yang sudah memahami dan menguasai mata kuliah tertentu. Biasanya pada momen-momen seperti itu, Seksi Pendidikan STAN mendata, siapa saja mahasiswa yang mempunyai kapasitas untuk berbagi pengetahuan, termasuk aku juga pernah didatangi dan diminta bantuan, “Eh, tolong kamu mengajari adik-adik mahasiswa di kelas ini ya.”

Sebelumnya, ketika masih di bangku SMEA, aku sudah memiliki pengalaman mengajar pegawai BRI yang bergelar sarjana muda. Pengalaman tersebut membangkitkan kepercayaan diriku. Rasanya aku mempunyai bekal yang cukup untuk mengajari tata buku ataupun akuntansi untuk kawan-kawan atau adik kelasku.

Karena itulah, ketika ditanya dan diinventarisasi, siapa saja yang bersedia mengajari adik-adik mahasiswa di STAN, aku menyatakan sanggup dan mampu. Di antara kami, ada yang kuat dan menonjol dalam bidang matematika, akuntansi, tata buku, sehingga kami bisa saling mengisi satu sama lain.

Sebenarnya, jika dibekali buku bacaan, mahasiswa STAN dengan mudah memahami materi kuliah asalkan mau berdiskusi dengan banyak kawan. Intinya, yang “menang” dan unggul adalah yang membaca buku lebih dahulu. Karena itulah, aku tidak heran jika lulusan STAN berkualitas tinggi karena selain rekrutmen sejak awal sudah bagus, sistem pendidikannya juga dijalani dengan baik.



1985: Sumiyati di antara tim Asisten Dosen (Asdon) STAN. Dari kiri: Amien Sunaryadi (sekarang Komisaris PLN, pernah jadi Komisioner KPK), Helmy Yahya (wirausaha); Sumiyati; Kusmanadji (Direktur STAN 9 tahun); Margono (Dosen STAN sampai pensiun); Edy Sanyoto (alm/konsultan pajak). Dari tim Asdos STAN 1985, hanya Ayunita Hirudani yang tak ada dalam foto ini.

FOTO: DOKUMENTASI SUMIYATI.

Situasi di STAN semacam ini membawa ikatan kami sesama mahasiswa semakin kuat. Sejak tingkat pertama hingga tingkat lima, hubungan antarmahasiswa STAN sangat dekat.

Salah satunya adalah hubunganku dan Kusmanadji, kami sama-sama mendapatkan penugasan sebagai Asisten Dosen (asdos) di STAN. Ketika kuliah, aku mendapatkan buku dari Kusmanadji, kakak kelasku, kami sebagai “kakak buku” dan “adik buku”. Kusmanadji pernah menjabat sebagai Direktur STAN selama 9 tahun. Ketika aku menjabat Kepala BPPK, aku memintanya menjadi Sekretaris BPPK karena beliau adalah pejabat senior yang memahami BPPK.

Di STAN, buku teks (*textbook*), kertas, penggaris, dan peralatan untuk keperluan kuliah, semua disediakan kampus. Kami ditanya ingin penggaris atau penghapus seperti apa. Kami boleh memilih yang berkualitas.

Mahasiswa yang naik ke tingkat dua, diwajibkan mewariskan buku-buku teks (yang masih layak pakai) ke adik-adik mahasiswa di tingkat satu. Tahun akademik dan tahun anggaran tidak bersamaan waktunya sehingga acapkali buku-buku teks yang dibagikan ke mahasiswa baru tidak mencukupi. Kondisi inilah yang melatarbelakangi mengapa buku-buku teks perlu diwariskan kepada adik-adik mahasiswa. Dari sinilah muncul istilah “kakak buku” dan “adik buku”.

Kampus Baru STAN di Bintaro

Pernah pada satu periode, ketika kampus STAN berlokasi di Purnawarman, semua staf pengajarnya pejabat, dan ini “menguntungkan” mahasiswa STAN.

Pada 1986, kampus baru STAN di Jurangmangu, Bintaro selesai dibangun dan digunakan untuk kali pertama, namun akses jalan dari Jakarta menuju kampus masih sangat jelek. Kondisi ini berdampak pada ketersediaan staf pengajar. Pejabat eselon I dan II yang ditugasi mengajar di STAN membutuhkan waktu sehari untuk mencapai kampus baru STAN. Akhirnya lama-kelamaan hanya beberapa pejabat saja yang siap mengajar di STAN karena mendahulukan tugas kantor yang padat. (Pada 1986, aku di tingkat IV tetapi kuliahku tetap di kampus lama).

Tugas para pejabat pengambil keputusan mengajar mahasiswa STAN itu akhirnya banyak beralih pada para widyaiswara Kementerian Keuangan dan dosen-dosen muda yang baru lulus pendidikan S2 dan S3 di luar negeri. Dari sisi pengalaman, dosen-dosen muda itu belum dapat menandingi pengalaman para pejabat, namun dari sisi konsep dan teori mereka sangat pandai.

Sementara itu mahasiswa baru STAN yang kuliah di kampus Bintaro yang terpencil dan jauh dari keramaian itu tidak punya kakak angkatan. Mereka merasa kembali seperti anak kampung karena bertemu dengan kerbau dan kambing di kawasan kampus Bintaro. Mereka tak punya *role model* dan kondisi ini kurang



Tim Asdos STAN: Dari kiri: Sumiyati, Amien Sunaryadi, Edy Sanyoto, Ayunita Hiryudani, Kusmanadji.

FOTO: DOKUMENTASI SUMIYATI

menguntungkan. Akhirnya kegiatan belajar-mengajar dikembalikan ke kondisi awal.

Setelah akses jalan ke kampus baru STAN di Bintaro diperbaiki dan kampus makin mudah dijangkau, STAN mulai kembali menggelar kuliah umum. Para pejabat yang memiliki *passion* sebagai pendidik tetap mengajar di STAN. Mahasiswa mulai terasah kembali, *soft skill* dibangun dan karakter dibentuk.

Lulusan STAN Siap Kerja

Aku merasakan betul pada masa perkuliahan di STAN, aku tidak sekadar mendapatkan *knowledge*, tetapi juga pembentukan karakter dan kepemimpinan yang berguna bagi masa depan. Jika buku-buku teks sudah habis dikupas, mahasiswa STAN diwajibkan berlatih memecahkan persoalan dengan berbagai studi kasus, dan harus kami kerjakan semuanya. Inilah yang membedakan STAN dengan perguruan tinggi lainnya.

Di STAN, kami belajar satu subjek selama satu tahun. Sejak tahun 1983/1984, kami mendalami akuntansi selama enam jam

dalam satu minggu. Karena itu, di tingkat IV dan V, materi kuliah yang disampaikan di STAN adalah materi pendidikan S-2. Aku baru menyadari ini ketika aku akan melanjutkan pendidikan S-2. Ternyata buku-buku teks S-2 adalah materi yang pernah aku dapatkan di tingkat IV dan V STAN.

Mengapa lulusan STAN berbeda dengan lulusan perguruan tinggi lainnya? Para pimpinan Kementerian Keuangan mengakui lulusan STAN siap kerja. Dalam perkuliahan, mahasiswa tidak sekadar dijejali teori, tetapi juga diajari praktiknya. Regulasi yang berlaku di dunia internasional dan regulasi di Indonesia dipelajari dan dikupas tuntas. Beban belajar mahasiswa STAN relatif lebih tinggi dibandingkan mahasiswa perguruan tinggi umum.

Dampak positifnya, lulusan STAN ada di mana-mana. Dunia keuangan sektor publik dan dunia komersial banyak yang merekrut alumni STAN. Aku tidak heran dengan fakta ini. Mengapa? Sebagian besar mahasiswa STAN di masa lalu adalah anak-anak yang pintar, berasal dari kampung, banyak dari keluarga yang perekonomiannya mereka pas-pasan, yang sejak kecil sudah terbiasa menghadapi tantangan dan berani mengambil risiko, sehingga mereka sudah terbiasa dengan tantangan dan siap serta berani mengambil keputusan.

Diangkat Menjadi CPNS Pada 1 April 1982

Pada 1 April 1982, ketika aku kuliah di tingkat II di STAN, aku diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan ditempatkan di Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan Negara Kementerian Keuangan pada tahun yang sama.

Aku mendapatkan gaji senilai Rp 18.000 dan tunjangan lain yang jumlah totalnya Rp 29.900 setiap bulan. Dengan pendapatan sebagai CPNS, aku tidak lagi bergantung kiriman uang dari Sragen. Malah aku mengirim uang Rp 10.000 setiap bulan untuk ibuku yang sudah sepuh.

Ketika diangkat menjadi CPNS, Kementerian Keuangan meminta KTP Jakarta. Aku termasuk tipe orang yang selalu mempersiapkan

segala sesuatunya sejak awal. Semua persyaratan pembuatan KTP sudah kuurus sendiri di kelurahan. Ketika dibutuhkan, semuanya sudah siap.

Untuk membayar sewa rumah kontrakan, aku bersama tiga teman lainnya berbagi. Biaya hidup Rp 40.000 sebulan dibagi empat dan masing-masing memberi kontribusi Rp 10.000. Biaya ini sudah termasuk pembayaran listrik, langganan surat kabar *Kompas*, biaya makan sehari-hari (kami masak di rumah karena jika kami makan di luar, biaya relatif lebih mahal), biaya minum susu, dan jika ada lebih, kami masih bisa nonton di bioskop.

Aku terbiasa bangun pagi, belajar di pagi hari, sambil masak dan mempersiapkan sarapan sederhana dengan sayur, ikan, ayam, atau telur. Menu empat sehat lima sempurna ini “harga mati” dan tak bisa dikompromikan. Kawan satu rumah yang baru bangun sering takjub melihatku karena nasi untuk sarapan sudah matang. Perut yang terisi sejak pagi memberiku cukup energi untuk mengikuti perkuliahan di kampus hingga sore hari.

Satu tahun kemudian, setelah lulus, aku diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebelumnya aku diwajibkan mengikuti Kursus Prajabatan (Diklat Prajabatan) sebagai prasyarat utama diangkat menjadi PNS 100 persen.

Mendalami Akuntansi Pemerintahan

Aku menikmati kuliah di STAN dengan perasaan *happy*. Pola belajarnya sangat baik. Aku membaca buku-buku teks sejak menerimanya dari STAN. Selama kuliah, aku membaca banyak buku tentang anggaran, ekonomi, dan buku lainnya yang tidak dibaca teman-temanku lainnya.

“Sum, kamu kok membaca buku yang tak punya masa depan?” sindir temanku.

Belajar akuntansi pemerintahan ternyata dianggap tidak punya masa depan. Meski aku mengambil Jurusan Akuntansi, aku memahami tentang Perbendaharaan, Perbankan, Anggaran, dan Ekonomi secara umum.

Aku menyelesaikan pendidikan Diploma IV STAN pada 1989. Lima tahun kemudian, aku melanjutkan pendidikan S-2 di Central Queensland University di Australia, mengambil Manajemen Keuangan Negara, dan meraih gelar *Master of Financial Management* pada 1994. Aku banyak membaca tentang Reformasi Keuangan Negara, dan tentang *Human Resource Management*. Aku yakin negara ini butuh perubahan. Aku membaca lebih dahulu tentang Reformasi Keuangan Negara di Australia.

Setelah aku menyelesaikan pendidikan S-2, ilmu dan pengetahuan tentang akuntansi dan keuangan negara sangat dibutuhkan. Saat itu Badan Akuntansi Keuangan Negara sangat berperan.⁷ Ilmu yang kupelajari di Australia sangat berguna bagi perjalanan karierku di Kementerian Keuangan. Aku seolah mendapatkan “arena bermain”. Meski bertugas di BPKP, ide-ideku juga selalu mengalir.

Aku ikut merancang akuntabilitas keuangan negara. Sejak mahasiswa, aku sudah punya impian untuk dapat berperan. Di STAN, kami selalu *dicekoki* kata-kata, “Uang kuliah kalian dibiayai dari uang pajak.”

Mengapa Aku Memilih Menjadi Akuntan?

Awalnya aku tidak mengerti tentang akuntansi. Di kelas V dan VI SD, aku baru mendengar istilah “tata buku”. Banyak tetangga yang mengatakan pelajaran itu susah. Tapi aku berpikir, “apanya yang susah?”. Ketika duduk di bangku kelas I SMEP pada 1974, guru Tata Buku barulah menyebut kata-kata “Bon A, Bon B”, dan kata “Akuntan”. Aku menilai guru Tata Buku itu sangat pandai menjelaskan tentang pengelolaan keuangan.

Aku menggeluti bidang ini karena aku ingin mengerti mengapa tabungan bapakku bisa hilang begitu saja gara-gara banknya pailit. Padahal uang tabungan itu hasil penjualan harta bapak

⁷ Badan Akuntansi Keuangan Negara (disingkat BAKUN) merupakan unit eselon I pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang pada tahun 2004 telah dilebur (reorganisasi) ke dalam Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Fungsi pembinaan akuntansi dan pelaporan menjadi Direktorat Informasi dan Akuntansi sedangkan Kantor Regional di beberapa provinsi melebur menjadi Bidang AKLAP pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan di masing-masing provinsi. (Sumber: http://id.dbpedia.org/page/Badan_Akuntansi_Keuangan_Negara)

berupa tanah, kerbau, hasil panen cengkeh, padi, dan lainnya. Aku penasaran. Bukankah uang tabungan bapak seharusnya dicatat, dan tabungan itu seharusnya ada jaminan.

Aku tidak rela melihat perilaku orang-orang yang melakukan *fraud*. Pengalaman buruk ini tidak pernah hilang dari benakku. Aku tidak rela uang bapakku digunakan dengan cara tidak benar. (Mungkin pola pikirku yang tertanam sejak kecil inilah, yang membawaku menjadi Inspektur Jenderal/Irjen di Kementerian Keuangan).

“Kalau Tak Ada Beasiswa, Aku Hanya Sumiyati yang Menanam Padi di Sawah”

Sebagai anak kampung, aku merasa beruntung mendapatkan beasiswa di SMEP dan SMEA, kemudian dapat melanjutkan pendidikan tentang keuangan negara secara gratis di STAN yang memiliki lingkungan yang nyaman.

Aku berpikir, “Jika keuangan negara ini dikelola dengan benar, tidak dikorupsi, ada berapa banyak orang yang lebih beruntung menikmati pendidikan gratis seperti aku?” Aku memikirkan ini sejak dulu. Jika mendengar ada yang korupsi uang negara, uang rakyat, aku merasa sakit dan marah. Jika aku tak bisa mematuhi peraturan, aku merasa “sakit”, seolah “menghantam” diri sendiri.

Karena itu ketika ada tawaran untuk keluar dari PNS dan bergabung dengan perusahaan swasta yang gajinya lebih tinggi, aku merasa tidak rela dan tidak pantas melakukan itu. Pendidikanku dibiayai negara. Aku ingin mengabdikan negara sampai akhir, dan selalu memikirkan kontribusi apa yang dapat aku berikan untuk negeri ini.

Aku ikut memikirkan keuangan negara ini. Aku merasa berutang kepada rakyat yang telah membiayai kuliahku. Aku menyadari betul hal ini. Karena jika tak ada beasiswa yang kuterima di SMEP dan SMEA, sampai akhirnya menyelesaikan pendidikan di STAN secara gratis, mungkin aku hanya seorang Sumiyati yang menanam padi di sawah di kampungku di Sragen.

Aku sangat meyakini kata-kata, “pendidikan adalah gerbang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik”. Setiap anak Indonesia yang mendapat kesempatan mengenyam pendidikan, harus memanfaatkan dan mengambilnya dengan sebaik-baiknya.”

Kebanggaan Menjadi Asisten Dosen STAN

Ibuku buta huruf. Dia senang aku menjadi PNS, dan mendoakan agar aku menjadi guru, menjadi pendidik. Aku bercita-cita menjadi orang yang memahami pengelolaan uang negara agar dikelola dengan benar dan tepat guna, dan agar tak ada yang tertipu. Dulu aku tidak paham istilah akuntan. Karena itulah aku tidak masuk SMP atau SPG. Aku lebih memilih SMEP dan melanjutkan ke SMEA.

Doa ibuku terkabul, doaku juga terkabul. Aku melanjutkan pendidikan tinggi di STAN, menjadi akuntan, sedangkan harapan ibuku agar aku menjadi guru pun terwujud. Aku menjadi asisten dosen di kampus STAN. Dua-duanya terealisasi. Betapa doa orangtua itu sangat luar biasa.

Ketika aku di tingkat III, pengangkatan asisten dosen dilakukan untuk kali pertama. Empat kakak angkatanku menjadi asisten dosen, yaitu Koesmanadji, Amin Sunaryadi, Eddy Sanyoto (alm), dan Yunita Hiriyudani. Saat itu aku sudah terpikir untuk menjadi asisten dosen jika aku lulus D3 sebagai Ajun Akuntan.

Aku sempat berpikir, apakah sebaiknya memilih menjadi auditor dan memilih kantor dekat kampung halamanku, agar bisa merawat ibuku. Terlintas dalam pikiranku, “apakah sebaiknya aku mengajar saja?” Aku anak satu-satunya dan ibuku sudah sepuh tinggal di kampung sendirian. Mungkin aku bisa ditempatkan di dekat kampungku, atau di Jogja, Surabaya, atau Semarang.

Dalam proses penempatan pegawai, setelah surat lamaran resmi disampaikan ke Biro Kepegawaian di Kementerian Keuangan, aku bertanya kepada staf di sana, “Apakah STAN masih menerima asisten dosen?”

Aku diminta menanyakan kepada Pak Seno, yang pernah menjabat Direktur STAN.

“Aku berpikir, jika keuangan negara ini dikelola dengan benar, tidak dikorupsi, ada berapa banyak orang yang lebih beruntung menikmati pendidikan gratis seperti aku? Aku merasa berutang kepada rakyat yang telah membiayai kuliahku. Jika tak ada beasiswa yang kuterima sejak di SMEP sampai menyelesaikan pendidikan di STAN secara gratis, mungkin aku hanya seorang Sumiyati yang menanam padi di sawah di kampungku di Sragen.”

“Kamu mau menjadi asisten dosen? Kamu senang mengajar ya?” tanya Pak Seno.

Sorenya, pukul 17.00, pengumuman keluar. Aku dan Margono diterima menjadi asisten dosen. Aku diminta mengajar di depan kelas. Ketika banyak pejabat sibuk dengan tugas utama di kantor mereka, aku diminta mengisi kelas mereka. Aku resmi menjadi asisten dosen sejak 1983. Aku diminta menjadi asisten dosen (asdos) di STAN karena tingkat *drop out* mahasiswa relatif tinggi saat itu.

Ketika aku dan beberapa kawanku menjadi asisten dosen, beberapa perguruan tinggi swasta yang statusnya masih “terdaftar” berupaya agar dapat “naik kelas” menjadi “diakui” dan “disamakan”, di antaranya YAI. Mereka datang ke STAN, meminta kami untuk membantu mengajar di tempat mereka. Sebagai asisten dosen, aku termasuk yang diminta mengajar di kelas khusus D3 Akademi Akuntansi YAI, tetapi itu baru dapat aku kerjakan pada sore dan malam hari, setelah jadwal mengajarku di STAN selesai pukul empat sore. Setelah status perguruan tinggi swasta itu naik, YAI berkembang menjadi universitas. Perbanas juga menjadi Sekolah Tinggi dan Akademi Ilmu Keuangan dan Perbankan menjadi STIE Swadaya.

Aku dan beberapa asisten dosen STAN ikut berperan dan memberi kontribusi nyata bagi perkembangan perguruan tinggi swasta yang memiliki program studi akuntansi, sampai akhirnya status mereka “disamakan”. Di sinilah salah satu kebanggaan kami menjadi asisten dosen STAN.

Menyelesaikan Program Diploma IV STAN Pada 1989

Setelah tiga tahun menjadi asdos, pada 1986, aku masuk program D4 Akuntansi, yang waktunya bersamaan dengan pembukaan kampus STAN Bintaro. Kondisi jalan di kawasan Jurangmangu saat itu masih seperti “kubangan kerbau”. Jadi aku sudah tidak ikut pindah ke Bintaro. Selain aku, asisten dosen lainnya yang pindah ke

Bintaro adalah Helmy Yahya, Iqbal Islami, Kunarso, Dite Abimanyu, dan Rahardjo Sudradjat.

Aku menikmati bidang pendidikan di STAN karena proses belajar dan mengajar tidak pernah putus. Penempatan pertamaku adalah mengajar sebagai asisten dosen di STAN. Buku-buku teks yang digunakan pun adalah buku-buku teks edisi terbaru, walaupun masih ada buku-buku tua dan usang di perpustakaan STAN. Buku-buku baru ini dipilih terutama saat banyak dosen yang baru selesai pendidikan dari luar negeri.

Artikel-artikel tentang Akuntansi yang terbit adalah artikel yang mengupas kondisi terkini, dan itu biasanya dibahas tuntas di kelas. Artikel itu digunting dan dikliping. Biasanya seorang mahasiswa sebagian mendapat tugas menerjemahkan tiga kalimat.

Pada saat bersamaan, alumni STAN yang dikirim melanjutkan pendidikan S2 di luar negeri mulai kembali ke Indonesia. Dosen-dosen STAN yang sebelumnya sebagian besar pejabat, diganti oleh dosen-dosen *fresh graduate* S2 dan S3 dari luar negeri.

Dosen lulusan Kanada misalnya, mengajar Manajemen Akuntansi. Mahasiswa mendapatkan warna berbeda dari kelas angkatan sebelumnya. Juga ada mata kuliah *Financial Accounting* dan *management accounting* yang disampaikan oleh lulusan S2 atau S3 dari luar negeri.

Direktur pertama STAN Taremalem Sembiring membuat kuliah di STAN menjadi menarik. Mahasiswa tak hanya belajar teori tetapi juga praktiknya. Laporan keuangan negara-negara lain dibedah. Studi kasus mengambil contoh-contoh yang nyata. Belajar akuntansi secara serius menjadi sesuatu yang menyenangkan.

Pada tahun itu juga, mulai diperkenalkan Satuan Kredit Semester (SKS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang menjadi alat ukur bagi prestasi mahasiswa di bidang akademik.

Selain dosen-dosen yang baru lulus S2 di universitas di luar negeri, para pengajar STAN adalah juga para pejabat dan *leader* di Kementerian Keuangan dan instansi lain, seperti Staf Ahli Menteri, para Deputi, Kepala BPKP dan lainnya. Mahasiswa tak hanya mendapatkan berbagai macam materi, tetapi juga cara bagaimana

memimpin (*how to lead*) dan pelajaran yang dipetik (*lesson learned*) dari berbagai studi kasus.

Aku sangat menikmati belajar di STAN karena mahasiswa tidak hanya dijejali teori dan konsep tetapi juga implementasi di dunia nyata dan kondisi sehari-hari di lapangan. Itulah yang membuatku menikmati kegiatan belajar-mengajar di STAN. Aku menyelesaikan Program Diploma IV STAN pada tahun 1989.



SUMBER FOTO: HUMAS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI

TIGA

PUNGGAWA KEUANGAN NEGARA

Mengawali Karier sebagai Auditor di BPKP DKI

Setelah lulus dari STAN, aku merasa *passion*-ku di dunia pendidikan sehingga ketika aku merasa tidak ada salahnya jika aku mengajar kembali di almamaterku, STAN. Namun ketika aku ngobrol dengan Kepala Bagian Kepegawaian, aku mendapat masukan berharga.

“Anda kan belum punya pengalaman di lapangan? Kalau Anda mengajar di STAN tanpa pengalaman, konten ajarmu akan kering. Untuk menjadi dosen yang baik, Anda perlu ke lapangan dulu minimal lima tahun. Setelah lima tahun, selanjutnya terserah Anda,” kata Pak Soekardi Hoesodo, Kepala Bagian Kepegawaian memberi pandangannya. Beliau tahu persis tentang diriku.

“Sebaiknya Anda ditempatkan di BPKP perwakilan DKI. Mutasinya relatif cepat, dua tahun sekali. Setidaknya Anda memahami tentang APBN dan APBD. Setelah itu, silakan terjun di dunia pendidikan kembali,” lanjut Pak Kardi yang kemudian memberiku surat penempatan di Kantor BPKP Perwakilan DKI Jakarta.

Kepala BPKP DKI Jakarta Pak Sudarjono —pindahan dari BPKP Sumatera Utara— memberi disposisi bahwa aku ditempatkan di Bidang Perencanaan, Analisa, dan Evaluasi, yang menjadi “dapur” rencana kerja. Dengan demikian, aku bisa belajar dengan benar



1992: Sumiyati berfoto bersama saat mengawali kariernya di BPKP Perwakilan Jakarta, bersama Gandhi (Kepala BPKP yang pertama) dan Purnomo Sidhi (Kepala Perwakilan BPKP DKI Jakarta).

FOTO: DOKUMENTASI SUMIYATI

di “dapur” yang benar, bagaimana sistem manajemen audit yang dilakukan BPKP.¹

Sebenarnya aku sudah cukup lama melakukan kegiatan belajar dan mengajar di STAN, sembilan tahun di dunia pendidikan dengan membaca buku, mengajar, membuat soal dari berbagai studi kasus. Masa yang diperlukan untuk menyelesaikan program D IV di masa lalu adalah sekitar sembilan tahun. Kalau sekolah di perguruan tinggi lain sudah hampir selesai S3. Karena itu aku tidak heran jika lulusan STAN siap bekerja ketika ditempatkan di mana pun.

Bagaimana audit dijalankan, dan seluk-beluk akuntansi, sebenarnya sudah aku kuasai luar dalam. Misalkan aku dibangunkan tengah malam dan diminta bercerita tentang akuntansi, aku sanggup melakukannya karena semua ada di dalam otakku.

Sejak kecil, aku sudah memikirkan alangkah indahnya jika banyak anak yang dapat menikmati pendidikan gratis seperti yang aku nikmati. Aku bisa melanjutkan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi karena sejak awal sudah menerima beasiswa.

Selain menerima beasiswa dari pemerintah, sejak kecil aku juga mendapatkan susu dan vitamin secara gratis. Mantri kesehatan datang memberi vaksinasi. Petugas Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) memberi penyuluhan tentang makanan sehat, dan menyarankan agar masyarakat menanam sayur dan buah-buahan di pekarangan rumah. Aku merasa dari kecil dihidupi oleh negeri ini.

Mimpiku sejak dulu adalah bagaimana agar keuangan negara dikelola dengan baik dan tidak dikorup. Aku sudah merasakan pahitnya harta bapakku hilang begitu saja, padahal itu hasil tabungannya bertahun-tahun.

¹ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP merupakan aparat pengawas intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di daerah, BPKP membentuk Kantor Perwakilan BPKP di setiap Provinsi. (Sumber: <https://www.bpkp.go.id/sumut/konten/48/Tugas-Fungsi-dan-Wewenang.bpkp>)

Kalau aku bisa, seharusnya orang lain juga mendapatkan hal yang sama yang aku dapatkan. Aku memimpikan lebih banyak anak-anak desa menikmati pendidikan gratis seperti yang aku dapatkan selama ini.

Kalau uang negara tidak dikorupsi, akan semakin banyak anak yang menikmati ini semua. Ini berarti pengelolaan keuangan negara harus tepat, pertanggungjawabannya harus benar, penganggarnya harus sesuai. Semangat dan kepedulianku tentang hal ini tidak pernah padam.

Di BPKP DKI, aku mendapatkan segudang pengalaman berharga terkait pengawasan pengelolaan keuangan negara. Sebenarnya, di manapun aku ditempatkan, aku selalu memetik pengalaman berharga dengan tingkat yang berbeda-beda. Sungguh aku tak pernah membayangkan suatu hari kelak, aku akan memimpin auditor di kantor audit yang sangat besar, pengawas keuangan negara di seluruh Indonesia.

Pengetahuan dan pengalaman audit terakumulasi sejak aku menjadi pegawai BPKP Perwakilan DKI Jakarta. Aku tidak pernah menampik atau mengeluh di mana pun bekerja. Aku akan bekerja serius dan sepenuh hati, banyak pelajaran yang bisa dipetik di setiap posisi. Pekerjaan sebagai auditor aku awali dari 2 Februari 1990.

Mengolah Data Masih Manual

Di BPKP DKI, aku bertugas di Bidang PAE (Perencanaan, Analisa Hasil Pengawasan, dan Evaluasi Tata Kerja), bidang yang menyiapkan program kerja pengawasan tahunan, monitoring pelaksanaan, serta memonitor tindak lanjut hasil pengawasan, serta melakukan evaluasi tata kerja di sektor tertentu yang menjadi *interest* pemerintah/publik.

Setiap temuan, ada kode-kode khusus dengan klasifikasi, apakah termasuk dalam kasus penyimpangan, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, atau *fraud* pendapatan negara, uang kas, uang belanja, atau karena pencatatan yang lemah, kontrol *internal control* yang kurang, atau karena sumber daya manusia yang

tidak mampu. Penyebabnya juga diberi kode, demikian juga status, rekomendasi dan tindak lanjutnya. Aku dapat membaca semua temuan tersebut, menganalisisnya dan mengklasifikasikannya sesuai ketentuan. Aku hapal kode-kode untuk membangun *database* hasil pengawasan.

Aku berpikir, seandainya pada masa itu, *database* dapat diolah dengan baik, tentu analisis data akan lebih baik pula. Namun pada era tersebut, semua data temuan tentang pembangunan dan keuangan negara yang masuk, masih harus diketik. Mengolah data masih manual, dan belum *computerized*. Namun aku sudah terbiasa membaca temuan-temuan BPKP, dan menganalisis hasil pengawasan yang masuk. Aku mampu membaca cepat semua temuan sehingga hampir semua laporan pengawasan mengalir kepadaku.

Rekomendasi auditor dalam temuan laporan keuangan selalu ditagih. Jika itu yang terjadi, kami biasanya membongkar gudang, membongkar “celengan” untuk mengecek ulang temuan. Laporan pengawasan disimpan di gudang dalam bentuk *hardcopy*, dipilah per departemen (sekarang kementerian), per pemerintah daerah, diurut sesuai direktorat jenderal, per sasaran, per proyek. Temuan difotokopi, ditempel, dan dibaca semua. Berbekal data ini, diketahui saldonya berapa, disesuaikan dengan data kementerian yang mutakhir.

Pekerjaan semacam ini aku lakoni sejak 1990. Aku membaca semua laporan hasil pemeriksaan. Apa yang ditemukan di Kementerian Pertanian? Daftarnya terbentang di depan mataku. Demikian pula, apa temuan di BUMN (waktu itu pembinaan masih di bawah Kementerian Keuangan), di Ditjen Pajak, di Ditjen Bea dan Cukai, dan lainnya.

Aku mengamati proyek-proyek besar, tiga bulan sebelum tutup tahun anggaran. Aku mengamati proyek-proyek bantuan luar negeri. Aku mengamati trennya. Aku suka mengamati *budget*, juga mengutak-atik analisis keuangan BUMN, mengamati anggaran proyek dan menganalisisnya, mencari penyebab mengapa proyek belum selesai, mengapa anggaran baru terserap 40 persen misalnya, dan mengeksekusi bagaimana tindak lanjutnya.

Setelah membaca banyak laporan hasil pengawasan keuangan dan menemukan banyak kasus dan persoalan, pikiranku sering berkecamuk, bagaimana memberesi benang kusut itu. Bunga sudah dibayar, eksekusi sudah dilakukan, tetapi proyek tidak memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Ini yang membuat anggaran negara tekor. Padahal negara sudah menghabiskan banyak energi dan dana, namun kesalahan terus berulang. Ini yang membuat pikiranku gelisah.

Aku melihat ada banyak kelemahan di lapangan, dan berpikir perlu ada evaluasi tata kerja. Diperlukan reformasi, debirokratisasi dan deregulasi. Justru karena aku bertugas di PAE, aku dapat membaca semua rencana maupun hasil pemeriksaan dan evaluasi. Kalau reformasi tidak dilakukan secara terstruktur, kesalahan akan terus berulang. Misalnya, persoalan harus dibereskan dengan Undang-undang (UU), tetapi ternyata hanya dengan Surat Edaran (SE), dan itu pun hanya Surat Edaran Dirjen. Hasilnya, tetap bolong di sana-sini.

Langsung Menjadi Ketua Tim Auditor

Aku bersyukur pada awal karierku, aku bertugas di “dapur” pengawasan keuangan negara dan menyiapkan analisis. Saat itu aku membayangkan BPKP sebagai koordinator pengawasan keuangan internal pemerintah (yang dulu sangat *powerful*) mengaudit APBN, APBD, BUMN, BUMD.

Selain mengerjakan administrasi sistem manajemen audit, aku juga melakukan kegiatan audit. Selama menjadi auditor, sejak masuk di BPKP, aku selalu menjadi ketua tim.

Ketika aku masih pegawai baru, aku diperkenalkan oleh atasanku, Ibu Laksmiwati dengan pegawai-pegawai BPKP DKI.

“Sum, saya perkenalkan dengan pegawai di sini,” katanya.

Sebagian besar pegawai BPKP DKI adalah alumni STAN yang mengenal diriku dengan sangat baik. Akhirnya merekalah yang memperkenalkan diriku kepada atasanku.

“Kalau demikian, Sumiyati yang menjadi ketua tim auditor,” kata atasanku, Ibu Sapartinah.

Aku ditempatkan di Bidang PAE, yang *core function*-nya bukan audit tetapi karena ada obyek-obyek audit, biasanya ruwet, termasuk proyek-proyek *loan*. Bidang inilah yang aku tangani. Pengalaman lapanganku bertambah karena aku mengetahui bagaimana kantor-kantor pemerintah mengelola keuangan negara.

Setelah menggeluti bidang ini, aku merasa sedih. Ternyata kriteria pengelolaan keuangan negara di instansi dan lembaga pemerintah belum jelas, dan masih dilakukan dengan cara konvensional. Ternyata masih sangat jauh dari yang aku impikan. Termasuk mencermati perilaku orang. Aku mengamati suatu instansi yang dipegang orang yang berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Hal-hal ini terakumulasi dalam pikiranku selama bertahun-tahun.

Surat Panggilan S-2 dari Australia ke Alamat Rumah yang Digusur

Di sela-sela bekerja di BPKP DKI Jakarta, pada 1991, aku mengikuti tes internal di BPKP dan Kementerian Keuangan melalui BPPK untuk melanjutkan pendidikan S-2. Sebelumnya ada *grant* dari Jepang, namun sempat terhenti. Setelah antre untuk mendapatkan *grant*, akhirnya aku mendapatkan *grant* pendidikan S-2 dua tahun kemudian, yaitu pada 1993.

Ketika diwawancarai, aku diberitahu bahwa aku melanjutkan pendidikan S-2 ke Central Queensland University. Aku mengiyakan karena belum dapat membayangkannya. Universitas itu tidak terlalu besar, tetapi suasanaanya nyaman.

Pada 1993, aku berangkat ke Australia, dibiayai *grant* dari Pemerintah Australia karena dana dari APBN murni tidak tersedia. Pemerintah Indonesia juga tidak menyediakan *loan* untuk pendidikan S-2.

Aku sempat pasrah karena merasa tidak mendapat surat panggilan. Namun rupanya Australia mengirim surat pemberitahuan

ke alamat rumah yang aku tinggali dan rumah itu kena gusur sehingga kabar gembira itu tidak sampai.

Seorang temanku, Widyawati yang menerima surat pemberitahuan, sempat bertanya, “Sum, kamu sudah dapat panggilan dari Australia?”

“Aku belum dapat. Mungkin aku tidak lulus,” jawabku.

“Ah tak apa, nanti kamu bisa mencarinya lagi,” ujar Widya.

Setelah sekian lama, surat panggilan dari Australia tiba di kantor di BPKP.

Hari itu pukul 16.30, aku dihampiri Pak Purnomo Sidi.

“Di sini ada yang bernama Sumiyati?”

“Iya Pak, saya Sumiyati,” sahutku.

“Benar nggak ini surat untuk kamu?” tanyanya.

Ternyata itu surat panggilan yang selama ini kutunggu-tunggu. Aku gembira bukan kepalang. Aku lulus dan dapat melanjutkan pendidikan S-2 di Australia.

Dalam keadaan hamil 5 bulan, aku berangkat ke Australia. Aku dipanggil dan ditanya sampai tiga kali, aku menegaskan bahwa aku ingin anak dan S-2. Jadi aku siap melanjutkan pendidikan S-2 dalam keadaan hamil dan melahirkan bayi di sana. Aku yakin mampu mengatasi berbagai persoalan yang akan muncul menjelang dan pasca-melahirkan di tengah studi S-2. Setelah melihat keseriusanku, pihak Australia akhirnya menyatakan aku diizinkan berangkat.

Belajar dari Australia tentang Penanganan Ibu Hamil

Ketika pesawat yang membawaku mendarat di Brisbane, ibu kota negara bagian Queensland, aku disambut oleh pekerja sosial.

“Ini Ibu Sumiyati yang hamil ya?” tanya pekerja sosial (*social worker*) yang mendapat tugas “mengawal” saya. Aku terkejut dengan sambutan Australia yang sangat peduli pada perempuan hamil.

Demikian pula ketika aku mulai masuk kampus, ada pekerja sosial yang mendaftarkanku ke dokter. Jadwalku ke dokter sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan ketika aku memeriksakan diri ke dokter kandungan, aku didampingi staf universitas di bagian

international education. Pihak universitas rupanya sangat peduli pada mahasiswi hamil seperti diriku karena mereka tahu aku melahirkan bayi tidak didampingi anggota keluarga.

Kehamilanku menarik perhatian mahasiswa dan dosen di kampus. Mereka tak segan-segan menawariku tumpangan mobil. “Tadinya kami khawatir Anda hamil, melahirkan tanpa didampingi anggota keluarga, belajar sendirian,” kata salah satu dosen. Aku sangat terharu. Betapa besarnya perhatian mereka terhadap perempuan hamil yang kuliah di kampus itu.

Bahkan ada dosen yang mengantar seikat bayam ke tempat tinggalku.

“Saya tak punya ide, bayam ini bisa dimasak apa,” kata dosen itu. Aku cuma tersenyum. Dia tidak tahu seikat bayam itu jika dimasak, hasilnya sedikit.

Ada pula yang membelikanku donat.

Setiap hari ada bidan yang membawa timbangan, memeriksaku selama dua minggu. Itu semua gratis. Keren sekali layanan kesehatan di Australia.

Sungguh tak terbayang olehku. Tiga hari setelah melahirkan, aku minta pulang dari rumah sakit, dan aku sudah harus menghadapi ujian semester. Dokter akhirnya setuju tetapi aku harus menandatangani perjanjian sekian lembar. Aku menyelesaikan ujian dengan baik dan berhasil lulus dengan baik. Setelah menjalani semester pertama, hasil ujian dipublikasikan secara luas.

Di Australia, aku melahirkan anak keempatku, yaitu Andyta Nalaresi pada Juni 1993. (Andyta kini masih menempuh Pendidikan S-2 di bidang *public health* di Australia, mendapatkan beasiswa LPDP). Tiga anakku sebelumnya adalah Triana Mustika Rukmi (lahir pada 1989), Dwipa Harimurti (lahir pada 1987. Aku hamil Dwipa ketika masih di tingkat IV dan menjelang naik ke tingkat V). Sedangkan anak sulungku, Budiaji Hartono (lahir pada 1985, ketika aku masih Asisten Dosen dan mahasiswi D3 STAN).

Melihat kepedulian Australia terhadap ibu hamil yang begitu besar, aku berpikir seharusnya Indonesia juga bisa melakukan hal serupa. Aku berpikir jika hal-hal baik semacam ini diterapkan

di Indonesia, tentu sangat baik. Pengalaman inilah yang memengaruhiku ketika aku menjadi Ketua Tim Pengarusutamaan Kesetaraan Gender Kementerian Keuangan. Aku menyerap pembelajaran dari Australia, membawanya pulang ke Indonesia dan mengimplementasikannya di institusi tempatku bekerja.

Ini mewarnai kebijakanku ketika aku menjabat Kepala Biro Anggaran dan Perencanaan di Kementerian Keuangan. Bagaimana Australia mampu menyusun anggaran yang berorientasi kepada pelayanan *public* termasuk mengalokasikan dana kesehatan untuk perempuan hamil, seperti yang aku alami saat menjadi mahasiswa S2 di sana? Aku membawa tim untuk belajar sistem keuangan dan perencanaan ke Kementerian *Human Services* di Canberra. Di Australia, kami diterima oleh Sekjen yang sehari-hari memimpin kantor kementerian dan dijelaskan konsep serta sistem pelayanan, sistem informasi untuk pelayanan publik. Kementerian dipimpin oleh Sekjen. Adapun Menteri hanya datang ke kantor beberapa kali dalam sebulan.

Aku belajar betul bagaimana Australia menerapkan sistem layanan kesehatan yang peduli pada perempuan hamil. Ternyata layanan kesehatan di Australia sangat baik dan sempurna. Kalau ada yang sakit, tinggal tekan satu nomor, otomatis langsung tersambung ke unit terdekat dengan orang yang perlu dilayani. Ini tidak hanya terbatas pada layanan kesehatan, tetapi juga untuk mereka yang membutuhkan ambulans, mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ataupun menjadi korban perampokan. Semua langsung terdeteksi.

Aku mempelajari bagaimana negara membiayai itu semua dengan anggaran yang tersedia. Ternyata setelah aku mendalami itu semua, aku menyimpulkan apa yang dilakukan Australia memang sangat bagus. Semua layanan publik sudah dirancang sedemikian rupa sehingga membuat rakyat Australia merasa diperhatikan — dan bukan hanya rakyat Australia, orang asing seperti aku pun menerima pelayanan yang sangat baik.

“Melihat kepedulian Australia terhadap ibu hamil yang begitu besar, aku berpikir seharusnya Indonesia juga bisa melakukan hal serupa. Jika hal-hal baik semacam ini diterapkan di Indonesia, tentu sangat baik.”



Tipe “Well-Planned”

Setelah melahirkan dan punya bayi, aku berusaha untuk mengelola waktuku sebaik-baiknya. Aku tidak mau terlalu *ngotot*. Aku mengenali diriku. Aku melahirkan jauh lebih cepat dari tanggal prakiraan.

Aku tipe orang yang *well-planned*. Sejak awal, aku sudah membuat *timeline*, menyelesaikan tugas-tugas membuat makalah (*paper*). Setelah *paper* kedua selesai, aku sudah menggarap *paper* ketiga karena aku khawatir pada saat aku melahirkan, aku belum menyelesaikan tugas-tugasku. Jadi aku sudah menyelesaikan tugas membuat *paper* tiga pekan sebelum batas waktu yang ditentukan, dan aku sudah mendapatkan angka.

Kalau ada mahasiswa lain yang bertanya, aku diizinkan memberi tahu tetapi dilarang memperlihatkan hasil. Di kampus itu, jika ada yang melakukan *cheating*, hukumannya keras. Jadi kunci belajarku di Australia adalah *well-planned*. Belajar giat di awal sehingga satu bulan terakhir, tak ada lagi tugas-tugas yang harus aku kerjakan.

Well-planned ini tak hanya aku terapkan saat kuliah dan di dunia kerja, tetapi juga saat di rumah. Aku mengimplementasikan pengelolaan waktu yang terencana dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melakukan kegiatan X misalnya, aku membutuhkan waktu berapa lama, skenario dan konsekuensinya. Aku melaksanakan ini semua secara otomatis dan mengalir.

Aku seorang perempuan bekerja, berperan sebagai istri dan ibu dari empat anak. Aku harus mengelola waktu secara seimbang untuk kantor dan rumah. Sampai anak-anakku duduk di bangku SMA, mereka masih membawa bekal makanan (masakanku) dari rumah. Mereka, tiga anakku bersekolah di SMA Negeri 8 Jakarta, yang gerbangnya hanya buka pada pagi hari dan sore hari. Aku harus mengelola waktuku bagaimana agar semua masakanku untuk bekal makan anak-anakku sudah siap dibawa pada pagi hari sebelum mereka berangkat ke sekolah.

Setiap bangun pagi, otakku langsung memerintahkan agar aku langsung menyalakan kompor dan memasak merebus air. Bahkan sampai sekarang pun, aku masih mengalami ini. Jika ada yang

mengatakan banyak “sinyal” perempuan yang menyala, itu benar adanya. Perempuan lebih mampu “menangkap” hal-hal kecil.

Karena itulah, dalam pengambilan keputusan, perempuan selalu memberi warna. Salah satu contoh, ketika aku sebagai Kepala BPPK Kemenkeu meminta agar kamar asrama dibuat sedemikian rupa seperti kamar hotel, dan asrama memiliki resepsionis. Aku meminta resepsionis tidak sekadar bertugas mengucapkan “selamat pagi” tetapi juga sekaligus bertugas menyampaikan informasi tentang banyak hal. Ini aku lakukan karena aku terinspirasi ketika melanjutkan pendidikan S-2 di Australia. *Social worker* di sana datang menyambutku yang sedang hamil dan merapikan banyak hal.

“Finance and Information System”

Di Australia, awalnya aku bermaksud mendalami akunting. Namun setelah bertemu dengan supervisor yang membaca transkrip nilaiku, aku ditanya buku-buku apa saja yang digunakan ketika belajar di STAN. Ternyata banyak buku-buku yang sama yang sudah aku baca dan sudah aku kuasai. Aku disarankan untuk tidak mengambil akuntansi lagi.

Aku akhirnya mengambil *finance and information system*. Aku mengakui karena aku berasal dari SMEP dan SMEA, aku tak punya pengetahuan dasar matematika yang cukup, namun aku belajar matematika secara mandiri di STAN dan berhasil lulus dengan nilai yang relatif lebih bagus. Karena itulah aku percaya diri mendalami masalah *finance* di Australia.

Dalam belajar, ada tantangan terkait dengan matematika dan aku menyadari bahwa tidak punya dasar yang kuat di sini. Oleh karena itu sebagian besar waktu aku habiskan untuk mempelajari ilmu matematika yang banyak digunakan sebagai dasar dalam pengembangan model atau formula di bidang ekonomi dan keuangan. Aku mempelajari algoritma dan matematika yang tidak aku dapatkan di bangku sekolah menengah. Aku pernah ditanya sama *housemate* yang mengambil PhD, “*ngapain* belajar sampai seperti itu?” karena melihat banyak buku matematika bertebaran

di kamar. Aku sesungguhnya belajar sendiri matematika dari tingkat dasar sampai menengah. Ternyata tidak mudah, tetapi kalau berusaha dan tekun ternyata bisa.

Karena tidak boleh mengambil akuntansi, aku mengambil bidang *finance*, termasuk *public finance*. Aku membaca banyak artikel tentang perdebatan kandidat Perdana Menteri antara Paul Keating dan John Howard — keduanya pernah menjabat Menteri Keuangan Australia. Program kedua kandidat itu memang keren. Tugasku sebagai mahasiswa S-2 adalah memberi tinjauan kritis (*critical review*).

Aku pernah ditanya pegawai Kementerian PUPR yang mengambil pendidikan S-3 di Australia. “Sum, *ngapain* klipng artikel berantakan begini?” Aku menekuni pedoman keuangan publik di Australia dan juga Selandia Baru pada 1993 dan 1994. Memang sebagian besar orang tidak terlalu peduli dengan urusan *public finance*. Namun aku tetap belajar dan menekuni *public finance* di Australia. Bagaimana membuat program empat tahun, *medium term*, bagaimana membuat program tahunannya, bagaimana urusan perpajakan dan urusan kesehatannya, sampai akhirnya aku memahami proses anggaran di Australia.

Setelah pulang ke Indonesia, aku dilibatkan dalam tim reformasi keuangan negara. Setelah Indonesia memiliki undang-undang tentang keuangan negara, aku sudah mempunyai bekal yang aku pelajari dari Australia.

Ketika aku menjabat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan, aku membawa tim ke Australia untuk mempelajari *planning and budgeting system* di negara tersebut. Tim beranggotakan dari perumus kebijakan, eksekutor, reviuier, instruktur, dan auditor dengan tujuan agar tim Kemenkeu yang membuat aturan, mengajarkan, mengeksekusi, dan mengauditnya memiliki persepsi yang sama.

Jika dulu aku hanya mempelajarinya dengan cara membaca dokumen dan artikel tentang keuangan negara Australia dan Selandia Baru, setelah jadi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

aku mendiskusikannya langsung dengan para pejabat dan otoritas keuangan Australia.

“Work Hard, Play Hard”

Selama tahun pertama di Australia, aku tidak banyak menghabiskan waktuku di perpustakaan kampus. Aku hanya meminjam buku-buku, dan membawanya pulang ke kamarku. Aku lebih banyak belajar di rumah karena punya bayi yang harus kuurus.

Hubunganku dengan dosen-dosen kampusku di Australia sangat baik, bahkan sampai sekarang pun, kami masih sering berkomunikasi. Banyak dosen di sana yang mengikuti perjalanan karierku di Kementerian Keuangan. Banyak yang tidak lupa padaku karena statusku saat itu mahasiswi S-2 yang hamil. Mereka takjub melihat ada alumnus dari Indonesia yang bisa berkiprah di dunia keuangan — yang tentu tidak mudah. Salah satunya adalah Seamus Fagan dari Divisi *International Education* yang lebih banyak mengajar Bahasa Inggris dan sering berhubungan dengan mahasiswa dari berbagai negara.

Ketika kuliah di Australia, aku sering berkumpul dengan mahasiswa Indonesia yang sedang melanjutkan pendidikan S-2 dan S-3. Tipikal orang Indonesia pada umumnya adalah jika ada acara tertentu seperti Lebaran, biasanya mengundang dosen. Kadang dosen yang gantian mengundang mahasiswa. Apapun acaranya, aku selalu berperan sebagai juru masak.

Di kampus, aku paling rajin membaca buku. Namun bila ada waktu, aku mempraktikkan prinsip *work hard, play hard*. Setiap akhir pekan, aku berusaha untuk jalan dan ngobrol sehingga ada sesuatu yang aku pelajari. Misalnya aku menonton pacuan kuda. Aku mencermati perilaku dan gaya hidup masyarakat setempat. Bila tidak bepergian, aku menikmati pesta akhir pekan di rumah dengan aneka makanan.

Jika memasuki masa liburan kuliah —biasanya selama dua pekan, aku memanfaatkan waktu untuk berlibur ke tempat-tempat

yang belum pernah aku datangi karena bisa saja aku tak punya waktu lagi untuk menjelajahi tempat-tempat tersebut.

Mengandalkan Logika

Pada 2005, aku mendalami masalah ini di Washington, berdiskusi dengan Patricia Dalton. Namun menurutku, untuk belajar tentang anggaran publik, Australia adalah negara paling baik.

Aku selalu mengaitkan pembelajaranku dengan aspek keuangan. Misalnya tentang infrastruktur. Mengapa kondisi jalan di Australia dan Selandia Baru selalu mulus? Ternyata ini berkaitan dengan perilaku (*behaviour*) dan budaya (*culture*). Di negara tetangga, jika ada jalan yang berlubang misalnya, langsung ditambal oleh otoritas yang menangani perbaikan jalan. Sedangkan di Indonesia, umumnya kita menunggu kondisi jalan hancur terlebih dahulu, baru diperbaiki.

Aku seorang yang pragmatis dan selalu memetik pelajaran dari pengalaman negara lain yang lebih maju. Aku tidak terlalu memikirkan teori yang *njlimet*, yang sulit dicerna. Mana yang terbaik untuk pelayanan, itulah yang paling pas untuk dijadikan contoh oleh Indonesia. Ini sama seperti aku melaksanakan audit. Aku mengambil materi *computer audit*, *information system development* hingga materi auditnya, serta model-model pengambilan keputusan dan dasar analisis data. Ketika data mulai beralih ke digitalisasi, ini sangat berguna saat bekerja.

Ketika aku menjabat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenkeu, Menteri Keuangan menginginkan untuk membangun data center dan meningkatkan kapasitas teknologi informasi Kemenkeu, aku ditanya, “Ibu Sum, kita perlu uang Rp 3 triliun, aku minta kamu sisir anggaran yang ada dan realokasi untuk IT Kemenkeu” jadi ini untuk menampung inisiatif baru. Dengan bekerja cerdas dan kerja sama yang sangat baik ternyata dana yang diperlukan dapat disediakan tanpa minta tambahan ke Ditjen Anggaran.

Untuk memperoleh gambaran *integrated financial information system*, aku ke Korea belajar ke BARO, MOSF, NCIA. Jadi aku punya

bekal pengetahuan tidak nol untuk pengembangan digitalisasi di Kemenkeu. Ketika pandemi melanda Indonesia dan dibutuhkan pekerjaan *remote audit*, aku tidak canggung lagi karena sebelumnya juga pernah belajar *computer audit*.

Aku mendapatkan penugasan sebagai pegawai yang terlibat dalam penyusunan regulasi, sistem, maupun *training* di bidang keuangan negara, mengoperasikan sistem pengelolaan anggaran negara hingga menjadi *auditor double*.

Dalam melaksanakan tugas aku selalu menuangkan dalam suatu *framework* yang utuh dengan menggunakan *logic model* berdasarkan teori peraturan, pengalaman, dan praktik terbaik. Aku merasa tidak sia-sia mengambil subyek mata kuliah saat S-2 di Australia untuk melengkapi bekal yang kuperoleh dari STAN, karena semua kontennya benar-benar bermanfaat. Aku belajar tidak sekadar hanya untuk lulus ataupun sekadar mendapatkan angka bagus di ijazah. Tetapi aku meresapi, memetik pelajaran, dan aku yakin suatu hari kelak, ilmu dan pengetahuan yang aku pelajari, akan bermanfaat jika diterapkan di Indonesia.

Pusdiklat Pengawasan di BPKP

Setelah bergelut di dunia auditor, aku diperbolehkan untuk mengajar kembali.

“Kalau kamu mau kembali ke dunia pendidikan dan mau mengajar lagi, kamu mengajar ke Pusdiklat,” demikian saran yang disampaikan kepadaku.

Aku dipindahkan ke Pusdiklat Pengawasan pada tahun 1995. Ketika bertugas di Pusdiklat, aku memiliki lebih banyak waktu, juga sudah memiliki banyak bekal ilmu. Sehingga aku langsung *nge-klik* ketika bertemu dengan orang-orang reformis — yang tergabung dalam Komite Pembaharuan Manajemen Keuangan, yang menyusun cikal-bakal Rancangan Undang-Undang Keuangan Negara.

Saat bertugas di Pusdiklat Pengawasan inilah, aku ditugasi menyusun kurikulum sertifikasi jabatan fungsional auditor. Aku bangga, kurikulum yang aku buat ini sampai titik koma tidak diubah

dan dapat diimplementasikan selama beberapa tahun sampai aku menjabat sebagai Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Kementerian Keuangan. Paling tidak, ada sesuatu yang aku tinggalkan dan bermanfaat bagi profesi auditor.

Akuntansi Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

Antara tahun 2001 dan 2005, aku bertugas di Seksi Pembinaan Akuntansi Pemerintah Daerah, dan menggeluti bidang Keuangan Daerah. Banyak pengalamanku yang menarik untuk diceritakan.

Pada masa itu, Otonomi Daerah menjadi topik menarik bagi banyak daerah di Indonesia. Pasca-reformasi, Indonesia memberlakukan Otonomi Daerah agar masyarakat di daerah lebih leluasa mengatur dan mengurus sendiri daerah masing-masing. Otonomi Daerah diberlakukan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

UU ini mengamanatkan Pemda harus mempertanggungjawabkan keuangan daerah, wajib mempertanggungjawabkan APBD berdasarkan standar akuntansi keuangan negara. Dampak dari UU yang berkaitan dengan Otonomi Daerah ini adalah banyak pemda yang masih gagap memahami esensi undang-undang yang baru dan cara menerapkannya di daerah masing-masing.

Salah satu dinamika daerah yang dibawa ke dalam diskusi tingkat nasional — yang aku ingat adalah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dipecah menjadi tiga kabupaten dan menyisakan persoalan. Pemerintah kabupaten yang lama memiliki perusahaan air minum (BUMD).

Tiga pemda ini berebut fisik bangunan BUMD, ada yang mengambil bangunan kantor, ada yang mau kuasai reservoid dan mata airnya, dan ada yang kebagian saluran irigasinya. Bagiku ini cukup menggelikan karena masing-masing pemda mengklaim, dan bukannya membagi BUMD dengan cara berbagi saham sekian persen.

Dalam otonomi daerah, penyerahan fungsi ke pemerintah daerah diikuti dengan penyerahan sumber pendanaannya. Sumber dana tersebut diberikan dalam bentuk Pendatan Asli Daerah (*tax power sharing*) dan Dana Perimbangan (*tax revenue sharing*). Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah Retribusi Daerah. Bagian Laba BUMD. Pendapatan yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum. Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus. Semua ini diatur dalam undang-undang. Anggaran daerah ini dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masing-masing pemerintah daerah mempunyai kewenangan otonom untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri.

Kemudian ada lagi cerita yang lain yang menarik yaitu pada 2001, ada orang pemda mengejar nelayan yang mencari ikan dengan perahu yang berkeliling di Pulau Madura. Nelayan meminggirkan perahunya. Ada orang yang mengejar nelayan itu mengklaim bahwa ikan-ikan yang ditangkap itu berasal dari wilayah mereka. Ada bupati yang mau dilengserkan ada orang berjudi di alun-alun. Dinamika di daerah terjadi dengan cepat. Banyak peristiwa unik dan aneh yang terjadi. Padahal pada masa itu, pemerintah belum memiliki standar akuntansi sehingga sebenarnya sama-sama tidak tahu, sama-sama masih meraba-raba.

Suatu hari aku dikejutkan oleh atasanku yang membawa laporan keuangan Kabupaten Sragen. Pemkab Sragen membuat laporan realisasi anggaran dengan nama “Neraca”, padahal itu laporan perhitungan anggaran daerah. Aku beranggapan banyak pemerintah daerah yang belum paham dengan Otonomi Daerah dan pelaksanaannya.

Tim Asistensi Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang timbul saat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan membentuk tim asistensi sistem informasi keuangan daerah yang diwujudkan dalam kelompok kerja (pokja). Tim yang anggotanya terdiri dari berbagai instansi ini (di antaranya

dari Kemenkeu, Kemendagri, BPKP) dibentuk dengan Keputusan Menkeu No 355 Tahun 2001.

Awalnya orang tidak mengenalku karena tugasku di Pusdiklat Pengawasan BPKP. Dalam suatu rapat, Andi Very Dharma yang mengenalku menyampaikan usul, “Kalau soal akuntansi, sebaiknya Mbak Sumiyati diajak bergabung dalam tim ini.” Akhirnya saya dihubungi dan bergabung di tim yang ditugasi untuk mengembangkan sistem akuntansi keuangan daerah.

Sejak dulu, aku sudah menyenangi akuntansi, mendalami keuangan negara, dan keuangan daerah. Aku mempelajari anggaran negara, format pelaporan, sampai pengungkapan. Namun aku belum pernah mengimplementasikannya. Ketika mendapatkan kesempatan ini, aku tinggal menulis tentang pendapatan, belanja, penerimaan, pengeluaran, sisa lebih anggaran atau tekor. Semuanya langsung mengalir, tanpa beban. Aku betul-betul bersemangat mengerjakannya dengan serius.

Aku mencoret-coretnya dengan tulisan tangan. Setelah tampak polanya akhirnya dikerjakan bersama dengan tim, diketik, baru terlihat hasilnya, sampai akhirnya menjadi buku panduan bagi pemerintah daerah untuk menyusun sistem akuntansi bagi pemerintah daerah.

Akar dari otonomi daerah ini adalah reformasi 1998-1999. Bisa dibayangkan betapa keuangan daerah “meledak” dari anggaran “hanya” Rp 10 miliar misalnya, mendadak menjadi Rp 350 miliar, bahkan ada yang mencapai Rp 1,5 triliun. Banyak pejabat tidak siap melihat anggaran daerah yang sangat besar. Semuanya diatur oleh undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya hingga peraturan gubernur, bupati, dan walikota.

Di satu sisi, pemerintah daerah sangat membutuhkan sistem pengelolaan keuangan daerah, namun Pemerintah Pusat tidak bisa ikut campur karena dibatasi oleh undang-undang. Apa yang kami persiapkan melalui buku panduan hanya menjadi referensi utama, sebagian besar menggunakan pola yang sudah ada, sebagian mengikuti sistem yang dibuat institusi pendidikan seperti UGM, juga dosen perorangan.

Di Indonesia, karena kewenangan pengembangan sistem untuk pemerintah daerah ada di kepala daerah, maka akhirnya ada beberapa sistem yang digunakan. Ini merupakan suatu pengalaman yang kurang elok, karena setiap tahun Pemerintah Pusat harus repot dalam konsolidasi fiskal. Harus dilakukan pemetaan untuk semua daerah agar dapat dikonsolidasikan. Ini menjadi *lesson learned* yang sangat mahal. Sistem akuntansi tidak disiapkan secara nasional. Masing-masing pemda menyiapkan sendiri dan menggunakan uang rakyat. Padahal idealnya 600-an pemerintah daerah tidak perlu membuat sendirian cukup ada satu sistem dipakai oleh semua pemerintah daerah.

Tiada Hari Tanpa Sosialisasi, Sibuk Berkeliling Daerah di Indonesia

Dapat dibayangkan betapa sibuknya aku sebagai orang yang tahu tentang keuangan daerah. Aku berkeliling ke setiap daerah di Indonesia, memenuhi permintaan sosialisasi keuangan daerah yang tak henti-hentinya. Aku dan semua tim membuka kelas di mana-mana karena semua pejabat di daerah membutuhkan informasi tentang keuangan daerah. Permintaan sosialisasi atau pelatihan terus berdatangan dari berbagai pemerintah daerah, bis ke Kementerian Keuangan, BPKP, Kementerian Dalam Negeri, LAN, perguruan tinggi, namun karena jumlah orang yang memahami masih sangat terbatas maka akhirnya permintaan tersebut banyak mengalir ke kami.

Kegiatan demikian ini berlangsung sejak aku masih bekerja di BPKP hingga sudah pindah ke Badan Akuntansi Keuangan Negara atau BAKUN, menjadi Kepala Seksi Pembinaan Keuangan Daerah. Tugas utamaku di sana adalah melakukan pembinaan akuntansi pemda, Namun ternyata permintaan dari pemda tentang pengelolaan keuangan daerah sangat beragam, ada permintaan materi keuangan negara/daerah, penyusunan anggaran, perbendaharaan, sistem akuntansi, standar akuntansi, laporan kinerja, hingga cara membaca laporan keuangan, baik untuk para kepala daerah, anggota DPRD,

kepala dinas, para pegawai, hingga anggota DPRD, DPD, serta para dosen di berbagai perguruan tinggi.

Benar-benar tiada hari tanpa sosialisasi. Permintaan sangat banyak, termasuk dari perguruan tinggi. Padahal stafku hanya lima orang. Aku seperti “dosen terbang”. Setiap hari aku harus mendatangi berbagai daerah untuk memaparkan seluk-beluk keuangan daerah. Karena banyaknya permintaan, akhirnya kami membentuk *task force*, yang anggotanya tidak hanya di Badan Akuntansi Keuangan Negara, tetapi juga dari Ditjen lain. Kami sudah menyusun buku panduan, dan juga sudah mempersiapkan modul-modulnya.

Jangan membayangkan modul-modul pengajaran yang sudah canggih seperti di BPPK saat ini. Semua maunya serba instan, tanpa belajar akuntansi bertahun-tahun mereka berharap bisa menyusun laporan keuangan. Berbekal pengalaman sebagai pengajar di berbagai perguruan tinggi, maka pelatihan dilakukan dengan *learning by doing*. Pembelajaran menggunakan bahasa awam karena pesertanya beragam, ada lulusan ekonomi, sosial, SPG, STM, MAN, dan lain-lain. Pembelajaran diawali dari konsep, regulasi, sistem akuntansi, praktik akuntansi sejak APBD diketok, alokasi anggaran ke dinas-dinas, proses permintaan pembayaran, pengeluaran uang dari kas daerah, penerimaan dana transfer dari APBN, penyeteroran pendapatan dan seterusnya. Semua transaksi keuangan lengkap sehingga di akhir pembelajaran dapat dihasilkan prototipe laporan keuangan.

Dengan mengerjakan proses akuntansi secara lengkap, membuat jurnal, mencatat di buku besar, bagaimana membuat neraca lajur, dan menuangkannya dalam format laporan keuangan yang benar, setidaknya mereka tahu dan punya bayangan alurnya seperti apa, dan tidak asal comot.

Bagiku, memberikan pelatihan tentang keuangan daerah bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia merupakan keasyikan tersendiri. Untuk menyiasati khalayak yang level kompetensinya berbeda-beda, aku sudah menyiapkan kunci jawaban. Dengan menggunakan trik seperti itu, bahan ajarku dapat dimengerti

banyak orang. Untuk melayani berbagai pertanyaan, ponselku terus menyala.

Pelatihan yang melibatkan eselon I sampai tenaga pelaksana itu ditutup oleh pengajar yang memahami konteks tentang keuangan daerah. Itu salah satu caraku untuk memperbanyak instruktur karena tidak sempat menggelar *Training of Trainer* (TOT). Aku mengajar didampingi banyak orang. Aku mencoba agar ada yang bergantian mengajar. Kalau sudah ada yang bisa dilepas, aku membawa junior-junior lainnya sehingga permintaan pelatihan tentang keuangan daerah dapat dipenuhi. Aku menerapkan sistem *learning by doing*.

Memang ini berbeda ketika aku bertugas sebelumnya di BPKP. Saat itu aku juga tenaga pelaksana. Namun BPKP mempunyai perwakilan di daerah. Hampir semua tenaga BPKP adalah akuntan lulusan STAN — yang mampu melakukan pendampingan di lapangan sampai orang-orang di daerah mampu menyusun laporan keuangan dengan benar. Kami memfokuskan diri pada sosialisasi tentang akuntansi keuangan daerah, mengikuti perkembangan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Inilah yang aku bawa hingga ke ujung pulau terluar Indonesia dan ke pedalaman Indonesia. Kadang dalam satu trip, aku melakukan perjalanan sekaligus ke beberapa daerah. Misalnya, tak hanya ke Medan, aku juga melanjutkan perjalanan ke Danau Toba dan Sibolga. Kami “menyapu” semua daerah agar pejabat-pejabat di sana memahami akuntansi keuangan daerah. Aku berada di garda terdepan bersama Pak Mulia Nasution dan Pak Sonny Loho. Kadang peserta pelatihan berasal dari beberapa kabupaten. Jika itu yang terjadi, para pengajar tak hanya dari Departemen Keuangan, tetapi juga Depdagri dan BPKP. Para pejabat eselon I dan II ikut turun ke lapangan, memberikan pelatihan.

Hasil Pelatihan: Banyak Daerah yang Dapatkan Opini WTP

Bagiku, ini sesuatu yang menarik. Aku mengikuti perkembangan laporan keuangan berbagai daerah. Hasil pelatihan ini

menggembirakan karena cukup banyak daerah yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion*. Ini berarti Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Sebelumnya, banyak uang besar yang tidak bisa di-*track*, dan uang itu habis begitu saja tanpa dapat dipertanggungjawabkan.

Saat menyelesaikan pendidikan S-2 di Australia, aku juga mendalami anggaran negara di Australia, antara lain mulai belajar penganggaran berbasis kinerja, *value for money*, dan arsitektur informasi kinerja. Namun penganggaran berbasis kinerja belum diterapkan di Indonesia. Saat aku dilibatkan dalam Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK), aku merasa itu saat yang tepat untuk menerapkannya, bersamaan dengan lahirnya Undang-undang tentang Keuangan Negara, dan lahirnya UU tentang Otonomi Daerah. Aku merasa ilmu yang aku dalami, sangat bermanfaat.

Saat itu memang belum banyak yang mendalami anggaran negara seperti yang aku pelajari di Australia. Selama ini orang belajar akuntansi hanya urusan debit-kredit, tambah-kurang. Tetapi begitu masuk ke masalah penganggaran, hanya orang-orang tertentu yang memahaminya lebih jauh. Ini karena tidak banyak akuntan yang mendalami penganggaran negara, memahami teknisnya seperti apa. Pada umumnya banyak yang melompat dari makro ekonomi langsung ke teknis, dan belum begitu memperhatikan tentang konsep *value for money* secara detail dan terstruktur.

Ketika ada permintaan pelatihan tentang penganggaran daerah, aku merasa aku orang yang beruntung karena memahami seluk-beluk keuangan negara dan keuangan daerah. Aku dituntut untuk mengajar banyak orang. Situasi dengan tekanan yang sangat tinggi ini benar-benar menempaku. Aku harus menjelaskan bahwa keuangan negara dan keuangan daerah membutuhkan akuntabilitas, baik *financial accountability* maupun *performance accountability*, dan transparansi.

Selain itu, aku harus menghadapi kaum oportunis yang tidak paham tentang keuangan negara dan daerah, tetapi memanfaatkan situasi untuk kepentingan sendiri. Tantangan lainnya, kapasitas sebagian besar pengajar masih sangat terbatas dan belum memiliki pengalaman dalam melakukan implementasi.

Selain itu, lingkungan pemerintah daerah berbeda dengan Pemerintah Pusat. Banyak pemda berjalan sendiri-sendiri karena pada dasarnya mereka memang tidak atau belum mengerti. Dari sisi legal, pemda dituntut mandiri, tetapi mereka belum siap. Ketika diberi tahu bahwa apa yang dikerjakan harus berdasarkan undang-undang, yang menjadi persoalan adalah pejabat pemda pun tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Sementara itu dosen-dosen di perguruan tinggi hanya memberi teori tanpa pernah praktik.

Alhasil, kami harus mengajar di berbagai perguruan tinggi seperti di UI dan Unpad. Pada 1995, aku pernah mengajar mata kuliah “Akuntansi Komersial” atau “*Financial Accounting*”, tetapi setelah tahun 2000, aku mengajar mata kuliah “Akuntansi Pemerintahan”.

Aku merasa upayaaku dan kawan-kawan memperkenalkan akuntabilitas dan transparansi untuk Indonesia berhasil. Banyak yang makin memahami perlunya pertanggungjawaban keuangan negara yang benar. Sebelumnya masyarakat Indonesia tidak mengenal laporan keuangan, kini orang satu republik ini mulai mengerti. Awalnya banyak yang hanya menyusun perhitungan anggaran dan memberi catatan laporan keuangan sebagai “neraca” padahal isinya bukan seperti yang dimaksud.

Aku sebagai seorang eselon empat yang punya beberapa staf pernah diminta pemda menggelar pelatihan satu bulan penuh. Aku merasa tertantang untuk membuat materi, melakukan *transfer of knowledge*, mengajari mereka bagaimana mengajar orang lain, menulis modul, melakukan evaluasi, sekaligus menyampaikan komunikasi publik dan komunikasi politik. Ini menjadi sesuatu yang penting karena mereka harus menghadapi bupati, walikota, dan DPRD. *Coaching* dan *mentoring* serta *monitoring* dan evaluasi dilakukan bersamaan untuk mendapatkan manfaat maksimal, sangat menantang dan ternyata bisa dilaksanakan.

Gubernur yang pertama memintaku mengajar di wilayahnya adalah Fadel Mohammad, saat itu Gubernur Gorontalo. Pak Fadel sangat bersemangat. Materi ajarku disiarkan langsung oleh RRI Gorontalo dengan tujuan agar masyarakat Gorontalo juga mengetahui dan memahami keuangan daerah.

Mesin “Speedboat” Mati di Laut sampai Mandi dengan Air Bercampur Minyak

Pengalamanku saat melakukan perjalanan ke berbagai daerah menarik untuk diceritakan. Misalnya ketika kami melakukan perjalanan dari Tarakan ke Nunukan, mesin *speedboat* mati di tengah laut. Beberapa orang sudah pucat. Tetapi aku tenang-tenang saja, berdoa, dan tidak boleh panik.

Demikian pula ketika melakukan perjalanan ke Larantuka, kota kecamatan yang menjadi kota kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Dari Maumere ke Larantuka, tak ada satu pun warung yang terlihat. Tak ada yang menjual minuman. Listrik padam, sehingga kami harus menggunakan lilin sebagai penerang. Untuk mandi, warga harus mengangkut air dengan ember dari sumur. Demikianlah kondisi daerah terpencil di NTT.

Ketika mengunjungi Amuntai di Kalimantan Selatan bersama Pak Syafrie Adnan Baharuddin, kami menghadapi kenyataan banyak warga kesulitan air bersih. Permukaan air sungai lebih tinggi dibandingkan daratan sehingga air sungai yang berbau anyir dan bikin gatal inilah yang sering mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat setempat. Di sinilah aku merasakan betapa Amuntai, daerah yang sesungguhnya kaya, namun membutuhkan teknologi agar rakyat di sana dapat hidup layak dan sehat.

Aku juga merasakan “penderitaan” masyarakat daerah di Teluk Kuantan di Riau, yang ketika akan mandi, airnya bercampur dengan minyak! Aku ikut merasakan dan berempati dengan kondisi yang dihadapi masyarakat di sana.

Atau ketika berada di Toli-toli, aku disarankan naik kapal. Namun ketika menunggu kapal pengangkut, saat aku bertanya kapal yang pernah kunaiki, warga setempat memberi tahu, “Oh kapal itu sudah terbakar, Bu.” Juga cerita mobil mogok di tengah hutan karena kehabisan bensin.

Beragam kisah dan cerita dari berbagai pengalaman di berbagai daerah di Indonesia ini aku dapatkan saat bertugas di Keuangan Daerah.

“Kalau Ngasih Mestinya Rela, Kok Masih Dimintai Laporan?”

Tantangan yang aku hadapi membentuk karakter yang kuat agar berani menghadapi audiens dan institusi dalam keadaan apapun, mendorong kami berinovasi secara cepat. Kami harus menghadapi berbagai pertanyaan DPRD di hampir semua daerah di Indonesia. Kadang pertanyaan dan permintaan mereka tak bisa diprediksi. Salah satunya, kami mendapat pertanyaan yang mengejutkan dari DPRD Ternate.

“Pemerintah Pusat sudah memberi duit. Kalau *ngasih*, mestinya ya rela. Tetapi *kok* kami masih dimintai pertanggungjawaban?” tanya mereka. Menanggapi komentar-komentar semacam ini, kami perlu mengolah rasa, menyampaikan komunikasi publik agar pada saat aku memberikan jawaban, mereka bisa menerima penjelasanku.

Pada masa itu, aku masih sebagai eselon IV, masih dianggap “anak baru” dan junior. Namun karena kebutuhan saat itu sangat mendesak dan jumlah tenaga ahli terbatas, aku “dipaksa keadaan” untuk mampu berbicara di depan forum terhormat, di depan para pejabat eselon II dan III. Aku harus siap menggantikan pimpinanku — yang kadang diminta mendadak mendampingi menteri.

Mau tak mau, aku sebagai akuntan yang memahami seluk-beluk keuangan daerah dan keuangan negara yang harus tampil untuk bicara tentang hal-hal yang strategis. Teman-teman dari daerah ada yang bersikap bijak, tetapi banyak pula yang bertanya, “Apa-

apaan ini?” Aku menyadari, membawa perubahan itu memang tidak mudah.

Pada saat bersamaan, aku juga diminta mendampingi Pak Hekinus Manao (alm) ke Amerika Serikat untuk mendalami *performance based budgeting*. Keuangan Daerah membawaku tidak hanya berkeliling Indonesia, tetapi juga keluar negeri. Penganggaran berbasis kinerja menjadi sesuatu yang sangat penting dan perlu diimplementasikan.

Berkomunikasi dengan Pak Hekinus Manao Tanpa Sekat

Pak Hekinus Manao adalah seniorku di STAN. Beliau seorang yang sangat cerdas dan cepat belajar, dan suka mengoleksi buku. Aku pernah satu kantor dengan Pak Hekinus di Pusdiklat Pengawasan BPKP.

Sejak awal aku bertugas di Pusdiklat Pengawasan BPKP, Pak Hekinus Manao sudah memperkenalkan hal-hal yang berkaitan dengan akuntabilitas dan *performance management*. Koleksi bukunya di bidang tersebut cukup lengkap.

“Sumiyati, kau pilih sendiri buku-buku yang ingin kau baca. Kau *copy*, kau pelajari sendiri ya,” kata Pak Hekinus Manao, saat itu Ph.D di bidang akuntansi ² Aku sungguh beruntung mempunyai atasan yang mau berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*), yang bersedia berdiskusi tanpa sekat yang mengganggu.

Dalam seminggu, minimal aku dua kali ke kantor BAKUN, untuk mengakses selain buku-buku koleksi Pak Hekinus Manao, juga

buku-buku koleksi Pak Sugijanto, Pak Partono, dan Pak Sonny Loho. Koleksi buku satu lemari, aku baca semua sampai habis. Kemudahan mengakses dan membaca buku-buku tentang keuangan negara ini membuatku selalu *nyambung* ketika berdiskusi, menuangkan ide untuk membangun sesuatu. Sinergi kami cepat karena langsung *tektokan*. Ketika kami membuat konsep, regulasi sistem, kami langsung *connect*, tanpa perlu menggelar rapat bertele-tele, kami cepat bersinergi karena mempunyai *basic knowledge* yang sama.

Berkomunikasi dengan Pak Hekinus Manao, tak ada sekat birokrasi. Kapanpun, aku bisa berkomunikasi dengan beliau. Dalam melakukan perubahan transformasi, komunikasi antara eselon I, II, III dan IV sangat intens. *Sharing knowledge* juga berjalan dengan sangat baik. Karena itulah *team building* sangat cepat. Segala sesuatu dikerjakan dengan cepat dan nyaman. Itulah yang aku rasakan ketika bekerja di Pusdiklat Pengawasan BPKP hingga di Kementerian Keuangan saat bekerja bersama Pak Hekinus Manao.

Memetakan Tim dan Membangun Komunikasi

Dengan bekal ini, ketika ditempatkan di posisi baru, aku langsung melihat orang-orang di sekitarku seperti apa, mitra dan atasanku seperti apa. Aku memilah-milah dari jenjang pendidikan mereka, S1, S2, S3, D1, D2, SMA, dan gaya mereka seperti apa. Semua aku amati dan pelajari, sehingga akhirnya aku bisa membangun komunikasi dengan memperhatikan *diversity*. Siapa yang bisa menjadi motor untuk suatu penugasan agar anggota dapat terangkut dalam satu perahu.

Aku dan Pak Hekinus Manao terus menjadi mitra. Ketika Pak Hekinus menjabat Direktur Akuntansi di Kemenkeu, aku menjadi Kabag Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Kementerian Keuangan, cakupan sangat besar karena pendapatan perpajakan dan PNBPN ada di Kementerian Keuangan, demikian juga anggaran Bendahara Umum Negara seperti subsidi, pinjaman dan investasi. Kalau hasil kinerjaku bagus, tentu besar kontribusinya ke kinerja

² Dr Hekinus Manao, S.Tr. Ak., MBA., CA lahir di Bawomataluo, Nias Selatan, pada 14 Juli 1956, menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (sekarang Politeknik Keuangan Negara STAN) dalam program Diploma IV Bidang Akuntansi. Hekinus meraih gelar Master of Accountancy dari Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, AS pada 1990; dan meraih gelar MBA dari Cleveland State University (di bidang Major: Accounting dan Minor: Finance & Information Systems) di Ohio, lulus pada 1995. Hekinus Manao pernah menjabat Direktur Eksekutif Bank Dunia pada 2010-2012. Sebelumnya Hekinus Manao pernah menjabat Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu pada 2008-2010; Komisaris PT Kereta Api (Persero); anggota Tim Kerja Dewan Pertimbangan Daerah (2005); Executive Director Ernst & Young Indonesia. Hekinus Manao meninggal dunia di RS Medistra Jakarta Selatan pada 19 Maret 2016 karena sakit, dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, 22 Maret 2016. (Sumber: Wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Hekinus_Manao, dan Kompas.com <https://money.kompas.com/read/2016/03/22/000100826/HariIni.Jenazah.Hekinus.Manao.Dimakamkan.di.San.Diego.Hills>).

Pak Hekinus untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, akan bagus juga.

Kami memiliki akar yang sama. Kami sama-sama memiliki semangat tinggi untuk membangun akuntabilitas dan transparansi. Ketika muncul masalah, kami langsung *tektokan*, saling berkomunikasi dan hal ini terus berlangsung sampai saat beliau menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. “Pak Hekinus, saya membutuhkan tim Bapak. Ada data lapangan seperti ini,” kataku. Demikian seterusnya.

Pola kerjaku di mana pun ditempatkan, selalu mulai dengan melakukan asesmen terhadap kapasitas instansi, *SWOT analysis* biasa aku pakai. Demikian juga ketika bertugas sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. Aku memetakan siapa *person in charge* atau yang menjabat di bidang keuangan, seperti penyusun anggaran, rencana kerja, bendahara, petugas akuntansi, dan petugas barang milik negara, siapa kepala kantor dan sudah pernah mendapatkan pelatihan apa saja, sertifikasi apa saja yang sudah mereka terima. Aku mencocokkan semuanya dengan hasil kerja mereka selama ini. Jika ada yang “merah” dan “kuning”, aku mengirim mereka ke BPPK untuk mendapatkan pelatihan, mulai dari bidang akuntansi, anggaran, sampai pengadaan barang dan jasa. Selain untuk meningkatkan kompetensi pribadi mereka, pelatihan di BPPK juga untuk meningkatkan *output* kerja mereka. Aku berharap mereka membuat rencana kerja anggaran melaksanakan kegiatan, menyusun laporan keuangan yang benar dan tepat waktu. Selain itu tentu aku berharap tak ada temuan-temuan yang janggal dalam laporan keuangan yang mereka buat. Pelatihan-pelatihan di BPPK harus membuat orang mampu bekerja dengan benar.

Demikianlah, setiap kali datang dan bertugas di tempat baru, aku selalu memetakan sumber daya manusia yang ada terlebih dahulu. Siapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) utama, siapa mitra yang bisa diajak lari bersama, dan siapa yang *follower*. Komunikasi yang aku bangun sejak awal tidak terputus begitu saja setelah aku pindah.

Di manapun aku bekerja, aku selalu memelihara komunikasi dengan banyak teman, dari pimpinan hingga ke operator, karena

itulah temanku banyak sekali. Bahkan pernah aku naik bus ke bandara, tiba-tiba tanpa aku ketahui, ada yang membayarku. Bahkan sampai aku bertugas sebagai Irjen di Kemenkeu, orang-orang yang pernah aku ajari pada tahun 2000-an masih menanyakan seputar Keuangan Daerah. Pertanyaan-pertanyaan mereka masih aku jawab.

Pada saat pandemi, berbagai pertanyaan tentang hal yang sama datang dari Aceh sampai Papua. Aku senang menerima pertanyaan-pertanyaan mereka dan langsung menjawabnya satu persatu. Ini berarti mereka bekerja, tetap memiliki semangat belajar. Aku merespon mereka dengan menjaga komunikasi agar apa yang disemaikan dapat tumbuh. Aku mengikuti perkembangan mereka sampai kelihatan hasil.

Ketika menjabat Kepala BPPK, aku harus melayani semua pengelola dan pengguna keuangan negara. Aku harus memastikan bahwa program diklat sudah disiapkan dengan tepat dan mampu meningkatkan kompetensi pegawai maupun meningkatkan kinerja individu maupun organisasi. Oleh karena itu aku pelajari programnya, kurikulum, bahan ajar, metode pembelajaran, metode evaluasi, serta sistem informasi kediklatan.

Mengingat Kementerian Keuangan terus bertransformasi tiada henti, akan sangat berbahaya jika program diklat tidak mengikuti perkembangan. Oleh karena itu metodologi pembelajaran di BPPK harus di-*update* menjadi *corporate university*. Dengan *corporate university* maka BPPK harus bermitra erat dengan unit teknis, terutama eselon 1, *subject matter experts (SMEs)*, *skill group owners*, mengembangkan infrastruktur untuk *training need analysis* serta evaluasi hasil diklat hingga peningkatan kinerja.

Setelah tidak lagi menjadi PNS, aku menjadi Ketua Komite Audit Kemenkeu. Di sini, aku bisa tetap memantau perkembangan terakhir di setiap direktorat jenderal di Kementerian Keuangan. Berbagai persoalan yang tersisa, yang belum terselesaikan, masih dapat aku ikuti, termasuk masalah Keuangan Daerah. Mengapa urusan Keuangan Daerah belum bisa selesai dan tak bisa *smooth*? Karena persoalan ini acapkali berkaitan dengan masalah politik dan otoritas

sehingga tidak bisa direformasi secara ideal, dan ini makan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Setiap Episode Lahirkan Tantangan dan Pengalaman Baru

Selama lima tahun (periode 2001-2006), aku mengurus Keuangan Daerah. Setiap episode melahirkan tantangan baru dan pengalaman baru. Hal-hal yang sebelumnya tidak ada, harus menjadi ada. Aku bangga pernah bertugas di bidang ini, berupaya melakukan transformasi —setidaknya ikut meletakkan dasar-dasar, memperkenalkan Keuangan Daerah sejak awal kepada berbagai pemerintah daerah.

Awalnya pada 2001, aku bertugas di Pusdiklat Pengawasan BPKP, setelah itu pada 2002, aku masuk ke BAKUN. Awalnya aku hanya mengurus Akuntansi, kemudian berkembang ke Penganggaran.

Mengapa aku peduli dengan akuntansi dan penganggaran? Aku merasa penasaran karena pendidikanku sejak menengah sampai pendidikan tinggi dibiayai negara. Aku berpikir, “masak sih keuangan negara tidak dicatat?” Pertanyaanku terjawab setelah negara melangkah ke *double entry accounting*.

Aku membaca laporan keuangan berbagai negara. Apalagi setelah ada internet, aku *googling*, membaca laporan keuangan mancanegara dan itu semua menjadi bahan ajarku. Aku bisa bercerita banyak hal. Biasanya akuntansi pemerintah *boring*, membosankan, dan bikin mengantuk, tetapi setelah aku menerapkan pola mengajar dengan caraku, peserta ajar langsung melek. Aku menyampaikan konsep dan teori seperti apa, regulasi di suatu negara seperti apa, dikaitkan dengan sistem yang berjalan, dan *direction of reform* ke depan seperti apa.

Aku memberi bayangan, jika ingin menjadi PNS, dosen, peneliti, atau terjun ke swasta, konsultan pemerintah, menjadi *vendor*, kira-kira akan seperti apa.

Berbisnis dengan pemerintah tak akan pernah berhenti karena pemerintah tidak pernah dilikuidasi. Sepanjang dunia belum kiamat, tetap ada. Apalagi jumlah pemerintah daerah saat ini 550-an. Ini belum termasuk 87 kementerian/lembaga pusat, 80.000-an desa, yang jika ditotal jumlahnya banyak sekali dan masih terus berkembang. APBN tahun 2022 saja Rp 2.700 triliun. Kalau tertarik pada Keuangan Publik, kita tidak akan pernah berhenti mengajari mereka. Apalagi setiap lima tahun, anggota DPRD berganti. Banyak aspek yang bisa dibedah dan dikerjakan.

“Keuangan Negara” yang berkaitan dengan pemerintah merupakan bisnis yang tak pernah dilikuidasi, mulai dari menyusun perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, pengelolaan aset, pengelolaan pinjaman, Badan Layanan Umum, pengelolaan pendapatan dan lain-lain, membangun sistemnya. Reformasi tak pernah berhenti. Lihat saja McKinsey yang tak pernah berhenti menjadi *vendor* pemerintah. Berapa banyak BLU yang membutuhkan pelatihan tentang Keuangan Negara? Dari segmen *training* saja, tak pernah habis-habisnya, *never ending business*. Belum lagi pegawai dan pejabat yang terus silih berganti karena adanya rekrutmen pegawai, mutasi, sampai pensiun. Semua ini merupakan ladang yang harus terus digarap.

Aku masih melayani pertanyaan beberapa mahasiswa S3 dari beberapa universitas, baik dari Indonesia, Australia maupun Eropa yang memerlukan informasi tentang reformasi manajemen keuangan negara karena referensinya sulit diperoleh dari perpustakaan. Referensi tentang Keuangan Negara di perpustakaan publik masih relatif minim, jadi ada mahasiswa yang sedang mengikuti program S3 menghubungiku malam hari, berdiskusi selama dua jam. Meskipun ada yang tidak kukenal secara personal, namun aku tetap bersedia melayaninya untuk memberi kontribusi.

Membangun Sistem di Direktorat Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Dalam rapat Panja RUU Keuangan Negara, muncul isu banyak rumah sakit yang menolak pasien karena tak punya uang, dan banyak perguruan tinggi sulit bergerak karena dana APBN lambat cair. Kesulitan ini menyebabkan cukup banyak rumah sakit dan perguruan tinggi negeri melanggar ketentuan. Bahkan ada yang berperan sebagai “menteri keuangan” sendiri, memakai uang pendapatannya secara langsung tanpa mempertanggungjawabkannya.

Dinamika ini terjadi antara lain kekakuan aturan dalam APBN atau karena adanya suatu kedaruratan. Seperti mendadak jumlah pasien di rumah sakit membludak tapi bagaimana dengan persediaan obat, alat kesehatan, darah, makanan? Sementara itu bagaimana bila perguruan tinggi tak punya kapur misalnya?

Saat di Rapat Panja dengan DPR, kami diminta memikirkan bagaimana rumah sakit dan perguruan tinggi bisa beroperasi lebih fleksibel sehingga kasus tolak pasien tidak terjadi dan kegiatan belajar-mengajar tidak terganggu.

Pada tahun 2002 itu, kami dari Pemerintah diberi waktu satu minggu untuk mempelajari, bidang usaha kesehatan di institusi pemerintah itu apa saja? Kesehatan itu apa? Ada Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan, Sekolah Kesehatan, rumah sakit, puskesmas. Kalau orang sakit, biasanya datang ke mana? Ke rumah sakit atau Departemen Kesehatan? Pertanyaan tentang institusi pendidikan di bawah pemerintah juga sama.

Akhirnya kami sadar tentang pentingnya pengaturan yang berbeda antara untuk regulator dan operator. Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah regulator yang mengoperasikan rumah sakit (pemerintah dan swasta) dan sekolah. Setelah menemukan hal ekstrem, kami bertanya siapa yang disebut provider pendidikan dan kesehatan? Ada pihak pemerintah dan swasta. Ada juga yang *in between* seperti BUMN, BUMD, Perjan.

Kami berkesimpulan, jika kantor departemen (kementerian) dan kantor dinas menghadapi masalah anggaran, yang terpenting adalah

gaji, listrik, dan air masih menyala, kertas masih tersedia, maka kantor masih bisa berjalan. Tetapi di rumah sakit, jika hanya dokter, dan tenaga kesehatan yang digaji? Rumah sakit dan puskesmas tidak jalan.

Di beberapa negara, ada *autonomous agency* atau badan otonom, yaitu badan yang mengatur diri sendiri yang dibentuk oleh Pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola sendiri keuangan. Berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui oleh instansi pemerintah yang berwenang. Instansi tersebut diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Ini berarti rumah sakit dan universitas, meski statusnya milik pemerintah, sangat dimungkinkan untuk dikelola secara otonom, termasuk keuangannya. Artinya rumah sakit dan universitas tetap bagian dari instansi pemerintah tetapi diberi fleksibilitas. Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Badan Layanan Umum atau BLU, setelah menyiapkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.

Kementerian Keuangan membentuk Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang beroperasi sejak 2006, dan menunjuk Vincentius Sonny Loho sebagai Direktur (2006-2008). Aku termasuk yang dipindahkan di direktorat baru ini sebagai Kepala Seksi (Kasie).

Ada kawan lain dari Ditjen Perbendaharaan yang ditugaskan di direktorat baru ini. “Bu Sum, saya di Kanwil (Ditjen Perbendaharaan) hanya mengurus DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), saya *nggak ngerti* BLU ini apa dan bagaimana kita harus bekerja,” katanya.

“Ayo, kita kerja *bareng*,” kataku. Kami melihat kinerja, mengamati laporan keuangan, tata kelola, mengevaluasi renstra. Semuanya belum pernah kami lihat, tetapi kami harus mampu belajar cepat dan mampu menangani semuanya.

Dengan bekal PP nomor 23/2005, kami harus bisa menyusun peraturan dan standar pengisian keuangan BLU, melakukan penilaian terhadap usulan instansi untuk menjadi BLU. Ada persyaratan yang harus dipenuhi secara substansi, teknis, administrasi. Uji kelayakan

ini dinilai Kemenkeu, apakah layak menjadi BLU, bagaimana dengan kinerja layanan dan keuangannya? Semua perlu pedoman dan kriteria, kalau terpenuhi, baru bisa ditetapkan menjadi BLU.

Kami menghitung berapa jumlah perguruan tinggi negeri, jumlah perguruan tinggi kedinasan, jumlah rumah sakit milik Pemerintah Pusat, berapa di bawah Kementerian Kesehatan, berapa rumah sakit milik Polri dan milik TNI. Berapa aset-aset yang dikelola Sekretariat Negara. Setelah didata, jumlahnya melebihi jumlah BUMN yang ada selama ini.

Yang memahami masalah ini tidak banyak orang — yang sejak awal sering berdiskusi. Kami membandingkan Temasek di Singapura itu seperti apa. Sebagai PNS, kami seumur-umur tidak pernah melakukan *feasibility study*, melihat instansi besar, karena saat itu kami baru belajar tahap awal.

Kami menghadapi 14 rumah sakit besar yang berpotensi menjadi BLU Kemenkes, demikian juga perguruan tinggi besar. Kami mendiskusikan ini dalam durasi yang relatif panjang, yang akhirnya melahirkan pemikiran baru. Bagaimana mengelola institusi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tetap akuntabel dan sesuai ketentuan? Ada institusi yang mundur teratur karena tak mau transparan dan akuntabel, tetapi juga banyak institusi yang berniat maju.

Di Direktorat Pembinaan PK-BLU, kami mengawali bagaimana membangun sistem tata kelola, membangun institusi yang memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan fleksibilitas. Misalnya, pendapatan yang diperoleh boleh digunakan langsung dan tenaga boleh direkrut dari kalangan profesional. Juga pemberian remunerasi *base on professional* namun tak boleh meminta dana APBN; dan kalau punya duit, dana itu boleh digunakan untuk berinvestasi. Institusi diizinkan meminjam uang tetapi pengembaliannya harus dari uang sendiri. Prinsip-prinsip ini yang harus ditegakkan di institusi yang masuk dalam kategori BLU.

Aku sudah mempelajari regulasi dari berbagai negara yang berkaitan dengan badan layanan umum. Aku cukup berselancar di

internet, dan tidak perlu melakukan studi banding satu rombongan yang menghabiskan anggaran negara. Kadang saat membaca rencana strategis suatu instansi yang diusulkan menjadi BLU aku tertawa di dalam hati, orang-orang yang bergelar profesor dan doktor di perguruan tinggi negeri yang pandai mengajar mata kuliah “manajemen strategik”, tetapi ketika diminta membuat renstra instansi sendiri untuk persiapan menjadi BLU, *kok* tidak beres. Ini kritikkku terhadap mereka.

Setiap kali aku dan teman-teman bicara tentang BLU, pelatihan tentang topik ini selalu dipenuhi peserta. Seringkali institusi yang ingin mengetahui lebih jauh tentang BLU, mencariku karena mampu “menguliti” institusi apa adanya, tanpa ditutup-tutupi.

Aku sering bertanya, bagaimana sebuah universitas bisa berkembang jika program-programnya tidak didukung dengan *resources* dan SDM dengan jumlah dan kualitas yang cukup dan semua dikembangkan secara harmonis. Aku selalu melihat sesuatu hal secara komprehensif. Tetapi jika banyak aspek yang tidak *nyambung* dan harmonis, bagaimana perguruan tinggi bisa berkembang?

Aku melihat banyak institusi (rumah sakit dan universitas) yang menampilkan direktur dan rektornya adalah yang bergelar tinggi. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan tidak hanya gelar akademik yang tinggi namun juga perlu kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang bagus. Mengapa sering tidak *connect* satu sama lain, aku melihat kemungkinannya karena penempatan seseorang yang pangkatnya sudah relatif tinggi — dengan gelar profesor doktor misalnya — menjadi pimpinan institusi tetapi melupakan aspek *soft competency, leadership* yang sangat penting untuk mengembangkan suatu organisasi. Situasi ini bisa jadi menyebabkan frustrasi jika pucuk pimpinan adalah figur yang tidak memiliki *leadership* yang baik.

Contoh lain misalnya, dokter spesialis ditempatkan menjadi direktur keuangan atau kepala satuan pengawasan intern rumah sakit, padahal bidang itu bukan kompetensinya, stress semua. Aku berpendapat, seharusnya direktur keuangan rumah sakit

berbasis profesional. Pilih saja profesional ahli keuangan yang mampu menangani bidang keuangan dengan baik, dan tidak perlu memaksakan diri menempatkan dokter atau pejabat yang tidak kompeten di bidang tersebut karena bukan keahliannya.

Setelah banyak rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum, tak ada lagi kabar tentang rumah sakit menolak pasien. Kalau dulu misalkan rumah sakit tak punya uang, “telur dibagi empat.” untuk pasien, sekarang tidak terdengar lagi. Setelah menjadi BLU, kinerja banyak rumah sakit berubah drastis menjadi luar biasa. Jika sebelumnya terseok-seok karena kekurangan dana, kini banyak rumah sakit yang maju dan berkembang.

Sebagai PNS, sebagai regulator, kami melihat dua hal. Dalam pelayanan, kami bisa masuk dari sisi regulasi dan dari kerangka anggaran. Aku melihat tidak semua rumah sakit dibiayai pemerintah. Karenanya kami harus masuk dari sisi regulasi atau anggaran. Mengutip Pak Basuki Tjahaja Purnama, kalau mau mengubah sesuatu, tidak cukup punya duit, tetapi jadilah pejabat dan pembuat aturannya.

Direktorat Pembinaan PK-BLU Bisa Menjadi Direktorat Jenderal Sendiri

Ketika bertugas di Direktorat PK-BLU, aku dan kawan-kawan betul-betul menjiwai semuanya. Sejak bangun tidur, yang keluar di hati dan kepala kami adalah segala sesuatu tentang BLU. Apa “jiwa” BLU? Kami berselancar di dunia maya untuk memahami ini semua.

Penyusun Peraturan Pemerintah tentang Badan Layanan Umum adalah tim yang dipimpin Pak Hekinus Manao. Pelaksanaannya diimplementasikan oleh Pak Vincentius Sonny Loho. Salah satu figur kuat yang melaksanakannya adalah Pak Eduard Nainggolan (saat ini Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalimantan Barat di Pontianak).

Kami membayangkan Direktorat Pembinaan PK-BLU di Kemenkeu dapat menjadi Direktorat Jenderal tersendiri karena mengurus BLU yang jumlahnya sangat banyak. Jika dikelola dengan

benar, manfaat BLU-BLU ini akan dirasakan masyarakat luas. Saat ini jumlah BLU yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Pusat tercatat 250-an.

Ada satu cerita menarik tentang BLU. IAIN Sunan Kalijaga adalah perguruan tinggi yang pertama mengusulkan menjadi BLU. Kami mendatangi kampus IAIN Sunan Kalijaga dan memastikan bahwa semua potensi yang ada sudah diinventarisasi termasuk warung-warung di sekitarnya. Lalu ada yang berkomentar “apa bedanya dengan perguruan tinggi umum?” Kemudian dijawab “Ini kan berbasis Alquran” Artinya semua pelayanan harus berbasis aturan dari Alquran “bagaimana cara menuangkan?” Setelah di *challenge* seperti itu akhirnya mereka menuangkan dalam satu buku standar Pelayanan Minimal yang berbasis Alquran.

Demikian juga, Rumah Sakit Paru Dr HA Rotinsulu di Bandung yang tak punya standar pelayanan. Saat ditantang akhirnya beberapa rumah sakit paru-paru bergabung dan menyiapkan Standar Pelayanan Minimal. Kami memang agak memaksa agar dapat melaksanakan tugas secara akuntabel. Aku dan beberapa kawan lain adalah “anak-anak baru” yang ditantang untuk memberikan ide dan gagasan. Meskipun saat ini peraturan masih terbatas, tetapi kami berani membuatnya. Kami tidak membutuhkan rapat berhari-hari. Kami mengerjakannya sesuai tugas kami di Direktorat PK-BLU.

Ketika STAN diusulkan menjadi BLU pada 2007, muncul pertanyaan, apakah STAN layak dikelola sebagai BLU? Kalau memang menjadi BLU, kemana gerakan STAN? Apakah layanan dan keuangan STAN akan terdongkrak secara signifikan setelah menjadi BLU? Pertanyaan mendasarnya adalah setelah menjadi BLU, apakah STAN akan lebih leluasa bergerak?

Meskipun STAN di bawah Kementerian Keuangan, kami tetap berusaha profesional. Kami melihat sumber daya manusia STAN terbatas, meski ‘lahan bisnisnya’ luar biasa. “Kalau *nyangkul* di lahan tetangga, tetapi lahan sendiri jadi semak-belukar, kan konyol? *Masak* mengajar mahasiswa STAN nantinya menjadi sambilan?” begitu pemikiran kami saat itu.

STAN dibiayai dana APBN. Artinya dari kantong kiri masuk ke kantong kanan. Kalau tak ada pelayanan keluar, dan semuanya berasal dari anggaran dan pendapatan sendiri, mengapa STAN dipaksakan menjadi BLU? Proses STAN menjadi BLU memang relatif lama. Jika akhirnya disetujui, kami berpikir ada potensi besar *line of business*, untuk menumbuhkan unit dan mengembangkannya ke masyarakat lebih luas.

Edward UP Nainggolan

“DITEMPATKAN DI MANA SAJA, BERLIAN TETAPLAH BERLIAN”



Edward UP Nainggolan

Edward UP Nainggolan mengenal Sumiyati untuk kali pertama pada tahun 2001. Saat itu Sumiyati adalah pengajar di Pusdiklat BPKP. Pada masa itu mereka tergabung dalam kelompok kerja (pokja) yang merumuskan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Pokja tersebut beranggotakan pejabat/pegawai dari Kementerian Keuangan dan BPKP. Dari Kementerian Keuangan anggotanya berasal dari Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) dan Ditjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (sekarang Ditjen Perimbangan Keuangan). Anggota dari BAKUN antara lain Edward dan Sonny Loho, sementara dari BPKP salah satunya Sumiyati.

Pada masa itu, satu-satunya peraturan pemerintah (PP) yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya pada era otonomi daerah adalah PP No 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sebelum PP itu terbit, pengelolaan keuangan pemda masih tersentralisasi dan menggunakan Manual Keuangan Daerah.

Setelah itu terbit Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan APBD — yang menjadi pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah menggantikan Manual Keuangan Daerah.

Dari interaksi yang sangat intens dengan Sumiyati, Edward menilai Sumiyati seorang mentor, rekan kakak, panutan, sekaligus orangtua. Sumiyati pakar di bidang akuntansi termasuk akuntansi pemerintah. Sejak sekolah menengah pertama, sampai kuliah di STAN, Sumiyati menggeluti

akuntansi sehingga sering dijuluki sebagai “kamus berjalan” di bidang akuntansi dan auditing.³

Setelah lulus D-3 STAN pada 1994, dan bekerja selama tiga tahun, pada 1997, Edward melanjutkan kuliah di STAN dan lulus pada 1999. Pada 1999-2004, Edward bekerja di BAKUN. Pada 2004, BAKUN dibubarkan dan masuk ke Ditjen Perbendaharaan.

Edward dan Sumiyati terlibat bersama menyusun Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). Sumiyati salah satu motor penggerak yang paling memahami akuntansi pemerintah karena pada masa itu belum banyak yang memahami akuntansi pemerintahan. Dia salah satu anggota yang menyusun SAKD — yang kemudian bermetamorfosa menjadi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah)⁴. BPKP mengembangkan SIMDA dan diterapkan di pemerintah daerah sampai sekarang.

Sosialisasi Keuangan Daerah ke Berbagai Daerah di Indonesia

Kebersamaan Edward dengan Sumiyati sejak awal tahun 2000 membuatnya menyerap banyak ilmu dari beliau. Pada Oktober 2002, setelah Sumiyati pindah ke Badan Akuntansi Negara Kemenkeu sebagai Kepala Seksi, Edward bawahannya sebagai Koordinator Pelaksana. Di sini, mereka banyak berinteraksi dan bersama-sama melakukan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah ke berbagai daerah terpencil di Indonesia. Pada masa itu, otonomi daerah baru di mulai dan pemerintah daerah belum memahami dengan baik pengelolaan keuangan sesuai praktik yang berlaku umum (*best practices*)

3 Diolah dari wawancara penulis dengan Edward UP Nainggolan, saat ini Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kalimantan Barat, 16 Juli 2022 melalui Zoom. Edo — nama panggilannya — pernah menjadi staf Sumiyati ketika di Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) dan di Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan; serta pernah menjadi rekan kerja Direktorat Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai sesama Kepala Seksi.

4 Sesuai peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat diandalkan (reliable), yaitu sistem yang mampu mengolah data-data (input) dan menghasilkan informasi (output) yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri tersebut menjelaskan siklus keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Selain itu juga disajikan sistem dan prosedur keuangan daerah beserta contoh-contoh formulir yang bisa digunakan oleh pemda baik secara manual maupun terkomputerisasi (computerized). Penyajian laporan keuangan dalam permendagri ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). (Sumber: <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/334/Sejarah-SIMDA.bpkp>)

Puluhan kali Edward mengunjungi daerah di Indonesia bersama Sumiyati. Ketika mereka dalam perjalanan ke daerah, Sumiyati selalu menceritakan masa kecilnya di desa sebagai anak petani penggarap di Sragen. Dia lahir ketika ayah dan ibunya mulai memasuki usia lansia. Meskipun orangtuanya sangat sederhana, tetapi memiliki visi jauh ke depan dengan mempersiapkan masa depan Sumiyati dengan baik.

Banyak pengalaman menarik ketika mereka ke daerah untuk melakukan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah. Pernah Edward dan Sumiyati berangkat dari Manado ke Sangir Talaud dengan kapal kayu selama 11 jam mengarungi laut lepas. Mereka berangkat dari Manado pukul tujuh malam dan tiba di Sangir Talaud pukul enam pagi. Mereka melakukan pelatihan pengelolaan keuangan daerah, menyusun APBD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan mempertanggungjawabkannya kepada legislatif dan eksekutif. Pulang dari Sangir ke Manado juga menggunakan kapal kayu. Waktu itu, yang ada di pikiran Edward dan Sumiyati adalah bagaimana melatih SDM pemda sehingga dapat mengelola keuangan dengan baik..

Salah satu pengalaman menarik, ketika mereka ke Toli-toli, naik pesawat baling-baling. Karena angin kencang, pesawat terbawa angin sehingga melewati Toli-Toli, dan pesawat akhirnya harus memutar lagi untuk bisa mendarat di Toli-Toli. Pulang dari Toli-Toli, mereka menempuh jalan darat melintasi Gunung Tinombala. Ketika tengah malam, mereka harus melewati pos jaga yang dikawal penduduk setempat.

Beberapa daerah yang juga mereka kunjungi dan berkesan antara lain Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapi-api, dan Kabupaten Kuantan Singingi di Provinsi Riau. Khusus untuk Kabupaten Kuantan Singingi, waktu itu baru berdiri sehingga SDM yang mengelola keuangan daerah masih minim. Kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Edward, Sumiyati, dan lainnya yang berupaya meningkatkan kualitas SDM di pemerintah daerah yang baru berdiri atau melaksanakan otonomi daerah.

Dari sisi pengetahuan, Edward menilai Sumiyati sangat menonjol di bidang akuntansi, auditing dan manajemen keuangan. Hal ini menyebabkan Sumiyati cepat beradaptasi terhadap perubahan manajemen keuangan baik di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Karena pengetahuan Sumiyati yang sangat luas dan dalam, julukan yang disematkan kepada beliau adalah “kamus berjalan”. Di samping itu, Sumiyati adalah pengajar yang terbaik yang pernah Edward kenal karena dapat menyampaikan

materi yang baru dan sulit dengan cara dan bahasa sederhana sehingga audiens dengan mudah memahami yang disampaikan.

Karena pengetahuan Sumiyati yang mendalam dan luas serta kemampuan mentransfer pengetahuan yang sangat baik, dia sering menerima banyak undangan menjadi pembicara atau narasumber. Sumiyati sering melibatkan Edward dalam kegiatannya dengan tujuan untuk transfer *knowledge* sekaligus mengkadernya — yang secara langsung dapat menyerap ilmu, baik itu pengetahuan yang disampaikan, cara mengajar yang baik, serta karakternya yang ramah, jujur, sederhana dan penuh perhatian.

Edward menilai Sumiyati seorang yang mempunyai pengetahuan yang komplet tetapi belum mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi secara optimal sesuai kompetensinya pada saat itu. Mulia Nasution, Kepala BAKUN saat itu melihat potensi Sumiyati dan memintanya membantu dalam penyusunan tiga paket RUU di bidang Keuangan Negara yaitu RUU tentang Keuangan Negara, RUU tentang Perbendaharaan Negara dan RUU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah

Sumiyati pindah dari BPKP ke BAKUN Kemenkeu pada Oktober 2002. Era sesudah diterbitkannya tiga paket UU di bidang Keuangan Negara yaitu RUU tentang Keuangan Negara, RUU tentang Perbendaharaan Negara dan RUU tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, merupakan era reformasi manajemen keuangan pemerintah termasuk akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

Sumiyati salah satu yang berperan dalam reformasi akuntansi pemerintah dengan terlibat langsung dalam pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) sebagaimana diamanatkan UU Keuangan Negara. KSAP membantu Pemerintah dalam memformulasikan dan merumuskan prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (*best practices*).

Sesudah KSAP terbentuk, Sumiyati terlibat langsung di KSAP sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) yang membantu pimpinan KSAP dalam merumuskan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Buletin Teknis SAP, Interpretasi SAP dan produk KSAP lainnya. Sumiyati sangat aktif

memberikan masukan-masukan yang sangat substantif dan menjadi salah satu motor penggerak KSAP. Sosok Sumiyati menjadi salah satu rujukan utama dalam pembahasan SAP dan produk KSAP lainnya karena sangat menguasai ilmu akuntansi dan pengetahuan lainnya yang menunjang dalam perumusan SAP. Di samping itu, Sumiyati juga memahami praktik pengelolaan keuangan Negara termasuk akuntansi.

Sesudah beberapa tahun menjadi anggota Pokja KSAP, Sumiyati diangkat menjadi anggota KSAP dan menjadi Ketua KSAP sampai sekarang (2022). Keanggotaan KSAP ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres).

Sebagai salah satu *milestone* dalam sistem pelaporan dan akuntansi Indonesia, pada tahun 2005 diterbitkan Peraturan Pemerintah No 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan sistem akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Di samping itu, SAP juga menjadi salah kriteria bagi BPK RI dalam melakukan audit dan pemberian opini terhadap laporan keuangan pemerintah.

Ketika Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pertama kali diterbitkan tahun 2005 untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2004, Pemerintah belum mempunyai standar akuntansi dan sistem akuntansi yang berlaku umum. Hal inilah salah satu yang menyebabkan LKPP tahun 2004 mendapat opini *Disclaimer* dari BPK RI.

Ketika SAP diterbitkan, Sumiyati menjabat Kepala Seksi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Edward salah satu stafnya. Dengan adanya SAP tersebut, Sumiyati dan Edward sebagai salah satu stafnya aktif untuk melakukan sosialisasi SAP ke pemerintah daerah. Di samping itu, mereka juga membuat prototipe sistem akuntansi pemerintah daerah dan memberikan pelatihan ke pemerintah daerah.

Direktorat Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Dalam melaksanakan reformasi manajemen keuangan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UU No.1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU). Konsep Pengelolaan Keuangan BLU merupakan implementasi *Reinventing Government* (Osborn dan Gaebler) dengan konsep *enterprising the*

government (meng-wirauasakan pemerintah). Satuan Kerja BLU diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dengan melaksanakan praktik bisnis yang sehat yaitu produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan debirokratisasi.

Untuk mengawal implementasi BLU, pada tahun 2006 dibentuk direktorat baru yaitu Direktorat Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Direktur pertama PK-BLU adalah Sonny Loho (yang di kemudian hari menjabat Inspektur Jenderal, dan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan). Sumiyati dan Edward dimutasi secara resmi dan sama-sama menjabat Kepala Seksi pada Direktorat tersebut pada Februari 2007, walau Edward sejak November 2006 telah ditugaskan untuk membantu Direktur PK-BLU pada waktu itu.

Meski secara langsung Sumiyati tidak terlibat dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dia sangat memahami konsep BLU dan terlibat langsung dalam penyusunan ketentuan-ketentuan teknis BLU terutama melalui penerbitan beberapa Peraturan Menteri Keuangan.

Peran Sumiyati dalam penyusunan ketentuan teknis BLU sangat menonjol karena BLU menerapkan konsep korporasi. Saat itu masih jarang pejabat/pegawai Direktorat PPK-BLU, Ditjen Perbendaharaan dan Kemenkeu yang memahami manajemen keuangan korporasi dan konsep BLU. Pada tahun-tahun pertama di Direktorat PPK-BLU, banyak ketentuan yang diterbitkan sebagai fondasi dalam implementasi BLU di Indonesia. Sumiyati salah satu tokoh yang mengembangkan BLU.

Pendidik Terbaik yang Lakukan “*Transfer of Knowledge*”

Suatu ketika, pada saat sibuk bertugas sebagai Kepala Seksi di Direktorat PK-BLU, pada tahun 2007, Sumiyati ditelepon Sekjen Kemenkeu Mulia Nasution.

“Siapa yang menelepon, Bu?” tanya Edward.

“Pak Mulia yang menelepon. Aku diminta ke Sekretariat Jenderal, menjadi Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,” kata Sumiyati. Mulia Nasution tahu persis kemampuan dan kapasitas Sumiyati. Secara usia, Sumiyati sudah senior dan kemampuannya luar biasa, namun pada tahun 2007, Sumiyati masih kepala seksi. Sebagai stafnya, dan sama-sama

telah menjadi kepala seksi pada waktu itu, Edward merasa perjalanan karier Sumiyati lambat.

“Ibu Sum ambil saja. Ibu pasti berkembang di sana,” kata Edward memberi saran.

Suatu hari pada pertengahan 2007, mereka melakukan sosialisasi tentang BLU di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sumiyati diminta segera kembali ke Jakarta, untuk dilantik menjadi Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Sejak itulah karier Sumiyati melejit.

Edward mengibaratkan Sumiyati seperti mutiara atau berlian yang meskipun ditempatkan di lumpur sekalipun, tetap memancarkan kemilau mutiara dan berlian. Sumiyati tidak pernah mengeluh tentang jabatan beliau yang tersendat, tetap fokus untuk memberikan yang terbaik. Walau jabatan kepala seksi, tetapi dia berperan di mana-mana dan menjadi narasumber utama terkait dengan manajemen keuangan pemerintah termasuk pemerintah daerah.

Edward menilai Sumiyati sangat pintar, tidak pelit dalam membagi pengetahuannya, sederhana, dan penuh perhatian. Karena kepintarannya, banyak yang menjulukinya sebagai “kamus berjalan”. Karier Sumiyati agak sedikit terlambat karena menjadi kepala bidang pada usia 46 tahun. Namun setelah Sumiyati di Setjen Kementerian Keuangan menjadi Kepala Bagian, kariernya terus melejit. Tidak lama sesudah Kabag, Sumiyati menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan terakhir menjadi Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan.

Ada satu yang menarik ketika Sumiyati mengikuti *bidding* jabatan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Pada saat itu, ada tiga jabatan yang lowong yaitu Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Pajak, dan Kepala BPPK. Edward mendengar, Sumiyati memenuhi persyaratan untuk ketiga posisi jabatan tersebut. Namun Sumiyati lebih memilih Kepala BPPK sesuai *passion*-nya yaitu pengajar.

Setahu Edward, sejak tamat dari STAN, Sumiyati menjadi Asisten Dosen, dan pengajar dan pendidik yang sangat baik melakukan *transfer of knowledge*.

Bagi Ibu Sumiyati, Semua Orang Spesial

Hubungan Edward dengan Sumiyati tidak sebatas hubungan pekerjaan. Pada saat-saat tertentu, Sumiyati menunjukkan sosok keibuannya — yang menyentuh rasa kemanusiaan. Pada 2015, Edward terserang penyakit demam berdarah dengue (DBD). Ketika itu Edward menjabat Kasubdit di Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dan Sumiyati Kepala BPPK Kementerian Keuangan. Sekitar pukul 15.00, Sumiyati menelepon Edward, pada saat dia terbaring lemah di UGD RS Premier Bintaro. Edward sangat *surprise* dan kaget karena tidak ada seorangpun yang tahu bahwa dia sakit kecuali asisten rumah tangga.

“Edo, siapa yang mengurusmu sakit?” tanya Sumiyati di seberang telepon. Dia tahu istri Edward sedang kuliah mengambil program doktoral di Australia.

“Tidak ada Bu, saya sendiri di rumah sakit,” jawab Edward dengan jujur.

Tiba-tiba sekitar jam lima sore, seorang staf BPPK yang juga sahabat Edward, datang ke IGD RS untuk menjaga dan membantunya.

“Kamu diminta Bu Sum ya?” tanya Edward spontan kepada staf Sumiyati itu.

Temannya hanya tersenyum dan tertawa. Staf tersebut membantu Edward sampai dipindahkan ke ruang rawat inap. Sesudah dipastikan Edward “aman”, staf Sumiyati pulang dari RS.

Esoknya, Sumiyati memberikan kejutan lagi dengan mengunjungi Edward di rawat inap RS Premier Bintaro. Edward merasakan perhatian Sumiyati seperti seorang ibu kepada anaknya pada saat itu. Walau Edward tidak lagi secara langsung bekerja dengan Sumiyati dan Sumiyati sudah menjadi pejabat eselon I sebagai Kepala BPPK Kementerian Keuangan, sementara Edward eselon III, tapi perhatian Sumiyati tidak pernah berubah. Suatu keutamaan yang luar biasa dan patut dicontoh.

Sebelumnya, pada tahun 2005, ketika ayah Edward sakit kanker *multiple myeloma*, perhatian Sumiyati sangat luar biasa. “Ibu Sum tahu, saya sebagai anak laki dari suku Batak wajib mengurus orangtua. Ibu Sumiyati juga mengetahui kecintaan saya kepada kedua orangtua tua saya, seperti halnya Ibu Sum yang juga sangat mencintai orangtuanya. Saya waktu itu harus merawat dan mengobati orangtua yang biaya pengobatannya besar,” cerita Edward Nainggolan.

“Ibu Sum tidak memberi saya uang, tetapi saya menjadi narasumber. Dari honor sebagai narasumber pembicara itulah, saya bisa mengobati orangtua saya di rumah sakit swasta yang biayanya sangat mahal. Berapapun uang yang saya keluarkan, bisa saya tanggulangi karena bantuan Ibu Sumiyati melalui penugasan saya sebagai narasumber,” lanjut Edward.

Pada 21 September 2006, kondisi ayah Edward kritis.

“Bagaimana kabar bapakmu, Edo?” tanya Sumiyati.

“Kritis, Bu. Bapak tidak sadar,” jawab Edward. Ketika itu mereka sedang betugas ke Bangka. Begitu mereka tiba di bandara di Pulau Bangka, saudara Edward menelepon dan melaporkan bahwa kondisi ayahnya sudah sangat kritis. Sumiyati memerintahkan Edward segera pulang. Setibanya di rumah sakit, ayah Edward mengembuskan nafas terakhir. Edward masih sempat bertemu dengan ayahnya pada detik-detik terakhir hidupnya.

“Sungguh dua pengalaman pribadi ini menunjukkan sosok keibuan dan kepedulian Ibu Sumiyati. Perhatian dan kepedulian Ibu Sumiyati seperti itu, bukan hanya kepada saya karena bagi Ibu Sumiyati, semua orang spesial,” ungkap Edward Nainggolan.

Pemimpin Berintegritas

Suatu saat Edward menjadi Kakanwil Ditjen Perbendaharaan di Maluku Utara. Datang tim Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk melakukan pemeriksaan di KPPN Ternate. Karena salah satu auditor Inspektorat Jenderal tersebut adalah sahabat Edward, dia mengajak makan malam. Namun sahabatnya menolak.

“Kami auditor Inspektorat Jenderal tidak boleh diajak makan keluar kantor oleh auditee,” katanya.

“Kamu saya ajak makan sebagai sahabat bukan sebagai auditor,” kata Edward.

Sahabatnya tetap menolak. Karena merasa kurang puas, Edward langsung menelepon Sumiyati yang saat itu menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

“Ibu Sum, saya mengajak kawan saya makan tetapi dia menolak. Katanya auditor Inspektorat Jenderal tidak boleh diajak makan keluar padahal saya

sahabatnya. Saya mohon izin agar Ibu Sumiyati memperbolehkannya,” kata Edward kepada Sumiyati melalui telepon.

“Iya memang tidak boleh. Kan Bang Edo yang membuat aturan itu. Yaaa tidak boleh, meski teman satu angkatan di STAN,” jawab Sumiyati di seberang telepon sambil bercanda.

Mendengar jawaban Sumiyati, Edward mengurungkan niatnya karena dia tahu karakter Sumiyati yang ingin menjaga integritas auditor Inspektorat Jenderal walau Sumiyati sangat mengetahui integritasnya.

Edward sangat mengetahui integritas Sumiyati karena relasi keduanya yang sangat dekat. Dari relasi tersebut, Edward melihat bagaimana Sumiyati mencontohkan seorang ASN yang berintegritas mulai dari hal kecil.

Integritas dan kebaikan Sumiyati menurun juga ke anak-anaknya. Kedekatan Edward membawanya mengenal keluarga Sumiyati karena beberapa kali dia berkunjung ke rumahnya. Sumiyati sering bercerita tentang suami dan anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya, Sumiyati mengetahui keluarga Edward dengan baik.

Sumiyati mempunyai empat anak yang baik dan cerdas. Tiga anaknya lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan anak bungsunya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Karakter anak-anak Sumiyati yang baik terlihat dari kelulusan mereka dari kuliah, tempat mereka bekerja, kesederhanaan, dan kerendahan hati mereka. Edward mengetahui karakter anak-anak Sumiyati karena beberapa kali dia bertemu dan berbicara dengan mereka. Suami Sumiyati juga dikenalnya dengan baik baik, berasal dari kota yang sama dengan istrinya, yaitu Sragen, Jawa Tengah. Suami Sumiyati sangat humble, tidak banyak berbicara, dan sederhana.

Melihat karakter Sumiyati, suami dan anak-anak, Edward menjadi ingat pepatah yang menyebutkan, “Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.”

Relasi saya dengan Sumiyati bukan hanya sebatas relasi pekerjaan tetapi lebih dari itu. Perkenalan Edward dengan Sumiyati sejak tahun 2000 dan hubungan intensif telah membangun relasi informal yang sangat baik walau dia tetap menghormati Sumiyati sebagai atasannya karena dia salah satu pimpinan di Kementerian Keuangan.

Ketika Sumiyati menjabat Inspektur Jenderal (Irjen) pada 2017-2021, Edward membutuhkan konsultasi dan mendatanginya. Edward

mengikuti arahan Sumiyati, jika beliau mengatakan, “jangan atau silakan lanjut” karena menganggap pemikirannya sangat matang dan mengetahui karakternya.

“Banyak hal dari Ibu Sum yang saya jadikan contoh dan panutan, di antaranya idealisme dan integritasnya. Juga cara Ibu Sum memperlakukan orang lain. Setinggi apapun jabatannya, Ibu Sum memperlakukan staf atau mantan staf sebagai mitra atau sahabat,” ujar Edward.

“Ibu Sum selalu mengingatkan saya untuk berpikir *out of the box*, jangan berpikir linear. ‘Karena ketika kamu berpikir linear, kamu sama saja dengan yang lain. Berpikir liar dalam kerangka yang benar, itu lebih baik,’ demikian nasihat Ibu Sum. Beliau sudah mempraktikkan itu dan menunjukkannya. Pada usia 61 tahun, walaupun sudah pensiun dari Kementerian Keuangan, pemikiran dan tenaga Ibu Sumiyati masih dibutuhkan. Beliau antara lain menjabat komisaris, komite audit di beberapa tempat dan Ketua Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Ini membuktikan bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki Ibu Sumiyati tetap bermanfaat. Berlian ya tetap berlian, ditempatkan di mana saja, tetap bersinar dan memancarkan kemilau,” papar Edward.

Edward beruntung, di awal kariernya di Kementerian Keuangan sampai saat ini, dia “dibimbing” oleh orang-orang yang penuh dedikasi, berintegritas, dan rendah hati. Mereka adalah atasan/pimpinan yang secara langsung mencontohkan keutamaan dalam bekerja seperti Mulia P. Nasution, (Alm) Hekinus Manao, Sonny Loho, Marwanto Harjowiryo, Sumiyati.

“Alangkah baiknya jika perjalanan karier para pimpinan Kementerian Keuangan dapat dibukukan sehingga pegawai Kementerian Keuangan dan masyarakat, terutama generasi muda, mengetahui para pimpinan Kementerian Keuangan yang berkarakter dan menjadi inspirasi. Hal ini menjadi *legacy* yang sangat berharga, seperti kata bijak *verba volant, scripta manent* (kata-kata lisan akan cepat hilang tetapi jika tertulis akan menjadi peninggalan yang permanen),” kata Edward Nainggolan.

“Saya mengibaratkan Ibu Sum seperti berlian, yang ditempatkan di manapun, termasuk di lumpur, akan tetap bersinar dan memancarkan kemilau.”

— Edward UP Nainggolan.

EMPAT

NAKHODA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Ditelepon Pak Mulia P. Nasution, “Bu Sum ke Setjen ya, Pindah Jadi Kepala Bagian Akuntansi”

Titik tolak implementasi reformasi keuangan secara lengkap dimulai ketika aku masuk di Biro Perencanaan dan Keuangan di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pada Juni 2007, aku ditelepon Sekjen, Pak Mulia Nasution.

“Bu Sum pindah ya, menjadi Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Setjen,” kata Pak Mulia suatu hari pada pertengahan 2007. Aku tersentak kaget. Rekan kerjaku, Edward Nainggolan, sempat bertanya siapa yang meneleponku, dan kujawab, “Pak Mulia Nasution.”

Edo — begitu aku memanggilnya — menyarankanku untuk menerima tawaran Pak Mulia. “Bu Sum pasti berkembang di sana,” kata Edo, rekanku di BAKUN sejak awal tahun 2000.

Aku menyampaikan kabar itu kepada atasanku Pak Sonny Loho dan juga ke Pak Hekinus Manao.

“Sebenarnya sayang Sum, kalau kamu hanya mengurus bagian akuntansi. Sayang kalau otakmu hanya memikirkan bidang akuntansi. Tapi kalau Kemenkeu yang minta, masak kita mau *nggondeli*?” kata Pak Hekinus. “Saya yakin kamu di sana akan berkembang cepat karena akan banyak diajak mendampingi rapat

pimpinan yang banyak membahas makro ekonomi dan fiskal,” imbuh beliau.

Setelah pindah menjadi Kabag Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, aku hanya mengenal Kepala Biro. Ini tantangan pertamaku saat duduk di sana. Banyak yang tidak mengenalku karena sebelumnya aku lebih banyak bertugas mengurus keuangan daerah. Untuk sistem akuntansi pusat aku menjadi pembina di Kemenristek, BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional), Bakorsutanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional), dan Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir).

Setelah menjabat Kabag Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, aku mempunyai empat Kepala Subbagian. Yang mengejutkanku adalah keempatnya tak punya latar belakang atau pengalaman di bidang akuntansi, dan mereka memang bukan dari jurusan akuntansi. Mereka lulusan Hukum, Ekonomi, Administrasi, dan Manajemen.

Aku kemudian menginventarisasi 37 orang stafku. Dari jumlah itu, sebagian besar lulusan D1 dan D3. Lulusan S1 hanya satu, yaitu Malul Azam (sekarang sedang melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Leuven di Belgia).

Aku memanggil empat kasubag dan mengajak mereka bicara. Hanya satu orang yang memahami substansi tugas di bagian ini. Aku kemudian memetakan sumber daya manusia yang ada, mulai dari asal pendidikan, jurusan, program diploma sampai S1, mengerjakan apa, dan apakah pernah mengikuti sosialisasi tentang Undang-undang Keuangan Negara.

Aku terkejut ketika tahu staf yang pernah ikut sosialisasi Undang-undang tentang Keuangan Negara hanya dua orang. Ini berarti Kemenkeu tak ada bedanya dengan kementerian-kementerian lain. Padahal Kemenkeu harus menjadi motor, menjadi pembina unit eselon I. Kemenkeu harus mengurus banyak hal, pendapatan (separuh dari APBN), belanja (sepertiga APBN), urusan transfer, belanja subsidi, penyertaan modal, pinjaman yang jumlahnya sangat besar — yang kalau dihitung, di atas 80 persen dari total APBN.

Kalau tidak diawaki personel yang kuat, sulit sekali untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Akhirnya aku memutuskan untuk turun langsung memberi bekal dan mengajari staf-stafku. Kalau tidak sedang rapat, aku langsung mengeluarkan laptop dan *in focus*, mengajari mereka tentang UU Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, Standar Akuntansi, dan lain-lainnya. Aku sendiri yang mengajari mereka. Dari sisi aplikasi, mereka cepat sekali. Tetapi dari sisi aturan (*rule*) dan substansi, banyak di antara mereka belum paham.

Aku menganggap pelatihan di kantor sangat efektif dan efisien. Aku membagi mereka ke dalam beberapa tim, dan memilih *leader* dalam setiap tim. Tipe Kemenkeu adalah *holding*, dan penanganannya berbeda satu sama lain. Urusan anggaran misalnya, berbeda dengan urusan pajak. BPPK mengurus berbagai pelatihan untuk ribuan pegawai. Direktorat Jenderal Bea Cukai mengurus kepabeanan, cukai, logistik, kapal, pesawat, gedung, barang sitaan dan lainnya. Ditjen Kekayaan Negara mengurus barang milik negara, penyertaan modal negara, aset-aset eks BLBI, aset eks asing, piutang negara, dan lelang. Badan Kebijakan Fiskal mengurus *policy* atau kebijakan, Ditjen PPR menangani pinjaman negara, Ditjen Perimbangan Keuangan mengelola dana transfer ke daerah.

“Kalian harus menjadi pembina di masing-masing ditjen dan badan, dan kalian harus memahami semuanya,” kataku kepada staf-stafku. Aku tidak mengirim mereka ke BPPK karena tak punya anggaran. Mau mengirim mereka ke berbagai pelatihan, kami tak punya anggaran. Mau mengundang narasumber, kami tak punya anggaran untuk membayar honor narsum. Aku memutuskan untuk menjadi narasumber, pengajar, *coach* dan mentor bagi stafku sendiri.

Setelah itu, aku membangun *alignment* yang kuat dengan unit eselon I, terutama para kepala bagian keuangan. Sebelumnya, hubungan itu relatif jauh. Namun setelah aku menjabat kabag akuntansi dan pelaporan keuangan, aku berkeliling, melakukan *sowan* dan *kulo nuwun* sekaligus mendiskusikan berbagai persoalan yang ada, seharusnya seperti apa, dan menanyakan apa yang dapat

dikerjakan bersama. Para kabag keuangan kemudian memanggil stafnya, dan kami berdiskusi bersama.

Tidak berhenti di sana. Aku kemudian berkeliling ke kantor-kantor direktorat jenderal di Kemenkeu, seperti tim Bea Cukai misalnya, kuajak tim Biro Menkeu, tim Inspektur Jenderal. Aku mempelajari semuanya, dari urusan pabean sampai teknologi informasi. Aku mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang terkait sampai pada proses bisnisnya. Aku juga turun ke lapangan, melihat langsung ke pelabuhan-pelabuhan, bagaimana pengoperasian kapal patroli, bagaimana pegawai BC bekerja, kalau ada tangkapan dan sitaan seperti apa, bagaimana pembukuannya dan pencatatannya secara manual dan menggunakan teknologi informasi. Aku turun ke bawah sampai ke kantor-kantor pelayanan. Hal serupa aku lakukan di kantor Ditjen Pajak.

Semuanya menjadi bekal penting bagiku sehingga aku dapat merancang strategi untuk mengentaskan Kemenkeu dari *disclaimer* ke Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Aku tahu persis apa akar masalahnya, dan bagaimana melakukan perbaikan.

Setiap kali aku datang ke berbagai wilayah, aku berusaha mendatangi semua kantor. Aku sekaligus membangun *alignment* yang kuat.

Aku sering membandingkan APBN itu dengan perempuan. APBN yang bagus itu ibarat perempuan cantik. Laporan keuangan yang sudah disusun dan diaudit akan memperlihatkan apakah APBN benar-benar dikelola dengan cantik. Laporan keuangan merupakan cerminan kesehatan unit organisasi di kantor-kantor pemerintah. Kalau belum mendapatkan Opini WTP, bisa jadi ada penyakit kronis. Aku memperkuat tim dan mulai bekerja bulan Juli 2007. Aku hapal tim siapa yang menangani apa dan kasus apa yang dihadapi. Aku hapal tim di setiap unit eselon I.

Saat diminta menjadi Kabag Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kemenkeu sedang menyusun Laporan Keuangan Semester I Tahun 2007. Laporan itu di-*review* oleh Inspektorat Jenderal. Aku mengikuti dan mengamati bagaimana mereka melaksanakan tugas sebagai auditor internal. Setelah aku cek, kok *review* mereka

begini, dan tidak sesuai yang diharapkan? *Kok* tidak seperti yang aku bayangkan? Ternyata mereka juga sama-sama belajar karena sebelumnya belum pernah mengikuti pelatihan.

Karena Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah mitraku, dan Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tidak mampu me-*review* semua kantor yang jumlahnya sekitar 1.100, aku berpikir kami harus bermitra dengan Itjen. Kebetulan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu saat itu adalah Hekinus Manao — yang pernah menjadi atasanku di Direktorat PK-BLU.

“Pak Hekinus, hasil *review* laporan keuangan kok begini?” tanyaku.

“Ya begitulah, Sum. Kita berikan *training* dulu untuk auditornya. Kau bikinkanlah kurikulumnya,” jawab Pak Hekinus sambil memberikan tantangan bagiku.

Aku menerima tantangan Pak Hekinus. Aku menyusun kurikulum Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah bersama tim akuntansi pemerintah di Ditjen Perbendaharaan. Salah satunya adalah Kusmanadji, “kakak buku”-ku di STAN. Kami sama-sama pernah menjadi asdos. Kami mempersiapkan kurikulum khusus, belajar tentang akuntansi pemerintah dengan cepat. Karena pesertanya sebagian besar akuntan alumni STAN, mereka cepat menangkap ilmu dan pengetahuan yang kami berikan.

Aku mengajak stafku di Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan teman-teman di Inspektorat Jenderal ke daerah bersama, untuk menyosialisasikan ini. Teman-teman di Itjen menyimak ketika aku menyampaikan kepada pegawai Kemenkeu di daerah, “Kalian nanti kerjanya begini.” Mereka diajari di kelas, dibawa ke lapangan, di-*coach* langsung. Setelah itu, kami pindah ke kantor lainnya. Aku membuka diri untuk berdiskusi (melalui pesan singkat/SMS). Aku melakukan itu sepanjang tahun dan hasilnya sangat efektif. Setiap kali mereka menghadapi kesulitan, mereka bertanya dan berdiskusi denganku.

Teman-teman kami di Itjen sangat kuat. Sebagian pernah menjadi mahasiswaku.

Aku benar-benar melaksanakan tugas membangun kapasitas internal Kemenkeu dan eksternal dengan para mitra, membangun *alignment* agar mendapatkan *engagement*. Aku berusaha menanamkan, “Ini lho kesehatan Kementerian Keuangan, yang dapat dilihat dari Opini WTP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan.” Aku hanya ingin mengingatkan bahwa Opini WTP Kemenkeu itu merupakan keharusan.

Yang aku lakukan adalah berusaha “mengolah rasa” mereka agar bekerja *all out* dalam menyusun laporan keuangan dengan membangun strategi yang terstruktur dan terprogram agar dapat mengubah *disclaimer* sampai wajar tanpa pengecualian. Selama aku menjadi Kabag Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, ada “Laskar WTP Kemenkeu”. Mereka inilah yang bekerja keras untuk mewujudkan itu.

Dulu Seakan Tak Punya Harapan, Kini Unit Kerja yang Hidup dan Dinamis

Pada masa lalu, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan acapkali “tidak dianggap”. Tetapi setelah aku memimpin unit ini, Bagian ini menjadi bagian strategis yang mendorong reformasi di bagian keuangan. Strategi yang dibangun untuk mereformasi keuangan negara dengan memperkuat audit, akuntabilitas, dan transparansi. Auditor dikencangkan, diperkuat. Kalau muncul deviasi, itu menjadi temuan. Rekomendasi yang disampaikan akan ditindaklanjuti dan hasilnya ditagih. Inilah salah satu strategi yang disiapkan ketika melaksanakan reformasi di bidang keuangan negara.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang sebelumnya merupakan unit kerja yang seakan tak punya harapan dan awaknya kurang bersemangat, kemudian menjadi unit kerja yang “seksi”, yang hidup dan dinamis. Aku membuka komunikasi *online* 24 jam. Ketika stafku mampu memecahkan masalah, unit ini terasa sangat hidup. Bahkan sering diminta oleh unit lain untuk membantu mereka, juga membantu mengajari pegawai kementerian lain.

Memang tidak semua sumber daya manusia (SDM) yang ada memiliki kemampuan yang sama. Namun aku tetap memberikan pekerjaan sesuai porsi dan kapasitas masing-masing, terutama menggenjot anak-anak muda. Malul Azam, pegawai senior di antara yang muda, termasuk yang menggiring kawan-kawannya bekerja keras.

“Ini Laporan Keuangan Satu Negara, Bukan Laporan Warung!”

Aku masuk di Bagian ini pada 2007. Sementara Kementerian, termasuk Kemenkeu, wajib menyusun laporan keuangan sejak 2006. Aku berusaha membedah laporan keuangan yang disusun agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pada saat auditor BPK masuk untuk audit laporan keuangan, aku berpandangan bahwa BPK inilah mitra utamaku untuk memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Kami belajar bersama, bahu-membahu “membongkar” permasalahan bersama. Bahkan aku diskusi dengan mereka. Kertas kerjamu seperti apa, prosedur auditmu seperti apa, kesimpulanmu apa, cara menghitungmu seperti apa, mengapa hal ini yang kamu angkat? Semuanya kami diskusikan bersama.

Aku mengingatkan mereka bahwa laporan keuangan ini laporan suatu negara, bukan laporan keuangan warung. Jumlahnya pun ribuan triliun rupiah, bukan ratusan miliar rupiah. Sebagai *audience* dan kakak yang lebih tua, aku ingin semua bekerja profesional, terukur dengan baik, dan mengarah pada perbaikan.

“Kalian tidak boleh bikin malu Republik Indonesia. Kalian tidak boleh bekerja dengan standar audit di bawah minimal,” kataku mengingatkan.

Pada tahap awal, karena semuanya masih baru, aku berusaha menjelaskan dengan perspektif yang tepat, dan menjelaskan dari berbagai sisi sehingga kami bisa berdiskusi di “halaman yang sama”. Aku menceritakan mengapa dibuat seperti itu, sejauh mana

implementasinya, *direction*-nya seperti apa, *international best practice*-nya seperti apa, dan yang tercantum di dalam *text book* seperti apa.

“Bunyi undang-undang begini, aturannya begini. Coba ambil *text book* dan buka lagi bukunya karena buku itu belum diganti. Ini penting agar tidak ada dusta di antara kita. Kalau mau dikoreksi, arahnya ke mana,” kataku. Diskusi yang berlangsung sangat konstruktif, saling menghormati, saling menjaga profesionalisme, dan tak ada yang ditutup-tutupi.

Kalau para auditor BPK terjun ke daerah, aku berusaha hadir sebagai tuan rumah. Aku mengumpulkan kawan-kawan di daerah, datang lebih awal, mendiskusikan apa akar persoalannya. Aku berusaha menjembatani BPK dengan unit-unit lain. Meskipun kami sama-sama akuntan namun bekerja di unit berbeda (Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan), tetapi sebagian dari mereka bukanlah auditor sehingga cara melihat persoalannya juga dari sudut pandang yang berbeda. Aku berusaha menjembatani mereka, mempertemukan mereka, sehingga terjadi kompromi, tahu langkah apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Cara kerja ini memiliki kontribusi besar terhadap Opini WTP Kemenkeu.

Lama-kelamaan, suasana di Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mengalami perubahan drastis. Jika sebelumnya sangat pasif, hanya menerima *softcopy* sesuai *template*, tanpa pernah dilakukan uji kelengkapan dan validitas angka, apalagi *disclosure*, maka setelah aku memimpin unit kerja ini, aku bekerja profesional. Aku meminta stafku, Malul Azam, membuat *template*.

laporan keuangan yang *full disclosure* sesuai SAP. Untuk program-program khusus perlu diberikan penilaian yang cukup, misal untuk *sunset policy* atau inventarisasi dan penilaian BMN. Aku memintanya membuat *reporting package* yang sesuai ketentuan sehingga dapat menjadi acuan format laporan keuangan kementerian dan lembaga pemerintah.

Hal-hal semacam inilah yang aku lakukan selama aku menjabat Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selama dua tahun (2007-2009). Setelah aku menjabat sebagai (Pelaksana Tugas) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, tugasku sebagai kabag digantikan oleh Anne Serfiana.

“Ibu Diminta Terbang ke Jakarta Karena akan Dilantik sebagai Kepala Biro”

Ketika sedang melakukan tugas kedinasan di Lombok pada 2009, aku mendapat kabar mengejutkan.

“Bu Sum diminta terbang ke Jakarta,” kata suara di seberang telepon.

“Ada apa?” tanyaku. Frekuensi pesawat dari Lombok ke Jakarta pada tahun itu masih sangat jarang, hanya dua kali seminggu.

“Ibu akan dilantik menjadi Kepala Biro,” jawabnya.

“Hah? Kepala Biro?” aku bertanya.

“Iya, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,” kata suara di telepon itu.

Dua tahun sebelumnya, ketika aku menjabat Kepala Seksi di Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, aku menerima kabar mutasi sebagai Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan juga ketika sedang dinas di Lombok. Ternyata aku mengalami hal yang sama.

Sebenarnya pangkatku pada tahun itu belum cukup untuk menjadi Kepala Biro. Karena itulah aku menjadi Pelaksana Tugas (Plt) terlebih dahulu, dan merangkap jabatan Kabag Akuntansi selama satu tahun. Setelah mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa, pada 2010, aku resmi menjabat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

Pengangkatanku sebagai Kepala Biro di luar kebiasaan Kemenkeu. Pada umumnya orang yang duduk di sana diambil dari pejabat senior dari Ditjen Anggaran dan pensiun di sana. Aku menjadi orang pertama yang berasal dari Bagian Akuntansi di

Sekretariat Jenderal, dan ini jabatan promosi pula. Mutasi ini serasa anomali.

Namun ketika menjabat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, aku sudah malang-melintang di semua unit. Aku sudah memiliki bekal yang cukup untuk mengetahui kemana arah reformasi Kementerian Keuangan. Aku ikut terlibat membuat undang-undang, beberapa peraturan pemerintah, dan laporan keuangan.

Aku terbiasa menggunakan alur dan kerangka berpikir, konsepnya seperti apa, *international best practice*-nya seperti apa, regulasi dan sistem yang sudah ada seperti apa.

Aku selalu mengatakan, “Prinsipnya begini. Kita akan menuju ke sana tetapi belum sampai.” Atau, “Ini hasil kompromi *lho*, arahnya akan menuju A. Kalau mau langsung ke sana, akan *nabrak* gunung sehingga harus memilih jalan yang memutar dulu. Tetapi kita sudah berada di jalan yang benar.”

“Ini Bukan Biro Pencatatan Keuangan!”

Aku menyadari betul Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan bisa mengatur denyut jantung Kemenkeu karena unit Perencanaan ada di sini. Dalam rapat, aku selalu menekankan bahwa, “Biro Perencanaan dan Keuangan bukanlah Biro Pencatatan Keuangan. Artinya, tim sentral di Biro ini akan mengambil kebijakan, program mana yang bisa dilanjutkan dan bagaimana pendanaannya. Aku juga menantang staf, bagaimana mengembangkan indikator kinerja sehingga apa yang dikerjakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.”

Di kementerian lain, Biro Perencanaan dan Keuangan dipecah terpisah menjadi dua biro, tetapi di Kementerian Keuangan, biro ini menjadi satu. Aku menyebutkan sebagai “paket hemat” karena sudah mencakup semua, termasuk mengelola *risk management*. Ada keuntungan yang aku dapatkan dari penggabungan ini dibandingkan jika dipisah menjadi dua biro.

Mengapa? Ini berkaitan dengan reformasi anggaran yang menyebutkan anggaran satu (*unified budget*) dan tak boleh ada yang

lain. Semua harus masuk dalam satu dokumen yang terintegrasi, termasuk penganggaran. Jika Perencanaan dan Keuangan tidak “di halaman yang sama”, maka saat ada pergerakan dan perubahan, situasinya akan ruwet. Tetapi di Kemenkeu, Perencanaan dan Keuangan menjadi satu biro, dan ini lebih efektif. Manfaatnya lebih terasa, meski aku menyadari beban kerja kepala biro “mengalir tanpa henti sepanjang tahun”.

Misalkan, sekarang melaksanakan tahun anggaran 2022, biro ini sudah mengerjakan perencanaan tahun 2023 dan 2024, dan menyusun laporan keuangan tahun 2021. Setidaknya mengerjakan tiga hal. Ini terjadi sepanjang tahun. Aku membayangkan staf biro ini harus memiliki *hard competency* dan *soft competency* yang memadai serta fisik yang bagus. Jika tidak kuat menghadapi tantangan ini, siapa pun bisa mengalami stres.

Lalu bagaimana dengan program-program yang ditangani biro ini? Biro ini memiliki beberapa Bagian yaitu Bagian Perencanaan, dan Bagian Penganggaran, Bagian Perbendaharaan, dan Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Aku mengubah komposisi personel bagian-bagian dengan melakukan rotasi antar bagian. Aku membangun tim yang kuat dengan memperhitungkan komposisi staf agar kesinambungan tidak terputus dan tetap terjaga. Komunikasi antarbagian juga harus terpelihara dengan baik.

Di Bagian Akuntansi yang sebelumnya menjadi garapanku, aku tahu persis perkembangannya. Aku mencari personel yang pantas menjadi Kabag yang baru dan aku memilih Anne Serfiana — yang pernah menjadi mahasiswaku saat aku asisten dosen di STAN. Aku mencari orang yang “kencang”, agak otoriter, bersemangat tinggi. Aku melihat Anne dididik dengan keras dan disiplin oleh orang tuanya, yang seorang jenderal. Dia pekerja keras. Kalau memang harus tidak tidur untuk menyelesaikan tugas, dia akan melakukan itu.

Setelah menemukan Anne menjadi penggantikku sebagai Kabag Akuntansi, aku berkonsentrasi di Bagian lain yaitu Bagian Perencanaan. Aku tidak asing lagi dengan konsep dan pengaturan

karena aku ikut terlibat dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Rencana Kerja Pemerintah dengan para pejabat Bappenas (di antaranya Pak Agus Raharjo, Pak Max Pohan, Pak Wismana, dan Pak Ronny) sehingga aku sudah tahu mekanisme, tata cara dan arahnya ke mana, serta apa permasalahan dan kendala yang dihadapi. Demikian pula untuk penganggaran, dari awal aku sudah ikut merumuskan ketentuan yang dimuat dalam UU Keuangan Negara serta ikut menyusun PP Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang mengusung tiga pendekatan, yaitu *Medium Term Expenditure Framework*, *Unified Budget*, dan *Performance Based Budgeting*.

Sebagai Kepala Biro, aku menyadari bahwa apa yang dicita-citakan dan yang tertuang dalam UU Keuangan Negara dan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berbagai peraturan pelaksanaan, kini saatnya harus benar-benar diimplementasikan secara konsisten. Aku harus mempunyai visi yang jelas, mengkampanyekan ide agar staf dan mitraku paham, dan mereka tergerak untuk belajar dan mau memikirkan serta mulai mengerjakannya. Di kantor Biro, aku akhirnya menjadi “tukang cerita”. Jika mejaku sudah “bersih”, aku biasanya ke luar ruangan, mendatangi ruang bagian-bagian yang menjadi tanggung jawab kerjaku untuk “berjualan” ide. (Meja kerjaku biasanya baru ditinggal satu jam, sudah dipenuhi dokumen dan laporan).

Tahap awal, aku ke Bagian Perencanaan dan Bagian Anggaran, aku cerita di sana. Staf-stafku pada mulanya bingung, “Ngapain Ibu Sum cerita-cerita di sini?” Tetapi akhirnya mereka paham, lalu mulai belajar dan ikut berdiskusi bersama.

“Ayo kita kerjakan bareng-bareng,” ajakku.

Mereka meminta belajar ke beberapa perguruan tinggi seperti UGM, Unibraw dan UI. Aku tidak kaget mengetahui dosen-dosen yang mengajarkan teori dan berbagai contoh kasus, tetapi mereka belum punya pengalaman di pemerintahan. Mereka hanya membaca dari bahan-bahan referensi tentang Perencanaan dan Anggaran

tetapi belum pernah mengerjakan, sehingga memberikan contoh seperti di sektor komersial.

Tentang biaya proyek misalnya, dosen-dosen di kampus menghitung biaya *overhead*, biaya listrik (berapa colokan yang digunakan) dan lainnya. Aku berpikir, kalau aturan dibuat *njelimet* seperti itu, kok mirip *ngurusi* pabrik, tidak akan bisa dioperasionalkan. Bagiku, yang penting tahu prinsip, konsep, manfaat, tata caranya, sesimpel itu, sistem dapat dikembangkan dengan adaptasi.

“Ayo, mau belajar apa lagi?” aku menantang staf-stafku seperti itu, karena sepulang *training* mereka akan diskusi dan mereka biasanya berpikir ulang. Aku biasanya akan menuntun mereka dari sistem di sektor komersial yang mereka sudah pelajari ke sektor publik. Bagiku tidak sulit, karena aku juga mengajarkan materi yang sama, baik komersial maupun sektor publik dan aku sudah mendalami terlebih dulu tentang perencanaan dan penganggaran sejak sekolah di Australia.

“Bu, kita perlu belajar ke BPPK,” kata Mas Vigo dan beberapa kawannya.

Aku mengenal orang-orang di BPPK dan meminta pengampu materi X adalah A, B, C. Aku meminta khusus karena aku tahu keunggulan widyaiswara itu berbeda-beda. Setelah mendapatkan pengetahuan di BPPK, barulah kemudian aku merancang bagaimana mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang sudah diperoleh. Aku memberi panduan agar dapat dikerjakan oleh staf-staf —yang sebagian merupakan adik-adikku alumni STAN yang hebat-hebat. Aku melibatkan widyaiswara dan personel di Inspektorat Jenderal untuk program ini.

Setelah tahu arah jalan akan ke mana, aku menceritakan tentang *international best practice*. Aku mengatakan kondisi Indonesia belum ideal. Memang ada praktik yang bagus namun dibutuhkan persiapan dan kesiapan pihak-pihak terkait. Mengapa? Karena Biro Perencanaan dan Keuangan adalah operator, bukan regulator. Sebagai orang yang pernah di posisi regulator, aku tahu persis

permasalahannya. Aku kemudian menjadi operator, “dirigen” yang mengoperasikan dan menjalankannya.

Aku mencari siapa saja *talent-talent* di Kementerian Keuangan? Merekalah yang menjadi tim penggerak untuk melakukan perbaikan. Dalam tim ada Finaldo, FX Cahyo Wijayanto, Marudut Napitupulu, Ade Juanda, Malul Azam, Suroso dan kawan-kawan yang lain.

Belajar dari Australia

Bagaimana kami mempelajari *international best practices*? Aku mengajak stafku untuk ke Australia, *learning by doing*. Sebagai orang yang pernah kuliah S-2 di Australia tahun 1994, aku mengetahui tentang keuangan negara di Australia. Aku terlibat dalam tim reformasi di Kemenkeu dan apa yang aku pelajari terhubung.

Aku juga selalu melibatkan orang-orang BPPK. Unit kerjaku berperan sebagai konsolidator, dan kami belajar dari Australia, bagaimana regulasi, sistem, arsitektur kinerjanya, bagaimana pembahasannya di Ditjen Anggaran, bagaimana melakukan *monitoring* dan evaluasi, dan bagaimana Australia melakukan audit. Kami juga belajar bagaimana proses regulasi itu di DPR. Kami mendatangi semua, termasuk ke Kementerian *Human Services*, kementerian yang menangani masalah-masalah sosial, kesehatan, dan bencana, dan semuanya dikonsolidasikan ke dalam satu program dan berada dalam satu sistem yang terintegrasi, indah sekali.

Pelayanan Australia di bidang sosial, kesehatan, dan bencana merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Mengapa? Karena ketika terjadi bencana misalnya, warga cukup mengontak ke satu nomor. Ada yang sakit mendadak, warga cukup menghubungi satu nomor, kemudian diarahkan ke bidang yang menangani. Semua terekam ke dalam satu sistem informasi, sehingga kita tahu duit pajak mengalir ke mana. Sementara di Indonesia, aku melihat terlalu banyak nomor sehingga sulit untuk diingat.

Banyak orang hebat di Australia itu bertugas di Kementerian Keuangan. Apa yang kami pelajari di sana, patut untuk direnungkan,

didalami, dan diimplementasikan di Indonesia. Kami menjadikan Kemenkeu sebagai *piloting*, proyek percontohan. Di Australia, kami juga belajar tentang penganggaran, sedangkan di Selandia Baru tentang arsitektur kinerja.

Aku menyadari perlunya fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran suatu kementerian. Untuk itu diperlukan penataan kembali program pemerintah. Aku dan teman-teman berpikir serius untuk hal ini, namun kami berada di posisi operator dan kami tidak bisa membuat regulasi yang berlaku secara nasional, oleh karena itu kami mencoba meminta aturan itu diubah dengan membawanya ke Bappenas dan Ditjen Anggaran, namun saat itu belum bisa.

Akhirnya pada tahun 2013-2014, kami berusaha merancang semuanya, termasuk menyiapkan Arsitektur Data dan Informasi Anggaran (ADIK) — dan rancangan itulah yang digunakan sebagai salah satu referensi saat ini, ketika pemerintah secara nasional melakukan redesain sistem perencanaan dan penganggaran atau dikenal dengan nama RSPP. Itu diadopsi dari sebagian yang kami tuangkan dalam *Best Practices Guide* Perencanaan dan Penganggaran. Implementasinya relatif cukup lama.

Aku baru dua hari menjalani kunjungan dinas Selandia Baru. Tetapi aku sudah harus kembali ke Jakarta karena ikut tes *bidding* sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu. Stafku mencari tiket pulang. Tiba di Jakarta, aku langsung masuk kelas dan ikut ujian.

Sementara itu studi banding ke Selandia tetap dilanjutkan. Stafku, antara lain FX Cahyo Wijayanto, Marudut Napitupulu, dan Ade Juanda, dan Pejabat dari DJA serta widyaiswara dari BPPK yang mengerjakan itu semua. Proses belajar tidak berhenti begitu saja. Setelah dari dua negara itu, mereka melanjutkan studi banding ke Jepang.

Di Setiap Tempat, Memancang Tonggak Baru

Setiap kali aku bertugas di satu tempat, aku memancang tonggak reformasi, berusaha mengaduk-aduk dan mengolah rasa mereka

untuk mau mempelajari dan menjalankan tonggak program yang aku letakkan. Jika penggantinya termasuk orang yang agresif, program reformasi itu akan cepat berjalan. Kalau bukan satu tipe denganku, bisa jadi program ini akan stagnan. Tetapi aku yakin, suatu saat, akan muncul orang agresif lagi sehingga program reformasi akan maju kembali.

Struktur organisasi di pemerintahan berbeda dengan organisasi di perusahaan komersial — kecuali di perbankan dan asuransi. Di perusahaan, semua tergantung pada pemiliknya yang dengan mudah mengganti orang kapan saja dan mengganti proses bisnis. Di pemerintahan, tak bisa fleksibel dan semudah itu, termasuk mengubah perencanaan dan penganggaran.

Salah satu cara yang tepat adalah dengan memanfaatkan momen-momen tertentu seperti misalnya momen-momen sulit pada masa pandemi Covid-19. Ketika terjadi masalah keuangan, muncul kesempatan emas untuk melakukan perombakan, untuk merancang kembali perencanaan dan penganggaran. *Piloting* di Kemenkeu baru sebagian yang dijalankan, tetapi aku senang karena setidaknya sudah ada kemajuan.

Jika ditanya tentang pola penganggaran yang ideal, aku akan menjelaskan bahwa UU Keuangan Negara lahir pada 2003 dan Peraturan Pemerintah terkait itu lahir pada 2004, namun baru pada tahun 2020 mulai terlihat hasilnya. Selama enam belas tahun, Indonesia tertatih-tatih. Penggunaan uang negara belum menghasilkan *outcome* yang benar-benar *nendang* bagi pelayanan publik.

Kalau aku harus mengulang, aku akan memilih *big bang* yang hasilnya cepat kelihatan. Setelah PP lahir tahun 2004, semestinya langsung saja melakukan cut over dengan penguatan di regulator dan operator. Selama ini aku mengajari banyak orang sampai ke pelosok Indonesia, tetapi hasilnya tak bisa langsung dicapai, pembaharuannya bertahap sehingga makan waktu dan biaya yang tidak sedikit, padahal uang negara sudah keluar sangat banyak.

Sepertinya ada sesuatu yang salah (*something wrong*), yang harus diperbaiki.

“Better Practice Guide”

Ketika masih di STAN, aku sering membaca buku-buku tentang *public finance*. Aku sering ditanya, “Sum, kamu membaca buku apa? Itu kan bidang yang tak punya masa depan?”

Aku penasaran dengan pengelolaan keuangan negara. Aku tak hanya belajar tentang *public finance* di Australia, tetapi juga Selandia Baru, dan *OECD countries*. Aku mengunduh bahan-bahan tentang *public finance*, pedoman pengelolaan keuangan di pemerintah kota dan di negara bagian. Ternyata buku-buku yang sering kubaca saat di STAN dan bahan-bahan yang sering aku unduh, menjadi materi kuliahku di S-2. Kalau dipikir memang aneh, karena itu bukan *core subject* di jurusan akuntansi dan tidak terbayangkan aku akan mengurus anggaran negara.

Apa yang aku pelajari bersama kawan-kawan akhirnya dituangkan dalam suatu buku panduan perencanaan dan penganggaran untuk internal Kementerian Keuangan dengan nama *Better Practice Guide* (BPG), Penganggaran Berbasis Kinerja, yang diterbitkan pada 2014. Buku ini dipakai di Kementerian Keuangan sebagai *piloting*. Intinya adalah penataan dan perumusan program dan kegiatan yang tepat untuk melaksanakan tugas dan fungsi, alokasi anggaran berbasis kinerja dengan menerapkan prinsip “*value for money*” indikator kinerja jelas dan terukur. Efisiensi dan efektivitas harus diperoleh. Dalam proses implementasi banyak penghematan yang dapat dilakukan, sehingga aku tanyakan ke Menteri Keuangan saat itu, jika ada efisiensi, apakah boleh dikembalikan kepada karyawan atau pegawai? Menteri menjawab, “Boleh!”.

Setelah dilakukan *scoring*, disiapkan bonus tahunan. Aku berani menggagas ini karena untuk kepentingan khalayak. Nyatanya, memang ada penghematan yang relatif besar. Ekstra penghematan

yang dikerjakan ini dilaksanakan dengan kerja keras. Ide ini aku dapatkan ketika kuliah S-2 di Australia. Dari contoh di Selandia Baru misalnya, akurasi mencapai 99 persen. Penghematan yang didapatkan, hasilnya 50 persen dikembalikan ke pegawai, dan 50 persen untuk negara.

Dari pengalaman ini, aku memetik pelajaran bahwa belajar ilmu itu bukanlah sekadar untuk lulus atau untuk dilupakan. Jika bertemu saat yang tepat, ilmu yang sudah dipelajari, dapat diimplementasikan. Inilah yang aku lakukan pada penganggaran berbasis kinerja.

Saat kunjungan ke Victoria bersama Pak Hadiyanto (Sekretaris Jenderal Kemenkeu) dan Pak Astera Primanto Bhakti (Kepala BPPK), aku menggali sistem perencanaan dan penganggaran untuk *public health* dan *public education*. Aku betul-betul menikmati belajar *public health* dan *public education* dari Australia. Aku punya impian, alangkah indahnya jika Indonesia mengadopsi penganggaran ini dari negara tetangga. Di Australia, hampir semua universitas milik negara. Universitas swasta tetap ada tetapi jumlahnya tidak banyak. Setelah aku pelajari satu persatu anggaran pendidikan di Australia, aku menyimpulkan perencanaan dan anggaran negara untuk sektor pendidikan dan kesehatan sangat berbeda dengan di Indonesia.

Di Indonesia, standar pendidikan belum sama. Masih ada sekolah dan universitas yang levelnya E misalnya, harus ditingkatkan menjadi minimal level C, dan harus mengejar ketertinggalan ke level yang lebih tinggi. Namun demikian bagaimana mengejar ketertinggalan tersebut agar masyarakat memperoleh layanan yang sama? Ini masih menjadi PR kita bersama. Apabila kita konsisten melakukan perbaikan dan terus dijaga tata kelolanya, aku yakin impian itu bisa terwujud.

“BEST PRACTICE GUIDE, PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA”

Penyusunan “*Best Practice Guide* Penganggaran Berbasis Kinerja” merupakan salah satu inisiatif strategis Kementerian Keuangan sebagai Pengguna Anggaran (*Chief Operational Officer*) yang mengelola Bagian Anggaran (BA) 15 yang merupakan proyek percontohan penerapan anggaran berbasis kinerja. BPG berisi intisari prinsip-prinsip dan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan dalam pemantapan penyusunan rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja.

Menteri Keuangan (waktu itu) Bambang PS Brodjonegoro dalam kata pengantar buku pada November 2014 menyebutkan, BPG diharapkan dapat menambah pertimbangan dan panduan bagi para pemangku kepentingan di internal Kementerian Keuangan dalam perencanaan anggaran yang lebih baik. Untuk itu, saya menyambut baik upaya Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal dalam menerbitkan edisi perdana kebijakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. Hal tersebut menggambarkan semangat Sekretariat Jenderal sebagai penggerak utama penyempurnaan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya visi Kementerian Keuangan.¹

Sedangkan Sekjen Kemenkeu (masa itu) Kiagus Ahmad Badaruddin menyatakan, *Better Practice Guide* Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan intisari prinsip-prinsip serta pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan dalam rangka pemantapan penyusunan rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja. Selain prinsip-prinsip utama, dalam BPG ini disampaikan juga beberapa hal yang bersifat teknis dan baru, seperti *Resource Forum*, *Budget Statement*, dan prosedur atau tata cara pengusulan proyek. BPG ini juga dilengkapi dengan ilustrasi dan contoh kasus untuk memudahkan pembaca dalam memahami prinsip-prinsip yang disampaikan.²

BPG difokuskan pada perbaikan-perbaikan tata kelola perencanaan dan penganggaran dengan merujuk dan mengadopsi kerangka konsep dan praktik yang lebih baik (*better practice*) termasuk melalui adopsi

1 Dikutip dari Pengantar Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Keuangan (saat itu) dari buku “*Better Practice Guide*” (BPG) Penganggaran Berbasis Kinerja, November 2014

2 Dikutip dari Pengantar Kiagus Ahmad Badaruddin, Sekjen Kementerian Keuangan (saat itu) dari buku “*Better Practice* (BPG) Penganggaran Berbasis Kinerja”, November 2014

lesson-learned dari negara maju. Secara khusus, BPG ini juga terinspirasi dari produk kebijakan serupa yang diterapkan oleh Pemerintah Australia melalui Australia National Audit Office. Selanjutnya, kerangka konsep dan praktik perencanaan dan penganggaran yang lebih baik tersebut disarikan dan dikontekstualisasikan dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Penyusunan

BPG ini juga melibatkan seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan dan telah diseminarkan dengan menghadirkan panelis dari eksternal Kementerian Keuangan. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran merupakan usaha yang terus-menerus dan berkelanjutan. Selaras dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal senantiasa bekerja keras menjadi penggerak utama penyempurnaan berkelanjutan menuju terwujudnya visi Kementerian Keuangan khususnya melalui dukungan anggaran yang efisien dan efektif.

Sementara itu Greg Feeney, Senior Adviser Government Partnerships Fund dari Australia dalam endorsementnya menyebutkan, Pemerintah Indonesia telah memulai agenda reformasi yang signifikan ketika memperkenalkan Penganggaran Berbasis Kinerja. Tujuan reformasi adalah untuk memberikan transparansi yang lebih baik dalam alokasi sumber daya anggaran, peningkatan kualitas perencanaan anggaran, fokus yang lebih baik pada prioritas kebijakan, dan peningkatan disiplin fiskal dan kesinambungan fiskal.³

Pelaksanaan reformasi akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk mencapai tujuan ekonomi dan fiskal Pemerintah Indonesia. Ini juga akan memberi kontribusi signifikan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan dan sasaran. Menurut Greg, keberhasilan pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja membutuhkan perubahan besar pada pengembangan dan pengelolaan anggaran internal kementerian agar selaras dengan transformasi anggaran Indonesia.

Greg Feeney atas nama Dana Kemitraan Pemerintah memberi apresiasi kepada kantor Sekretariat Jenderal Kemenkeu, khususnya kepada Biro Perencanaan dan Keuangan, yang mengembangkan panduan Penganggaran Berbasis Kinerja ini.

3 Dikutip dari “endorsement” Greg Feeney dari buku yang sama

Sering Turun Langsung ke Lapangan

Ketika dilakukan pembahasan anggaran, aku berusaha untuk hadir dan menunggu sampai acara selesai. Ini di luar kelaziman. Tetapi aku lebih suka turun langsung ke bawah sehingga aku betul-betul mengerti dan memahami situasi lapangan sebenarnya.

Aku juga sering melakukan “kampanye” ke jajaran eselon I. Aku mengaduk-aduk perencanaan hingga urusan audit. Aku sengaja bicara keras dan pedas supaya banyak yang tertantang. Setelah itu, aku tidak “meninggalkan” mereka. Aku tetap mendampingi, kerja bersama agar cepat selesai.

Aku mengundang para Ses-Ditjen dan berbicara bahwa Kemenkeu ini kementerian dengan tipe *holding*, namun mulai dari urusan *policy*, anggaran, teknologi informasi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sampai organisasi tak bisa berdiri sendiri. Aku memberi contoh, Ditjen Bea dan Cukai *ngotot* ingin membeli kapal patroli, tetapi Biro SDM dan Organisasi (Organta) tidak bisa rekrut orang untuk awak kapal, itu berarti rencana pembelian kapal patroli disinkronkan dengan rekrutmen awak kapal lebih dahulu.

Orang-orang di Itjen misalnya, tidak aku posisikan diri sebagai *watchdog*, tetapi sebagai *strategic business partner*. Aku mengundang mereka sebagai observer dan mereka tak punya hak untuk memutuskan. Orang-orang Itjen yang mengikuti sejak awal, tahu alurnya dari mula dapat diminta pandangannya terhadap rencana kerja dari semua unit.

Dalam *resources forum meeting*, aku sudah memperhatikan *risk management*, dan meminta semua yang hadir memberi pandangan yang tertuang dalam bentuk warna hijau, kuning, dan merah. Hasilnya pasti ada yang berbeda. Yang berbeda, kami diskusikan bersama. Jika ada sesuatu yang kurang, syarat apa saja yang harus dilengkapi. Kami diskusikan bersama dan diberi tenggat waktu untuk memenuhi persyaratan. Jika sampai batas waktu tertentu tidak terpenuhi, permohonan akan di-*drop*.

Aku mengingatkan agar dalam penyusunan rencana kerja, tidak menunggu anggaran mengucur lebih dahulu. Aku selalu mengikuti perkembangan setiap unit kerja. Apa saja yang

dibutuhkan, disiapkan dalam daftar. “Silakan ajukan ke Biro, sesuai urutan prioritas,” kataku. Ibaratnya, ini seperti anak kecil minta orangtuanya membelikan barang, sementara dana terbatas. Jadi aku meminta mereka menyusun sesuai urutan prioritas agar kami tidak salah memberi prioritas dalam alokasi anggaran.

Semua usulan akan dibahas dan dikonsolidasikan untuk seluruh kementerian. Usulan yang belum mendapat alokasi anggaran akan masuk *waiting list* dan akan menjadi prioritas saat terjadi revisi anggaran karena adanya kegiatan yang tidak berjalan. Dengan pola perencanaan dan penganggaran yang didiskusikan secara transparan seperti ini, Biro yang aku pimpin —sebelumnya datar-datar saja, menjadi lebih hidup dan dinamis. Hasilnya, eksekusi anggaran lebih cepat dan kinerja semakin baik.

Namun untuk bisa berdiskusi bersama dengan pola pikir yang sama, kalau sesama pegawai tidak saling kenal dengan baik, komunikasi yang cair tidak akan terjadi. Karena itulah setiap tahun aku menggelar acara *outing* agar sesama pegawai dapat saling ngobrol dan bercanda, dan dekat secara personal. Kalau mereka sudah kenal baik, segala sesuatunya lebih mudah dan lebih cepat disampaikan.

Kalau ada waktu luang, aku menyempatkan diri berkeliling ke wilayah pinggiran Indonesia. Dari Aceh sampai Kalimantan dan Papua, aku datang untuk mengetahui persis kondisi lapangan yang sebenarnya. Pernah aku mengunjungi daerah di Kepulauan Riau, aku ikut kapal patroli, mendatangi kantor dan melihat sarana dan prasarana di dalamnya, termasuk melihat seperti apa meja dan kursi, ruang istirahat, dermaga, tempat *docking* kapal, *mess*, bahkan kandang anjing di sana. Aku juga mengecek stok makanan, pakaian, sepatu, sampai jumlah insentif yang didapat saat mereka harus berpatroli.

Aku tahu semua. Ketika aku kembali ke Jakarta, aku dapat mendiskusikan segala sesuatunya dengan Sesditjen dan Dirjen. Aku bilang, “Ini kan kantor di wilayah terluar Indonesia kan mencerminkan wajah Indonesia. Mestinya kantor harus representatif.” Lalu kami membuat program bersama.

Aku berpikir mereka sudah bekerja keras di kapal patroli, *berantem* dengan penyelundup dan perompak. Seharusnya mereka menerima sepatu, jaket, pelampung yang khusus. Teman-teman mereka di daratan, kalau dinas luar biasanya menginap di hotel, sedangkan orang-orang Bea dan Cukai ini bekerja di kapal patroli di laut lepas. Aku juga melakukan hal yang sama untuk kantor yang lain, melihat dari dalam kantor-kantor Ditjen Pajak, termasuk melihat sarana dan prasarana teknologi informasinya.

Selama aku menjabat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, aku sangat memperhatikan segala sesuatunya secara detail. Aku juga peduli pada urusan pegawai perempuan yang ditempatkan jauh dari *home base* keluarga, seperti di Papua, NTT dan wilayah terluar lainnya. Aku mengikuti akun Instagramnya. Aku menyapa mereka saja, pegawai-pegawai itu sudah sangat senang. Aku berusaha “menyentuh” mereka karena mereka adalah bagian dari Kementerian Keuangan.

Demikian pula, ketika aku bertugas di BPPK. Hari pertama menjabat Kepala BPPK, aku langsung mengecek sarana dan prasarana serta buku-buku perpustakaan di sana.

“Lha, kok yang banyak di sini malah buku masak? Punya anggaran kok BPPK beli buku kayak gitu?” aku berseloroh. Aku juga cek solar yang ada di *genset*. Demikian juga saat itu banyak ruang kosong yang tidak dimanfaatkan. Maka pada tahun berikutnya dirancang berbagai program untuk memanfaatkan *resources* secara optimal.

Jika aku berada di daerah dan kebetulan melintas di salah satu kantor milik Kemenkeu, pikiranku langsung melayang-layang dan bertanya-tanya, “Di gedung sebesar ini, berapa jumlah pegawainya?” Ketika memimpin rapat yang membahas anggaran dan rencana kerja, ingatkanku tentang gedung itu belum hilang.

“Aku melihat cat di gedung itu tidak sesuai standar. Tunggu saja sampai catnya pudar dulu. Mengapa kalian menggunakan cat dengan aturanmu sendiri?” tanyaku dalam rapat ketika unit yang membawahi kantor tersebut minta anggaran.

Memang aku sangat detail dalam urusan semacam ini. Itu semua untuk menjaga dan memastikan tak ada yang bermain-main dengan anggaran. Ketika mengundang pemenang lelang, aku selalu mengingatkan agar mereka bekerja dengan benar dan menjaga integritas. Sinyal-sinyal itu selalu aku sampaikan kepada para pemenang lelang. *Role model* dan *walk the talk* selalu aku jalankan. Sebagai Kepala Biro yang dimiliki Kemenkeu, jika ada waktu kosong, aku selalu berupaya terjun ke lapangan untuk memastikan bahwa semuanya berada di rel yang tepat.

Kemenkeu sejak dulu menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk pengadaan barang dan jasa, yang saat ini digunakan oleh puluhan lembaga. Aku selalu memantau rencana seperti apa dan sejauh mana realisasinya sehingga aku punya perkiraan capaian anggaran maupun kinerja per periode. Untuk pemantauan realisasi anggaran ada aplikasi yang disiapkan oleh Vigo Wijanarko beserta tim dengan nama MONIKA. Di Kantor Staf Presiden, ada tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran atau TEPR. Kalau tim BPKP memintaku melaporkan, aku tinggal membuka MONIKA dan tampaklah data realisasi anggaran sampai level satker (saat itu belum ada SAKTI).

Pada periode 1990-1992, aku menjadi auditor di BPKP. Aku ditempatkan di Bidang Perencanaan, Analisa Hasil Pengawasan dan Evaluasi Tata Kerja (PAE)-Di sana aku belajar bekerja di lapangan. Pengalaman ini menginspirasi untuk selalu melakukan monitoring dan evaluasi proyek-proyek di Kemenkeu. Apalagi beberapa bulan sebelum tutup buku, aku selalu sibuk memantau kinerja.

Di Biro Perencanaan dan Keuangan, pada akhir triwulan ketiga dan keempat, pada saat waktu luang dan tak ada rapat, aku mengajak Kabag Anggaran berkeliling Kota Jakarta, melihat kantor-kantor Kemenkeu yang sedang dalam pengerjaan. Sebelumnya, aku sudah membawa bekal data dan angka tentang proyek tersebut. Ketika aku masuk, aku terkadang masih melihat ada gundukan pasir dan semen, aku mengingatkan agar segera diselesaikan sebelum masa kontrak berakhir.

Di proyek lain yang lebih besar dan berisiko, teman-teman Biro mengecek proyek setiap minggu. Proyek di Lapangan Banteng, stafku mengeceknya setiap hari. Proyek-proyek itu harus diselesaikan *proper*, sesuai ketentuan. Karena pola monitoring yang ketat, maka apabila terdapat pekerjaan yang bermasalah, misalnya ada proyek yang harus dihentikan, atau bermasalah dan harus dikenakan denda, maka aku sudah punya datanya.

Selama menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan banyak pengetahuan dan pengalaman yang aku peroleh. Bagaimana aku menangani perencanaan, anggaran, dan evaluasinya; Bagaimana menghadapi DPR saat kami melakukan pembahasan anggaran; Bagaimana bersama-sama BPK melakukan audit; bersama Bappenas melakukan monitoring program; bersama Ditjen Anggaran sebagai regulator anggaran membahas alokasi anggaran; dan bersama Ditjen Perbendaharaan membahas pelaksanaan anggaran beserta pertanggungjawabannya, merupakan suatu pembelajaran yang sangat berharga dalam mengimplementasikan reformasi manajemen keuangan negara. Jadi aku merasakan reformasi keuangan negara *in action*.

Pada saat aku menjabat Inspektur Jenderal, aku memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Ponsel pintar sekarang sudah mampu merekam video. Aku meminta kepala kantor yang punya proyek untuk merekam dan mengirimkannya melalui ponsel pintar.

Aku selalu berupaya memompa semangat ke seluruh penjurur, seperti “memompa darah ke seluruh tubuh”, Aku harus memastikan denyut jantung tidak berhenti.

Penghargaan Tertinggi dari Presiden untuk Pengarusutamaan Gender

Kepedulianku pada kesetaraan gender mendorongku untuk menerapkannya di seluruh institusi Kementerian Keuangan. Selama lima tahun (2009-2015), sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan aku ditugasi untuk memimpin Tim Pengarusutamaan Gender kemenkeu. Aku berusaha mewujudkan agar berbagai fasilitas



19 Desember 2018: Sumiyati (kiri), ketika itu Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Utama Kategori Mentor untuk kali ketiga. Sumber

FOTO: BUKU "LAPORAN IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN KEUANGAN", 2020

dan peraturan kepegawaian di Kemenkeu peduli pada kesetaraan gender. Usahaku bersama Tim PUG tidak sia-sia. Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kemenkeu akhirnya mendapatkan penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo.

Menurutku, sangat wajar Kementerian Keuangan meraih penghargaan tertinggi di bidang Pengarusutamaan Gender dari Presiden RI untuk kelas Mentor. Kami menggelar berbagai program untuk merawat (*grooming*) kaum perempuan. Mengapa? Karena perempuan itu adalah empu, ibu, induk yang berbeda dengan laki-laki, sehingga kebutuhan keperempuannannya harus direspon secara tepat oleh institusi.

Adapun dalam budaya Timur, lelaki secara alamiah adalah pencari nafkah, tidak selalu harus dekat dengan anak-anak. Perempuan lah yang harus dekat dengan anak-anak, karena kodratnya harus hamil dan menyusui. Jika perempuan tidak diajari

dengan benar, pengaruhnya sangat besar terhadap anak-cucu kelak. Jadi aku berpikir "investasi" harus dilakukan dengan benar. Investasi pada perempuan sama halnya dengan investasi untuk generasi mendatang, tetapi kalau investasi untuk laki-laki pada umumnya hanya untuk laki-laki itu sendiri.

Kemenkeu akhirnya meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Utama Kategori Mentor untuk kali ketiga pada 19 Desember 2018. Penghargaan ini buah manis dari komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan atas implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai bidang tugas dan fungsi serta kewenangannya. Setiap unit eselon I bersinergi dan bersama-sama mendukung pelaksanaan implementasi PUG. Dengan seperangkat komponen kunci yang disebut "Tujuh Prasyarat PUG", implementasi PUG di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi lebih terarah dan sistematis untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan Kemenkeu.

Adapun area yang digarap dalam membangun keadilan gender mencakup aspek internal dan aspek pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk aspek internal dirumuskan dari sekretaris jenderal selaku pembina kepegawaian, seperti sarana prasarana, anggaran, pelatihan, penataan kepegawaian, dan berbagai fasilitas lain. Aspek pelayanan kepada mitra atau masyarakat dikerjakan oleh setiap unit.

Aku sangat teliti pada hal-hal kecil. Mungkin karena naluri perempuanku bekerja tanpa henti. Misalnya, aku sangat memperhatikan pemasangan *paving block* yang tidak boleh ada yang bolong agar tidak mengganggu sepatu perempuan. Atau lantai di berbagai kantor di lingkungan Kemenkeu tak boleh ada yang licin. Aku juga peduli pada akses kaum difabel agar mereka tetap mempunyai hak untuk melakukan mobilitas.

Ketika aku menjabat Kepala BPPK, aku meminta agar tangga yang curam dan membahayakan penggunaanya untuk dibongkar, dan diganti dengan tangga yang "ramah". Demikian pula, aku meminta agar jembatan penyeberangan orang di Jalan Wahidin di

dekat kantor Kemenkeu, yang tidak responsif terhadap perempuan dan kaum lanjut usia (lansia), untuk dibongkar. Kini banyak orang menggunakan jembatan penyeberangan yang lebih “ramah”.

Kampanye pengarusutamaan gender ini kemudian menyebar ke seluruh jajaran Kemenkeu. Ditjen Kekayaan Negara dan Inspektorat Jenderal kini memiliki Ruang Laktasi. Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan memiliki Ruang Laktasi dengan akses masuk berupa sensor retina mata.

Kantor Pusat Ditjen Kekayaan Negara menyediakan toilet bagi kaum difabel dan toilet yang dilengkapi pembalut bagi kaum perempuan. Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai menyediakan Tempat Penitipan Anak (TPA), sementara Kantor Inspektorat Jenderal menyediakan Ruang Bermain Anak.

Kantor Pusat Ditjen Perimbangan Keuangan memiliki lift ramah bagi penyandang disabilitas, yang dilengkapi dengan tombol huruf braille. Kantor ini juga memiliki pintu masuk khusus ibu hamil, serta menyediakan kursi roda dan tongkat bagi penyandang disabilitas. Kantor pusat BPPK menyediakan *priority parking* bagi kaum disabilitas di halaman parkir mereka. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menyediakan pintu masuk khusus bagi ibu hamil dan penyandang disabilitas.

Di daerah, kantor-kantor di bawah Kemenkeu juga melakukan hal serupa. Kantor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo misalnya, menyediakan Ruang Laktasi dan Toilet Khusus Difabel dan Ramah Anak. Sedangkan KPP Bea dan Cukai Bekasi menyediakan Ruang Bermain Anak.

Dari sisi kebijakan dalam pengelolaan sumber daya manusia, sejak penentuan formasi, rekrutmen, pelatihan, penempatan, manajemen talenta, dan berbagai aspek lainnya telah diupayakan responsif gender, termasuk tugas pelayanan dalam tugas dan fungsi di setiap eselon 1. Dengan demikian diharapkan kaum perempuan dapat memperoleh hak untuk mengakses, berkontribusi, serta menikmati hasil pembangunan dan selanjutnya akan tercipta kesetaraan gender.

Mei Ling

SUMIYATI SOKO GURU AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA



Mei Ling

Bagi Mei Ling, Sumiyati adalah guru dan mentornya sejak pertama mengenalnya pada tahun 2005. Mei Ling mengenal Sumiyati ketika dia baru pulang dari tugas belajar mengenyam pendidikan S2 di Waseda University Jepang. Mei Ling ditempatkan di Subbidang Pengembangan Sistem Akuntansi, yang berada dalam satu ruangan yang sama dengan Sumiyati.

Tahun 2005 adalah tahun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kas Menuju Akrual, sekaligus penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk pertama kalinya. Banyak sekali pengaturan sistem akuntansi yang perlu dikembangkan saat itu.

“Ibu Sumiyati adalah tempat saya — yang saat itu pegawai yang masih relatif baru— bertanya dan meminta bimbingan. Ibu Sumiyati selalu memiliki jawaban dan alternatif solusi atas berbagai pertanyaan,” kata Mei Ling, Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Pelaku Sejarah Reformasi Keuangan Negara

Mei Ling melihat besarnya peran Sumiyati dalam mengawal lahirnya Undang-Undang Keuangan Negara dan meletakkan fundamental akuntansi pemerintahan. “Ini membuat beliau menjadi salah satu pelaku sejarah reformasi keuangan negara. Ibu Sumiyati adalah salah satu tokoh utama di balik layar reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia,” ungkapnya.

Sebagai salah satu ahli akuntansi keuangan sektor publik dan pionir terbentuknya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), Sumiyati adalah sosok yang mengawal penyusunan dan penerbitan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) perdana. Tidak hanya sampai di situ,



Sumiyati juga melanjutkan perjuangannya untuk mengawal penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk pertama kalinya.

Selama bergabung dengan KSAP sebagai anggota Kelompok Kerja, Mei Ling banyak belajar dari Sumiyati mengenai pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), termasuk dalam melihat suatu permasalahan dengan perspektif yang lebih luas dan mencari alternatif solusi. Sumiyati selalu mengingatkan bahwa akuntansi pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari penganggaran, karena akuntansi pemerintahan merupakan pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran.

Tidak hanya Pemerintah Pusat, reformasi akuntansi pemerintahan juga dilakukan pada pemerintah daerah. Sebagai Kepala Subbidang Bimbingan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Sumiyati mendapat amanah untuk mengawal dan mendorong reformasi akuntansi pemerintahan, termasuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk pertama kalinya, melalui berbagai program capacity building, sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh pemerintah daerah.

“Masih teringat dalam benak saya waktu pertama kalinya diberikan kepercayaan untuk terlibat dalam program capacity building pemerintah daerah. Saya mendapat kehormatan untuk dapat membawakan materi bersama Ibu Sumiyati, yang sekaligus menjadi mentor dan memberikan inspirasi bagaimana melakukan knowledge sharing yang efektif kepada pemerintah daerah,” cerita Mei Ling.

“Ensiklopedia Berjalan”

“Satu hal yang selalu saya kagumi dari Ibu Sumiyati adalah pengetahuan beliau yang begitu komprehensif dan detail tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah, seperti ‘ensiklopedia berjalan’. Beliau hafal di luar kepala mengenai sejarah, latar belakang dan isi berbagai peraturan di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Beliau selalu menyampaikan penjelasan atau argumen dengan tata bahasa, kerangka logika dan urutan kronologis yang baik, sehingga dapat dipahami oleh semua kalangan,” papar Mei Ling.

Setelah pembentukan direktorat baru, Mei Ling bersama Sumiyati juga terlibat dalam pengembangan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dimulai dari pengembangan tata kelola, peraturan, penilaian dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum untuk pertama kalinya. Sebagai Kepala Seksi Pola dan Standar Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, kepiawaian Sumiyati kembali terlihat dalam pembangunan tata kelola Badan Layanan Umum yang baru lahir.

“Beliau juga salah satu sosok yang pertama kali memperkenalkan *Government Finance Statistics* (GFS), suatu istilah yang terdengar asing kala itu, kepada saya. Beliau menyampaikan kalau GFS merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kemanfaatan informasi dalam laporan keuangan. Saya tidak menyangka beberapa tahun kemudian saya diminta untuk mengawal pengembangan GFS di Indonesia,” paparnya.

Setelah Mei Ling kembali dari tugas belajar S3, Sumiyati mendapat kepercayaan untuk menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan. “Kapasitas Ibu Sum sebagai akuntan yang andal dalam membangun tata kelola keuangan sektor publik telah menghasilkan berbagai bukti nyata. Kementerian Keuangan dapat memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya di bawah besutan tangan dingin Ibu Sum,” urainya.

Tidak hanya sampai di situ, sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sumiyati juga melanjutkan perjuangannya untuk mengawal penerapan akuntansi berbasis akrual untuk pertama kalinya di Indonesia, sampai LK BUN dan LKPP tahun 2016 memperoleh opini audit WTP. Menurut Mei Ling, Sumiyati juga selalu mendukung dalam diskusi temuan dan mengawal tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. “Beliau adalah tempat bertanya untuk permasalahan terkait akuntansi pemerintahan,” kata Mei Ling.

Sepak terjang dan torehan prestasi Sumiyati sudah menjadi *legacy* akuntansi pemerintahan bagi para pelaku keuangan negara dan daerah. “Langkah, dedikasi dan pengabdian Ibu Sumiyati akan selalu menjadi inspirasi bagi saya dalam melanjutkan perjuangan beliau untuk terus mengawal pengelolaan keuangan negara dan daerah yang transparan dan akuntabel,” tutur Mei Ling, yang juga Anggota Kelompok Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).⁴

Marudut Napitupulu

SUMIYATI MENDORONG PERBAIKAN TATA KELOLA ANGGARAN DARI HILIR KE HULU DENGAN PENDEKATAN HUMANIS



Marudut Napitupulu

Sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sumiyati adalah nahkoda yang bercita-cita agar Kementerian Keuangan sebagai Pengguna Anggaran BA015 tidak cukup sekadar memperoleh Opini WTP atas Audit BPK pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan. Lebih jauh, “Beliau menginginkan terciptanya Perencanaan dan Penganggaran yang berkualitas termasuk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang menghasilkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas (value for money) yang semakin baik,” kata Marudut Napitupulu, Kepala Bagian

Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan, Setjen Kemenkeu.

Kesempurnaan yang sudah diperoleh Kementerian Keuangan di area hilir yaitu akuntansi pelaporan perlu diperkuat juga dengan penyempurnaan di area hulu yakni bagaimana anggaran direncanakan

⁴ Mei Ling, S.E., Ak., MBA., PhD., CA., Cert IPSAS adalah Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; dan Anggota Kelompok Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

dengan sebaik-baiknya, karena ada ungkapan yang sangat familiar di Biro Perencanaan dan Keuangan — yang juga sering diingatkan Sumiyati yaitu “gagal merencanakan adalah merencanakan kegagalan”.

“Seiring dengan upaya perbaikan di hulu, pada aspek Perencanaan dan Penganggaran di bawah kepemimpinan Ibu Sumiyati, beberapa pejabat dan pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan dari setiap bagian dipilih menjadi *champion team* yang ditugaskan untuk merancang sebuah panduan yang kemudian dikenal dengan *Better Practice Guide* (BPG). Penyusunan panduan ini memerlukan waktu yang tidak sedikit, komitmen dan konsistensi seluruh anggota di bawah kepemimpinan Ibu Sumiyati. Pada akhirnya, Biro Perencanaan dan Keuangan mampu menghasilkan panduan tepat waktu dan mendapat apresiasi yang sangat baik,” ungkap M. Napitupulu.⁵

Panduan ini sangat bermanfaat karena berisi hal-hal mendasar yang harus diketahui oleh para senior manajer di Kementerian Keuangan dalam menyusun perencanaan anggaran yang berkualitas. Bagi praktisi yang bergerak di bidang perencanaan dan penganggaran, kami yakin panduan ini sangat bermanfaat memberikan kerangka konseptual dan praktis atas penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja. Bukan saja bagi perencanaan anggaran di tingkat pusat, namun juga bagi rekan-rekan perencanaan anggaran di pemerintah daerah. Dan tentu saja bagi para manajer dan eksekutif di pemerintahan, panduan ini memuat banyak konsep untuk meningkatkan kualitas perencanaan.

Mengutip Menteri Keuangan (waktu itu) Bapak Bambang Brodjonegoro dalam pengantarannya, “BPG ini berisi intisari prinsip-prinsip dan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan dalam rangka pemantapan penyusunan rencana kerja dan anggaran berbasis kinerja”. Selaras dengan Menteri, perwakilan *Government Partnership Fund* (GPF) Australia juga mendukung dengan menguatkan bahwa BPG *discusses a range of principles and techniques designed to embed internal budgeting in an organisation's planning and performance structure, and will greatly enhance the Indonesian Ministry of Finance's introduction of the reforms.*

Sekretaris Jenderal (alm. K. A. Badaruddin) pada waktu itu juga mendorong, “Semoga BPG ini menjadi salah satu modal yang kuat dan panduan yang bermanfaat dalam perencanaan dan penganggaran bagi

⁵ Diolah dari penjelasan tertulis Marudut R. Napitupulu SST. Ak. MPP, Kepala Bagian Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan, Setjen Kemenkeu, Rabu, 13 Juli 2022

para pemangku kepentingan di Kementerian Keuangan (juga Kementerian lainnya).”

BPG Merupakan “Legacy” Ibu Sumiyati

Menurut Marudut Napitupulu, BPG adalah salah satu *legacy* atau warisan yang sangat berharga dari kepemimpinan Sumiyati sebagai usaha penyempurnaan perencanaan anggaran di Kementerian Lembaga dengan sangat humanis.

Dalam proses penyusunan panduan ini, M Napitupulu sebagai salah satu kontributor menyaksikan betul determinasi, persistensi dan peran Sumiyati sebagai pemimpin yang menjadi enabler memberikan ruang yang sangat luas bagi pegawai yang lebih muda untuk secara aktif dan produktif memberikan kontribusi.

“Misalnya, untuk mendapatkan kapasitas yang memadai, Ibu Sumiyati menugasi kami untuk pelatihan secara intensif dengan School of Management and Business Institut Teknologi Bandung (ITB) selama berbulan-bulan lamanya di sela-sela menyelesaikan pekerjaan rutin. Melengkapi pelatihan dalam negeri, juga anggota tim diberikan kesempatan untuk mengikuti benchmark dan visiting ke negara-negara OECD seperti Australia dan Selandia Baru (New Zealand) yang sudah terlebih dahulu menerapkan penganggaran yang lebih modern. Kesempatan ini tidak saja menambah kapasitas secara teknis tetapi menambah cakrawala dan wawasan kami sehingga menjadi bekal dalam penyelesaian panduan dan mampu memahami konseptual dan praktikal dinamika tata kelola anggaran yang semakin kompleks,” paparnya.

Singkatnya, kata Napitupulu, Sumiyati sangat demanding dan membuat target yang challenging (menantang), namun di sisi lain sangat suportif memfasilitasi apa yang diperlukan oleh pegawainya dalam menyelesaikan penugasan.

“Tentunya, banyak sekali kesan mendalam, baik bimbingan dan petuah yang disampaikan oleh Ibu Sumiyati kepada kami — yang tentunya menjadi bekal penting meniti karier di masa mendatang, terutama dalam mengawal tata kelola anggaran di Kementerian Keuangan yang menjadi tugas generasi yang lebih muda,” urainya.

Tiga Hal yang Patut Diteladani dari Sumiyati

Melengkapi pengalaman profesional, secara pribadi observasi ada tiga hal yang menurut Marudut Napitupulu sangat patut diteladani. “Pertama, saya sangat terkesan dengan komitmen Ibu Sumiyati yang sangat menghargai ketepatan waktu, on-time. Dalam setiap kesempatan, Ibu Sumiyati sudah ready 15 menit sebelum mulai kegiatan. Selain demi kelancaran kegiatan, poin penting yang beliau sampaikan satu hal yang berharga adalah jangan sampai menghukum orang yang sudah tepat waktu,” ungkapnya.

Kedua, dalam menghadapi perjalanan karier ketika menghadapi tantangan atau permasalahan (“tembok”), Sumiyati mengingatkan untuk tidak menabrak tembok, tetapi juga bukan berarti diam atau berpasrah, sebaliknya selalu berusaha menemukan cara untuk melewati “tembok” tersebut dengan cara yang lebih strategis, meskipun sedikit melingkar tetapi mencapai tujuan. “Bagian yang ini saya kurang pintar membahasakan tetapi dapat memaknai sangat mendalam meskipun dituturkan dalam bahasa mataram yang begitu indah,” kata Napitupulu.

Ketiga, menurut Marudut Napitupulu, Sumiyati menerapkan “stick, sermon and carrots” secara harmonis. *Stick* dengan target arahan *destination statement* yang tinggi. *Sermon* dengan pengulangan arahan dan pelatihan pegawai yang efektif. Dan tentunya *carrots* memberikan kesempatan dan rewards dengan porsi yang tepat bagi pegawai yang berprestasi. Tentunya keteladanan itu dapat diterapkan dalam sisi manajerial bagi pegawai yang lebih muda kelak ketika memimpin.

“Singkatnya, ada banyak hal tentunya yang kami sangat kagumi dan jadikan benchmark atas kepemimpinan Ibu Sumiyati. Kiranya kami bisa melanjutkan hal-hal *excellent* yang sudah diwariskan Beliau terutama di area tata kelola anggaran Kementerian Keuangan. Terima kasih, mauiate godang, matur sembah untuk Ibu Sumiyati yang membimbing kami tanpa pandang bulu dan selalu memberikan ruang untuk bertumbuh lebih baik,” katanya.

Malul Azam

SUMIYATI TAK PERNAH SUNGKAN BERBAGI PENGETAHUAN



Malul Azam

Suatu siang pada triwulan keempat tahun 2007, Malul Azam dan beberapa orang rekan dari Bagian Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) diminta menghadiri sebuah rapat yang dipimpin langsung oleh Sekjen Kemenkeu Mulia P Nasution, yang salah satu agenda pembahasannya terkait Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.

Dalam forum tersebut, Sekjen Mulia Nasution memperkenalkan bahwa yang akan menjadi nahkoda di Bagian Aklap adalah Sumiyati Ak. MFM — yang akrab dipanggil Bu Sum. Itulah pertama kali Malul Azam mengenal Sumiyati. Bagian Aklap merupakan salah satu unit eselon III di bawah Biro Perencanaan dan Keuangan (saat itu masih bernama Biro Keuangan), yang salah satu tugasnya menyusun Laporan Keuangan Kementerian Keuangan.

Pandangan hadirin rapat terarah pada seorang ibu berpakaian putih bersih. Rambutnya diikat rapi, dan tubuhnya tinggi tegap. “Wah, akhirnya ada juga rekan kerja yang berlatar belakang akuntansi,” gumam Azam waktu itu. Dia bertanya kepada rekan kerja satu Bagian, rupanya belum ada yang mengenal sosok Sumiyati. Sejak itu, pada tahun 2007, mulai jamak pegawai dari unit eselon I lain mendapatkan penugasan di unit kerja berbeda, seperti Sumiyati dari Ditjen Perbendaharaan dipromosikan di Setjen.

Demografi rekan kerja Aklap pada masa itu hampir setengahnya berisi pegawai yang akan purnatugas pada lima tahun mendatang. Saat itu, Sumiyati mendapatkan arahan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tidak hanya di Kemenkeu tetapi juga kepada seluruh K/L.

Kurang lebih seminggu berlalu setelah pelantikan, Sumiyati akhirnya mulai mengisi hari kerjanya di Aklap. Azam ingat betul, hal pertama yang dilakukan Sumiyati setelah berkenalan adalah berdiskusi dengan stafnya dan melakukan inventarisasi hal-hal yang menjadi *pending issues* dan

mengkalkulasi kekuatan SDM. Sumiyati hendak menimbanginya dengan tantangannya, karena masa itu adalah awal-awal akuntansi sektor publik sedang bergeliat dan menerapkan pendekatan baru, *cash-toward-accrual*.

Dari sekadar membukukan dokumen penerimaan dan pengeluaran, menjadi menghasilkan neraca, termasuk mencatat aktiva dan kewajiban Kementerian. Sebagai kementerian yang membukukan penerimaan pajak termasuk piutangnya, ditambah jumlah dan sebaran satuan kerja di seluruh pelosok tanah air, tugas-tugas ini akan menjadi tantangan tersendiri. Satuan kerja yang sebelumnya tidak menjadi entitas akuntansi tiba-tiba berubah menjadi entitas yang melakukan transaksi dan melaporkannya.

Terbayang masalah pengembangan kapasitas untuk sampai ke sana. Namun, saat itu Sumiyati terheran-heran karena di tempat kerja yang membidangi akuntansi untuk lingkup kementerian, ternyata hanya ada satu orang akuntan. Bagaimana nanti pegawai Aklap harus men-transfer knowledge dan mindset ke seluruh unit kerja Kemenkeu, baik yang ada di pusat maupun daerah?

Tanpa pikir panjang, langkah pertama yang dilakukan Sumiyati yaitu membangun kapasitas unit Aklap. Bulan pertama, hampir setiap hari kerja Azam dan kawan-kawannya dikumpulkan. Sumiyati menggelar papan tulis dan langsung menjelaskan dari awal, terkadang pada pagi hari atau setelah makan siang. Mulai dari tiga paket undang-undang keuangan negara hingga penjelasan detail standar akuntansi pemerintah.

Bagi Malul Azam dan kawan-kawannya, itu sungguh kesempatan langka, mendengar langsung narasi pengelolaan keuangan publik, khususnya akuntansi pemerintah dari konseptornya langsung. Sumiyati juga kemudian membukakan pintu akses bagi para stafnya untuk belajar dari narasumber lain di luar. Sebagai narasumber nasional dalam pengelolaan keuangan negara, Sumiyati sering diminta mengisi berbagai kelas dan seminar.

“Alhamdulillah, saya sering diajak serta sekadar menemani beliau menjadi narasumber atau jadi asisten sorot (asrot) — bertugas untuk menampilkan dan mengoperasikan bahan presentasi, sesuai arahan beliau yang melakukan presentasi. Dari sana, saya paham betul kapasitas dan kemampuan Ibu Sumiyati di bidang keuangan negara. Bahkan beberapa

bulan kemudian ketika beliau terlalu sibuk, saya diminta menjadi badal yang menggantinya mengajar,” ungkap Malul Azam.⁶

Tidak hanya ilmu akuntansi, Sumiyati juga kerap membagi ilmu bagaimana berkomunikasi di depan audiens dan membuat tulisan yang baik. “Jangan sekali-kali melihat lantai atau memasukkan tangan ke saku celana ketika sedang berbicara kepada audiens,” jelasnya. Ke depan, hal ini penting mengingat tugas Azam dan kawan-kawannya menjadi pembina penyusunan laporan keuangan lingkup Kemenkeu. Kecakapan merangkai kata dalam bahasa tulis juga tidak kalah penting, agar pesan yang disampaikan dalam penjelasan laporan keuangan bisa dipahami dengan baik oleh pembaca laporan keuangan.

Malul Azam ingat betul, di awal-awal menyusun sebuah catatan atas laporan keuangan semuanya ditandai oleh Sumiyati. Seiring berjalannya waktu, Staf Aklap terus belajar dan berkembang menjadi makin solid, terutama dari aspek kapasitas dan kompetensi SDM. Ini sejalan dengan semangat Sumiyati menjadikan pengelolaan keuangan, terutama penyusunan laporan keuangan menjadi yang terdepan, karena akan menjadi kiblat dan benchmark bagi K/L lain.

Bekal pengetahuannya tentang keuangan negara dan tempaan pengalamannya menjadi pendidik, Sumiyati menjadikan implementasi berbagai kebijakannya selalu diawali dengan bertutur teori/filosofi yang mendasari itu semua, termasuk perdebatan ketika kebijakan dirumuskan. Dengan demikian, staf Aklap bisa memahami intisari atau spirit dari pembuat kebijakan. Selain menjadikan Azam dan kawan-kawannya berpikir kritis, Sumiyati selalu menekankan ilmu sebelum beramal. Teori keuangan negara yang acap membingungkan menjadi terasa lebih mudah dipahami dan dipraktikkan, seperti ketika membuat jurnal akuntansi.

Selain di kalangan internal, Sumiyati juga tidak pelit berbagi ilmu dengan banyak pihak termasuk para auditor BPK. Lagi-lagi karena saat itu memang masih tahap awal implementasi akuntansi pemerintah, sehingga para stafnya masih dalam tahap belajar. Selain solusi itu, Sumiyati juga mendatangkan pegawai dari Ditjen Perbendaharaan yang sukarela mau bergabung dengan Aklap. Selang beberapa tahun kemudian, Bagian Aklap juga kedatangan beberapa lulusan STAN yang bergabung sehingga SDM bidang akuntansi yang dimiliki kian solid.

⁶ Malul Azam, Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan; Mahasiswa Program Doktorat Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Belgia.

Membayangkan kemajuan pesat akuntansi pemerintahan sektor publik saat ini, terasa bagaikan langit dan bumi, terutama dibandingkan dengan era tahun 2006, ketika kementerian/lembaga mulai dimandatkan menyusun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga masing-masing. Mendekati pertengahan tahun 2008, demi membumikan akuntansi pemerintahan kepada K/L, disepakati diselenggarakan program percepatan, kemudian dikenal sebagai Program Percepatan Akuntansi Keuangan Pemerintahan atau disingkat PPAKP. Sumiyati dan tim diberikan amanah untuk menyusun konsep dan menjalankan program tersebut.

Pemikirannya sederhana, jika pada saat itu di Kemenkeu saja komposisi sumber daya yang menangani akuntansi cukup terbatas, di K/L lain tentunya tidak jauh berbeda bahkan bisa jadi lebih menyedihkan. Oleh karenanya, diperlukan akselerasi peningkatan kapasitas kepada seluruh K/L. Pada tahap awal, Sumiyati mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menyiapkan penyusunan konten program dan TOT atau pembekalan bagi para calon pengajar. Semua dilakukan serba kilat.

Akhir tahun 2008, Malul Azam mendapatkan kesempatan tugas belajar keluar negeri sampai tahun 2010. Pada akhir tahun yang sama, sepulang dari tugas belajar, Sumiyati sudah menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, sebelum definitif pada 2011. Tugas Sumiyati mencakup dari perencanaan, pengelolaan kinerja, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan. Azam setelah pulang tugas belajar ditempatkan pada unit kerja yang menangani pelaksanaan anggaran selama satu tahun, kemudian pindah ke unit penganggaran, dan tidak lagi menangani penyusunan laporan keuangan.

Ketika Sumiyati menjadi Kepala Biro, beberapa area di pengelolaan keuangan publik seperti penganggaran memang masih dalam tahap awal perubahan, terutama penganggaran berbasis kinerja dan pengelolaan kinerja. Pada kurun waktu 2013 sampai 2015, Sumiyati sempat mengirimkan beberapa pegawai untuk melakukan benchmarking dan melihat langsung best practice penganggaran berbasis kinerja dari negara lain yang sudah lebih dulu mengimplementasikan model ini seperti Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.

“Kami berkesempatan langsung mendengar dari praktisi maupun akademisi tentang implementasi guna dijadikan pembelajaran dan mencari bentuk yang best-fit dengan karakteristik birokrasi di

Indonesia. Menimbang posisi Kemenkeu sebagai unit yang selalu menjadi benchmarking atau inspirasi bagi K/L lain, beliau selalu berusaha menjadikan Kemenkeu terdepan dan terbaik dalam pengelolaan keuangan negara,” cerita Malul Azam.

Atas capaian dan kinerjanya, Sumiyati dilantik menjadi Kepala BPPK pada tahun 2015. Pengenalan Sumiyati oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, juga sangat spesial, ketika rapat kerja dengan Komisi XI sebagai salah satu pejabat perempuan yang akan menduduki posisi eselon I di Kementerian Keuangan. Pada tahun 2017, Sumiyati dilantik menjadi Irjen Kemenkeu, sebelum akhirnya purnatugas sebagai PNS tahun 2021.

Periode setelah Sumiyati menjadi pejabat eselon I pun masih menaruh perhatian kepada stafnya di Biro. Sumiyati sesekali waktu memantau perkembangan reformasi yang dilakukan jajaran Biro Perencanaan dan Keuangan, seperti peningkatan kualitas penganggaran dan implementasi pengarusutamaan gender. Selain berbagi ilmu dan pengalaman dalam penugasan baru Sumiyati selama menjadi Irjen, Malul Azam dan kawan-kawannya beberapa kali berkolaborasi untuk mengadakan program bagi women leader di Kemenkeu.

Setelah purnatugas, Sumiyati tidak pernah sungkan untuk berbagi ilmu. Selain itu, sebagai pimpinan, atensi Sumiyati tidak hanya terkait pekerjaan, dan selalu menyempatkan untuk menanyakan kepada stafnya tentang kondisi keluarga masing-masing. Hal ini guna memastikan setiap pegawainya bisa fokus bekerja dengan tidak terlalu dibebani masalah keluarga. Bila terdapat masalah, Sumiyati tidak segan untuk turun tangan langsung menawarkan bantuan.

Anne Serfiana

“SUMIYATI, KARTINI INDONESIA MULTITALENTA”



Anne Serfiana

Anne Serfiana merasa beruntung mengenal Sumiyati karena banyak pelajaran yang didapatkannya ketika bekerja bersama sosok perempuan hebat di Kementerian Keuangan tersebut. “Ibu Sumiyati adalah salah satu Kartini Indonesia multitalemta yang tetap tampil rendah hati. Segudang karyanya menjadi warisan buat generasi muda Kemenkeu,” katanya.

Anne bertemu kali pertama dengan Sumiyati pada tahun 1985 — yang saat itu asisten dosen. Anne beberapa kali pernah diajar Sumiyati saat dosen utama berhalangan hadir. “Saat itu yang saya lihat Bu Sum sosok yang sederhana dengan rambutnya yang panjang sekali,” ungkap Anne.

Ketika Anne ditempatkan di Itjen, salah satu ketua timnya bertanya, “Siapa ya Sumiyati itu? Beliau mengoordinir penertiban Rekening Pemerintah. Siapa ya beliau?” Ternyata Sumiyati yang dimaksud adalah Sumiyati, yang pernah menjadi asisten dosen Anne di STAN — dan saat itu bertugas di Sekretariat Jenderal.

Memperbaiki Laporan Keuangan dari Hulu

Ketika Anne bertugas di Itjen, dia bertemu lagi dengan Sumiyati — yang mendapat tugas mengawal penyusunan Laporan Keuangan Ditjen Bea dan Cukai. Saat itu Laporan Keuangan Kemenkeu masih mendapat Opini Disclaimer. “Saya bertemu Bu Sum yang turun langsung mengawal penyusunan Laporan Keuangan Bea dan Cukai. Di sana saya mulai memahami siapa sosok Sumiyati. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa untuk mencapai Laporan Keuangan dengan Opini Terbaik, harus ada perbaikan dari hulu. Jadi menurut Bu Sum, para staf penyusun Laporan Keuangan di tingkat Satker inilah yang perlu dibimbing dan diperhatikan, termasuk anggarannya,” urai Anne.

Awal 2012, Anne bergabung ke Setjen Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Sumiyati menjabat Kepala Biro. Anne sebagai Kepala Bagian Aklap, menjadi staf Sumiyati. Baru satu hari bergabung di sana, Anne sudah langsung ikut menyusun Laporan Keuangan Kemenkeu untuk tahun anggaran 2011 — yang memang menjadi tanggung jawab Kabag Aklap. Saat itu jadwal penyusunan Laporan Keuangan unaudited.

“Saya senang sekali karena cita-cita dan ide-ide beliau untuk membangun negeri ini sangat tulus. Hal itu menggugah saya untuk ikut membantu Bum Sum mewujudkan mimpi besar beliau yaitu mewujudkan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dengan Opini Terbaik. Ibu Sum bercita-cita mewujudkan Laporan Keuangan terkonsolidasi,” cerita Anne Serfiana, kini menjabat Direktur Keuangan Umum dan Sistem Informasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kemenkeu.⁷

Anne menambahkan, apa yang diimpikan Sumiyati dilaksanakan dengan upaya yang keras dan terstruktur, dipersiapkan selangkah demi selangkah, sampai akhirnya cita-cita Sumiyati terwujud. “Ibu Sum tidak pernah lelah memberi semangat kepada kami semua. Kini Kemenkeu sudah meraih Opini Terbaik Wajar Tanpa Pengecualian untuk kali ke-11.

“Meskipun tidak lagi bertugas di Biro Perencanaan dan Keuangan, Ibu Sumiyati tidak pernah lupa selalu datang ke tempat kami. Ketika diumumkan Kemenkeu meraih Opini terbaik WTP Ibu Sum langsung menyampaikan selamat kepada seluruh staf Biro. Kedatangan Ibu Sum memompa semangat kami,” ungkap Anne.

Ketika menyusun Laporan Keuangan Kemenkeu, papar Anne, Biro Perencanaan dan Keuangan harus berkoordinasi dengan sebelas unit eselon I. “Dalam kondisi tertentu, kami kadang bekerja seharian sampai pagi. Ibu Sum saat itu sudah menjadi pejabat eselon I tetap menyempatkan diri berkunjung, memberikan bimbingan dan melihat kondisi kami semua,” ungkap Anne.

Sumiyati selalu mengingatkan, Reformasi Keuangan Negara dan pentingnya Laporan Keuangan yang akuntabel tidak hanya untuk memperoleh Opini WTP tetapi juga yang lebih penting adalah sebagai sarana yang dapat digunakan pimpinan saat membuat kebijakan ataupun melakukan analisis agar memperoleh hasil lebih akurat.

⁷ Diolah dari penjelasan tertulis Anne Serfiana, Direktur Keuangan Umum dan Sistem Informasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan, 8 Agustus 2022

Memperbaiki Kemenkeu dari Sisi Pendidikan

Setelah pindah ke Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan atau BPPK, Sumiyati juga peduli untuk memperbaiki Kemenkeu dari sisi pendidikan.

“Ibu Sumiyati memperbaiki pola pendidikan di Kemenkeu agar sesuai dengan kebutuhan pegawai, karena saat itu disinyalir pola diklat tidak membekali, hanya teori-teori yang tidak membantu pekerjaan para pegawai. Termasuk pendidikan yang terkait penyusunan dan revidi LK. Beliau meminta para pengajar di BPPK untuk melihat langsung kondisi lapangan atas pekerjaan yang kami lakukan. Saya ingat beberapa pengajar utusan Ibu Sum diikutkan bersama kami dalam penyusunan Laporan Keuangan. Akhirnya kami mendengar bahwa Ibu Sum memprakarsai pembentukan Corporate University Kemenkeu,” urai Anne.

Tak Hanya Jadi Pengawas, Itjen Juga Mitra Seluruh Eselon I

Ketika menjabat Inspektur Jenderal Kemenkeu, Sumiyati tetap mau mendengarkan langsung bila ada seseorang ingin menyampaikan sesuatu kepada beliau. Sumiyati menyatakan bahwa Irjen tidak hanya menjadi pengawas tetapi harus menjadi mitra seluruh eselon I di Kemenkeu sehingga tim-tim revidi atas kegiatan di eselon I terkait penyusunan Laporan Keuangan digalakkan secara paralel saat proses penyusunan.

Akhirnya secara rutin dalam setiap penyusunan Laporan Keuangan, Tim Revidi dari Itjen ikut mendampingi kami, terutama saat membahas temuan dan rekomendasi dari aparat Pemeriksa Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Di Itjen, Sumiyati juga menjalin kerja sama dengan seluruh APIP dari semua kementerian dan lembaga, dan berbagi informasi dan pengalaman dengan mereka. Sumiyati masih tetap sesekali mengunjungi Anne dan kawan-kawannya ketika melakukan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan di Biro Perencanaan dan Keuangan.

Sumiyati Tetap Memasak dan Mencuci Sendiri Pakaiannya

Anne mengaku belum pernah bertemu dengan sosok yang sangat cerdas yang memiliki daya ingat yang tajam, sekaligus sebagai ibu yang selalu mengurus keluarganya, mulai dari mempersiapkan makanan, memasak, sampai mencuci. “Ketika Ibu Sum menjabat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, saya tidak menyangka beliau masih menyempatkan diri mengurus keluarganya. Saya sangat kagum pada Ibu Sum. Sebagai seorang

pemimpin, beliau tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Sebagai istri dan sebagai ibu, Ibu Sum menyiapkan makanan untuk keluarganya, memasak makanan di rumah, bahkan mencuci sendiri pakaian,” paparnya.

Menurut Anne, dia ingat ketika berkunjung ke rumah Sumiyati, melihat sosok yang dikaguminya itu sedang menggoreng makanan di dapur. “Ibu Sum bercerita jika ada satu-dua potong pakaian kotor, beliau mencuci sendiri pakaian itu karena masuk mesin cuci terlalu lama. Ternyata sesibuk apapun, Ibu Sum tetap seorang ibu yang mengurus keluarga dan mendidik anak-anaknya,” urainya.

Sumiyati sering berbagi pengalaman bagaimana dia mendidik anak-anaknya. “Ketika anak saya kesulitan belajar, Ibu Sum memberi nasihat dan berbagi pengalamannya bagaimana mendidik anak dan menstimulus anak yang memiliki permasalahan di sekolah. Ibu Sum memberi contoh bagaimana salah satu putrinya dianggap bermasalah terkait kecerdasan, setelah dibimbing dengan sabar dan penuh cinta, dapat menjadi anak yang luar biasa, lulus dengan predikat cum laude,” cerita Anne.

Sumiyati Hafal Kondisi Stafnya dan Keluarganya

Anne menilai Sumiyati seorang pemimpin yang hapal dengan kondisi para stafnya, termasuk segala sesuatu tentang keluarga mereka. “Ibu Sum tahu dan tidak lupa nama istri, jumlah anak, sekolah anak-anak para stafnya, dan segala sesuatu yang pernah diceritakan kepada beliau. Setiap bertemu dengan stafnya, Ibu Sum pasti menanyakan kabar istri, sekolah anak, kesehatan orangtua. Apakah anakmu masih susah makan? Apakah anakmu masih suka ngambek?” urai Anne.

“Bu Sum di tengah kesibukannya, mau menyempatkan waktunya untuk menghadiri undangan stafnya bila ada yang menikah walau lokasinya di kampung dan kurang nyaman, juga mengunjungi staf yang sakit atau mendapat kemalangan,” tutur Anne.

Pelajaran yang didapat Anne adalah, “Ibu Sum adalah pemimpin yang bukan *bossy*, tetapi merangkul bawahannya sebagai satu tim yang solid sebagai keluarga. Kami bebas menyampaikan pendapat dan Ibu Sum tetap mau menerima kami, bahkan setelah menjadi pejabat eselon I menjadi

Irjen — yang biasanya ditakuti semua orang, Ibu Sum tetap mau menerima staf paling rendah sekalipun,” ungkap Anne.

Prakarsai Pengarusutamaan Gender di Kemenkeu

Atas keteladanannya, Sumiyati dipercaya untuk memprakarsai pengarusutamaan gender (PUG) di Kemenkeu. Sejauh ini, kata Anne, sudah banyak perkembangan PUG di Kemenkeu, mulai dari sistem penganggarannya sampai pada kebijakan-kebijakan yang mendukung para perempuan, di antaranya cuti bagi suami ketika istri melahirkan, tersedianya ruang laktasi di setiap kantor dan fasilitas kantor untuk mendukung kaum disabilitas.

Anne menilai, Sumiyati sosok yang rendah hati. “Sebagai pemimpin, Ibu Sum bisa menjadi sahabat yang baik, yang mau mendengarkan cerita dan keluhan stafnya, mau bergaul dengan anak buahnya bagaikan teman. Misalnya mengajak mereka ke pusat perbelanjaan pada jam istirahat untuk membeli sesuatu — sebagaimana yang biasa dilakukan dengan teman sebaya,” tuturnya.

Daya Ingat yang Tajam

Anne juga melukiskan betapa daya ingat Sumiyati sangat tajam. Dalam memberikan bimbingan kepada para stafnya, Sumiyati dengan mudah menunjukkan referensi, “ini tercantum di buku X halaman sekian di sisi kiri.” Bagi Anne, daya ingat Sumiyati sungguh luar biasa.

Sumiyati bahkan ingat kapan dan di mana bertemu kali pertama dengan seseorang, termasuk pakaian yang dikenakan. Ketika bertemu dengan salah seorang pegawai, Sumiyati mengatakan, “Saya ingat kita bertemu di kampus STAN 30 tahun yang lalu dan kau memakai baju kotak-kotak.”

Kecerdasan dan daya ingat Sumiyati yang luar biasa, serta kerendahhatiannya membuat Anne semakin kagum dengan sosok Sumiyati. “Ibu Sum adalah guru yang baik. Seorang pemimpin yang rendah hati, yang patut diteladani. Ibu Sum dapat menjadi sahabat baik bagi anak buahnya karena selalu mau mendengar keluhan kami. Beliau ibu yang luar biasa, yang tidak melupakan kewajibannya di rumah, menjadi panutan para perempuan karena ide-idenya mendukung pengarusutamaan gender,” ungkap Anne.

Anne juga mengagumi Sumiyati yang sangat memahami tentang batik. “Saya pernah diajak mencari batik di Solo, dan beliau menjelaskan kepada saya tentang jenis-jenis batik. Sungguh luar biasa, sampai cerita batik pun, beliau paham. Saya merasa selalu bertambah ilmu jika sering dekat dengan Bu Sum. Karena beliau senang mengajar, kepada siapa pun, tak peduli ruang dan waktu, setiap ada kesempatan semua ilmunya selalu dibagi ke semuanya,” papar Anne.

LIMA

GEBRAKAN DI BPPK: DARI CORPU SAMPAI PKN STAN

Memilih Menjadi “Kepala Sekolah”

Suatu hari menjelang akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pertengahan 2014, aku dipanggil Menteri Keuangan M. Chatib Basri.

“Rasanya tidak *fair* kalau Bu Sum saya *gondeli* sebagai kepala biro. Sudah waktunya Bu Sum dipromosikan. Bu Sum minatnya di mana?” tanya Menteri Chatib Basri.

Aku tertawa mendengar kata-kata Pak Menteri.

“Ditugaskan di mana saja, saya siap, dan akan saya kerjakan dengan sepenuh hati. Kalau saya ditanya, saya pilih menjadi kepala sekolah saja,” jawabku. Sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, aku merasa bekerja “tanpa titik koma”.

“Mengapa Bu Sum memilih menjadi kepala sekolah?” tanya Menteri Chatib Basri.

“*Passion* saya memang menjadi guru,” sahutku.

“Sudah terlihat sekali bahwa Bu Sum itu guru,” kata Chatib Basri.

Ketika masa kepemimpinan Presiden SBY selesai dan keputusan presiden tentang jabatanku sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu keluar, aku berada di Belgia. Aku kembali ke Indonesia hari Sabtu, tetapi apa mungkin hari libur dilantik? Sementara Presiden baru Joko Widodo mulai bekerja dan pada hari Minggu sudah akan mengumumkan kabinet baru.

Keppres Presiden SBY yang belum pernah aku baca itu, belum pernah aku terima sudah berumur satu bulan dan tak ada kabar berita tentang pelantikan, sehingga sesuai ketentuan tidak berlaku lagi. Sementara di beberapa kementerian yang keppresnya keluar bersamaan, pelantikan tetap digelar pada hari Sabtu —yang merupakan hari libur resmi.

Aku tidak *mutung* dan tetap bekerja seperti biasa, tidak ada perubahan, serta tetap menjaga reputasi lembaga dan pimpinannya. Aku pikir jabatan itu amanah. Kalau memang “milik”, tak akan pindah ke orang lain, demikian keyakinanku.

Ikut “Bidding” Lagi

Akhirnya aku mengikuti *bidding* lagi untuk menjadi Kepala BPPK. Ketika proses *bidding* dimulai, posisiku berada di Selandia Baru. Stafku di Biro Perencanaan dan Keuangan, Marudut Napitupulu dan FX Cahyo Wijayanto, yang ikut dalam perjalanan dinas ke Selandia Baru, mencari tiket agar aku bisa kembali ke Jakarta dan mengikuti *bidding* Kepala BPPK.

Tiba di Jakarta, aku langsung mengikuti ujian kompetensi, mempresentasikan, “akan dibawa ke mana BPPK ke depan?” Setelah berproses cukup panjang, akhirnya aku terpilih sebagai Kepala BPPK.

Pengalamanku sebagai asisten dosen di STAN, instruktur di Pusdiklat Pengawasan BPKP, dan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan sebelumnya sangat berguna. Pengetahuanku tentang pelaksanaan reformasi sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara, mulai dari perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, sampai audit, memudahkan pekerjaanku di BPPK. Sebelumnya banyak mimpi dan konsep yang ada dalam pikiran untuk membangun kompetensi SDM pengelola keuangan negara agar menjadi profesional yang berintegritas.

Sebagai kepala biro, aku merasakan permasalahan yang dihadapi di semua unit tentang pengelolaan keuangan negara. Reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Kemenkeu terus berjalan.

Perubahan sedemikian cepat. Sebagian program diklat sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika yang ada. Oleh karena itu perlu adanya transformasi dan perlu jembatan yang harus dibangun untuk menghubungkan teori dan praktik, *international best practices*, serta memanfaatkan data, informasi, pengetahuan dan pengalaman para ahli serta *skill group owner* yang ada di semua unit. Sarana dan prasarana, kompetensi para widyaiswara, serta metodologi pembelajaran juga perlu disesuaikan dengan perkembangan di Kementerian Keuangan. Inilah yang aku pikirkan dan aku tuangkan saat mengikuti proses seleksi Kepala BPPK.

Perkuat SDM Kemenkeu Melalui Diklat

Setelah menjadi “kepala sekolah”, aku tertantang untuk mengimplementasikan ideku ke dalam sistem pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara, termasuk menerapkan digitalisasi.

Di BPPK, aku berdiskusi dengan beberapa pejabat struktural maupun fungsional. BPPK berkantor di Jalan Purnawarman 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara semua pusdiklat berkantor di tempat lain. Oleh karena itu, saya seringkali diskusi intensif dengan Sekretaris BPPK dan para Kapusdiklat, serta beberapa orang yang dapat diajak “berlari cepat”, antara lain Rahmadi Murwanto dan Heni Kartikawati, Iqbal Islami, Agus Hekso.

Perencanaan dan penganggaran merupakan kunci untuk alokasi anggaran yang tepat berdasarkan target kinerja, maka di tahap awal bidang inilah yang lebih mendapat prioritas.

“Saya minta rencana kerja disusun sesuai dengan kebutuhan mitra, analisis kebutuhan diklat dirancang dengan baik, indikator kinerja disepakati bersama, dan *engagement* dan komitmen yang kuat dibangun dengan mitra para eselon 1.

Akhirnya kami menyusun kurikulum diklat bersama-sama. Aku ingin metodologi pembelajaran yang tepat dengan tim pengajar yang kompeten, tidak hanya menjejali teori, dan peraturan tetapi juga melibatkan praktisi yang sudah berpengalaman, dan lebih sebagai

pendidikan vokasi. Evaluasi pasca-pelatihan pun, tidak dilakukan sebagaimana biasa setelah tiga bulan, namun dicek ke *output* pekerjaannya secara individu dan kinerja organisasi. Misalnya Rencana Kerja Anggaran harus selesai tepat waktu, benar dan tidak diberi catatan. Laporan keuangannya pun mesti tepat waktu dan andal, dan ketika diaudit BPK, tidak ada temuan.

Mewujudkan Corporate University Kemenkeu

Aku “mengaduk-aduk” BPPK. Aku mempelajari gagasan Corporate University atau Corpu agar pendidikan dan pelatihan yang diberikan memang yang dibutuhkan pegawai untuk keperluan peningkatan kinerja organisasi. Ilmu pengetahuan yang disampaikan tidak hanya menjadi pengetahuan bagi pribadi pegawai tetapi harus berdampak positif terhadap penyelesaian tugas-tugas di kantor. Aku berpikir sinergi harus dibangun berdasarkan kolaborasi antara pusklat dan unit teknis.

Aku ingin agar BPPK menjadi *training center* yang sesungguhnya. Setelah meng-*capture knowledge*, peserta diklat dapat mempraktikkannya di lapangan sesuai teori dan pengetahuan yang diperoleh. Yang diperbanyak adalah latihan, bukan ceramah sehingga diklat yang diselenggarakan bermanfaat dan menghasilkan SDM berkualitas. Tujuan akhirnya adalah agar SDM profesional, mampu mengelola keuangan negara dengan baik, sejak perencanaan dan penganggaran, eksekusi program, pembayaran, pengelolaan aset dan kewajiban serta audit dan pelaporan keuangan secara akuntabel dan transparan.

Kemenkeu dapat memahami akuntansi secara utuh, dapat membuat Laporan Keuangan meraih Opini Terbaik Wajar Tanpa Pengecualian, kepatuan terhadap ketentuan peraturan-perundang-undangan terjaga, dan tidak ada *fraud*.

Setelah masuk ke BPPK, aku benar-benar *ngotot* agar konsep pembelajaran dirancang bersama dengan para ahlinya di unit teknis, menggunakan data informasi di Kemenkeu yang luar biasa banyak. Peserta diklat dididik, diarahkan untuk berkolaborasi, bekerja sama,



2015: Sumiyati (saat itu) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu bersama Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro saat peluncuran Kemenkeu Corporate University di Jakarta.

FOTO: DOKUMENTASI BPPK KEMENKEU

menjalin sinergi yang kuat. Konsep ini aku minta dituangkan dalam sistem pembelajaran di Kemenkeu. Kalau sebelumnya aku tidak pernah menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, *sense* yang aku miliki tidak akan sedalam ini. Namun dengan bekal dari biro, aku tahu persis seberapa dalam kebutuhan unit teknis akan diklat bagi para pegawai mereka.

Aku sering berdiskusi dengan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Rahmadi Muwanto dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Henny. Kami melakukan kurasi berbagai pengalaman. Ketika mereka minta *benchmarking* ke corpu BUMN, saat itu aku langsung menghubungi Direktur Umum dan SDM Pertamina, Dwi Wahyu Daryoto dan tim Pertamina datang ke kantor BPPK menjelaskan tentang berbagai hal tentang pengelolaan SDM serta pengalaman pengembangan corpu di Pertamina.

Henny “belajar” ke Telkom untuk mengetahui sistem manajemen pengetahuan (*knowledge management system*) di BUMN tersebut. Saat baru keluar dari kampus, Bu Henny langsung menghubungiku.

“Untuk membangun Corpu, salah satu pilarnya adalah *Knowledge Management System*. Kita perlu belajar, Bu,” kata Henny.

“Memang iya, segera hubungi Profesor Yan Hidayat ITB,” kataku.

“Beliau siapa, Bu?” Henny penasaran.

“Profesor Yan Hidayat adalah Ketua Knowledge Management Indonesia,” jawabku. Aku tahu tentang Profesor Yan dari anak-anakku yang kuliah di ITB. Akhirnya aku dan teman-teman berdiskusi dengan Prof Yan Hidayat dari Institut Teknologi Bandung.

Belajar tentang Corpu, agar cepat terwujud, aku minta beberapa orang dari BPPK, mulai dari kepala pusdiklat, kepala bidang, sampai widyaiswara untuk bersama-sama menghadiri *international summit* yang membahas Corpu di Amsterdam, Belanda. Kami belajar serius sekali untuk memahami konsep Corpu. Aku berpesan agar mereka meng-*capture* dengan cepat dan komprehensif dan begitu pulang ke BPPK langsung kita mulai kerjakan.

Ketika mewujudkan Corpu Kemenkeu, kami menghadirkan *trainer* di tahap awal, selanjutnya mengerjakan sendiri tanpa didampingi konsultan. Kami membangun metodologi pembelajaran berikut infrastrukturnya, dan kami harus memahami itu semua. Aku berpikir jika konsultan atau pihak lain yang mengerjakannya, teman-teman BPPK tidak akan memiliki *sense of ownership* yang kuat. Padahal Corpu ini harus dipelihara, diisi, dan dikembangkan sepanjang masa, sehingga aku berpendapat BPPK tidak boleh bergantung pada pihak lain.

Aku yakin mereka yang ditugaskan di BPPK adalah orang-orang pilihan. Asalkan *leader*-nya kuat dan punya visi yang jelas, semua gagasan dapat diwujudkan. *Human capital* BPPK sangat kuat. Orang-orang pandai jika diberi tantangan dan difasilitasi, umumnya mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

Namun di BPPK, orang tak hanya harus pandai, tetapi juga harus mampu menjadi guru. Jika di-*grooming* dengan baik, aku yakin hasilnya pasti baik. Saat ini, aku boleh bangga, Corpu Kemenkeu adalah yang pertama di lingkungan Kementerian/Lembaga dan sangat baik. Aku pikir Corpu Kemenkeu masih yang terbaik. Namun kita tidak boleh sombong, Corpu Kemenkeu harus terus dikembangkan dan berkelas global.

Dalam menjaga konten diklat, aku berusaha mempelajari setiap program yang ada, berikut bahan ajar dan metodologi pembelajarannya. Aku memahami bahwa tidak mudah mengubah dari sesuatu yang sudah mapan. Aku mengerjakan sesuatu *based on evidence*. Aku mengecek satu persatu, membaca modulnya, melihat kompetensi yang dimiliki, penambahan dan pengayaannya. Kalau masih belum mengalir, aku memberi catatan ke pusdiklat. Sebagai pengajar dalam *team teaching*, aku sudah biasa mengecek apa saja yang dicatat dan yang diberikan pengajar lain. Aku biasanya mengisi yang masih *bolong-bolong*. Aku sudah terbiasa melakukan seperti ini, sehingga begitu menjadi “kepala sekolah” di BPPK, ini pun aku lakukan.

Aku berusaha mengembangkan sistem informasi di BPPK tentang rekam jejak pengembangan kompetensi pegawai Kemenkeu. BPPK bisa melacak seseorang yang masuk BPPK memiliki bekal kompetensi apa saja. Pelatihan apa yang pernah diikutinya. Karier pegawai bisa *zig-zag*, bisa pula vertikal, namun apapun harus terekam dengan baik agar mereka memenuhi kompetisi yang diperlukan.

Platform Semantik, yang dikembangkan tim Pak Sandri, yang digabung dengan *platform* Kemenkeu Learning Center menjadi sangat *powerful*.¹ Semantik adalah sistem informasi diklat yang diselenggarakan BPPK. Di dalamnya terdapat jadwal diklat, daftar dan jenis diklat yang diikuti, wadah berbagi materi, presensi, dan evaluasi.

¹ Kemenkeu Learning Center atau KLC adalah media pembelajaran online yang membahas berbagai materi tentang Pengelolaan Keuangan Negara. KLC dapat diakses oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan dan masyarakat umum. Sebagai portal pembelajaran Keuangan Negara, KLC berfungsi sebagai tools untuk menyampaikan pembelajaran dan juga tools untuk repositori atau pengelolaan pengetahuan. KLC telah menjadi rumah bagi ratusan e-learning dan ribuan media pembelajaran keuangan negara, baik berupa artikel, buku, maupun video, yang dapat diakses melalui laman klc.kemenkeu.go.id. Saat ini terdapat 5.299 video pembelajaran terkait keuangan negara yang dapat diakses kapan saja, dan dimana saja. Selain pembelajaran yang sudah terprogram, KLC juga bermanfaat sebagai forum diskusi melalui fitur Community of Practice. Pengunjung KLC dapat berdiskusi tentang keuangan negara dengan rekan sejawat dan dipandu oleh pakar di bidangnya. Sampai saat ini, terdapat 620 forum diskusi yang bisa diakses, baik langsung maupun termoderasi. Portal ini dikembangkan sejak 2016 dan resmi diluncurkan pada semester pertama tahun 2017. Meningkatnya jumlah program dan peserta e-learning membuat pengembangan KLC menjadi hal mutlak dibutuhkan. Pengembangan KLC telah sampai pada KLC 2.0 yang memiliki tampilan lebih user friendly. Berbagai fitur telah dikembangkan, sehingga pengunjung KLC yang ingin belajar dapat menikmati proses pembelajaran yang menyenangkan. (Sumber: <https://bppk.kemenkeu.go.id/kemenkeu-corpu/kemenkeu-learning-center>)

CORPORATE UNIVERSITY, STRATEGI KEMBANGKAN KOMPETENSI SDM KEMENKEU

Corporate University (Corpu) Kementerian Keuangan merupakan strategi untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia. Ini bagian visi dan misi Kemenkeu melalui keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan, pembelajaran, dan penerapan nilai-nilai dengan target kinerja, yang didukung manajemen pengetahuan (*knowledge management*).²

Pendidikan dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar pada pendidikan formal; atau pendidikan vokasi dilaksanakan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN. Pembelajaran dilakukan melalui jalur klasikal berupa kegiatan tatap muka antara pengajar dan peserta di dalam kelas yang sama, dan atau non-klasikal berupa kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran di luar kelas.

Pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan desain pembelajaran berdasarkan model 70:20:10 dengan proporsi 70 persen aktivitas pembelajaran terintegrasi di tempat kerja melalui praktik langsung seperti magang/praktik kerja, detasering (*secondment*), dan pertukaran antara pegawai negeri sipil (PNS) dengan pegawai swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah.

Dua puluh persen aktivitas pembelajaran kolaboratif dalam sebuah komunitas maupun bimbingan melalui interaksi atau dengan mengobservasi pihak seperti coaching, mentoring, dan patok banding (*benchmarking*). Adapun 10 persen aktivitas pembelajaran melalui metode ceramah di dalam maupun di luar kelas seperti pelatihan teknis, pelatihan jarak jauh, dan belajar mandiri. Ini semua dilakukan sesuai ketentuan tentang manajemen pengembangan SDM di Kemenkeu.

Pembelajaran dalam Corpu memiliki karakteristik relevan, mudah diaplikasikan, berdampak, mudah diakses.

House of Kemenkeu Corporate University merupakan infrastruktur penunjang terselenggaranya Kemenkeu Corpu yang terdiri atas tata kelola strategi pembelajaran (*learning strategy governance*), fokus pembelajaran (*learning focus*), manajemen pengetahuan (*knowledge management*), infrastruktur pembelajaran pintar (*smart learning infrastructure*),

² Disarikan dari salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 924/KMK.011/2018 tentang Kementerian Keuangan Corporate University, yang ditetapkan pada 31 Desember 2018.

sekolah (*school*), kolese (*college*), akademi (*academy*), arsitektur solusi pembelajaran (*learning solution architecture*), dan solusi penyampaian pembelajaran (*learning solution delivery system*).

Pola tata kelola Corpu merupakan rangkaian proses supervisi dan atau pola koordinasi untuk mengembangkan kompetensi SDM dan manajemen pengetahuan melalui sinergi antarunit di Kemenkeu. Unsur pelaksana Pola Tata Kelola Implementasi Corpu terdiri atas Komite Pengarah, Komite Operasional, dan Pemilik Rumpun Keahlian (*Skill Group Owner*) sesuai peraturan perundang-undangan tentang analisis kebutuhan pembelajaran.

Komite Pengarah terdiri atas Chairman (Menkeu), Vice Chairman (Wakil Menkeu), representasi unit pembina SDM (Sekjen), representasi unit jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Sekjen, para Dirjen, Irjen, dan para Kepala Badan di Kemenkeu), individual member (para Staf Ahli Menkeu). Komite Pengarah bertugas merumuskan kebijakan strategis pengembangan kompetensi SDM dan manajemen pengetahuan.

Menjadi “Arena Bermain”

Aku tidak tahu berapa lama menjabat Kepala BPPK. Namun yang pasti, bekerja di dunia pendidikan membuat aku bahagia, tidak merasa bekerja dan tidak merasa lelah. Bagiku, ini lebih seperti “arena bermain”. Aku malah membayangkan aku kembali menjadi asisten dosen STAN yang pernah aku lakoni pada 1983-1986 karena aku menaiki tangga yang sama di gedung yang sama. Gedung BPPK di Jalan Purnawarman di Jakarta Selatan sebelumnya adalah kampus STAN pada era 1980-an.

Aku bernostalgia, mengingat kembali masa awal bekerja sebagai asdos pada 1983. Rasanya seperti pulang ke rumah. Apalagi beberapa pegawai BPPK masih kukenal. Aku seperti berjumpa dengan sahabat lama. Aku sangat menikmati bekerja di BPPK.

Sejak dulu aku menyukai pekerjaan di bidang pendidikan, menjadi guru di kelas. Saat melihat mata berbinar karena mahasiswa mengerti apa yang kusampaikan merupakan bayaran tunai langsung yang kuterima, sangat bahagia rasanya.

Mengubah STAN Menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN

Setelah mewujudkan Corpu Kemenkeu, aku berupaya agar status hukum STAN pasti. Caranya adalah mengubahnya dari STAN menjadi Politeknik Keuangan Negara. Sejak STAN berdiri tahun 1974 sampai 2015, status STAN tidak stabil karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak mau mengakui status STAN karena mempunyai aturan sendiri. Sementara Kementerian Keuangan membutuhkan lulusannya untuk mengisi kekosongan sumber daya manusia di bidang akuntansi dan keuangan negara yang langsung siap bekerja. Aku melihat ada perbedaan pandangan antara kedua kementerian ini.

Daripada perbedaan ini berlarut-larut dan berkepanjangan sehingga menyebabkan status STAN makin tak jelas, aku meminta BPPK mempelajari perbedaan antara politeknik dan universitas.

Sebagai salah satu anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu, aku ikut mengawasi pengiriman banyak mahasiswa belajar keluar negeri. Aku beberapa kali mempelajari perguruan tinggi di mancanegara. Dalam salah satu kunjungan keluar negeri, aku singgah di politeknik agrikultur di Paris Perancis. Kegiatan mahasiswa politeknik di kampus hanya 30-40 persen hanya untuk mendengarkan teori secara singkat. Selebihnya, mahasiswa dititipkan di korporasi, lembaga riset, dan badan usaha. Mahasiswa dipaksa *learning by doing*.

Di Toronto, Kanada, aku memperoleh penjelasan tentang politeknik —yang bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga merangkap bursa tenaga kerja. Banyak perusahaan mencari tenaga kerja di politeknik tersebut karena pendidikan di sana bagus. Ini berarti *link and match*-nya *nyambung* dengan kebutuhan. Di Australia, aku menanyakan pelatihan-pelatihan, seperti di Tafe College, yang sudah diakui kreditnya apabila akan melanjutkan pendidikan ke *degree program*. Jadi *link and match* dan pendidikan berkelanjutan dapat berlangsung tanpa batas.

Aku berdiskusi dengan Direktur STAN Pak Kusmanadji, Sekjen Kemenkeu Pak Ki Agus Ahmad Badaruddin, dan Wakil Menkeu

Pak Mardiasmo. Kusmanadji ketika kuliah di STAN adalah “kakak buku”. Buku-buku teks yang aku baca adalah ‘warisan’ Kusmanadji. Kami sama-sama pernah tinggal *nge-kos* di rumah petak di kawasan Tulodong. Ketika aku Kepala BPPK, aku membawa Kusmanadji sebagai Sekretaris BPPK dan beliau pensiun di sana.

Sampai tahun 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN sudah memasuki usia 7 tahun. Perjalanannya masih pendek, tetapi sebagai perguruan tinggi, STAN sudah eksis sejak 1960-an dan menjadi “pabrik” ahli pengelolaan keuangan negara.

Dulu aku sempat penasaran mengapa orang-orang lulusan Oxford dan Cambridge memiliki karakter yang kuat dan sangat kredibel di bidangnya. Ternyata pada tahun pertama, mereka diasramakan untuk membangun karakter dan disiplin yang baik. Aku menyampaikan gagasan mengasramakan mahasiswa PKN STAN dan setelah sekian tahun, bersamaan dengan masa pandemi, ide tersebut diimplementasikan. Dengan demikian maka mahasiswa STAN yang banyak berasal dari anak-anak kampung dari berbagai daerah di Indonesia diasramakan akan dibina agar karakter mereka benar-benar dibangun dengan baik (*character building*). Ketika dilepas untuk tinggal di rumah kos di tengah masyarakat, mereka mampu membentengi diri dan menjadi orang yang baik.

“STAN is The Best!”

Aku berpendapat, sampai sekarang STAN adalah salah satu sekolah tinggi terbaik di republik ini di bidang akuntansi keuangan negara, bukan UI ataupun UGM. Para reformis keuangan negara berasal dari STAN karena mereka yang menguasai pengetahuan keuangan negara, apakah di sektor anggaran, pajak, bea cukai, maupun perbendaharaan. Pemerintah kolonial Belanda mempersiapkan tenaga ahli keuangan negara sejak dulu. Aku pernah menyampaikan Orasi Ilmiah pada saat Dies Natalis ke-6 PKN STAN, 13 Juli 2021.

Aku memberi contoh 126 orang di angkatanku di STAN, angkatan keenam. Sebagian besar lulusannya berhasil saat bekerja menjadi abdi negara di sejumlah lembaga pemerintah dan BUMN,

dan sebagian lagi bekerja di dunia komersial. Aku bangga dengan kawan-kawanku yang terjun di bidang Keuangan Negara maupun di dunia bisnis di luar instansi pemerintah.

Selain aku yang menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (2017-2021), beberapa teman seangkatanku di STAN yang pernah menjabat di sejumlah instansi adalah Yustan Riduan Siahaan (Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian), Dadang Kurnia (Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah/PPKD), Ito Warsito, alm (Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia 2009-2015; CEO dan Komisaris Utama PT Bahana Securities 2006-2009), Gatot Trihargo (Wakil Dirut Perum Bulog 2019-2021). Sebagian lainnya terjun di dunia komersial, membangun bisnis, membuka kantor konsultan pajak dan lainnya.

ORASI ILMIAH SUMIYATI

TUJUH HAL YANG WAJIB DIMILIKI MAHASISWA POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

Perubahan demi perubahan dalam pengelolaan keuangan negara terus berlanjut. Tahun 2015 merupakan tahun dimana Pemerintah Indonesia telah menggunakan akuntansi basis akrual penuh yang diyakini dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi lebih baik.

Meskipun telah menggunakan basis akrual penuh sejak tahun 2015 namun pengelolaan keuangan negara terus-menerus berkembang agar dapat melakukan pengelolaan yang efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem perencanaan dan penganggaran terus menerus diperbaiki dengan mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara benar.

Selain itu sistem pengelolaan juga terus diperbaiki guna mengoptimalkan pendapatan serta melakukan belanja secara efektif dan efisien. Di sisi pelaporan juga mengalami perubahan yang cukup besar baik dalam sistem

akuntansi maupun dalam kebijakan akuntansi. Penggunaan teknologi informasi menjadi kebutuhan dalam pengelolaan keuangan negara.

Di sisi lain karena adanya ketentuan penyelenggaraan pendidikan tinggi di bawah Kementerian dan Lembaga diarahkan ke Pendidikan Vokasi, maka STAN menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN yang merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi secara penuh. Selain itu PKN STAN harus terus-menerus memperbaiki diri baik dari program Pendidikan, kurikulum, maupun karakter lulusan yang akan dihasilkan agar mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Perkembangan dan inovasi yang terus-menerus di bidang pengelolaan keuangan negara diperlukan SDM pengelola keuangan negara yang kompeten dan profesional serta mampu mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu.

Untuk itu PKN STAN sebagai penyedia SDM keuangan negara minimal harus membekali mahasiswanya dengan:

Pertama, Ilmu Pemerintahan/Administrasi Pemerintahan. Mahasiswa PKN STAN jangan hanya paham akuntansi debit kredit, karena keuangan negara merupakan darah pemerintahan jadi ilmu pemerintahan harus diberikan, sehingga kita tahu di mana posisi keuangan negara dalam pemerintahan.

Kedua, pengelolaan APBN. APBN sebagai alat untuk alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi APBN ini harus benar-benar dipahami bahwa kita beroperasi di lingkungan negara yang sangat dinamis.

Ketiga, Ekonomi dan Politik. Dalam hubungan pemerintah dan rakyat, dengan DPR sebagai wakilnya, maka semestinya mahasiswa PKN STAN juga harus dibekali dengan pengetahuan tentang Ekonomi dan Politik, sehingga punya wawasan secara makro tidak hanya mikro.

Keempat, Manajemen Keuangan Negara secara utuh. Kita bisa melihat keuangan negara dari konsep *stock and flow*. *Stock*-nya kita melihat neraca yang terdiri dari aset (kas, investasi, aset tetap, aset lainnya), liabilitas sampai dengan ekuitas, sedangkan *flow*-nya adalah transaksi yang terjadi ada pendapatan dan belanja. Untuk pengelolaan pendapatan termasuk PNPB secara terus-menerus kita perbaiki, begitu juga dengan belanja juga kita perbaiki secara berkelanjutan mulai dari penganggaran sampai

dengan pertanggungjawabannya. Penganggaran kita berubah dari line item budgeting ke penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*/PBB), meskipun implementasinya saat ini belum sesuai yang kita harapkan sehingga saat ini kita melakukan *refocusing* yang dikenal dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP) yang merupakan implementasi dari konsep PBB.

Kelima, Berpikir Kreatif. Saat ini kita mengalami krisis, yaitu adanya pandemi COVID-19, sehingga pengelolaan keuangan negara kita arahkan untuk menangani krisis, namun di sisi lain kita juga harus bekerja keras untuk mempersiapkan pengelolaan keuangan negara setelah pandemi. Dalam situasi seperti ini, insan Keuangan Negara dituntut kreatif, bagaimana pada saat pendapatan sedikit sementara kebutuhan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) membutuhkan dana yang besar, tetapi di sisi lain pembangunan infrastruktur dituntut untuk jalan terus. SDM keuangan negara dituntut untuk bisa melakukan *creative financing*. SDM keuangan negara harus bisa melihat peluang dan pembiayaan yang komprehensif. Selain itu, kita harus memahami tidak hanya sisi fiskal tetapi juga sisi moneter. Keadaan ini menuntut kita untuk berorientasi secara global.

Keenam, Teknologi Informasi. Di sisi lain kita memasuki dunia digital sehingga tidak hanya paham *body of knowledge* keuangan negara tetapi harus bisa link dengan teknologi digital. Teknologi dan informasi keuangan harus benar-benar di pahami, termasuk juga dalam audit, kita harus paham dengan audit berbantuan komputer dan audit sistem informasi.

Ketujuh, Human Resouce Management. Bukannya kita harus ahli dalam manajemen sumber daya manusia, namun kita perlu membekali mahasiswa PKN STAN dengan ilmu komunikasi. Saat ini komunikasi kadang menjadi benturan tersendiri, kesenjangan antara generasi milenial dan kolonial agak tinggi. Mahasiswa PKN STAN harus memahami komunikasi publik dan komunikasi politik karena stakeholder kita beragam, ada DPR, pengusaha, menteri, kepala daerah, dan orang politik yang punya karakteristik yang berbeda-beda.

Saat ini lulusan PKN STAN sangat kuat di teknis, namun dalam komunikasi dan diplomasi sangat kurang. Jadi saat ini sangat susah untuk membawa lulusan PKN STAN ke arah yang strategis. Hal ini harus bisa kita

perbaiki sehingga lulusan PKN STAN mempunyai kemampuan komunikasi dan diplomasi yang baik.

Melihat kondisi yang terjadi saat ini pengelolaan keuangan dan reformasi keuangan negara sangat memerlukan lulusan PKN STAN. Kalau kita flash back ke belakang maka reformasi keuangan negara yang terjadi di Indonesia sebagian besar adalah dilakukan oleh segelintir alumni STAN yang mempunyai kemampuan tersebut. Oleh karena itu, saya berharap ke depan mahasiswa PKN STAN harus bisa dibekali dengan ilmu-ilmu tersebut.

Semoga PKN STAN terus berjaya dan mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam pengelolaan keuangan negara.

Skor BPPK Naik Pesat

Ketika sedang asyik-asyiknya mewujudkan Corpu Kemenkeu di BPPK, pada 2016 Presiden Joko Widodo memanggil pulang Ibu Sri Mulyani Indrawati dari Washington DC, Amerika Serikat, untuk menjabat Menteri Keuangan.

Tidak lama kemudian Irjen Kemenkeu, Bapak Ki Agus Ahmad Badaruddin menjadi Kepala PPATK, Ibu Sri Mulyani mengatakan, “Bu Sum Irjen ya.”

“Saya bikin Corpu di BPPK belum selesai Bu,” kataku.

“Nanti bisa dilanjutkan oleh yang lain,” kata Sri Mulyani. Januari 2017, aku menduduki jabatan Inspektur Jenderal Kemenkeu.

Setelah aku meninggalkan BPPK untuk menunaikan tugas baru sebagai Irjen, skor kinerja BPPK naik cukup pesat, bahkan melampaui skor rata-rata Kemenkeu.

Aku masih ingat bagaimana aku mengurus sampai hal-hal kecil, misalnya ikut memerhatikan makanan di asrama untuk para peserta diklat. Diskusi dengan ahli gizi juga dilakukan, supaya penyediaan konsumsi bukan menjadi “program penggemukan” tetapi memberikan makanan yang berimbang untuk para peserta

diklat. Aku minta para kapusdiklat agar menyekolahkan pengurus asrama BPPK ke perhotelan agar mereka memahami seluk-beluknya. Aku ingin orang yang menjadi peserta diklat di BPPK menikmati makanan sehat, sarana prasarana yang baik, lingkungan yang nyaman untuk belajar.

Aku memang tidak pernah tahu berapa lama akan bertugas di suatu tempat. Tetapi aku bermimpi untuk membangun fondasi yang kokoh lebih dahulu karena kalau fondasi sudah diletakkan, aku yakin fondasi itu tidak akan di-*delete*, mungkin hanya laju perkembangannya saja yang berbeda. Jika penggantinya memiliki determinasi yang kuat, perkembangannya akan cepat. Alhamdulillah, aku senang BPPK berkembang sangat cepat dan pesat.

Aku meyakini mereka yang ditugaskan di BPPK adalah orang-orang hebat. Tinggal *leader*-nya yang mengarahkan dan membawa mereka untuk berlari cepat.

Di Corpu, pegawai BPPK diajari banyak hal, termasuk membuat video, misalnya merekam video petugas bea cukai berpatroli di laut lepas. Semua aspek dan infrastruktur untuk mengoperasikan Corpu dipersiapkan. Meski tak bisa langsung “melompat” namun kami terus melangkah maju.

Pada masa pandemi selama dua tahun (2020 dan 2021), manfaat Corpu sangat terasa. Pegawai Kemenkeu dan para punggawa pengelola keuangan di Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah dapat belajar dari rumah. Bahkan setiap kali Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani memberikan pengarahan, yang hadir secara daring di YouTube jumlahnya ribuan orang. Aku semakin yakin langkahku mewujudkan Corpu langkah yang tepat dan bermanfaat.

Menata Ulang dan Memberdayakan Widyaiswara

Satu hal lagi yang aku benahi di BPPK adalah menata ulang dan memberdayakan widyaiswara. Aku berpikir widyaiswara utama itu dalam jabatan dosen adalah setingkat profesor. Mereka tidak hanya

“Banyak orang mengatakan, DNA-ku adalah perubahan. Ketika aku masuk ke suatu tempat, pasti ada yang berubah.”



melakukan transfer pengetahuan tetapi juga memiliki pengalaman riset yang tinggi agar dapat mengembangkan keilmuan mereka.

Aku meminta widyaiswara melakukan riset. Aku memang bukan peneliti, namun aku minta setiap widyaiswara ketika akan melakukan riset, membuat proposal. Aku membaca semua proposal mereka dan mengetahui keseriusan mereka. Langkah ini aku lanjutkan. Aku berharap mereka yang memilih jalur sebagai instruktur dan akademisi memanfaatkan data, informasi, pengetahuan dan pengalaman pengelolaan keuangan negara yang sangat banyak di Republik ini. Oleh karena itu, mereka harus memahami dan mampu mengolahnya dengan baik untuk menyiapkan bahan ajar dan metodologi pembelajarannya.

Aku juga ingin widyaiswara tidak mengajarkan hal-hal yang sudah ketinggalan zaman karena itu bukan masa depan. Sekarang kinerja mereka masuk dalam KPI. Mereka dipaksa untuk tetap belajar dan membaca, berkomunikasi dengan banyak pihak, mengolah dan menganalisis data.

“DNA-ku adalah Perubahan!”

Banyak orang mengatakan, DNA-ku adalah perubahan. Ketika aku masuk ke suatu tempat, pasti ada yang berubah. Setelah aku menjabat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) tahun 2015, aku membuat “repot” banyak orang.

Di BPPK, aku mendirikan Kemenkeu Corporate University (Kemenkeu Corpu) untuk mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi Kemenkeu. Hal ini sejalan dengan amanat PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Didukung dengan sistem manajemen pengetahuan yang mutakhir, pembelajaran di Kemenkeu menjadi tak terbatas.

Dimanapun ditempatkan, aku berusaha membuat terobosan, inovasi, atau pembaharuan sekecil apapun. Aku mengubah status STAN menjadi Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Ketika

menjabat Inspektur Jenderal, aku memperkenalkan program digitalisasi di jajaran Kementerian Keuangan.

Di Biro Perencanaan dan Keuangan, aku mengubah tata cara perencanaan dan penganggaran, mendorong implementasi pengarusutamaan gender, *monitoring* pelaksanaan anggaran secara ketat, memperbaiki penanganan tuntutan ganti rugi, membina para bendahara, memerhatikan insentif pegawai, dan memperbaiki sistem akuntansi dari mendapat opini *disclaimer* menjadi WTP.

Di BPPK, pengetahuan dan pengalamanku kudedidaskan untuk perbaikan pembelajaran bagi SDM pengelola keuangan negara, baik di Pemerintah Pusat maupun di pemerintah daerah. Saat menjadi Irjen Kemenkeu, aku tidak hanya mengawasi Kemenkeu tetapi juga menjadi Ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, yang juga terus melakukan pembenahan standar audit, kode etik profesi, penjagaan mutu melalui *peer review* dan peningkatan kompetensi auditor.

Planning, organizing, actuating, and controlling, semua sudah aku lalui. Bidang anggaran pendapatan dan belanja negara, perbendaharaan, akuntansi, audit, sudah pernah aku alami. Ibarat kupu-kupu yang memiliki empat sayap, aku sudah berada di semua sisi sayap, dan semua bisa mengepak dengan sempurna.

Rahmadi Murwanto
TIGA “LEGACY” SUMIYATI DI BPPK



Rahmadi Murwanto

Bagi Rahmadi Murwanto —saat ini Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN—, Sumiyati yang pernah menjabat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan atau BPPK Kemenkeu (Februari 2015-Januari 2017) merupakan sosok yang memiliki integritas tinggi dan pengabdianya kepada negara tidak diragukan lagi.

Menurut Rahmadi, Sumiyati memimpin BPPK pada saat yang tepat. “Ketika itu, organisasi ini mengalami krisis setelah muncul rekomendasi McKinsey yang menyebutkan badan diklat di Kemenkeu sebaiknya dihilangkan dan setiap pusdiklat dijadikan bagian di berbagai direktorat jenderal,” ungkap Rahmadi, yang saat itu menjabat Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) BPPK. Rahmadi bertemu Sumiyati secara intens setelah alumnus STAN 1980 itu menjabat Kepala BPPK.

“Ibu Sum, apakah ibu setuju dengan kajian McKinsey yang merekomendasikan agar BPPK dibubarkan? Situasi di luar, pimpinan Kemenkeu mengatakan kajian McKinsey tentang BPPK harus dilaksanakan. Kita harus melakukan sesuatu,” kata Rahmadi.³

“Saya tidak pernah setuju. Itu merupakan kemunduran! Lembaga yang mengelola sumber daya manusia ini justru harus diperkuat. Tenaga SDM dan TI (teknologi informasi) harus kuat,” jawab Sumiyati tegas.

³ Diolah dari percakapan penulis dengan Rahmadi Murwanto, Ak., MAcc., MBA, PhD, Direktur Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, 8 Agustus 2022 melalui Zoom. Lahir di Metro, Lampung, 13 Maret 1970, Rahmadi lulus STAN Diploma IV tahun 1997; Master of Business Administration (MBA) dengan konsentrasi pada Corporate Finance dan Operation Management, Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, AS (2001), Master of Accountancy (dengan konsentrasi pada Financial Accounting) di kampus yang sama di Cleveland (2001); dan PhD (dalam bidang riset Manajemen Kinerja dan Pelaporan Kinerja), Victoria University of Wellington, Selandia Baru (2011).

“Meskipun hanya dua tahun memimpin BPPK, Sumiyati melahirkan dua karya yang luar biasa. Pertama, menghadirkan wajah baru BPPK dengan Corporate University (Corpu) Kemenkeu yang pertama di Indonesia. Sumiyati memberdayakan dan menghidupkan kembali BPPK sehingga menjadi lembaga pendidikan dan latihan yang disegani di Kementerian Keuangan. Kedua, mengubah STAN menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN.”

— Rahmadi Murwanto.



Sejak itu, Rahmadi sering berdiskusi dengan Sumiyati. Visi mereka sama, dan Sumiyati bukan tipikal pemimpin yang *men-drive* semuanya, juga bukan pemimpin yang minta dilayani.

“Bu, saya senang sebagai anak buah bisa berdiskusi dengan ibu tentang berbagai hal. Tetapi dalam diskusi, saya tidak menganggap ibu sebagai pejabat. Saya ingin berdiskusi dengan ibu sebagai senior yang sama-sama pernah menjadi asdos di STAN,” kata Rahmadi, lulusan terbaik STAN tahun 1991 dan pernah menjadi asisten dosen (asdos). Sumiyati juga lulusan terbaik STAN (termasuk 10 besar terbaik) tahun 1980 dan pernah menjadi asdos.

Sumiyati dan Rahmadi berdiskusi bagaimana caranya agar BPPK punya eksistensi. Mereka berdiskusi tentang perbaikan sistem dan integritas, yang tujuannya untuk memperbaiki organisasi BPPK sesuai dengan standar tata kelola di pemerintahan. Banyak tata kelola di BPPK yang diperbaiki Sumiyati, termasuk dalam hal menentukan promosi pegawai. “Serahkan saya, nanti saya yang memutuskan,” kata Sumiyati.

Rahmadi menganggap Sumiyati sebagai kakak perempuannya. Dalam diskusi, keduanya pada level sama-sama saling menghormati, dan akhirnya menghasilkan solusi. “Ibu Sum perempuan yang sangat cerdas dan pintar. Beliau dengan mudah mencapai kesepakatan. Cara saya menghadapi beliau berbeda. Dari semua pimpinan BPPK yang pernah saya layani, Ibu Sumiyati-lah yang bisa memberikan yang terbaik,” ungkap Rahmadi yang mengaku senang dapat “menerjemahkan” pemikiran Sumiyati saat itu.

Rahmadi berpendapat, karakter pejabat seperti Sumiyati jarang ada di Indonesia. “Apalagi bila melihat kemampuan dan kecerdasannya yang luar biasa yang mampu membuat orang lebih mudah paham dengan apa yang disampaikan,” tambahnya.

Menolak Kajian McKinsey yang Minta BPPK Dibubarkan

Meskipun hanya dua tahun memimpin BPPK, Sumiyati melahirkan dua karya yang luar biasa. Pertama, menghadirkan wajah baru BPPK dengan Corporate University (Corpu) Kemenkeu yang baru pertama ada di Indonesia. Sumiyati memberdayakan dan menghidupkan kembali BPPK sehingga menjadi lembaga pendidikan dan latihan disegani di Kementerian Keuangan, dengan mewujudkan Corpu. Kedua, mengubah STAN menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN.

Selain dua *legacy* yang dibuat Sumiyati, menurut Rahmadi, masih ada satu lagi yang dilakukan yaitu memperbaiki tata kelola BPPK sehingga dipercaya dan berintegritas. Rahmadi saat itu Kabag Ortala berperan sebagai think tank Sumiyati di BPPK. Itu masa paling produktif bagi Rahmadi selama dua tahun bersama Sumiyati.

“Coba kita gali dan pelajari Corpu,” kata Sumiyati. Setelah dipelajari, konsep dan gagasan Corpu memang sangat baik.

Kajian McKinsey yang meminta BPPK dibubarkan karena sebelumnya BPPK dianggap hanya sebagai event organizer. Pengajar dan peserta pelatihan didatangkan dari luar sehingga tak ada value yang bermanfaat bagi Kemenkeu.

Munculnya rekomendasi McKinsey itu membuat Sumiyati dan Rahmadi tidak puas. Tetapi melihat apa yang dilakukan BPPK yang disebut berperan sebagai *event organizer*, mereka juga tidak puas, kok BPPK hanya menjadi penyelenggara, dan tak ada dampak nyata pelatihan yang diselenggarakan untuk peningkatan SDM Kemenkeu.

Sumiyati sangat fokus pada hasil akhir (*outcome*), bukan sekadar output, dan itu memperkuat pola pikir Rahmadi.

“Corpu ini sangat baik diwujudkan karena bergerak dari kebutuhan para eselon I agar staf mereka mencapai kinerja yang diharapkan. Dua pilar penting Corpu adalah *learning organization* (organisasi pembelajar) dan *knowledge management* (manajemen pengetahuan). Coba Pak Rahmadi cari tahu, belajar dengan cepat tentang Corpu,” kata Sumiyati.

Rahmadi klop dengan pemikiran Sumiyati. Setiap malam dia berdiskusi tentang Corpu. Suatu saat mereka menghadiri konferensi di Belanda, dan kesempatan itu digunakan mereka untuk belajar dan melakukan studi banding tentang Corpu. Di sana, mereka belajar langsung dari para ahli Corpu yang sedang berkumpul. Selain Sumiyati dan Rahmadi, yang ikut serta dalam konferensi adalah pihak yang mewakili eselon 2 BPPK dan mewakili widyaiswara.

Hasil kunjungan di Belanda itu langsung terlihat. Perspektif setiap peserta digabung menjadi satu. Tak sampai satu tahun, BPPK memiliki gambaran yang jelas, Corpu Kemenkeu itu seperti apa.

Menurut pandangan Rahmadi, perhatian Sumiyati pada hal-hal yang detail sangat luar biasa. Pengalaman Sumiyati yang sebelumnya pernah menjabat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenkeu —ditambah

pasokan data — membuatnya memahami persoalan besar yang dihadapi Kemenkeu. Selama ini, pegawai yang bekerja santai “cukup kuat” di BPPK.

Setelah Sumiyati membuat gebrakan tentang Corpu, banyak pihak akhirnya sadar. Saat itu, kata Rahmadi, beberapa pusdiklat merasa bagian dari direktorat jenderal. Mulailah orang melihat Pusdiklat-pusdiklat itu sebenarnya merupakan bagian dari Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Jika semua Pusdiklat disatukan di bawah BPPK dan menjalin kerja sama yang erat, hasilnya akan lebih baik. Jika masing-masing pusdiklat merasa punya kekuasaan sendiri, sinerginya kurang dan hasilnya tidak optimal.

Sumiyati melakukan pendekatan Corpu sebagai alat untuk menyatukan BPPK yang mendorong upaya pelaksanaan program-program diklat terintegrasi sehingga pimpinan pusdiklat tidak harus dari unit yang dilayani, tetapi bisa dari BPPK atau unit di Kementerian Keuangan lainnya. “Bu Sum mengajak semua kapusdiklat untuk bersinergi dengan tidak melihat dari mana asal pimpinannya,” kata Rahmadi.

Ketika ada pemilihan Kepala Pusdiklat Perbendaharaan dan Anggaran, diskusinya cukup panjang, sampai akhirnya terpilih Iqbal Islami —yang pernah menjadi asisten dosen STAN.

Sumiyati melihat Direktur STAN dijabat “kakak bukunya” yaitu Kusmanadji. Setidaknya empat dari 9 pejabat diklat dipegang oleh alumni STAN, yang rata-rata berpola pikir yang sama. Sumiyati tahu persis alumni STAN seperti apa karena dia pernah menjadi asdos di STAN dan memahami karakter masing-masing orang. Sumiyati membangun aliansi yang sehat dan lebih mudah meyakinkan pejabat lainnya.

Sumiyati diakui Rahmadi sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi, yang membereskan organisasi BPPK bukan untuk kepentingan pribadi atau sektoral tetapi untuk kepentingan bersama, yaitu kepentingan Kemenkeu. “Gebrakan Ibu Sum menyebabkan beberapa orang merasa tidak nyaman. Namun beliau tidak berkompromi dengan hal-hal yang berkaitan dengan integritas. Semua PNS atau ASN sudah cukup penghasilannya, dan jangan coba-coba mencari tambahan,” ungkap Rahmadi.

Rahmadi mengatakan, Sumiyati bukan tipikal pemimpin yang minta dilayani. Dia ingat BPPK harus menginsiasi kerja sama dengan beberapa kampus. Ketika melakukan perjalanan dinas ke Jember di Jawa Timur,

Sumiyati dengan santainya membawa ransel —mirip *backpacker*, bersama-sama dengan Rahmadi, naik bus. “Nanti tak ada yang menjemput, Bu,” kata Rahmadi. Sumiyati dengan santai menikmati perjalanan itu. “Padahal beliau kan pejabat eselon I yang termasuk VIP. Tetapi Ibu Sum santai saja,” tambah Rahmadi.

“Salah satu kelebihan Ibu Sumiyati adalah sebagai seorang ibu, beliau memiliki empati kepada semua staf dan keluarganya sehingga kami merasakan seperti punya ibu sendiri. Itu salah satu kelebihan beliau,” katanya.

STAN Berganti Nama Menjadi Politeknik Keuangan Negara

Dalam kepemimpinannya yang singkat, Sumiyati juga berhasil membereskan status legal STAN setelah 20 tahun tak kunjung selesai. Pada Juli 2015, legalitas STAN diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) setelah berganti nama menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN.

“Ini merupakan *milestone* penting dalam sejarah STAN dan Kemenkeu. Peran Ibu Sumiyati sangat besar dalam memperjuangkan pergantian nama menjadi Politeknik Keuangan Negara. Dengan demikian, STAN yang sebelumnya dianggap perguruan tinggi akademik menjadi sekolah vokasional. Ini berarti izin PKN STAN diakui Kemendikbud, lulusannya pun diakui secara hukum,” jelas Rahmadi.

Sebelumnya, para pejabat Kemenkeu punya mimpi, menginginkan STAN maju dan berkembang, tetapi persoalannya adalah STAN terbelenggu dengan status legal yang tidak jelas.

Sumiyati juga melaporkan ke Menkeu tentang status legal STAN. “Bu Sum dekat Menkeu sehingga beliau dengan mudah menjelaskan akar persoalannya. Jika status legal STAN tidak diurus, STAN diancam tidak diakui, termasuk alumninya tidak diakui juga. Kehadiran Ibu Sumiyati di BPPK tepat waktu. Menkeu setuju dan minta agar segera diproses,” katanya.

Kerja keras Sumiyati berbuah manis. Corpu Kemenkeu kini menjadi *benchmark* bagi kementerian dan lembaga lain di Indonesia.

Menempatkan Rahmadi sebagai Direktur PKN STAN

Setelah Kusmanadji ditarik menjadi Sekretaris BPPK, Sumiyati mencari pengganti yang tepat untuk duduk menjadi Direktur STAN. Untuk memuaskan Menkeu tidak gampang karena Sri Mulyani punya harapan tinggi terhadap Direktur STAN. Beberapa nama sempat ditolak. Akhirnya Sumiyati menyodorkan nama Rahmadi Murwanto ke Menkeu dan disetujui.

Sumiyati tampaknya berharap Rahmadi dapat mewujudkan mimpi-mimpinya tentang PKN STAN. Dia menempatkan orang untuk menjaga apa yang ditanamkan di PKN STAN. Mengapa sekolah vokasional? Karena PKN STAN mengajarkan ilmu dan pengetahuan tentang Keuangan Negara, membedah apa yang terjadi di Kemenkeu dengan berbagai teori yang ada dan praktiknya.

Ketika Sumiyati dipromosikan menjadi Inspektur Jenderal Kemenkeu, Sumiyati bertanya, “Siapa yang tepat menggantikan saya sebagai Kepala BPPK?”

Akhirnya yang diputuskan adalah Astera Primanto Bhakti, yang melanjutkan kebijakan Sumiyati. Satu hal penting dari kepemimpinan Primanto adalah konsisten menjalankan apa yang ada dalam cetak biru Corpu Kemenkeu yang dibuat semasa kepemimpinan Sumiyati. Konsistensi menjalankan yang sudah direncanakan pimpinan sebelumnya dan menambahkan program budaya Corpu dengan simbol logo Corpu. “Ini menjadikan Corpu dapat dibangun dengan baik di bawah fondasi yang sudah diletakkan Bu Sum,” ujar Rahmadi.

Setelah Astera Primanto dipromosikan sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan, dia digantikan oleh Rionald Silaban yang pernah bertugas di World Bank. Pertimbangannya, Rionald tahu Bank Dunia juga memiliki Corpu sehingga dapat mencontohnya. Setelah Rionald Silaban dipromosikan menjadi Dirjen Kekayaan Negara, Andin Hadiyanto yang juga pernah bertugas di Bank Dunia, menggantikannya sebagai Kepala BPPK.

ENAM

MEMIMPIN AUDITOR INTERN PEMERINTAH

Sri Mulyani: “Bu Sum Nanti Irjen, ya”

27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo memanggil pulang Sri Mulyani Indrawati —saat itu Managing Director atau Direktur Pelaksana sekaligus Chief Operating Officer World Bank dari Washington, Amerika Serikat, untuk menjabat Menteri Keuangan, menggantikan



2017: Sumiyati saat dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI, disaksikan Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan Wakil Menkeu Mardiasmo (tengah), dan Sekjen Hadiyanto (kedua dari kiri).

FOTO: HUMAS ITJEN KEMENKEU

Bambang Brodjonegoro. Presiden menggeser Bambang menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Saat itu aku menjabat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BBPK) Kementerian Keuangan.

“Bu Sum nanti Irjen ya,” kata Menteri Sri Mulyani tidak lama setelah Pak Ki Ahmad Badaruddin diangkat sebagai Kepala PPATK.

“Saya sedang mengerjakan Corpu, belum selesai, Bu,” kataku terus terang.

“Nanti dilanjutkan yang lain. Bu Sum *jagain* amanah, *jagain* keuangan negara, *jagain* saya,” kata Sri Mulyani.

“Siap Bu, kalau memang Ibu tugas,” jawabku.

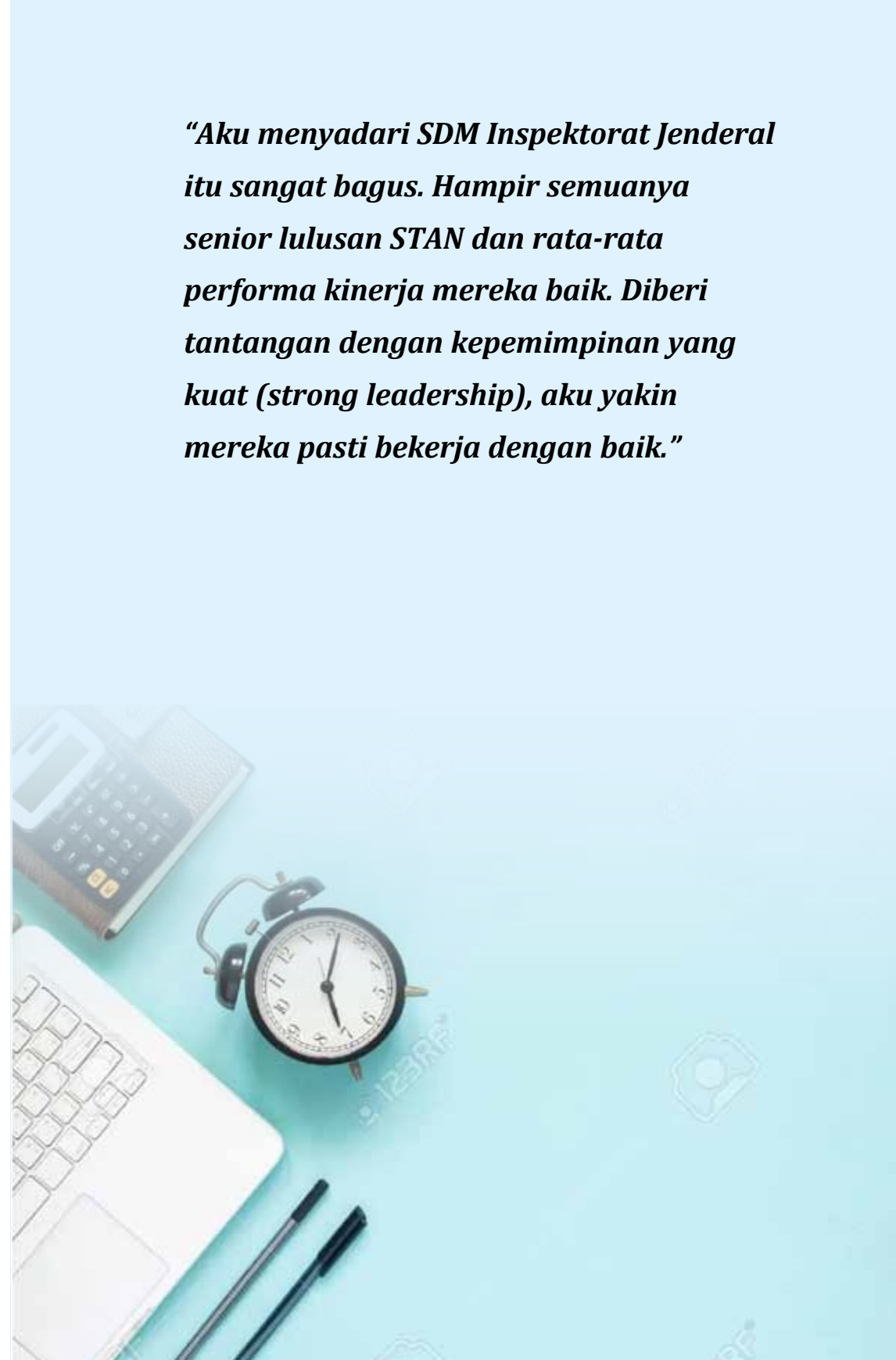
Januari 2017, aku dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kemenkeu dan berada di posisi ini hampir lima tahun, sampai akhir Juli 2021. Sebelumnya, akhir 2016, aku sudah menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal karena Irjen sebelumnya, Kiagus Ahmad Badaruddin, sudah menjabat Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Karena merangkap jabatan, aku harus bolak-balik dari kantor BPPK ke kantor Itjen.

Aku menyadari sumber daya manusia (SDM) Itjen itu sangat bagus. Hampir semuanya senior lulusan STAN dan rata-rata performa kinerja mereka baik. Diberi tantangan dengan kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*), aku yakin mereka pasti bekerja dengan baik. Lulusan STAN yang ditempatkan di Jakarta di masa lalu pada umumnya yang mempunyai kemampuan akademik yang bagus.

Ketika menjabat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, aku sangat dekat dengan kawan-kawan di Itjen.

Dunia audit memang tidak pernah lepas dari diriku. Sebagian besar karierku adalah bekerja erat bersama auditor atau sebagai auditor. Meskipun aku mengajar Akuntansi di UI, Unpad, dan beberapa kampus lainnya, materi yang aku ajarkan tidak terlepas dari teori tentang audit dan akuntansi. Aku membimbing banyak tesis mahasiswa. Aku tetap mengetahui perkembangan terkini teori-teori tentang audit, baik di korporasi maupun di pemerintahan. Meskipun bekerja di pemerintahan, aku bisa terus kulakan ilmu dari sektor korporasi. Di samping itu, aku juga belajar tentang

“Aku menyadari SDM Inspektorat Jenderal itu sangat bagus. Hampir semuanya senior lulusan STAN dan rata-rata performa kinerja mereka baik. Diberi tantangan dengan kepemimpinan yang kuat (strong leadership), aku yakin mereka pasti bekerja dengan baik.”



Governance, Risk, and Control dari beberapa BUMN karena aku mendapatkan penugasan sebagai komisar, seperti Jiwasraya, Bank BTN, PLN, Tuban Petro, dan IFG. Bagiku, mengajar identik dengan belajar.

Digitalisasi di Inspektorat Jenderal

Ketika aku masuk di Itjen, kapasitas internal audit berada di level III. Sebanyak 35 persen lembaga audit dunia berada di level tersebut. Aku ingin naik ke level IV. Untuk mencapai itu, perlu pemetaan (*mapping*), penyusunan strategi, pembuatan peta jalan (*roadmap*). Aku melihat potensi yang ada di Itjen mampu menghadapi tantangan ke depan. Aku mendiskusikan dengan Sekretaris Itjen dan para Inspektur. Pada 2018, kami membuat peta jalan terstruktur, dan kami menyusun apa saja yang harus dilakukan setiap tahun selama lima tahun ke depan.

Pada peta jalan dipasang *Key Performance Indicator* (KPI) dan dituangkan dalam Renstra 2019-2024. Yang menjadi tantangan adalah masalah teknologi informasi karena industri 4.0 sudah dimulai. Ini tampak dari semua pejabat eselon I di Kementerian Keuangan berusaha melaksanakan digitalisasi terhadap semua proses bisnis. BPPK yang sebelumnya aku pimpin, membentuk Corporate University (Corpu), Ditjen Perbendaharaan melakukan digitalisasi sistem perbendaharaan negara di 25.000-an kantor pemerintah se-Indonesia, Ditjen Pajak mempersiapkan sistem inti administrasi perpajakan, yang merupakan *benchmark* dengan *best practice* yang digunakan oleh tujuh negara. Demikian pula Ditjen Kekayaan Negara memperbaiki sistem layanan, dan Ditjen Perimbangan Keuangan membangun sistem untuk konsolidasi fiskal, pusat dan daerah, Ditjen Bea dan Cukai juga memperbaiki sistem pelayanannya bersama Lembaga National Single Window (LNSW).

Aku meminta Inspektorat Jenderal tidak tertinggal. Sumber daya manusia sudah bagus dan yang dibutuhkan adalah membangun tim dengan kapasitas khusus, yang benar-benar mampu mengawasi dan menangani informasi sistem digital. Jika Kemenkeu telah

menerapkan teknologi informasi dengan tingkat *advance*, masak Itjen tertinggal dan peralatannya masih sederhana? Tak ada cara lain kecuali harus investasi baik di SDM maupun sarana dan prasarana, masuk ke dalam sistem berbasis digital.

Untuk memasuki ekosistem yang teknologi informasinya sudah sangat *advance*, ada beberapa hal yang diperkuat di Itjen. Pertama, kapasitas dan kompetensi untuk memahami pengembangan sistem informasi, Itjen selaku pemberi *assurance* harus melakukan *review* sejak rencana disusun, memberi sinyal dan masukan. Kalau SDM tidak mengerti, tak bisa dilanjutkan. Semua aspek harus dilihat. Itjen harus menjadi strategis *business partner* menjalankan fungsi consulting.

Kedua, Itjen harus mengawal, untuk memastikan apa yang sudah direncanakan, dikerjakan dengan baik. SDM-nya harus mempunyai kapasitas. Salah seorang Inspektur di Itjen, Patrick Wahyudwisaksono, aku tantang agar memiliki kompetensi dalam bidang *project management* karena sistem yang dibangun di Kemenkeu harus mengacu pada dunia internasional. Patrick harus tahu aturan mainnya, dan dia belajar khusus tentang itu di Australia.

Sebagai contoh ada pengadaan IT di Kemenkeu dengan nilai anggaran tidak terlalu besar, sekitar Rp 2 triliun, tetapi pengawasan anggaran itu *very critical* karena untuk menangani APBN senilai Rp 3.000-an triliun. Aku harus menyiapkan dan memastikan bahwa sistem pengawasan yang dirancang Itjen mampu menjaga GRC, mampu mengawal rencana kerja dan anggaran, proses pengadaan, *probity audit*, kebenaran substansi, menjaga integritas data, dan pembangunan infrastruktur, serta *change management* program yang disiapkan.

Untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efisien dan efektif di suatu institusi yang berbasis digital, auditor secara kolektif harus memahami regulasi, proses bisnis, sistem informasi, dan IT. Oleh karenanya, saat itu aku minta dilakukan pemetaan kompetensi SDM dan disiapkan *road map* pengembangan auditor lima tahun ke depan, baik untuk operator maupun manajerial, dari sertifikasi profesi sampai dengan yang mengambil S2 dan S3. Semua

dituangkan dalam suatu rencana kerja jangka menengah yang dijalankan secara konsisten setiap tahun. Aku memberi apresiasi untuk Pak Roberth Gonijaya, Inspektur 7 beserta tim saat itu yang menyiapkannya secara terstruktur.

Untuk memastikan apa yang dilakukan Itjen dapat memberikan nilai tambah kepada mitra pengawasannya, maka tiap inspektorat aku minta mempelajari *risk management* setiap fungsi unit mitranya dan dituangkan di dalam *risk control matrix*, sehingga Itjen punya asesmen yang cukup untuk menyusun program kerja pengawasan tahunan.

Untuk hal yang sangat penting, aku sendiri ikut terjun, Aku melihat secara langsung dan mendampingi para *programer* untuk memastikan proses bisnis dilakukan dengan tepat. Sebenarnya ini bukan tugas eselon I tetapi sebagai Ketua Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintah, aku sangat peduli dengan implementasi standar akuntansi sejalan dengan peraturan dan teknologi informasi yang dibangun. Ketika menerima pertanyaan di *high level*, aku dapat menjelaskannya dengan gamblang.

Kami menjadwalkan implementasi teknologi informasi untuk digital audit di Itjen selesai seluruhnya pada 2023. Aku sebenarnya minta ini dipercepat dengan toleransi kesalahan hanya dua persen akibat masalah jaringan internet atau kabel putus terkena pacul misalnya. Aku menyadari saat audit sedang berjalan di lapangan, terkadang urusan jaringan internet lebih lama dibandingkan urusan utama pekerjaan auditnya.

Salah satu lompatan yang harus dilakukan adalah membangun kapasitas *data analytics*, agar mampu mengakses, mengolah, menganalisa untuk kepentingan audit, baik untuk kepentingan *assurance* ataupun *consulting*, untuk memberikan *insight* atau *foresight*. Di samping itu juga membangun *Continuous Audit Continuous Monitoring (CACM)*.

Pada 2019, aku minta disiapkan *War Room*, “arena bermain” untuk mengolah data. Aku memutuskan untuk “memotong” ruang kerja (bagian ruang istirahat) untuk *War Room*. Di ruang inilah, kami mengolah data APBN secara keseluruhan, menganalisis

data, mengakses data secara populasi, dan memetakan risiko. Walaupun aku seorang “gaptek”, tetapi aku menyadari pentingnya pembangunan kapasitas IT, oleh karena aku serius dalam menyiapkan Itjen agar dapat bekerja efektif di era VUCA ini.

Pandemi Covid-19 di Indonesia sejak Maret 2020 mempercepat proses digitalisasi di Itjen. Kami berkolaborasi dengan sistem layanan data Kemenkeu.¹ Proses ini menghadapi tantangan, namun aku menyadari teknologi informasi harus menjadi programku di Itjen.

Auditor seperti Dokter

Aku menganggap profesi auditor itu seperti dokter, melakukan diagnosis. Ketika tubuh pasien memiliki kelemahan, dokter memberi nasihat. Seperti jasa konsultan yang memberi rekomendasi. Aku mengatakan kepada auditor, “tirulah pegawai perusahaan farmasi yang mampu ‘berjualan’ obat ke dokter dalam waktu lima menit, dan dokter menerima ‘jualan’ itu.” Artinya auditor tak perlu bicara panjang lebar tak menentu. Lebih baik fokus terhadap apa yang akan disampaikan. Auditor harus menjadi komunikator yang baik.

Aku menegaskan ini karena auditor harus menjelaskan secara singkat namun memberi gambaran jelas tentang situasi terkini. Aku menyadari waktu yang dimiliki eselon I sangat terbatas untuk berdialog dengan auditor. Karena itu, *engagement* antara auditor dan auditee perlu dilakukan. Aku minta mereka membangun persahabatan dengan auditee sebagai mitra, namun tetap bekerja profesional dan obyektif serta tidak terkooptasi. Tugas auditor internal itu memastikan semua pekerjaan efektif dan efisien. Jadi aku

¹ Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK) dibangun untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. SLDK mengintegrasikan dan mengonsolidasikan data seluruh unit di lingkungan Kemenkeu dan eksternal, sehingga tercipta single source of truth. Data ini dapat dimanfaatkan, termasuk dalam pengambilan kebijakan dengan berdasarkan prinsip kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan. SLDK juga bertujuan untuk mewujudkan Integrated Financial Management Information System (IFMIS). SLDK dapat menjadi backbone New Thinking of Working (NTOW) — bentuk perubahan budaya Kemenkeu yang semakin adaptif, berintegritas, agile, dan berbasis digital. (Sumber: Tata Kelola Data Terintegrasi Kemenkeu Dukung Satu Data Indonesia, 29 Juli 2020 <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/tata-kelola-data-terintegrasi-kemenkeu-dukung-satu-data-indonesia>)

minta auditor tidak menunggu pekerjaan selesai, baru “menyalahnyalahkan”. Jika hal semacam ini masih terjadi, berarti masih ada pekerjaan rumah, dibutuhkan perbaikan komunikasi lisan dan tertulis dan tata cara audit.

Melakukan komunikasi tertulis menghadapi tantangan berbeda. Aku pernah ditugasi menyiapkan modul Laporan Hasil Pemeriksaan. Tugasku membuat modul, menguraikannya harus lengkap, sesuai dasar hukum sehingga tidak terbantahkan lagi, selain penyebab, akibat, rekomendasi, dan komentarnya. Setelah aku menyadari pimpinan sibuk untuk membaca secara mendetail, aku meminta laporan dibuat dua versi. Dalam versi singkat, aku minta dibuat infografis, satu tema satu halaman. Menteri cukup membaca infografis dengan data singkat dan padat. Adapun versi lengkapnya, dibaca dan dipelajari oleh unit-unit teknis terkait.

Laporan audit melalui infografis ternyata lebih efektif. Setelah membaca itu, Menteri bisa lebih cepat memahami, berdiskusi, memberi arahan lebih cepat dan lebih tajam.

Untuk mengembangkan kompetensi auditor, kami sudah merancang sampai tahun 2023, auditor diwajibkan memiliki berbagai keahlian. Ini merupakan hal baru di Itjen. *Passion* dan kepedulianku memang di bidang kompetensi sumber daya manusia. Menjadi guru bisa di mana saja.

Dalam melakukan transformasi, aku minta SDM dari unit teknis, kalau belajar juga mengajak regulator, auditor, dan widyaiswara. Mereka semua akan bertugas untuk menjalankan program transformasi sesuai dengan bidang tugasnya. Oleh karena itu semua pihak harus memperoleh bekal yang sama agar semua dapat menjalankan tugas dan peran masing-masing dengan benar dan program dapat berjalan lancar.

Pengawasan dalam Pengarusutamaan Gender Masih Kurang

Sebelum pandemi 2018, ketika menjabat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan, aku menginisiasi program

pengarusutamaan gender di Kemenkeu. Namun aku melihat pengawasan dalam program ini masih kurang.

Oleh karena itu aku minta kepada Inspektur 6, saat itu Bu Rina Robiati, dengan Heru Susanto sebagai auditor madya, untuk menyiapkan audit implementasi PUG. Pada tahun 2018 audit implementasi PUG ini mulai dilakukan, meski masih sangat *basic*.

Kementerian Keuangan merupakan kementerian di Indonesia yang melakukan audit implementasi pengarusutamaan gender. Panduan audit PUG sudah diterbitkan untuk dipedomani. Dengan adanya audit ini maka dorongan implementasi PUG di Kemenkeu semakin kuat. Kementerian dan lembaga lainnya di Indonesia sampai tahun 2022 ini masih belum melakukan audit PUG.

Kerja Sama dengan Instansi Lain dan Aktif di Asosiasi Auditor Internal Pemerintah

Dalam hal pengawalan keuangan negara, Itjen menjalin kerja sama dengan aparat Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kerja sama ini sudah terjalin sejak dulu. Memasuki pandemi, kerja sama dipererat dengan penandatanganan nota kesepahaman (Mou) dan menggelar rapat berkala secara intensif.

Satu hal lagi selama menjabat Irjen, aku menjadi Ketua Dewan Pengawasan Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), yang memiliki Komite Standar Audit, Komite Pengembangan Profesi, Komite Telaah Sejawat, dan Komite Kode Etik Profesi. Di sini, aku berusaha mendorong asosiasi ini menjalankan perannya sehingga standar audit, kode etik, *peer review*, pengembangan profesi dijalankan.

Sayangnya saat mulai aktif, Indonesia memasuki masa pandemi sehingga upaya ini tak bisa optimal karena situasinya tidak memungkinkan. Aku baru empat kali melakukan kunjungan ke daerah, yaitu ke Semarang, Palembang, Batam, dan Ternate. Kami mempersiapkan panduan dan berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan auditor dari instansi lain.

Berbagi Pengetahuan

Berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) sangat diperlukan. Setiap tahun dalam 220 hari kerja, lebih dari 150 tamu dari berbagai lembaga yang datang ke kantor Itjen untuk belajar. Untuk mempercepat *knowledge sharing*, kami membuat kelas dalam *Kemenkeu Learning Center* atau KLC. Aku beranggapan proses pembelajaran harus terus berlangsung sepanjang masa dan tak boleh terputus. Dari lapangan, banyak sekali pelajaran yang didapatkan. Karenanya aku meminta semua laporan tak boleh masuk lemari arsip begitu saja tetapi harus diolah dan dikemas dalam *case management system* atau modul-modul pelatihan.

Karena banyak yang membutuhkannya, bahan-bahan pengetahuan ini perlu dikemas secara digital sehingga mudah diakses. Ini berarti tidak harus bergantung pada Inspektur. Mereka yang ingin belajar bagaimana melakukan audit dengan tema tertentu, cukup menonton video dan mencari bahannya.

Ketika menjabat Irjen pada Januari 2017, anggaran sudah tersedia dan digunakan untuk membangun fasilitas yang bermanfaat sampai saat ini. Infrastruktur yang aku bangun mulai dari sarana dan prasarana, sistem dan regulasi yang disesuaikan pada masa pandemi. Karena membutuhkan SDM yang piawai dalam dunia teknologi informasi, Itjen melakukan percepatan pelatihan, bekerja sama dengan BPPK.

Saat pandemi melanda Indonesia, pegawai Itjen tidak bengong. Justru Itjen Kemenkeu memperoleh *benefit* berupa akselerasi implementasi digital audit. *Audit Management Systems* digunakan sepenuhnya. Sistem informasi untuk audit terjadi selama masa pandemi.

Sebaliknya di pemda-pemda, banyak auditor yang tidak bisa bekerja karena adanya pembatasan dan tak ada yang dapat dikerjakan. Sementara Itjen Kemenkeu terus bekerja keras untuk mengawal Program Penanganan Covid, Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). Seandainya *digital audit* belum disiapkan, auditor Kemenkeu juga akan mengalami kesulitan untuk bertugas.

“Open Space” di Gedung Itjen

Sebelum Kementerian Keuangan menerapkan kebijakan *working space* di seluruh unit kerja Kemenkeu pada akhir 2020², Inspektorat Jenderal sudah lebih dulu menerapkan kebijakan *open space* (penataan ruang kerja terbuka tanpa sekat). Ruang kerja kubikal dibongkar, diganti dengan ruang terbuka. Pegawai Itjen bisa duduk dan bekerja di mana saja.

Aku menyadari pada tahap awal, ada resistensi terhadap kebijakan ini. Namun setelah ada yang menikmati, banyak yang bertanya, kapan ruangan kami dijadikan *open working space*?

Saat itu Menteri Keuangan belum menginstruksikan.

“Bisa (dilaksanakan), Bu Sum?” tanya Bu Sri Mulyani suatu hari saat rapat tentang *working space* di Inspektorat Jenderal.

“Bisa, Bu, tetapi ya mesti sabar,” jawabku.

Aku mulai menerapkan *working space* ini dari ruang kerja di Inspektorat 1, yang mengawasi Pajak, kemudian merambah ke inspektorat lain termasuk Inspektorat 7 yang menangani bidang Teknologi Informasi. Setelah itu menyebar ke berbagai ruangan.

Implikasi penggunaan teknologi informasi ini adalah pola kerja auditor yang berubah, yang sebelumnya konvensional berubah menjadi berbasis digital. Sebelumnya, kalau auditor menerima surat tugas, melakukan persiapan kunjungan, turun ke lapangan, dan mengurus biaya perjalanan dinas secara konvensional. Setelah audit berbasis digital, maka saat terima surat tugas, auditor langsung buka computer masing-masing, tidak ada lagi kerepotan dan waktu yang diperlukan untuk persiapan penugasan.

Jika audit masih konvensional, pegawai harus ke lapangan, melakukan perjalanan sehingga menghabiskan waktu relatif lama. Kantor atau Satuan kerja Kemenkeu tersebar sampai level kabupaten/kota, bahkan punya pos di tepi laut. Aku pernah

² Co-Working Space merupakan ruang kerja bersama yang dapat digunakan seluruh pegawai Kementerian Keuangan sebagai bagian dari pelaksanaan Activity Based Workplace (ABW). Ruang kerja nyaman yang memiliki tata letak ruang dengan konsep open space. Berbagai fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pegawai seperti loker pribadi. Co-working Space mendorong terciptanya komunikasi, diskusi dan kolaborasi antar pegawai dengan memanfaatkan ruang kerja tanpa harus bekerja di kantor utama namun pegawai tetap produktif dalam bekerja. (Sumber: <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/menteri-keuangan-resmi-meluncurkan-satellite-office-dan-co-working-space>)

mengunjungi kantor-kantor Kemenkeu di Tembilahan, Rengat, Tahuna, Nunukan, Kuala Tungkal, Toli-Toli, dan pedalaman Riau. Semuanya menghabiskan waktu yang relatif panjang, melelahkan, dan tidak efisien. Padahal waktu relatif panjang itu dapat digunakan untuk memikirkan hal-hal lain. Aku ingin mengoptimalkan kapasitas sumber daya manusia di kantor Itjen.

Setelah berbasis digital, semua yang konvensional secara bertahap berkurang dan akhirnya tinggal sedikit. Dampak positif program digitalisasi adalah efisiensi. Aku membangun komunikasi dengan unit di lingkungan Itjen, menjelaskan lebih jauh tentang *open space* dan *remote auditing*. Melalui sistem ini, pegawai Itjen bisa bekerja di ruang mana saja, juga bisa akses dari *War Room*.

Konsekuensi digitalisasi adalah perubahan perilaku, sekaligus penurunan biaya anggaran pengawasan. Biaya audit di Kemenkeu “hanya” 30-35 persen, sepertiga dari kementerian besar, padahal jumlah pegawai Kemenkeu 84.000 orang dengan 1.100 kantor.

Pengawasan Jarak Jauh

Pengawasan jarak jauh (*remote auditing*) yang aku gagas ini memanfaatkan teknologi informasi. Sebenarnya program ini sudah dilakukan lebuah dulu di negara-negara maju. Auditor tidak harus datang bertatap muka dengan auditee tetapi dilakukan secara jarak jauh. Pengawasan jarak jauh makin bermanfaat setelah pandemi melanda Indonesia sejak Maret 2020. Agar tata kelola audit jarak jauh ini terjaga, maka ketentuan tentang pengawasan jarak jauh ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Hasil audit tetap sah jika kasus sampai ke pengadilan, dan teknik audit sudah sesuai dengan SOP KMK. Komite auditing ini dikomandani oleh Pak Alexander Zulkarnain.

Jumlah auditor terbatas, dan ketika pandemi terjadi, pegawai kami sulit ke lokasi. Agar pengawasan tetap berjalan, aku selalu menyampaikan pesan kepada para pegawai Kementerian Keuangan di berbagai lokasi melalui program “Irjen Menyapa” melalui

teknologi Zoom. Aku berkomunikasi dengan pegawai Kemenkeu di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam program pengawasan jarak jauh, pegawai Itjen bukan berarti tidak boleh keluar kota, tetapi aku menekankan cara kerja auditor tak bisa lagi seperti dulu, tetapi menggunakan audit digital. Pegawai yang ke lapangan lebih melakukan observasi, *walk through test*, atau pengecekan fisik.

“Menjaga Rumah” agar Kemenkeu Tetap Dipercaya

Kami semua yang bekerja di Kementerian Keuangan wajib “menjaga rumah” ini tetap nyaman dan Kemenkeu tetap dipercaya. Siapapun Menteri Keuangan yang ditunjuk Presiden, kami berkewajiban memastikan semua sistem yang sudah dibangun sejak reformasi birokrasi di Kemenkeu, berjalan dengan baik.

Fondasi yang kokoh dan pilar-pilar yang dibangun menjadikan performa Kemenkeu tetap baik. *Whistle Blowing System* (WBS) di lingkungan Kemenkeu juga berjalan dengan baik.³

Setiap pegawai Kemenkeu sudah tercatat rekam jejaknya sejak awal masuk, dan ini dapat dicek oleh Inspektur Jenderal dan Unit Kepatuhan Internal.

Kami juga meminta jajaran Kemenkeu untuk menggunakan media sosial (medsos) secara bijak, jangan sembarangan meneruskan (*forward*) unggahan di medsos. Karena komentar pegawai Kemenkeu bisa jadi kontraproduktif. Misalkan satu pegawai DJP, Gayus melakukan *fraud*, yang merasa sakit adalah pegawai se-Kementerian Keuangan. Dibutuhkan usaha ekstra oleh semua pihak untuk menetralkan dan memulihkan situasi tersebut. Karenanya, sejak awal, aku sebagai Irjen meminta agar seluruh pegawai menjaga nama Kemenkeu bersama-sama.

3 Whistleblowing System atau WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Di Kementerian Keuangan, Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan bagi yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kemenkeu. (Sumber: <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/whistleblowing-system>)



2021: Sumiyati menyerahkan jabatan Inspektur Jenderal Kemenkeu kepada penggantinya, Awan Nurmawan Nuh.

FOTO: DOKUMENTASI HUMAS ITJEN KEMENKEU

Kepada mahasiswa PKN STAN, aku selalu mengingatkan, mereka yang datang dari desa dan kuliah di kampus PKN STAN yang dibiayai negara menjadi kebanggaan orangtua dan harapan keluarga. “Jika kalian tidak bisa menjaga diri, tidak bisa menjaga integritas, bagaimana perasaan orangtua dan keluarga kalian?” kataku.

Mahasiswa PKN STAN sekarang tidak lagi didominasi anak-anak kampung dari desa. Pada zaman aku kuliah, 80 persen mahasiswa berasal dari desa —seperti aku. Tetapi setelah remunerasi di Kemenkeu semakin baik, kesempatan belajar bagi pegawai Kemenkeu terbuka lebar, penghasilan tak lagi minim —*entry level* Kemenkeu bahkan relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan swasta, banyak orang tertarik bekerja di Kemenkeu dengan cara kuliah di PKN STAN. Saat ini sudah jamak melihat lulusan SMA favorit yang tertarik masuk PKN STAN. Mereka yang bukan lulusan PKN STAN yang ingin masuk Kemenkeu harus berkompetisi secara ketat karena harus mengikuti seleksi yang tidak ringan. Kondisi inilah yang akhirnya menyebabkan PKN STAN menjadi salah satu tempat kuliah favorit.

Bambang Karuliawasto

“IBU SUMIYATI, ATASAN YANG TIDAK BIROKRATIS”



Bambang Karuliawasto, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

FOTO OLEH ROBERT ADHI KSP

Bambang Karuliawasto (59 tahun) mengenal Sumiyati sejak tahun 1982. Saat itu Sumiyati kakak kelasnya di STAN, satu tahun di atas dia. Sumiyati pernah menjadi asisten dosen (asdos) dan mengajar Bambang —kebetulan lulusan SMA jurusan IPA yang tidak mendapatkan pelajaran Tata Buku atau Akuntansi.

Menurut Bambang, Sumiyati adalah senior yang dengan sukarela mendidik teman-teman yang kesulitan memahami Tata Buku. Angkatan Bambang di STAN banyak yang berguguran terutama karena tidak menguasai pelajaran Tata Buku. Sekitar 100 orang yang *drop-out*.

Bambang mengaku sangat terbantu oleh Sumiyati yang saat itu berperan sebagai tentor. Dalam kegiatan tentir yang dikelola oleh Senat Mahasiswa, Sumiyati tidak dibayar. “Itu karena jiwa Ibu Sum memang mengajar. Beliau sangat menguasai materi pelajaran dan dapat menyampaikan kepada kami dengan jelas,” cerita Bambang.

Bahkan dalam pekerjaan pun, kata Bambang, Sumiyati sangat menguasai tiga paket UU Keuangan Negara. “Ini tidak heran karena Ibu Sum ikut terlibat dalam penyusunan UU tersebut. Beliau ikut meletakkan dasar-dasar keuangan negara. Beliau memang pakar penganggaran,” jelas Bambang Karuliawasto yang saat ini bertugas sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.⁴

⁴ Diolah dari percakapan penulis dengan Bambang Karuliawasto, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI di Gedung Djuanda II Jakarta, 1 Agustus 2022. Bambang Karuliawasto, Ak., MBA, CA, C-SOX, yang lahir di Jakarta 17 Desember 1962 adalah lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1990. Bambang melanjutkan pendidikan MBA bidang Keuangan di The University of Miami (UM) di Florida, Amerika Serikat tahun 1995. Bambang pernah ditugaskan sebagai Asistance Vice President pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional, BPPN (1999-2004), serta penugasan paruh waktu sebagai anggota Komite Audit pada PT Hutama Karya (2005-2010), PT Balai Pustaka (2007-2013), BNI Securities (2007 – 2018), dan sebagai Ketua Komite Audit PT Karabha Digdaya (2018-sekarang) — yang salah satunya membawahi padang golf Emerald. Di perusahaan eks BPPN yang 100 persen dimiliki Kemenkeu tersebut, Bambang ditugasi sebagai Komisaris Utama.

Setelah lulus dari STAN, mereka lama tidak berjumpa dan sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Bambang baru bertemu lagi dengan Sumiyati ketika menjabat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan di kantor Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. “Pada saat itu saya Auditor Madya di Inspektorat Jenderal. Kami sama-sama melakukan penelaahan (review) atas penyusunan laporan keuangan Bagian Anggaran 15 (BA 15) Kementerian Keuangan agar sesuai standar akuntansi yang berlaku,” ungkap Bambang.

Karena mereka sudah saling kenal dan memiliki chemistry yang sama, komunikasi mereka lebih lancar. “Interaksi saya dengan Ibu Sum makin sering, terutama dalam rapat dan saat meninjau satuan kerja (satker). Pada masa itu, penyusunan laporan keuangan pemerintah masih merupakan sesuatu hal yang baru. Kami (Setjen dan Itjen) sama-sama berusaha mendapatkan opini terbaik bagi Laporan Keuangan Kementerian Keuangan, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jelas Bambang.

Titik kekuatan Sumiyati adalah pada saat memberitahukan kepada pihak lain, selalu jelas. “Artikulasi katanya sangat bagus. Cara Ibu Sum menyampaikan, meminta satker menyusun laporan keuangan sesuai standar lebih mudah dicerna. Berkat kerja keras Ibu Sumiyati, Laporan Keuangan BA15 Kemenkeu yang pada awalnya tidak baik, berangsur-angsur mendapatkan Opini WTP. Untuk itu, kita tidak boleh melupakan jerih-payah Ibu Sumiyati — yang saat menjabat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, berjuang keras melaksanakan tugas dan fungsinya mengamankan BA-15,” papar Bambang.

Pada tahun 2013, Sumiyati menjabat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu sebagai pejabat eselon I, dan Bambang di eselon II Itjen Kemenkeu.

Empat tahun kemudian, pada 2017, Sumiyati menjabat Inspektur Jenderal, dan Bambang bawahannya, sebagai Inspektur IV di Itjen, mengawasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Badan Kebijakan Fiskal. Pada tahun 2017 itu, Bambang dimutasi menjadi Inspektur VI yang mengawasi BPPK dan Sekretariat Jenderal. Satu tahun kemudian, pada 2018, Bambang menjabat Sekretaris Inspektorat Jenderal (Ses Itjen), sampai sekarang. Sementara itu Sumiyati memasuki masa purnabakti pada 1 Agustus 2021. Namun demikian, saat ini interaksi Sumiyati dengan Inspektorat Jenderal tetap intens karena pada 2022, Sumiyati diangkat

sebagai Ketua Komite Audit Kementerian Keuangan, sebuah komite yang berperan sebagai *oversight* pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal.

Mudah Beradaptasi dan Berkomunikasi

Bambang menilai, ketika memimpin Inspektorat Jenderal, Sumiyati dengan mudah beradaptasi karena pernah menjadi auditor di BPKP pada awal kariernya, selain itu, juga pernah menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. “Sebagai Inspektur Jenderal, Ibu Sumiyati sangat detail. Kalau mereviu konsep laporan hasil pengawasan misalnya, Ibu Sum sangat memperhatikan referensi peraturan perundangan serta susunan kata-katanya,” katanya.

Bambang juga mengungkapkan, peran Sumiyati sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional AAPII pada saat itu memudahkan dan menunjang pekerjaannya sebagai Irjen Kemenkeu, yang mendukung peran Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN).

Sesuai UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan memiliki tiga peran, yaitu sebagai pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah atas kepemilikan kekayaan negara dipisahkan disamping sebagai Pengguna Anggaran. Sebagai pengelola fiskal, Menteri Keuangan mempunyai delapan tugas, salah satunya adalah sebagai Bendahara Umum Negara. Dana BUN yang disalurkan ke Kementerian/Lembaga/Korporasi, dan ke pemerintah daerah dalam bentuk subsidi, kompensasi, dan transfer ke daerah sangat besar.

Di sini, Sumiyati melalui AAPII berupaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi para auditor anggota AAPII, yang anggotanya adalah auditor-auditor di kementerian/lembaga dan pemda. Apabila para auditor di Pemerintah Pusat dan pemerintah sudah bekerja dengan profesional, Menteri Keuangan selaku BUN akan lebih yakin tata kelola keuangan negara dijalankan dengan baik.

Bambang berpendapat, Sumiyati yang merintis kariernya dari bawah, sangat menguasai proses audit atau pengawasan intern. Selain pernah menjadi auditor di BPKP dan Kepala Biro Perencanaan Keuangan, Sumiyati selalu update pada perkembangan audit terkini.

“Ibu Sum sangat detail menanyakan tentang pelaksanaan audit. Beliau sering menanyakan kepada para Inspektur untuk memastikan para auditor melakukan langkah audit yang tepat. Walaupun demikian, Ibu Sum

bisa diajak ngobrol di mana saja. Beliau tidak terlalu birokratis sehingga komunikasi dan hubungan kerja menjadi lebih cair,” kata Bambang.

Bambang juga terkesan dengan rasa kekeluargaan Sumiyati. “Karena Ibu Sumiyati seorang ibu, hubungan atasan dan bawahan lebih cair dan rasa kekeluargaan dalam keluarga pegawai sangat kental. Ibu sangat penuh perhatian. Ketika istri saya sakit dan dirawat di rumah sakit, Ibu Sum menyempatkan diri untuk menjenguk istri saya — yang aktif di Dharma Wanita. Ibu Sum sangat memperhatikan anggota keluarga para pegawai karena sosok beliau sebagai ibu. Naluri keibuannya sangat menonjol. Ketika saya berulang tahun, Ibu Sumiyati sebagai atasan saya menyempatkan datang ke ruangan saya, memberi ucapan selamat. Sentuhan personal beliau sangat kuat,” ungkapnya.

Raden Patrick Wahyudwisaksono

SUMIYATI MEMBIMBING DENGAN HATI DAN KASIH SAYANG



Raden Patrick Wahyudwisaksono,
Inspektur V Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan RI.

FOTO OLEH ROBERT ADHI KSP

Raden Patrick Wahyudwisaksono masih ingat pada tahun 1982 ketika dia mulai awal kuliah di STAN, Sumiyati adalah asisten dosen dan pembimbingnya di bidang akuntansi. Patrick lulusan SMA jurusan IPA masih “buta” tentang tata buku atau akuntansi. “Bu Sum-lah yang mengajari saya dari nol bagaimana membaca akuntansi dan untuk apa akuntansi,” cerita Patrick.⁵

Patrick merasa Sumiyati seperti kakaknya sendiri, yang membimbingnya dengan kasih sayang dan dengan hati. “Apalagi kami sama-sama berasal dari wilayah Keresidenan Surakarta, yang membawa kami bernostalgia dengan kehidupan di daerah. Saya dari

⁵ Diolah dari wawancara penulis dengan Raden Patrick Wahyudwisaksono, Inspektur V Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI, di kantor Gedung Djuanda II Jakarta Pusat, 1 Agustus 2022

“Ibu Sum selalu mengatakan kepada saya, apa artinya gelar jika tak bisa membawakan diri? Belajar harus serius dan ilmu yang dipelajari harus diimplementasikan. Beliau selalu mengingatkan kepada semua jajaran Itjen untuk selalu menjaga integritas dan tidak korupsi karena hanya integritas-lah yang membuat seseorang punya nilai.”
— Patrick Wahyudwisaksono

Solo, dan Ibu Sum dari Sragen. Saya masih keturunan dari Keraton Solo yang semuanya beruntung sudah tersedia, Ibu Sum tinggal di tempat yang jauh dari keramaian, di perbukitan yang jauh dari kota Sragen, dan dengan kesederhanaannya, harus berjuang keras mendapatkan air untuk keperluan sehari-hari. Saya merasakan kesederhanaan Ibu Sum dan perjuangan orangtuanya yang tidak sekolah, yang menginginkan putrinya berhasil dalam kehidupan. Tak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada perjuangan tanpa menapaki perjalanan yang berjenjang,” ungkap Patrick yang juga aktif sebagai penari Jawa maupun tarian nusantara.

Patrick menilai, Sumiyati bertipe koleris dan sedikit plegmatis tetapi bukan seorang melankolis. Kerja keras Sumiyati dan dorongan orangtuanya membuatnya mampu mewujudkan cita-citanya. Beberapa saudaranya ada yang menjadi pejabat di Wonogiri dan Semarang. Ketika Sumiyati kuliah di STAN, dia bercita-cita menjadi akuntan namun tetap menyukai profesi guru.

Pada 1985, Patrick dan rekan seangkatannya di STAN (1982) merupakan pegawai pertama BPKP — di mana sebelumnya bernama Ditjen Pengawasan Keuangan Negara. Seluruh pegawai Ditjen Pengawasan Keuangan Negara dialihkan menjadi pegawai BPKP, termasuk Sumiyati — yang sejak 1983 atau dua tahun lebih awal bekerja di BPKP, tetapi ditempatkan di STAN.

Mereka berpisah dalam rentang waktu relatif lama sekitar 15 tahun. Patrick yang mulai bertugas sejak tahun 1985 berstatus sebagai pegawai Deputy Administrasi BPKP yang diperbantukan di Kementerian Keuangan pada Inspektorat Jenderal, sedangkan Sumiyati beberapa kali pernah dimutasi di BPKP. Keduanya bertemu lagi pada 1990 di seputaran Lapangan Banteng (kantor pusat Kemenkeu) setelah keduanya bertugas di Kementerian. Sumiyati bekerja di BAKUN (yang kemudian melebur ke Ditjen Perbendaharaan), sedangkan Patrick tetap di Itjen Kementerian Keuangan. Sumiyati ditarik oleh (alm) Hekinus Manao dan Sonny Loho, di mana keduanya pernah menjabat Inspektur Jenderal Kemenkeu. Sumiyati dipromosikan sebagai Kabag.

Tetap Rendah Hati, Berkonsultasi dengan Adik Angkatan dan Mahasiswanya

Patrick yang saat itu masih eselon IV bertemu dengan Sumiyati yang ketika itu mengajar di salah satu sesi pendidikan akuntabilitas laporan keuangan (PPAKP) tentang bagaimana meraih Opini WTP — yang sebelumnya disclaimer. Tak elok jika Kemenkeu tidak meraih Opini WTP.

Sumiyati kemudian dipromosi menjabat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan di Setjen Kemenkeu, menjadi pejabat eselon II. Ketika itu Patrick auditor di bidang bea dan cukai. Dia ditantang untuk memperbaiki laporan keuangan. Bersama-sama Anne Serfiana, Patrick sama-sama memperbaiki laporan keuangan bea dan cukai, dan mendapatkan Opini WTP pada 2008 (atau 2009?). “Itulah kepuasan kerja kami setelah dibimbing Ibu Sumiyati yang menggalang laporan keuangan yang akuntabel dan kredibel,” ungkap Patrick.

Ketika Sumiyati menjabat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Patrick adalah Auditor Madya di Itjen Kemenkeu. “Saya terkesan pada Ibu Sum karena beliau dengan rendah hati berkonsultasi tentang belanja modal, serta pengadaan barang dan jasa dari sisi transparansi dan pencegahan korupsi. Tak ada kata malu dan gengsi bagi Ibu Sum untuk berkonsultasi dengan saya yang notabene adalah adik kelasnya dan pernah menjadi mahasiswanya di STAN. Beliau duduk di ruang Help Desk, dan dengan rendah hati menanyakan segala sesuatu tentang pencegahan fraud,” ungkap Patrick.

Menyatukan Semua Pusdiklat di Bawah BPPK

Patrick mengikuti ‘sepak terjang’ Sumiyati ketika menjabat Kepala BPPK. “Bu Sum adalah pelopor berdirinya Corpu University di BPPK, menata dan menyatukan semua Pusdiklat di lingkungan Kemenkeu, mulai dari Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Pusdiklat Keuangan Umum, sampai Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pusdiklat-pusdiklat tersebut yang sebelumnya bekerja “santai”, setelah Sumiyati menjabat Kepala BPPK, langsung tancap gas.

Patrick melihat, Pusdiklat Bea dan Cukai sebelumnya merasa bagian dari Ditjen Bea dan Cukai, demikian halnya dengan Pusdiklat Pajak yang seolah bagian dari Ditjen Pajak. “Bu Sum menyatukan semua Pusdiklat

itu dalam format yang sama. Beliau menyamakan mutu dan standar biaya pendidikan, serta memantau aktivitas widyaiswara agar pengukuran kinerja mereka lebih baik lagi,” ungkapnya.

Meningkatkan Peran APIP di Kementerian dan Lembaga

Yang tidak diduga-duga, kata Patrick, ketika pada awal 2017, Sumiyati diangkat menjabat Inspektur Jenderal Kemenkeu. Sumiyati mendorong Patrick —yang sejak Maret 2017 menjabat Inspektur V Itjen Kemenkeu— untuk berinovasi bagaimana mengawal APBN, mendorongnya untuk meningkatkan peran APIP atau Aparat Pengawas Internal Pemerintah agar proaktif mengawal penerimaan negara dari APBN, yang dikukuhkan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. “Itu hasil kerja kami satu tahun. Sebelumnya APIP hanya mengawal belanja,” papar Patrick.

Setelah menjabat Irjen Kemenkeu, Sumiyati menggagas untuk menghimpun 87 pimpinan APIP di Dhanapala, membuat *Letter of Commitment*, komitmen bersama mengawal Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP. “Ini ide Bu Sum. Beliau memikirkan bagaimana menggandeng APIP daerah, pengawas internal daerah, dengan cara menyinergikan APIP pusat dan daerah. Kebijakan ini diinisiasi Bu Sum pada 2018 untuk mengawal setiap rupiah yang dikeluarkan negara,” urai Patrick.

Mendorong Itjen Lakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Selain itu, sebagai Irjen Kemenkeu, Sumiyati juga aktif (*ex-officio*) sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional AAIP, menggelar rapat-rapat koordinasi pengawasan dengan 87 koordinator auditor dari kementerian dan lembaga. Menurut Patrick, Sumiyati mendorong jajaran Itjen melakukan inisiasi redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP) dalam upaya memperbaiki pengawasan di kementerian dan lembaga.

Sebagai salah satu anggota yang terlibat dalam penyusunan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara yang mendorong pemerintah RI menerapkan Penganggaran Berbasis Kinerja, Sumiyati

mengingatkan setiap kementerian dan lembaga untuk tidak hanya menaikkan anggaran setiap tahun tanpa melihat hubungan relevansi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Pembangunan Tahunan, ataupun tanpa melihat *output* dan *outcome*-nya.

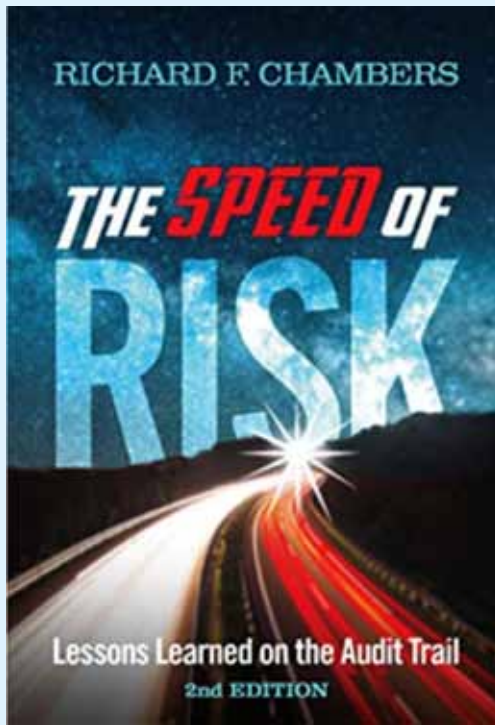
“Bu Sum menantang kami di Inspektorat V. Itulah awal kami menggali berbagai sumber referensi untuk membangkitkan kembali (*reborn*) Penganggaran Berbasis Kinerja. Ini menjadi materi yang saya usung ketika mengikuti kontes Staf Ahli Menteri, yaitu mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan redesain sistem perencanaan dan penganggaran. Itu buah pikir Bu Sum karena beliau terlibat dalam merumuskan ketentuan anggaran dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang belum puas dengan cara kerja di Itjen yang terkesan lamban. Sampai sekarang RSPP masih kami sempurnakan agar terjadi efisiensi,” ungkap Patrick.

Membedah Cara Kerja Itjen yang Lamban

Pada 2019, Patrick dan Sumiyati mengikuti konferensi internasional yang diselenggarakan oleh The Institute of Internal Audit (IIA) diikuti auditor internal dari seluruh dunia — di Anaheim, California, Amerika Serikat. Sumiyati membaca buku berjudul “The Speed of Risk” karya Richard F. Chambers, IIA dan buku itu menggugahnya, mempertanyakan cara kerja auditor yang lamban, tidak cepat merespon pimpinan. Sumiyati mencari cara untuk mempercepat cara kerja auditor agar lebih cepat.

Salah satunya adalah dengan menerapkan digitalisasi 4.0. Itu berarti cara kerja yang harus berubah, tak bisa lagi bekerja dengan cara biasa-biasa lagi. Kami harus menggali data dan mampu menganalisis data. Ini harus difasilitasi CTO (*Central Transformation Office*) di Sekretariat Jenderal dan Pusintek (Pusat Sistem Informasi Teknologi) Kemenkeu yang menyalurkan data ke kamar sistem layanan data komputer.

Dulu Itjen hanya mengandalkan informasi sedapatnya dari tim di lapangan dan seringkali data yang diterima tidak update. Cara memilihnya pun tidak berbasis risiko dan tidak sepenuhnya sesuai teori. Informasi diterima hanya dari tingkat kerawanan dari pengaduan, dan tipe pegawai, tetapi tidak bisa dipantau lebih jauh.



Setelah menjabat Irjen, Sumiyati membedah penyebab lamban cara kerja Itjen. “Bu Sum mencari cara agar seluruh pejabat eselon I dapat menyalurkan data, dan meyakinkan berbagai pihak bahwa kebijakan Itjen untuk melayani Menteri Keuangan. Bu Sum melakukan revolusi di Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Itjen, War Room kami. Sejak itu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang sebelumnya membatasi kewenangan Itjen mulai membuka data mereka. Beliau juga meminta adik-adik milenial di-grooming agar mampu menganalisis data hingga tingkat advance,” urai Patrick.

Mengoptimalkan Penggunaan Aplikasi Solusi Audit “TeamMate”

Sebenarnya, sebelum mengenal analisis data, Sumiyati sudah memperkenalkan cara mengolah data dengan cara sederhana. Auditor mempunyai teknik audit berbasis komputer atau TABK yang menggunakan

aplikasi Audit Command Language atau ACL. Melalui aplikasi ACL, auditor merekap data. “Ibu Sum mewajibkan kami — dari auditor pelaksana sampai auditor utama— untuk belajar lagi, termasuk saya. Ini cikal bakal Ibu Sum mengubah cara kerja dari cara manual ke basis digital,” jelas Patrick.

“Aplikasi kita apa?” tanya Sumiyati.

“Sistem manajemen audit, Bu. Karena satu-satunya APIP pengguna terbesar, kita pernah dikasih award,” jawab Patrick.

Sumiyati tidak puas karena capability model di Itjen tetap di level III sejak 2011.

“Enam tahun kita tidak naik kelas. Apa yang kurang?” tanya Sumiyati.

“Kita harus punya komite audit, piagam audit, pola pembinaan karier auditor yang lebih baik, dan semua harus berbasis teknologi informasi, tak bisa lagi dengan cara manual,” jelas Patrick.

“Apakah ada dalam sistem manajemen audit kita?” tanya Sumiyati lagi.

“Ada, Bu, tetapi tidak dipakai optimal,” jelas Patrick.

Sebenarnya Itjen Kemenkeu telah menggunakan aplikasi yang bagus, dan Sumiyati melihat aplikasi tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Kemenkeu misalnya, pernah diundang Wolters Kluwer karena menggunakan aplikasi audit bermerek dagang “TeamMate” dan menjadi contoh sebagai institusi yang berambisi naik ke level IV.

Setelah Sumiyati memaksimalkan penggunaan aplikasi “TeamMate” ini, kapabilitas audit di Itjen Kemenkeu kini sudah di level IV. Level ini membawa Indonesia tertinggi di kawasan Asia Pasifik saat ini. Hanya tiga negara yang di Asia Pasifik yang ada di level IV.

Sumiyati memacu jajaran Itjen untuk mencari sekaligus membenahi kekurangan. Selain itu, Sumiyati juga menata manajemen talenta (pola penataan karier).

“Saya tidak mau melihat urut kacang. Auditor muda bisa saja menjadi auditor madya, atau pelaksana bisa menjadi auditor muda jika mereka berprestasi,” kata Sumiyati.

Membentuk “Community of Practice”

Pada 2019, Sumiyati menginisiasi pembentukan *Community of Practice* (CoP) yang memfokuskan pada topik tentang pengadaan barang dan jasa, penerimaan negara, belanja dan pembiayaan APBN, serta analisis kebijakan fiskal. Komunitas ini belum sempurna dan kegiatannya masih on-off.

Selama masa pandemi, kegiatan CoP hampir terhenti karena kendala Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

Menggagas dan Mempraktikkan Pengawasan Jarak Jauh

Pada Maret 2020, Sumiyati diundang UGM untuk mengupas peran auditor internal. Ketika berbicara di Fakultas Pascasarjana UGM itulah, Sumiyati mencetuskan gagasan untuk melakukan pengawasan jarak jauh (remote auditing). Ketika itu Sumiyati mendapatkan referensi tentang era baru (new era) di mana kegiatan audit dapat dilakukan jarak jauh, lebih efisien, bukan lagi dengan sampel tetapi populasi. Kalaupun turun ke lapangan, hanya hal-hal yang bersifat anomali. Locus-nya banyak namun langsung ke sumber masalah.

Pengawasan jarak jauh di era digital ini sangat membantu jajaran Itjen bekerja pada masa pandemi Covid-19. Momentumnya bersamaan dengan masa tingginya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yaitu pada April 2020. Jajaran Itjen harus tetap bekerja dalam kondisi apapun. Salah satunya adalah melakukan pengawasan belanja modal untuk uji petik. Saat itu pengawasan jarak jauh dilakukan dalam pembangunan kantor pemerintah di Sorong, Papua Barat.

“Semua data dipindai dan dikirim ke kantor kami di Jakarta. Pemeriksaan lapangan divideokan oleh konsultan di Sorong. Itu merupakan uji petik pertama kami dalam remote auditing pengadaan barang dan jasa. Diskusi dilakukan melalui Zoom,” jelas Patrick.

Pengawasan jarak jauh ditularkan dalam penyusunan review laporan keuangan. Inilah titik awal transformasi laporan keuangan dari semula tim Itjen mendatangi satu persatu kantor, menjadi pemantauan dilakukan melalui aplikasi setelah melihat rekaman video yang dikirim dari lokasi. Tim Itjen tetap bisa turun ke lapangan bila muncul anomali.

Sumiyati meminta untuk tidak menyalahartikan Kemenkeu mengurangi anggaran agar staf Itjen tidak melakukan perjalanan dinas. Ini semata-mata untuk mengubah cara berpikir (*mindset*) dan cara kerja di era digital. Digitalisasi juga merambah ke bidang monitoring. Ini semua berkaitan dengan masa pandemi.

Meski pada masa pandemi akibat PPKM, Itjen harus mengembalikan 40 persen anggaran, namun Patrick mengatakan tetap bersyukur Itjen dapat menyusun laporan pengawasan tanpa mengurangi kualitas laporan.

Jika terjadi penyimpangan, di antaranya *fraud* dalam laporan administrasi, Itjen langsung melakukan penindakan. Dengan penggunaan teknologi *Zoom* dan sejenisnya, Itjen tetap menjalankan tugas-tugas dengan baik, dan ini terlihat dari nilai kerja organisasi yang tercapai.

Memperkuat Kolaborasi Inspektorat dan Eselon I Kemenkeu

Pada pengujung masa baktinya di Inspektorat Jenderal, Sumiyati memperbaiki dan memperkuat kolaborasi jajaran Inspektorat dan eselon I Kemenkeu.

“Bu Sum tidak ingin kata kolaborasi sekadar jargon. Bu Sum menginginkan kerja *bareng* yang menghasilkan sesuatu dan memberi nilai tambah, menuju *motto trusted adviser*. Pekerjaan ini tidak mudah karena semula sebagai *watchdog* berubah menjadi *catalyst*, *consultant*, dan menjadi *trusted adviser*. Jika ada rekomendasi yang tidak tepat, Itjen harus bersedia dikoreksi,” urai Patrick.

Sumiyati terinspirasi setelah mengikuti seminar-seminar auditor di Amerika Serikat, Finlandia, dan Perancis. Peran Itjen tidak sekadar mengawasi, tetapi juga harus mampu mengevaluasi kebijakan. “Begitulah ide dan gagasan Bu Sum seperti itu,” ungkapny.

“Bu Sum memiliki pemikiran yang luas dan jauh ke depan. Beliau menuangkan banyak ide dan gagasan untuk memperbaiki cara kerja auditor di Inspektorat Jenderal. Bu Sum sering bertanya mengapa standar auditor swasta lebih unggul. Apa bedanya standar akuntansi pemerintah dengan standar akuntansi yang berlaku di BUMN?”

Patrick menilai, Sumiyati seorang yang tulus, dan tidak macam-macam karena bagi Sumiyati, berbagi ilmu lebih penting. Beberapa kali

Sumiyati dipercaya menjadi komisaris, masih memimpin Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), dan ini menunjukkan sosoknya yang tetap dipercaya meski sudah memasuki purnabakti.

Auditor Harus Memiliki “Interpersonal Skill” yang Baik dan Berkomunikasi dengan Jelas

Sumiyati selalu bersemangat dan punya mimpi, juga selalu bertanya, apa yang sudah saya berikan kepada Inspektorat Jenderal Kemenkeu? Sumiyati ingin mengubah cara berpikir auditor di Itjen untuk lebih responsif, lebih cepat. Pimpinan Itjen sebelumnya mungkin masih disibukkan dengan pembenahan di institusi ini —yang sebelumnya banyak pihak ingin Itjen Kementerian Keuangan ditidurkan dan sering tidak dianggap, seperti yang terjadi sebelum di era Hekinus Manao. Di era Hekinus Manao mulai mencanangkan motto “We Built Public Trust” dan terus menggulirkan transformasi.

Kemudian ketika Sonny Loho menjadi Irjen, di tengah terjadi carut-marut politik pemerintah saat itu dan intervensi proses anggaran, mulai dari peristiwa Hambalang pada 2012, simulator SIM, wisma atlet Palembang, sampai vaksin flu burung. Sonny Loho memukul genderang perang melawan calo-calo anggaran, dan membersihkan Kemenkeu dari calo-calo semacam itu karena mencederai reputasi Kemenkeu.

Sumiyati masuk sebagai Irjen, merendahkan hatinya untuk belajar dengan mitra strategis sampai akhirnya mereka bersedia membukakan data. Sumiyati menata cara kerja dan sikap auditor dari pasif menjadi aktif, dan cara berkomunikasi dengan baik dan jelas. Kunci auditor itu berkomunikasi yang jelas dan memiliki interpersonal skill yang baik. Auditor juga harus memiliki helicopter view sehingga dapat memberikan big picture dan menjabarkannya kepada pimpinan.

“Ibu Sum biasa mengajar sehingga cara komunikasinya jelas. Saya belajar banyak dari beliau,” katanya.

Selalu Menantang Stafnya Belajar Hal-hal Baru

Sumiyati meminta jajaran Itjen untuk terus berpikir kritis dan bersemangat belajar pada hal-hal baru yang menantang karena itu modal bagi pegawai Itjen menuju strategic partner dan trusted advisor yang cikal-bakalnya dicanangkannya.

Patrick misalnya pernah diminta belajar dari berbagai buku dan didorong untuk lulus sebagai *consultant project management* (CPM) berkualifikasi internasional.

“Kalau LKPP, semua juga bisa. Masak sih inspektur tak punya sertifikat internasional dalam project management?” kata Sumiyati suatu hari kepada Patrick.

Menerima tantangan itu, Patrick akhirnya lulus dari *Agile Project Management Foundation*, 22 November 2017 dan mendapatkan predikat CPM, sebagai bukti layak menjadi konsultan bagi unit kerja eselon I. “Ini cikal bakal program pengawasan yang agile di Itjen saat ini karena Kemenkeu membutuhkan speed dan agile semua pihak. Ini ide Bu Sum,” jelasnya.

Sampai sekarang Patrick tetap ingat kata-kata sang guru dan mentor, “Jangan pernah puas dengan apa yang kamu miliki, dan sebarkan ilmu itu ke orang lain, bagikan kepada adik-adik milenial agar menjadi ibadah.”

Apa Artinya Gelar jika Tak Bisa Membawakan Diri?

Rumah Patrick tidak terlalu jauh dari rumah Sumiyati di Bekasi. Dia sering main ke rumah Sumiyati, dan melihatnya masih tetap masak sendiri dan menyapu halaman rumahnya. “Bu Sum pejabat eselon I yang *humble*. Orangtuanya selalu menanamkan budi pekerti, dan mengingatkan warisan leluhur yang positif. Ibu Sum menguasai berbagai tingkatan bahasa Jawa,” paparnya.

“Ibu Sum selalu mengatakan kepada saya, apa artinya gelar jika tak bisa membawakan diri? Kalau belajar harus serius, ilmu yang dipelajari harus diimplementasikan. Beliau selalu mengingatkan kepada semua jajaran Itjen untuk selalu menjaga integritas dan tidak korupsi karena hanya integritas-lah yang membuat seseorang punya nilai,” ungkap Patrick.

Sumiyati mencari uang secara halal dari mengajar, menyisihkan dan menabung uang yang diperoleh untuk membeli aset berupa tanah sedikit demi sedikit di Kalimalang. “Ibu Sum mengajari kami untuk tidak berfoya-foya, tidak mengandalkan warisan orangtua, agar tidak mengalami kesusahan di masa tua. Dia juga mengajari anak-anaknya seperti itu. Putra-putrinya sukses di bidang TI dan finance,” kata Patrick.

Patrick menganggap Sumiyati sebagai kakaknya. “Bahkan ketika anak-anaknya menikah, saya yang ikut mengantarkan mereka ke pelaminan,” ungkap Patrick yang berasal dari keluarga Kasunanan Surakarta, pandai menari, sejak kecil sudah mengenal karawitan, dan pernah menjadi penari Istana.

Lucia Widiharsanti

SUMIYATI, GURU DAN MENTOR YANG HEBAT



Lucia Widiharsanti, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat III.

FOTO OLEH ROBERT ADHI KSP

Lucia Widiharsanti melihat Sumiyati untuk kali pertama di kampus STAN di Jalan Purnawarman, Jakarta Selatan ketika dia mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada tahun 1984. Sumiyati, perempuan yang membawa pengeras suara berbentuk corong atau megafon merek TOA memanggil para pendaftar di STAN. Setelah Lucia diterima sebagai mahasiswi STAN, dia baru tahu bahwa perempuan yang dipanggil “Mbak Sum” itu adalah asisten dosen. Tetapi Lucia tidak pernah diajar oleh Sumiyati.

Bertahun-tahun kemudian, pada Juni 2007, Lucia baru bertemu Sumiyati lagi ketika menjabat Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang dipimpin Pak Mulia Nasution. Sumiyati bertanggung jawab menyusun Laporan Keuangan BA-15 (Bagian Anggaran-15) Kemenkeu, sedangkan Lucia bertugas di Inspektorat Jenderal, mereviu laporan keuangan Kemenkeu BA-15 tersebut, bertugas menelaah ulang bukti-bukti untuk memastikan laporan keuangan yang disusun telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Di sinilah Lucia dan Sumiyati bekerja sama untuk kali pertama. Lucia tenaga fungsional pemeriksa

“Sumiyati seorang visioner. Sebelum kebijakan open space diberlakukan di lingkungan Kemenkeu, Inspektorat Jenderal sudah menerapkannya di lantai 13 dan berlaku untuk seluruh pegawai Itjen.”

— Lucia Widiharsanti



sebagai auditor, sedangkan Sumiyati pejabat eselon III sebagai penyusun laporan dan auditee.

Setelah dua puluh tiga tahun sebelumnya, Lucia melihat Sumiyati dari jauh pada saat pendaftaran mahasiswa STAN, pada Juni 2007, keduanya berada di satu ruangan sebagai mitra kerja profesional, dan hampir setiap hari bertemu muka untuk mewujudkan tugas membuat Laporan Keuangan Kemenkeu. Target mereka adalah bagaimana agar Laporan Keuangan Kemenkeu mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Terbaik — sebelumnya selalu disclaimer.

“Saya menganggap Ibu Sumiyati adalah kakak dan mentor dalam karier saya, baik sebagai mitra, atasan, maupun sebagai sesama perempuan. Kami tidak hanya bicara tentang pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan sebagai perempuan. Saya kenal anak-anaknya, hapal nama-nama mereka, dan bertukar cerita tentang cucu,” ungkap Lucia.⁶

Menurut Lucia, Sumiyati seorang yang cerdas, fokus, dan bijak, dan selalu menjadikan kendala sebagai tantangan yang harus dicarikan solusinya. Dia diajak untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. “Ibu Sum kuat diajak berjalan bersama untuk mewujudkan mimpi. Dalam perjalanan, selalu ada dongeng kehidupan, air mata, dan tawa. Kami bukan hanya sekadar mitra dan mentor, tetapi juga teman seperjalanan dengan dua orang yang bercerita berbeda,” tuturnya.

Ketika Lucia akan mengambil keputusan dan membutuhkan orang yang bisa diajak berdiskusi, dia mendatangi Sumiyati untuk meminta pertimbangan. “Ibu Sum menggiring kami dengan ingatan dan pengetahuannya yang banyak. Saya tidak ragu sebagai auditor untuk membuat kesimpulan mengenai hasil kerja kami,” papar Lucia, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III yang membawahi empat daerah yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi.

⁶ Diolah dari percakapan penulis dengan Lucia Widiarsanti, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III, 3 Agustus 2022 di kantornya di Bogor. Lucia Widiarsanti lahir di Bekasi, 19 April 1965, mengenyam pendidikan di STAN, STIE YAI, dan FISIP Universitas Indonesia. Sejak lulus STAN pada 1987 sampai 2019, Lucia bekerja sebagai Auditor Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Setelah menjabat Inspektur I Itjen Kemenkeu yang membawahi Ditjen Pajak (2019-2022), Lucia Widiarsanti sejak April 2022 bertugas di Bogor.

Memastikan Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi

Bagi Lucia yang bertugas me-review laporan keuangan, Sumiyati tetap dosen dan guru. “Ketika mengaudit, Ibu memberikan solusi, bagaimana me-review laporan keuangan secara paralel. Bagaimana kami menyusun laporan keuangan dan me-review-nya, menyelesaikannya secara paralel. Ibu yang mengajari kami,” terangnya.

Menurut Lucia, hal itu menjadi salah satu *legacy* Sumiyati, bagaimana sebagai auditee Sumiyati mengajari auditor. “Cara kerja kami — atas bimbingan beliau — dibuat peraturannya dan dibukukan dan kini dipakai secara nasional oleh kementerian dan lembaga. Tidak semua orang mampu memberikan insight tentang bagaimana bekerja efektif dan efisien,” urainya.

Sebagai Kepala Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan, serta Kepala Biro, Sumiyati menjadi koordinator utama yang memastikan seluruh eselon I di Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang mempunyai organisasi vertikal yang banyak dan mempunyai tanggung jawab mencatat penerimaan negara dari pajak, dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam menyusun laporan keuangan. Sumiyati tidak segan mengirim stafnya untuk meng-input data dan menelepon pejabat eselon I untuk memastikan bahwa laporan keuangan sudah disusun sesuai standar akuntansi dan tepat waktu. “Ini membutuhkan sosok yang memiliki big personality seperti Ibu Sum,” kata Lucia.

Lucia melihat Sumiyati turun sendiri ke kantor Bea Cukai, menggelar rapat malam hari di sana. Saking semangatnya bekerja, ketika rapat malam hari di kantor Bea Cukai, spakbor depan mobil Sumiyati hilang.

Sumiyati juga aktif menelepon pejabat eselon II dan Ditjen Pajak dan Bea Cukai untuk memastikan setiap Kanwil menyusun laporan keuangan tepat waktu sesuai dengan peraturan. Sampai hari libur pun, Sumiyati rajin mendatangi beberapa KPPN. “Ini dilakukan Ibu Sum secara intensif. Prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik pada suatu institusi tergambar pada Laporan Keuangan. Ini cerita di balik Opini WTP,” papar Lucia.

Kerja keras Sumiyati akhirnya membuahkan hasil. Laporan Keuangan Kemenkeu mendapat Opini WTP terbaik, dan tahun 2022 tahun ke-10 Kemenkeu mencapai prestasi tersebut. “Itu *legacy* Ibu yang luar biasa dalam penyusunan Laporan Keuangan, ketika Ibu sebagai Kabag

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,” ungkap Lucia.

Dalam perjalanan pribadi Lucia dengan Sumiyati, Lucia menilai Sumiyati adalah, “guru, teman perjalanan yang menyenangkan, punya satu visi. Dalam hal ini, Ibu sebagai kepala bagian dan kepala biro, telah membantu Itjen bagaimana melakukan pekerjaan me-review laporan keuangan kementerian dan lembaga (K/L). Atas bimbingan Bu Sum dan Pak Hekinus, pekerjaan Itjen (APIP) bisa membuat PMK tentang review laporan keuangan K/L.

Legacy Ibu Sum di bidang itu. Cara bekerjanya dibukukan, dipakai secara nasional. Ketika itu Irjen dijabat Pak Hekinus Manao,” paparnya.

Sampai sekarang, kata Lucia, teman-teman auditor di BPK, BPKP, dan Kemenkeu masih tetap menganggap Sumiyati sebagai seorang tokoh guru yang disegani, yang identik dengan sosok yang memiliki integritas dan kecerdasan. Ini terbukti sejak muda, Sumiyati adalah asdos terpilih. Dengan demikian, komunikasi Sumiyati dengan auditor eksternal relatif lebih mudah.

Ini juga yang membuat perjalanan Laporan Keuangan Kemenkeu mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terwujud pada tahun ketiga Sumiyati menjabat, setelah pada tahun pertama dan kedua hanya Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Pejabat yang Egaliter

Sumiyati seorang pejabat yang egaliter, yang tidak membedakan atasan atau bawahan. “Ibu selalu ada bersama kami, dan kami selalu merasa nyaman di dekatnya. Namun Ibu Sum tetap tokoh yang kami segani dan hormati. Ibaratnya, mau nakal, eh ada Ibu. Jadi Ibu seorang yang egaliter tetapi tetap disegani. Karena ada Ibu, kami yakin semua akan baik-baik saja,” katanya.

Bahkan dia pernah punya pengalaman terlambat keluar kota, dan pada jam menjelang keberangkatan, Sumiyati sudah tiba di stasiun dan malah menunggui kedatangan Lucia. “Ibu tidak marah dan tidak memperlihatkan rasa marahnya, tapi hanya bertanya melalui telepon, ‘Mbaakkk Luci di mana?’ Sampai sekarang saya merasa bersalah dan merasa malu. Sedikit orang bisa seperti itu. Egaliternya Ibu sungguh luar biasa. Ini yang membuat saya semakin hormat kepada Ibu Sum,” cerita Lucia.

Ketika masih eselon III, Sumiyati menyetir sendiri dan Lucia menumpang mobilnya. “Kebetulan saya tidak bisa nyetir. Ibu Sum memang tidak birokratis. Ibu selalu ada di antara kami. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memastikan tak ada yang tertinggal, seperti yang disampaikan Ki Hadjar Dewantara,” urainya.

“Open Space” di Kantor Itjen Bukti Sumiyati Visioner

Lucia menilai Sumiyati seorang visioner. Sebelum kebijakan open space diberlakukan di lingkungan Kemenkeu, Inspektorat Jenderal sudah menerapkannya di lantai 13 dan berlaku untuk seluruh pegawai Itjen. Ketika Menkeu Sri Mulyani pada 2021 memberlakukan kebijakan digital workspace di seluruh lingkungan kerja Kemenkeu, para pegawai Itjen tidak merasa asing lagi.

“Memang pada awalnya kebijakan Ibu Sum mendapat tentangan dari orang-orang yang sudah terbiasa memiliki meja besar dan ruangan eksklusif. Karena dengan kebijakan ini, mereka tiba-tiba harus bisa bekerja di ruangan mana saja tanpa sekat. Untuk mewujudkan kebijakan ini, dibutuhkan pemimpin yang memiliki kepemimpinan kuat (strong leadership) dan mempunyai visi manajemen perubahan (change management),” kata Lucia, yang sebelumnya pernah menjabat Inspektur I di Itjen Kemenkeu yang mengawasi semua kantor Ditjen Pajak di seluruh Indonesia.

Dengan kebijakan baru tersebut, semua barang pribadi pegawai Kemenkeu wajib disimpan di loker masing-masing. Tidak boleh ada lagi sandal, sepatu, atau jaket ditinggal di sembarang tempat. “Sesekali Ibu Sum melakukan razia dan itu direkam dengan video, sehingga banyak pegawai merasa segan untuk meninggalkan barang-barang pribadi di sembarangan tempat. Ibu Sum tidak hanya bicara tetapi turun ke lapangan. Walk the talk. Ibu memiliki *strong leadership*,” ujar Lucia.

Mengawal Reformasi di Ditjen Pajak

Setelah Sumiyati memimpin Itjen sejak 2017, pada saat itulah institusi ini memiliki Ibu dan Guru, yang memastikan apa yang dipelajari di STAN tentang auditing, dipraktikkan di sini.

“Kebetulan tugas saya mengaudit Ditjen Pajak yang waktu itu sedang memulai reformasi generasi ketiga. Ditjen Pajak membutuhkan mitra untuk memastikan reformasi tsb berjalan semestinya. Kemenkeu butuh auditor internal yang dapat mengawal reformasi Ditjen Pajak mencapai tujuan dengan tepat waktu. Di sinilah Ibu Sumiyati berperan banyak,” tutur Lucia.

“Bu Sum dengan kapasitasnya memberi dukungan penuh kepada Ditjen Pajak, memastikan soal anggaran, proses pengadaan mulai dari rencana sampai penunjukan pemenang tender telah melalui tata kelola yang baik,” lanjutnya.

Saking seriusnya, pernah saat rapat di lantai IV terjadi gempa. “Ibu Sum dan semuanya turun dan rapat dilanjutkan di luar gedung, di halaman kantor. Setidaknya, Ibu Sum memastikan bahwa Irjen hadir dan mendukung bahwa reformasi itu penting. Rapat tidak bubar ataupun dilanjutkan besok, tetapi tetap dilanjutkan di halaman,” cerita Lucia.

Rapat juga sering digelar pada akhir pekan dan hari libur, terutama bila dibutuhkan keputusan hari itu. “Ibu Sum membawa makanan untuk peserta rapat, biasanya arem-arem. Ibu memastikan kawan-kawan yang hadir, ada makanan dalam rapat,” urainya.

Bila ada permasalahan yang mendadak timbul, Sumiyati bersedia hadir dalam rapat yang tidak direncanakan sebelumnya, yang dihadiri antara lain Staf Ahli Menkeu dan para pejabat Ditjen Pajak untuk mengambil keputusan segera di kantor Ditjen Pajak di Jalan Gatot Subroto Jakarta.

Pada hari saat menemani tim pengembang aplikasi RAS (*Revenue Accounting System*), Sumiyati memberi masukan di lantai 8 Gedung B Jalan Gatot Subroto. Beliau hadir bukan sebagai atasan, tetapi hadir sebagai Guru, di antara anak-anaknya, untuk memastikan segala sesuatunya berjalan di rel yang tepat.

Sampai akhirnya Sumiyati memasuki masa purnabakti 1 Agustus 2021, reformasi di tubuh Ditjen Pajak masih berjalan. “Ibu Sum berjuang agar akuntansi di Ditjen Pajak bisa dilakukan *double accounting* secara sistem. Beliau memimpikan ada sistem informasi *end-to-end* yang meliputi seluruh proses bisnis diakuntansikan secara *double accounting* yang disebut yang *revenue accounting system*, sehingga laporan keuangan DJP dapat dibuat secara otomatis dengan hanya menekan tombol,” jelas Lucia.

Itjen Kemenkeu Menjadi “Trendsetter”

Sebagai pemimpin di Inspektorat Jenderal Kemenkeu, Sumiyati berupaya membuat auditor internal dapat berfungsi optimal untuk menjaga keuangan negara, baik di level Pemerintah Pusat maupun di level pemerintah daerah. Optimalisasi itu selalu dilakukan melalui kepemimpinan Sumiyati sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPII).

“Karena itulah Itjen Kemenkeu menjadi trendsetter dan menjadi pusat studi banding auditor internal kementerian dan lembaga, serta pemda. Itjen sering dikunjungi auditor internal K/L dan pemda dari berbagai daerah di Indonesia,” ungkap Lucia.

Berupaya Perempuan di Kemenkeu Menjadi Pemimpin

Sebagai perempuan pertama yang menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sumiyati berusaha menjadi mentor bagi perempuan-perempuan di kementerian tersebut dengan melakukan coaching dan sharing secara informal. Sumiyati melihat perempuan di Indonesia secara umum menghadapi banyak hambatan psikologis untuk berkembang padahal sebenarnya mereka mampu menjadi pemimpin di lingkungan kantor maupun lingkungan sosial.

“Ibu Sumiyati yakin, jika perempuan menjadi pemimpin dan hadir saat pengambilan keputusan, maka keputusannya akan lebih komprehensif. Biasanya cara berpikir perempuan multitasking, melihat semua aspek,” jelas Lucia.

Sumiyati berpendapat perempuan-perempuan di Kemenkeu hebat karena tes masuknya saja sama dengan lelaki. “Dalam perjalanan karier, mereka bisa ‘hilang’ karena hambatan kultur di mana dia dibesarkan. Ibu Sum melihat ada perempuan-perempuan di Kemenkeu yang perlu dibantu, diberi motivasi karena Ibu Sum yakin semua perempuan bisa menjadi pemimpin di tempat kerja dan rumah tangganya tetap baik-baik saja. Ibu Sum ingin menepis *stereotype* bahwa perempuan karier menelantarkan kodratnya sebagai perempuan. Ibu ingin meyakinkan para perempuan bahwa mereka mampu optimal bekerja di kantor tanpa harus menelantarkan kodrat sebagai perempuan dengan mencontohkan dirinya,” ungkap Lucia.

Guru dan Mentor dalam Segala Hal

Lucia yang lahir di Bekasi ini mengagumi sosok Sumiyati sebagai guru dan mentor. “Di manapun Ibu Sumiyati berada, beliau selalu dapat diandalkan. Rendah hati, sederhana, egaliter, pekerja keras pedangan big personality-nya,” paparnya.

“Dalam kehidupan sebenarnya, Ibu Sum adalah guru segalanya. Beliau bisa mengajari kami menjadi PNS yang baik sampai mengajari kami bagaimana memasak peyek yang renyah. Ibu Sum juga guru memasak. Ketika berbicara bagaimana membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan, Ibu Sum juga guru saya,” cerita Lucia yang sering bertukar pikiran dengan Sumiyati.

Lucia sering menemani Sumiyati malam hari. “Ibu darah rendah. Saya sering menemani Ibu. Kami tetap memikirkan pekerjaan. Ibu Sum adalah rekan kerja sekaligus teman seperjalanan. Saya punya mentor luar biasa untuk menjadikan saya seperti ini sekarang,” ungkap Lucia yang bangga bekerja dengan dua perempuan hebat di Kemenkeu, yaitu Sri Mulyani, dan Sumiyati. Lucia mengaku tidak pernah menyangka Sumiyati, mitra kerjanya, sepuluh tahun kemudian menjadi atasan langsungnya.

Di Kemenkeu, tak ada hari libur bahkan pada akhir pekan, hari Sabtu dan Minggu Minggu rapat bisa digelar kapan saja. Rata-rata pejabat eselon I di Kemenkeu tidur “hanya” tiga jam. “Saya ikut rapat-rapat sampai malam. Melihat dua perempuan, Ibu Menkeu, dan Ibu Irjen, saya ikut termotivasi,” kata Lucia, perempuan berdarah Yogyakarta itu.

Sumiyati saksi sejarah Reformasi Keuangan Negara karena tergabung dalam tim yang sejak awal mengikuti bagaimana seharusnya tata kelola keuangan negara. “Ibu Sum ikut mendirikan Komite Standar Akuntansi Pemerintah ketika masih junior, dan kini setelah beliau purnabakti pun, Ibu Sum masih dipercaya memimpin KSAP. Ini bukti bahwa beliau orang yang dibutuhkan dan senang berkarya,” kata Lucia.

Lucia mengagumi daya ingat Sumiyati yang sangat jam, yang masih hapal lokasi posisi duduk anak didiknya. Selain itu, “Ibu seperti kamus berjalan, perpustakaan berjalan. Karena itu, saya selalu menanyakan banyak hal apa pun kepada Ibu Sum. Coba lihat halaman sekian buku, Mbak. Bayangkan, betapa beruntungnya saya mengenal Ibu Sumiyati,” tuturnya.

“Ketika Ibu Sumiyati memasuki masa purnabakti dan melihat ucapan di bunga papan dari Direktur STAN Pak Rahmadi, beliau menangis. Terutama karena Ibu ingat turning point kehidupan beliau, karpet merah digelar, setelah kuliah dan mengajar di STAN,” ujar Lucia.

Ketika Lucia menjadi pemimpin di Kemenkeu, dia mengakui itu semua atas jasa besar Sumiyati sebagai mentor dan gurunya. “Saya ingin mengikuti langkahnya, bisa berkarya di mana saja, asalkan bekerja dengan sungguh-sungguh. Tak perlu ingin menjadi siapa, atau menduduki jabatan apa, tetapi yang terpenting adalah karya kita. Kerjakan saja yang ada. Itu yang ingin saya tiru dari Ibu Sum, mentor, guru, teman. Ibu Sum adalah perempuan Jawa yang tidak pernah mengeluh, menjalani saja meski ada hambatan karena waktu yang akan membuktikan. Bagi anak-anak STAN, hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Saya bisa menjadi seperti ini berkat guru yang hebat,” ujar Lucia.

Nur Imaroatun Sholihat

“IBU SUMIYATI SUMBER MOTIVASI BAGI BANYAK PEREMPUAN”



Nur Imaroatun Sholihat

Sebagai seorang pemimpin maupun seorang perempuan, Sumiyati meninggalkan kesan mendalam dalam pikiran Nur Imaroatun Sholihat, auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Perjuangan masa kecil Sumiyati telah menjadi pengingat bahwa titik permulaan seseorang bisa sesederhana apapun tetapi kerja keras dan kesungguhan bisa mengubah segalanya.

“Kesederhanaan yang terpancar di balik deretan pencapaian Bu Sum — begitu beliau biasa disapa — meyakinkan saya bahwa perempuan bisa menjadi demikian ayu dan cantik dalam kesederhanaan. Saya mengagumi

bagaimana beliau memancarkan aura kuat dan lembut, digdaya dan penuh kasih secara bersamaan,” ungkap Nur Imaroatun yang mewakili generasi milenial Kemenkeu.⁷

Nur menjadikan Sumiyati sebagai inspirasinya untuk terus belajar. “Tidak terhitung saya mendengar orang menceritakan betapa cemerlangnya Bu Sum dalam perkara keuangan negara. Beliau mengingat apapun dengan seksama, bahkan di halaman berapa sebuah kalimat dalam sebuah buku. Beliau adalah sumber motivasi bagi banyak perempuan untuk menaruh usaha terbaik dalam hari-hari mereka —saya tidak terkecuali.” kata Nur Imaroatun yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan dalam program Master of Commerce di University of New South Wales (UNSW) di Sydney, Australia.

⁷ Nur Imaroatun Sholihat (31 tahun) adalah Auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan; mahasiswa program Master of Commerce di UNSW Sydney; Lulusan D3 STAN dan S1 Universitas Lampung

TUJUH

“SIGARANING NYAWA” DAN GENERASI PENERUS

“Garwo”

Sebagai perempuan Jawa, aku menyadari betul, istri adalah *garwo* atau *sigaraning nyowo*, belahan jiwa yang harus mendampingi dan mendukung suami. Aku harus tetap mengedepankan suami sebagai pemimpin dalam keluarga di rumah. Meskipun dalam pekerjaan sehari-hari di kantor, perempuan menduduki jabatan tinggi, tetapi di rumah, perempuan adalah pendamping suami. Aku tetap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Posisi di kantor dan di rumah berbeda. Itu yang aku yakini sejak kecil, dan aku tidak mengabaikan akar budaya Jawa.

Aku berulang kali menyampaikan kepada keluarga dan kawan-kawan di kantor bahwa perempuan boleh berkariier setinggi apapun, tetapi tidak boleh membelah dirinya, misalnya 60 persen di kantor dan 40 persen di rumah. Perempuan harus siap berbagi peran, melakukan *multitasking*, 100 persen di kantor, dan 100 persen di rumah. Ini berarti jika sedang berada di kantor, jangan memikirkan urusan rumah. Sebaliknya setelah di rumah, jangan memikirkan urusan kantor.

Setelah di kantor, aku memfokuskan diri pada urusan kantor. Setelah di rumah, kalau tidak terpaksa sekali, aku tidak membawa pekerjaan ke rumah —kecuali menulis dan memeriksa *paper*. Aku berusaha agar di rumah, aku benar-benar memikirkan keluargaku.

Sebagai ibu, aku harus hadir kapan pun ketika anak-anakku membutuhkanku. Aku dan suami mengajari anak-anakku mandiri sejak usia dini. Anak-anak kami jarang sekali menelepon ibu dan ayahnya pada jam kerja. Kalau sampai ada telepon, deringan telepon tak terjawab (*missed call*), pesan singkat dari anak, berarti pasti ada sesuatu yang mendesak (*urgent*). Biasanya aku akan *break* sejenak untuk menghubungi mereka. Dalam situasi normal —apalagi di masa lalu belum ada ponsel, jarang sekali anak-anak menghubungiku.

Mendisiplinkan Anak-anak

Aku dan suamiku membangun komitmen agar anak-anak tetap disiplin. Sejak mereka belum menginjak bangku sekolah, kami sudah mendisiplinkan mereka akan waktu. Kegiatan-kegiatan bersama, misalnya nonton acara di televisi, tidak boleh mengganggu yang lain. Bila sudah waktunya jam belajar, tak ada satupun anak yang menyalakan TV. Kalau ada acara bagus di TV, dan mereka ingin menontonnya, aku meminta anak-anak menyelesaikan tugas-tugas belajar lebih dahulu.

Pada masa itu, di rumahku tinggal 18 orang, termasuk empat anakku. Jika ada yang mencoba melanggar aturan tentang televisi, anak-anakku tidak segan untuk mematikannya. Pernah ada saudara yang bandel, anak sulungku langsung mencopot kabelnya karena suara TV dianggap mengganggu konsentrasi belajar mereka.

Saat anak-anakku mulai sekolah, aku bekerja di BPKP Perwakilan DKI Jakarta. Biasanya aku pulang dari kantor BPKP sekitar jam empat sore. Setibanya di rumah, aku *jogging* agar tetap bugar, atau berbelanja di warung di dekat rumah. Biasanya anakku yang saat itu masih kecil meminta ikut.

Aku selalu bertanya lebih dahulu kepadanya, “Apakah tugas sudah diselesaikan? Jika belum selesai, kamu mesti selesaikan dulu, baru boleh ikut ke *supermarket*.”

Hanya dengan cara sederhana ini, aku mendisiplinkan anak-anakku dengan cepat. Mereka akhirnya memahami jika ingin ikut

berbelanja, minimal dibelikan es krim atau coklat, mereka wajib menyelesaikan tugas dari sekolah terlebih dahulu.

Jika misalnya karena tuntutan dinas kantor, aku harus pulang malam hari, aku menugasi Budiaji, anak sulungku, untuk mengecek adik-adiknya, termasuk tugas-tugas sekolah mereka. Jika misalnya ada pekerjaan rumah (PR) yang tidak bisa mereka kerjakan, mereka memberi catatan untuk dibaca olehku. Anak-anakku biasanya tidur lebih cepat dan bangun lebih awal. Mereka membaca catatanku yang menjelaskan cara menjawab soal-soal PR.

Komunikasi antara anak-anakku sangat baik. Mereka saling membantu bila salah satu membutuhkan bantuan, misalnya mendapat tugas mencari daun berwarna-warni, atau mencari bahan-bahan tentang jamur. Siapa yang tiba di rumah lebih dulu, dialah yang mencarikannya.

Mendisiplinkan anak-anak sebenarnya sederhana. Sejak kecil aku meminta mereka untuk disiplin dan bicara jujur. Aku memandu dan mengajari mereka untuk selalu berkomunikasi secara terbuka satu sama lain. Anak sulung selalu ngemong dan ikut mendisiplinkan adik-adiknya. Tiga adiknya selalu patuh pada Aji, dan tak satupun membantah kakak sulungnya itu. Bahkan aku mempercayakan Aji untuk mengambil rapor adik-adiknya. Guru sekolah tahu orangtua mereka sibuk di kantor sehingga tidak banyak bertanya ketika Aji mengambil rapor adik-adiknya.

Anak ketiga, Tika, jika tali sepatunya panjang sebelah, dia akan mengulangnya dari awal. Jika sepatunya kotor kena kotoran becek, Tika menggedor kelas kakaknya, dan meminta bantuan kakaknya untuk membersihkan sepatunya. Pola asuh seperti inilah yang tumbuh di keluargaku.

Perpustakaan di Rumah Tumbuhkan Minat Baca Anak-anak

Aku dan suami senang membaca. Suamiku, Hartono sejak tahun 1980-an bekerja di bidang perbukuan yang selalu berkulat dengan buku. Kami menyediakan banyak buku untuk mengisi rak-rak

perpustakaan di rumahku. Ini salah satu caraku agar anak-anak senang membaca. Aku sungguh bersyukur keempat anakku senang membaca. Sejak kecil, mereka tidak terlalu suka main di luar rumah karena buku-buku perpustakaan “menemani” mereka setiap saat.

Memperbanyak buku bacaan adalah salah satu caraku membuat anak-anakku betah di rumah. Menjelang hari libur atau saat hari libur, kami sering membeli buku di Gramedia, satu anak diberi jatah memilih maksimal empat buku. Karena aku mempunyai empat anak berarti jumlah yang dibeli minimal 16 buku, dan itu belum termasuk aku dan suamiku.

Kami memang mempunyai hobi membaca. Suamiku mengedit banyak buku anak. Cukup banyak penerbit yang mengirimkan buku-buku cerita ke rumah. Pada 1980-an, aku dan suamiku masih punya banyak waktu luang. Melihat ibu dan bapaknya membaca, anak-anak juga tertular, ikut membaca. Pada saat anak-anak belum bisa membaca, mereka minta diceritakan isi buku. Tanpa disuruh pun, anak-anakku belajar membaca.

Ada suatu pembelajaran yang tak terduga. Anak bungsuku, Andyta Nalaresi, pernah bertanya ketika melihat orang-orang membawa koper dan boks besar akan mudik lebaran.

“Orang-orang itu kok bawa koper besar, mau kemana, Bu?” tanyanya.

“Pulang kampung,” jawabku

“Kampung kita di mana?” Dyta penasaran.

“Kampung bapak dan ibu di Sragen di Jawa Tengah karena lahir di sana. Kalau kamu lahirnya di Australia,” aku menjelaskan.

“Australia ada di mana?”

Aku membawa bola dunia dan menjelaskan lokasi Australia, lokasi Sragen, dan lokasi Jakarta, tempat lahir tiga kakaknya.

“Ohh, tempat lahirku berbeda sendiri ya,” gumamnya sambil membayangkan jauhnya tempat lahirnya di Benua Australia.

“Kalau kamu mau pulang kampung, bahasa yang diucapkan pun berbeda, harus menggunakan Bahasa Inggris.”

Penjelasan ini akhirnya mendorong anak bungsuku giat mendalami Bahasa Inggris sejak kecil. Ketika buku Harry Potter

terbit, Dyta duduk di bangku kelas III SD. Dia memintaku untuk membelikan buku edisi Bahasa Inggris untuk segera dibacanya.

Kami juga berlangganan surat kabar *Kompas*, majalah *Intisari* dan *National Geographic*, majalah *Bobo*, dan *Donald Bebek*, hingga *Pos Kota*. Kami sekeluarga mengikuti perkembangan berita dari *Kompas*. Jika belum membaca *Kompas*, kami merasa ada yang belum pas.

Anak-anak melahapi semua buku sastra, novel, ensiklopedia kimia dan fisika. Ini belum termasuk komik. Hampir semua buku komik ada di perpustakaan kami. Bahkan ketika komik Mahabarata yang *hard cover* terbit, Andyta yang sudah *internship* (magang) di Rumah Sakit Karyadi Semarang membelinya satu set.

Anak-anakku sangat berdisiplin dan menjaga kesepakatan yang dibuat bersama. Pada hari-hari biasa, anak-anak dilarang bermain dan mereka dengan ketat menjaga itu. Mainan Nintendo hanya dibuka pada Sabtu siang dan sudah dibungkus lagi pada hari Minggu. Mobil-mobil Tamiya dikeluarkan hari Sabtu, dan esoknya sudah disimpan pagi dengan rapi.

Demikianlah, anak-anakku senang membaca buku karena kami ibu dan bapaknya selain memberi contoh membaca buku pada saat senggang, juga menyediakan perpustakaan di rumah. Aku hanya memberi contoh-contoh sederhana yang bisa dijalankan mereka.

Menyiapkan Makanan Bergizi buat Anak-anak

Ada pepatah Jawa yang menyebutkan bahwa perempuan harus *macak* (berdandan), *manak* (memiliki anak), dan masak. Untuk *macak*, aku sederhana saja melakukannya. Tetapi untuk *manak* dan masak, aku melakukannya dengan sepenuh hati.

Sebagai ibu dari empat orang anak, aku berusaha untuk menyiapkan semua keperluan keluargaku, terutama menyediakan makanan bergizi yang terkontrol. Aku selalu masak sendiri di rumah, menyiapkan makanan untuk suami dan empat anakku saat sarapan, makan siang, dan makan malam. Hanya bila kepepet saja, aku baru membeli makanan di luar rumah — apapun rasanya.

Ketika anak-anak bersekolah di SMA (tiga di antaranya di SMA Negeri 8 Jakarta, yang nomor dua tidak mau ke SMA 8 karena tidak mau terkena macet dan memilih SMA 81 yang dekat rumah), mereka membawa bekal makan siang dari rumah. Kalaupun harus membeli, itu hanya tambahan. Setiap hari, anak-anak membawa bekal, yang tidak pernah tertinggal adalah roti dan susu.

Hidup anak-anak kami sangat tradisional. Mereka tidak mengikuti kursus macam-macam. Setelah pulang sekolah, mereka biasanya tidur sejenak. Setelah bangun sore hari, mereka menikmati coklat susu dan kue bolu buatanku. Setiap hari aku membuat bolu dua loyang sekaligus sehingga masih bisa untuk cadangan esok hari.

Aku mempersiapkan makanan yang gampang dimasak — di antaranya sate yang sudah aku bungkus 20 tusuk, dan udang (*tiger prawn*) — dan disimpan di freezer. Udang biasanya langsung digoreng dan dimakan dengan kentang. Anak-anak kami tidak terbiasa jajan di luar rumah. Mereka lebih suka menikmati masakan ibunya di rumah.

Kalau “Ngumpul” di Rumah, Obrolan Anak-anak Mirip Seminar

Empat anak kami bersekolah di SD yang sama, SMP Negeri 109 dan 115, SMA Negeri 8 (kecuali Dwipa di SMA Negeri 81). Tiga dari mereka kuliah di ITB Bandung.

Aku selalu mengingatkan anak-anakku untuk belajar optimal. Kalau sudah berusaha dan belajar dengan keras, hasilnya kurang memuaskan —misalnya mendapat nilai 6 — aku meminta mereka untuk tidak kecewa. Yang terpenting adalah mereka tidak menyia-nyiakan karunia yang diberikan Tuhan.

Kini mereka sudah dewasa, dua di antaranya sudah menikah. Kalau anak-anak “ngumpul” di rumah, suasananya seperti seminar, diskusi serius. Kadang aku nimbrung berdasarkan pengetahuan yang mereka dapatkan. Aku merasakan suasana yang seru di tengah diskusi anak-anak. Aku menganggap mereka seperti mitra diskusi. Kalau aku ingin meng-*update* perkembangan gaya hidup (*lifestyle*)

dan teknologi informasi terkini, apa yang diinginkan anak-anak muda sekarang, aku berdiskusi dengan mereka.

Anak-anak menjelaskan secara runut, mulai dari teori sampai fakta terkini. Bahkan setelah berdiskusi, anak-anak menuliskannya kembali untuk memastikan ibunya tidak salah. Aku tertawa geli. Aku pikir anak-anakku betul-betul meniru caraku menjelaskan kepada mereka. Tiga dari mereka asisten dosen, kecuali Dwipa yang terjun di bidang bisnis. Adapun Tika ketika kuliah di Bandung, setiap akhir pekan ikut kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan seperti menari tarian bali dan ikut nyanyi bersama grup Elfes. Mereka menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan dengan cara berbeda.

Filosofi Jawa yang Memengaruhi Hidup

Beberapa filosofi Jawa yang memengaruhi hidupku di antaranya *urip iku urup*. Aku tidak boleh membiarkan waktu berlalu tanpa memberi manfaat. Orangtuaku tidak pernah membiarkan aku duduk diam tanpa mengerjakan apa-apa. Biasanya setelah makan, aku diminta membaca buku-buku tua berbahasa Jawa. Kadang aku diminta mengupas kacang atau jagung. Bapak dan ibuku berpesan agar aku mengisi hidupku dan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat.

Mereka berpesan bahwa hidup ini anugerah dan semua talenta yang diberi Tuhan, tak boleh aku sia-siakan. Aku harus memanfaatkannya secara optimal. Kalau tidak digunakan, kita berdosa. Karenanya aku benar-benar bersyukur, bapak dan ibuku selalu memintaku untuk mendarmabaktikan talentaku sehingga bermanfaat bagi banyak orang. Perjalanan hidupku sebagai pendidik, sebagai guru, tak pernah berhenti, sampai sekarang.

Menang tanpa ngasorake. Kalau ada sesuatu yang tidak tepat, aku tidak pernah marah sehingga membuat suasana menjadi ribut dan heboh. Aku merasa, jika sampai aku marah dan mengeluarkan amarahku, itu seperti berbalik menghantam diriku sendiri sehingga aku lelah.

Aku bukan tipe orang yang frontal. Aku berusaha melakukan negosiasi dan kompromi. Misalnya bila aku sudah merasa sangat

kesal dengan auditor yang ngeyel, aku meminta mereka mengambil buku teks, membaca lagi halaman sekian dan paragraf sekian, sambil menjelaskan latar belakang dan tujuannya. Tetapi aku tidak melakukannya dengan marah karena aku sadar itu hanya akan menghabiskan energiku. Kalau sampai di kantor aku marah, pasti banyak stafku di kantor terkejut karena situasinya pasti sudah luar biasa.

Selain itu, aku selalu memegang teguh kejujuran di mana saja karena ini merupakan harta yang tidak ternilai dalam kehidupanku.

Dukungan “Belahan Jiwa”

Tetangga Satu Desa

Hartono Wiryo Sukarto (67), suami Sumiyati, adalah tetangga satu desa tetapi berbeda dusun. Hartono tinggal di Dusun Gading, sedangkan Sumiyati di Dusun Magersari. Rumah mereka berjarak kurang dari 500 meter.

Hartono yang enam tahun lebih tua dari usia Sumiyati bercerita, ketika dia duduk di bangku SD, Sumiyati belum masuk usia sekolah. Setelah Hartono lulus SMEP, dia melanjutkan ke SMEA di Solo. Pertemuannya dengan Sumiyati hanya sesekali. Hartono mendengar kabar, Sum masuk SMEP di Tanon, di desa di Sragen, dan selalu menjadi juara di sekolahnya. Hartono masih mengikuti perkembangan Sum yang setelah lulus SMEP di Tanon, melanjutkan pendidikan ke SMEA di Sragen, dibiayai negara melalui beasiswa Supersemar.

Setelah tamat SMEA, Hartono diterima di Universitas Negeri Surakarta (UNS) di Solo. Tetapi karena keterbatasan ekonomi keluarga, Hartono mengurungkan niatnya untuk kuliah di UNS. Ayah dan ibunya berniat menjual ternak sapi, namun Hartono berpikir bagaimana pendidikan adik-adiknya kelak? Akhirnya pada 1976, dia mengembara di Jakarta, sambil mencari pekerjaan.

Pada 1980, Sumiyati —yang baru masuk kuliah di STAN, bercerita pernah melihat Hartono di Metromini namun Hartono — saat itu sudah bekerja di kawasan Senayan, tidak melihatnya.

Bertemu dalam Arisan Keluarga

Pada 1983, Hartono berjumpa lagi dengan Sumiyati dalam sebuah arisan keluarga. Di sana, sebagai sesama perantau satu desa di Sragen, mereka saling bertukar cerita dan pengalaman. Arisan itu



2017: Sumiyati dan suaminya, Hartono Wiryo Sukarto.

FOTO: DOK ITJEN KEMENKEU

digelar setiap enam bulan sekali di Jakarta. Komunikasi mereka sulit karena saat itu belum ada telepon.

Pada 1983/1984, Sumiyati mulai mengajar sebagai asisten dosen STAN.

Hartono mengenang awal pertemuan dengan Sumiyati di Jakarta. Salah seorang temannya main ke rumah kontrakan Hartono, dan mengajak Sumiyati. Setelah itu Sumiyati ditinggal berdua di sana.

“Sum, kamu sudah punya pacar?” tanya Hartono.

“Belum, Mas Tono,” jawab Sum.

“Kalau belum ada, ayolah kita kawin,” ajak Hartono langsung.

Mereka menikah pada Januari 1985. Hartono bekerja di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) di daerah Senayan (kadang di Jalan Dempo, kadang di Jalan Hang Lekir), Sum bekerja sebagai asisten dosen di STAN dan beberapa perguruan tinggi lainnya.

Ketika Sumiyati harus melanjutkan pendidikan S2 di Australia dalam keadaan hamil anak keempat, Hartono memberi dukungan moril kepada istrinya.

Hartono menyadari dia dan istrinya memiliki kesibukan di kantor masing-masing. Karenanya dia dan Sum sepakat untuk berbagi pekerjaan rumah. Hartono melihat istrinya harus membesarkan anak, harus mengajar, tetapi kemudian harus kuliah lagi di Australia. “Ini tuntutan keadaan. Kalau orang mau maju, memang harus menjalani itu,” kata Hartono.

Berbagi Cerita tentang Karier Sumiyati

Dalam perjalanan selanjutnya, Sumiyati lulus D-IV STAN dan ditempatkan di kantor Perwakilan BPKP DKI Jakarta di Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Saat itu citra auditor belum seperti sekarang, masih banyak yang berpandangan negatif terhadap auditor. Ketika Sum mendapat kesempatan untuk dimutasi, Hartono menyarankan Sum tidak lagi menjadi auditor, maka dari Bidang PAE di BPKP DKI Jakarta pindah ke Pusdiklat Pengawasan BPKP.

Sumiyati bekerja di BPKP DKI selama enam tahun. Kenaikan pangkatnya terhambat karena statusnya sebagai auditor dan administrasi di sana tidak begitu jelas padahal lazimnya auditor tak sampai 4 tahun sudah naik pangkat. Saat di Pusdiklat Pengawasan terhambat lagi, enam tahun baru bisa naik pangkat karena ditempatkan di Pusdiklat tetapi diangkat dalam jabatan fungsional sebagai auditor, dalam perhitungan angka kredit ada ketentuan bahwa 85 persen harus berasal dari penugasan audit, Sumiyati tidak pernah audit selama di Pusdiklat sehingga tidak bisa naik pangkat dan menunggu hingga enam tahun.

Pada tahun 2022. Sumiyati diminta Pak Mulia Nasution pindah ke Kemenkeu. “Kalau memang itu yang terbaik dan cocok dengan hati nurani, silakan pindah saja, Sum,” kata Hartono memberi pertimbangan kepada istrinya. Dia tidak pernah melakukan intervensi terhadap apa yang dikerjakan istrinya di kantor.

Pasca reformasi, muncul tuntutan otonomi daerah. Sejak itu pekerjaan Sumiyati makin padat. Pangkatnya naik dari pelaksana menjadi eselon IV. Menurut Hartono, istrinya bekerja keras dengan jujur dan tekun karena yakin hasilnya akan diperoleh di kemudian hari. “Jika sudah ‘milik’, itu tidak akan berpindah ke orang lain. Pada saat itu, dia harus pulang larut malam sampai pukul satu atau dua dinihari. Saya hanya bisa mendukung pekerjaan Sum. Anak-anak sudah terbiasa dan mereka semua mendukung ibunya,” ungkap Hartono.

Hartono sempat terkejut dan gembira ketika istrinya naik pangkat menjabat pelaksana tugas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, kemudian akhirnya sebagai pejabat eselon I ketika menjabat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). “Sum membawa STAN sejajar dengan perguruan tinggi lain,” katanya.

Ketika Sumiyati dipromosikan menjadi Irjen Kemenkeu, Hartono berpesan wanti-wanti kepada istrinya agar berhati-hati, tetap menjaga integritas dan kejujuran.

“Saya tidak pernah ikut campur urusan kantor. Sum tidak cerita tentang pekerjaan kantornya. Ada hal-hal rahasia yang tidak diceritakan Sum kepada saya,” kata Hartono.

Di ujung jabatannya, Sumiyati pernah ditawari sebagai Kepala BPKP dan minta pertimbangan suaminya. Hartono mendengar kabar, permasalahan dan pekerjaan di BPKP tidak sederhana. “Saya dan anak-anak menyarankan agar Sum tetap di Kemenkeu karena waktunya kurang dari dua tahun yang tersisa dan rasanya tidak cukup untuk bisa mentransformasi BPKP. Saya bersyukur Ibu Sri Mulyani tetap mempertahankan Sum di Kemenkeu,” tuturnya.

Sebagai Suami Pejabat Teras Kemenkeu

Apa pendapat Hartono ketika istrinya menjadi pejabat teras Kementerian Keuangan? “Sebagai suami, jabatan saya jauh di bawah Sum. Tapi nasib manusia kan sendiri-sendiri. Memang, kadang-kadang ada perasaan sedikit enggan ketika saya harus mendampingi Sum —yang saat itu sebagai Irjen— bertemu dengan pejabat tinggi. Tapi situasi mengharuskan saya datang, mendampingi Sum. Meski berat, tetapi saya tetap berangkat,” ungkap Hartono.

Pernah dia dicemooh karena harus menemani istrinya ke London. “Saya disebut *ngintil* dengan nada merendahkan. Saya terima saja,” katanya. Sejak awal ketika Sum masih eselon IV, kata Hartono, dia mendukung karier istrinya agar bisa terus naik.

Suasana kerja di Kementerian Keuangan, kata Hartono, lebih terbuka. Para pejabat teras Kemenkeu sangat ramah dan menghargai semua orang. Itu yang membuatnya tetap mendampingi istrinya.

Berbagi Tugas di Rumah Tangga

Hartono pernah ditanya Menteri Keuangan tentang keluhannya setelah istrinya menjadi pejabat eselon I. “Kami sudah terbiasa ketika salah satu anggota keluarga masih di luar rumah sampai larut malam, salah satu mesti ada yang menjaga, menunggu, dan tak boleh

ditinggal tidur. Saya menunggu Sum sampai dia pulang dari kantor,” kata Hartono menjawab Menkeu saat itu.

Setelah Sum pulang pukul 23.00 atau 24.00, setibanya di rumah, Sum tetap ke dapur terlebih dahulu, melihat persediaan makanan. Pagi hari sebelum berangkat ke kantor, Sum sudah ada di dapur, menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anak. Sum tidak melupakan tugasnya sebagai istri dan ibu yang harus memasak dan menyiapkan makanan untuk anggota keluarganya.

Di rumah, mereka tidak punya asisten rumah tangga. Sum sudah terbiasa mencuci sendiri pakaiannya dan keluarganya. “Sum mencuci, saya yang menyeterika. Kami kan anak kampung yang pernah mengalami kehidupan yang sangat sulit. Jadi untuk pekerjaan semacam ini, kami tidak pernah mempersoalkannya. Demikian juga, soal makanan, kami tidak pernah mempermasalahkannya,” papar Hartono yang menambahkan, jika ada sisa makanan, harus diberikan kepada hewan peliharaan, ayam atau ikan.

Hartono bangga anak-anaknya sejak kecil sudah diajari bersedekah dan berbagi.

Tiada Mengetahui Pensiun untuk Mengabdikan dan Melayani

Kilas Balik, Refleksi untuk Menata Diri

Sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN), aku sudah tahu pasti bahwa masa baktiku berakhir tanggal 1 Agustus 2021. Mengabdikan sebagai ASN selama 39 tahun 4 bulan merupakan perjalanan yang sangat panjang. Aku beruntung mengalami berbagai era sejak 1980-an sampai 2021. Saat masuk ke Kementerian Keuangan pertama kali masih melihat suasana kerja yang didominasi dengan cara kerja yang konvensional, meja-meja dipenuhi dengan tumpukan kertas dan banyak orang sibuk dengan mesin ketik yang besar di mejanya masing-masing. Suara mesin ketik yang menjadi musik, pengisi ruang yang hening. Berhitung masih menggunakan mesin hitung yang besar, *tek.. tek.. tek.. jekrek* terus berkumandang, sampai akhirnya berganti kalkulator.

Selanjutnya teknologi informasi berkembang dan hadirnya komputer di Gedung Pusat Analisa Informasi Keuangan (PAIK), komputer *mainframe* yang sangat besar dengan *punch card* dan *tape*. Di sanalah aku belajar komputer, yang kalau komputer dinyalakan masih layar hitam yang muncul dengan *C prompt* warna hijau berkedip di sudut kiri bawah. Rasanya belum lama, ternyata di akhir masa tugas, teknologi informasi sudah berkembang pesat, bisa bekerja dari mana saja dan semua sudah berbasis digital. Dunia terus berubah dan hanya perubahan yang abadi di dunia ini. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mampu beradaptasi agar bisa hidup mengikuti perkembangan zaman, termasuk memasuki masa purna bakti.

Teknologi informasi adalah *enabler*, yang lebih memperkaya hidupku adalah pengalaman menjalani tiga era pengelolaan keuangan negara, sebelum krisis masih era ICW, masa krisis sebagai masa transisi kita menyiapkan reformasi pengelolaan keuangan

negara, dan era pasca-reformasi. Aku merasa pengetahuan dan pengalaman yang kumiliki sayang sekali kalau tidak kugunakan lagi dan saat pensiun, aku langsung diam tidak beraktivitas.

Aku sudah mempersiapkan diri untuk mengakhiri masa baktiku sebagai ASN dan tidak berkeinginan untuk melimpah ke jabatan fungsional yang bisa menambah masa kerjaku lima tahun. Aku ingin lebih leluasa menikmati waktu di masa tuaku. Aku ingin lebih memperhatikan kesehatan dan kebugaranku, keluargaku yang selama ini banyak kutinggalkan karena tugas kedinasan, dan aku bisa mempunyai preferensi dalam mengabdikan sesuai dengan passion dan kemampuanku.

Roda Pengabdian Terus Berputar

Berbagai hal terkait masa tuaku, sudah aku persiapkan secara teliti sejak usiaku memasuki setengah abad, termasuk aspek finansial. Aku bersyukur saat pensiun keempat anakku sudah bekerja dan mandiri. Tugasku dan suami tinggal melihat dari jauh, *tut wuri handayani*. Oleh karena itu aku tidak lagi memikirkan beban biaya hidup keluargaku dan juga berupaya agar hidupku bersama suami tidak menjadi beban anak-anakku. Aku berharap lebih leluasa dalam memanfaatkan waktu.

Ada beberapa skenario yang sudah aku pikirkan. Aku suka berbagi pengetahuan dan pengalaman namun aku tidak mau lagi terikat dalam waktu dan penugasan dalam suatu instansi. Aku suka menginspirasi dan memotivasi anak-anak muda untuk belajar dan berinovasi. Aku juga tidak enggan membantu kawan-kawan yang memerlukan pencerahan atau masukan dalam bertugas. Yang tidak kalah pentingnya, aku masih suka belajar, apakah dari buku, pengalaman internasional terbaik, observasi di lapangan, atau inovasi dan perkembangan dari lembaga profesi internasional, tidak hanya di bidang keuangan, bahkan untuk pengarusutamaan gender di Uni Eropa juga masih aku ikuti. Oleh karena itu aku sudah membayangkan bahwa waktu tidak boleh berlalu begitu saja tanpa

“Secara berkala, aku dan suami pulang ke kampung halaman beberapa hari untuk menengok masjid yang kami bangun dari penghasilan yang kami sisihkan, Masjid Agung di Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Aku sekaligus bisa berziarah ke makam orangtua dan bersilaturahmi dengan masyarakat setempat.”





Sumiyati dan keluarga di Kampung Gading, Sragen, Jawa Tengah



Sumiyati dan suaminya, Hartono.

makna. Harus ada sesuatu yang aku kerjakan sebagai baktiku untuk keluargaku dan untuk negeri yang telah menghidupiku.

Alhamdulillah, puji dan syukur saat memasuki purnabakti sebagai ASN dengan baik dan indah menurut Ibu Sri Mulyani Indrawati, aku sehat dan segar bugar, masih mempunyai pemikiran yang jernih dan ternyata masih diberikan ladang untuk berkarya di berbagai penugasan, namun semuanya sesuai harapan dan doaku, tidak mengikat waktuku secara ketat, sehingga aku bisa luwes mengaturnya. Doa, dedikasi dan komitmen yang konsisten sangat diperlukan agar kita memperoleh yang terbaik sesuai dengan ukuran kita masing-masing. Ini yang kurasakan dan aku syukuri.

Pada hari terakhir aku bertugas sebagai ASN, diadakan pelepasan oleh Menteri Keuangan beserta seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Pada sore harinya, pukul 17.00, aku belum meninggalkan kantor, sudah diundang dan diberikan SK sebagai Komisaris PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG) dan juga menerima SK sebagai Komite Audit di Lembaga Pembiayaan Indonesia (INA). Dengan demikian ada dua lahan baru yang harus kupelajari lagi. Di samping itu, aku masih menjadi Ketua Komite Kerja KSAP, yang sudah kugeluti selama 18 tahun. Kementerian Sekretaris Negara juga masih menugasku sebagai Dewan Pengawas di Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran. Pada akhir tahun 2021 aku dihubungi Kemenkeu untuk menjadi Komite Audit Kemenkeu sejak Januari 2022, dan Kementerian Kesehatan juga memintaku untuk menjadi Komite Audit Kementerian Kesehatan sejak Agustus 2022.

Aku tumbuh di dunia akuntansi dan keuangan baik di sektor korporasi maupun pemerintahan, dan cukup lama juga menjadi pengajar. Inilah yang membuat Yayasan Pendidikan Internal Audit memintaku untuk bergabung kembali sebagai anggota Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor. Lembaga ini didirikan oleh Forum Komunikasi SPI BUMN tahun 1995. Aku dulu pernah terlibat intensif dalam mengembangkan kurikulum, bahan ajar dan mengajar dari tahun 1996 sampai tahun 2022. Di lembaga ini, aku sering mendapat tugas untuk memberikan materi *leadership*



Masjid Agung di Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, yang dibangun Sumiyati dari penghasilan yang dia sisihkan.

untuk *internal audit* dan menguji. Di samping itu juga masih ada permintaan dari berbagai lembaga untuk mengisi acara seperti seminar, termasuk Srikandi BUMN.

Beberapa penugasan yang kuterima ini membuat aku hidup dan tidak redup, berpikir lebih terbuka karena tidak ada beban tugas struktural, terus mengikuti perkembangan, dan tetap bersemangat. Melalui pengabdian ini, aku bisa mengikuti apa yang terjadi dengan berbagai upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Otakku seperti merekam perjalanan sejarah pengelolaan keuangan negara lengkap dengan 5W dan 1H. Aku sangat senang dan menikmati hari-hariku dengan penugasan ini.

Aku bukanlah orang IT, sementara sekarang kita berada di era digital. Aku terus berusaha memahami. Aku tidak malu belajar dari anakku, kebetulan dua anakku orang IT, dari Teknik Elektro Telekomunikasi dan dari Teknik Informatika ITB. Sedangkan untuk perkembangan pasar keuangan dan pasar modal aku berdiskusi dengan anakku nomor dua, alumni Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Untuk bidang kesehatan, aku sering berdiskusi dengan anak bungsuku seorang dokter, yang pernah praktik di Indonesia Timur dan sekarang sedang menempuh pendidikan Master of Public Health di Australia.



Sumiyati dan suaminya di Bromo, Jawa Timur.

Anak-anakku adalah mitra diskusiku yang andal. Kami saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Dengan demikian, tidak ada hari-hari yang kosong tanpa mengerjakan sesuatu. Hari-hariku masih tetap berwarna-warni, terisi dengan berbagai aktivitas yang sangat aku sukai. Karena aku mengerjakan sesuatu yang aku sukai maka pekerjaan itu sangat menyenangkan, menggairahkan dan membakar semangat. Aku menyadari usiaku semakin bertambah, maka aku berusaha menjaga kesehatan dan kebugaran tubuhku dengan olah raga ringan, seperti jalan kaki, atau dengan mengerjakan pekerjaan rumah, seperti menyapu halaman dan kebun.

Setelah memasuki purnabakti, otomatis aku menjadi anggota Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) yaitu wadah para pensiunan ASN dan BUMN. Bapak Mulia P. Nasution sebagai Wakil Ketua Bidang Usaha, Dana dan Koperasi memintaku untuk bergabung. Aku ingin PWRI menampilkan wajah pensiunan yang segar dan bersemangat, tidak loyo, dengan membawa para pensiunan sahabatku, yaitu Helmy Yahya, Suryo Alam, dan Ito Warsito (almarhum). Saat ini masih di tahap awal. Aku berharap ada sesuatu yang bisa dikontribusikan oleh PWRI untuk anggotanya maupun untuk para calon pensiunan, dan juga untuk masyarakat luas.

Walaupun kegiatanku masih banyak, aku masih tetap melaksanakan kegiatan rutinku untuk mengurus keluarga, seperti menyiapkan makanan dan kebutuhan lainnya. Di saat luang, aku bisa bermain dengan cucuku, Aruna Sasmaya Harimurti seperti nenek pada umumnya. Secara berkala aku dan suami pulang ke kampung halaman beberapa hari untuk menengok masjid yang kami bangun, dari penghasilan yang kami sisihkan, Masjid Agung di Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Aku sekaligus bisa berziarah ke makam orang tua sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat di sana.

Demikianlah aku mengisi hari-hariku setelah purnabakti, tetap produktif, dan mengabdikan untuk negeri. Setelah pandemi berakhir, semoga aku dan suami lebih banyak bisa berkativitas bersama, mengarungi masa tua bersama keluarga tercinta, tetap sehat, semangat, dan bahagia.



Di depan Gedung Putih, Washington DC.

Empat Anak Bicara tentang Sang Ibu

“Nak, Kita Berutang Pada Negara!”

Sumiyati tak pernah lupa bahwa dia dapat menikmati pendidikan menengahnya (SMEP dan SMEA di Sragen) sampai pendidikan tinggi (STAN di Jakarta dan S2 di Australia) karena dibiayai negara. Karena itu tidaklah heran ketika Sumiyati mengabdikan diri di Kementerian Keuangan, dia bekerja total sepenuh hati, dan juga tidak memanfaatkan jabatannya sebagai pejabat eselon I. “Nak, kita berutang pada negara,” katanya kepada anak-anaknya berulang kali.

Empat putra-putri Sumiyati yaitu Budiaji Hartono, Dwipa Harimurti, Triana Mustika Rukmi, dan Andyta Nalaresi kompak menyampaikan ini. “Ibu selalu mengingatkan kami anak-anaknya bahwa keluarga ini berutang kepada negara. Rasa terima kasih ibu kepada negara sangat besar,” cerita Budiaji, anak sulung.

Menurut Aji, sejak ibunya bekerja sebagai dosen sampai menjadi pejabat eselon I di Kementerian Keuangan, kehidupan mereka sama. “Apa bedanya? Kami sudah nyaman seperti ini. Kebutuhan kami hanya secukupnya, dan kami sudah dibiasakan hidup sederhana. Sampai sekarang pun, ibu masih merebus ubi untuk bapak. Setelah kami dewasa, setiap akhir pekan jika kami mampir ke rumah, ibu tetap memasak untuk kami, anak-anaknya,” cerita Aji.

Tidak Memanfaatkan Jabatan

Dwipa menambahkan, integritas ibunya tidak diragukan. “Sebenarnya dengan posisi ibu sebagai pejabat eselon I, betapa powerfulnya ibu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tetapi ibu tidak pernah memanfaatkannya,” kata anak kedua.

Triana Mustika Rukmi, anak ketiga, mengaku dia dan tiga saudaranya tidak pernah tahu secara rinci pekerjaan ibunya di kantor. Yang diingat Tika adalah ketika dia masih SD, ibunya bekerja ramai-ramai di satu ruangan. Setelah Tika di SMP, ibunya



Dari kiri ke kanan: Budiaji Hartono (anak sulung) dan istrinya Anindita; Andyta Nalaresi (anak bungsu); Sumiyati dan suaminya Hartono; Triana Mustika Rukmi (anak ketiga); Febriana Anindya (istri Dwipa) dan Dwipa Harimurti (anak kedua). Foto diambil pada hari terakhir Sumiyati berkantor di Kementerian Keuangan sebagai Inspektur Jenderal (Irjen), awal Agustus 2021.



mempunyai ruang kerja tersendiri dengan sekretaris yang membantunya.

Sampai akhirnya Tika menyadari jabatan ibunya di Kemenkeu sudah tinggi. Ketika ibunya masuk ke ruangannya, semua orang berdiri.

“Ruangan ibu yang mana?” tanya Tika suatu hari ketika diajak ke kantor oleh ibunya.

“Satu lantai ini,” sahut sang ibu.

Tika menyadari selama ini ibunya tidak menceritakan tentang pekerjaan di kantor. Ibunya bahkan mengurus sendiri administrasi kependudukan ke kantor kelurahan misalnya. “Kami anak-anaknya tidak merasakan perbedaan dalam kehidupan kami karena gaya hidup ibu tetap saja, sejak dulu sampai menduduki jabatan eselon I. Semua sama saja,” cerita Tika.

Hal yang sama diungkapkan Andyta Nalaresi, anak bungsu. Menurut Dyta, ibunya jarang bercerita tentang pekerjaannya di kantor Kemenkeu. Justru Dyta yang mendapat informasi dari asisten pribadi ibunya. Dyta merasa tak ada perubahan apapun di rumah, tetap sama ketika ibunya masih dosen dan pegawai awal di Kemenkeu maupun ketika ibunya sudah pejabat eselon I. “Hidup kami di rumah tetap sederhana,” ungkap Dyta.

Ketika Dyta menjadi dokter dan mendapat penugasan awal di Brebes, sang ibu mengingatkannya, “Kamu sudah memilih menjadi dokter. Itu berarti kamu memiliki kewajiban dan melayani dari hati,” kata Sumiyati kepada anak bungsunya. Dyta langsung tersadar bahwa menjadi dokter adalah pilihan hidupnya.

Pada masa *internship* (magang), dokter harus memilih tempat mengabdikan. Sebagian teman seangkatan Dyta memilih lokasi yang dekat dengan rumah, tetapi Dyta di lokasi yang relatif jauh.

“Kan bisa nitip ke Kemenkes?” kata teman Sumiyati ketika tahu Andyta magang di lokasi yang cukup jauh.



Sumiyati dan keluarganya di Sangiran.



Sumiyati dan keluarga saat pernikahan putra keduanya, Dwipa Harimurti.

“Iya Pak, tetapi apakah cara itu benar?” Sumiyati balik bertanya.

Terhadap anak-anaknya saja, Sumiyati bersikap keras. “Nilai-nilai yang ditanamkan Ibu di Kementerian Keuangan, diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga,” cerita Dyta.

Sumiyati dan suaminya menanamkan budaya Jawa kepada anak-anak mereka. “Ibu tidak pernah bersuara keras kepada bapak. Ini pelajaran yang ditanamkan ibu bahwa budaya Jawa seperti itu,” tutur Aji.

Hal yang sama disampaikan Dwipa. Meski karakter orangtuanya sama-sama keras, tetapi Dwipa tidak pernah melihat ibu dan ayahnya “berantem” mengeluarkan kata-kata keras.

Budaya ini juga yang diterapkan Sumiyati di kantornya. Alih-alih marah dan bersuara keras terhadap bawahannya, Sumiyati malah menjadikan bawahannya sebagai teman diskusi, dibimbing dan dididik menjadi orang-orang berhasil di bidangnya.

Ibu Ingin “Membayar” Utang kepada Negara

Dari empat bersaudara, Tika yang paling sering jalan-jalan. Dia sempat bekerja di Kuala Lumpur di Malaysia sendirian dan pekerjaannya menuntutnya untuk bepergian ke banyak negara.

“Apa yang harus dibangun Indonesia supaya orang-orang muda seperti Tika mau kembali ke Indonesia?” ibunya sering bertanya kepada Tika.

Sebelumnya ibunya juga bertanya, “Beasiswa seperti apa yang membuat kamu tertarik untuk mengambil beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan?”

Tika menyadari ibunya ingin “membayar utang” kepada negara yang sudah membiayai pendidikannya.

Budiaji mengakui, meskipun saat ini ibunya sudah pensiun, tetapi tetap memikirkan bagaimana agar negara ini semakin baik.

“Kalau ibu dinas keluar negeri, beliau jarang sekali membawa oleh-oleh. Paling banter cokelat. Tetapi jangan harap ibu membeli barang. Karena ibu berpikir, yang terpenting dalam perjalanan

keluar negeri adalah pengalaman. Seringkali ibu dalam ceritanya bertanya, kapan Indonesia bisa seperti negara A, B, C,” kata Budiaji.

Sejak Kecil, Dididik dengan Disiplin Tinggi

Sejak kecil, Aji sudah dididik sangat keras. Anak pertama harus menjadi contoh. Ini berbeda dengan teman-temannya. Aji menilai, ibu dan ayahnya bukan kejam, tetapi sangat mendisiplinkan dirinya. Artinya, jam berapa dia bangun, makan, mandi, berjemur, dan tidur sudah on schedule. Adik-adiknya juga didisiplinkan dengan cara yang sama.

Ketika duduk di bangku SD, Aji menceritakan, setelah pulang dari sekolah, dia mempunyai kesempatan untuk menonton TV dan membaca buku beberapa jam. Namun dibandingkan teman-teman seantarannya yang selalu nonton film secara penuh, dia dan adik-adiknya hanya boleh di depan TV hanya sampai pukul sembilan malam, sedangkan lanjutan film bagus di TV ditayangkan setelah acara “Dunia Dalam Berita” pukul 21.00.

“Jadi saya selalu hanya menonton film setengahnya. Setelah itu saya dan adik-adik wajib ke kamar dan tidur. Ini saya alami sejak kelas I sampai kelas VI SD,” ungkapnya yang ingin menggambarkan bagaimana ibu dan ayahnya yang bekerja sebagai PNS mengatur keluarga tersebut.

Dalam pendidikan, Aji dan adik-adiknya didukung penuh. “Ibu tidak cuma meminta kami tidak menonton TV pada jam belajar. Ibu juga mewajibkan kami untuk makan di rumah. Bahkan jika ibu pulang malam hari karena rapat di kantor, ibu membawa pulang makanan itu dan menyantapnya di rumah,” tuturnya.

Aji menambahkan, penerapan disiplin di rumah ketika dia duduk di bangku SMP dan SMA sama saja. Hiburan di rumah adalah televisi (hanya satu) dan buku-buku di perpustakaan. Mereka jarang nonton film di bioskop. Kalau pun ke mal, mereka hanya membeli pakaian.

“Bapak dan ibu membiarkan kami ‘berantem’ ketika kami masing-masing punya pilihan berbeda saat menonton acara televisi.

Kami sekaligus belajar berdemokrasi dalam keluarga. Tetapi remote control TV tetap dipegang bapak atau ibu,” kata Aji.

Dwipa Harimurti mengungkapkan, ketika diajari Bahasa Inggris oleh ibunya, dalam waktu setengah jam, dia sudah hapal. Sang ibu melarangnya untuk menonton TV. Tampaknya kepandaian ibunya menurun ke semua anak-anaknya. Setiap kenaikan jenjang pendidikan, nilai ujian Dwi selalu bagus. Dia tidak heran jika mereka masuk ke perguruan tinggi yang bagus karena ibu dan ayahnya menerapkan disiplin keras terhadap anak-anaknya. Setelah pukul 21.00, ayahnya mengunci pintu dan melarang anak-anaknya nonton TV.

Andyta Nalaresi, si anak bungsu, mengaku masa kecilnya paling bahagia dibandingkan ketiga kakaknya. “Saya tidak dididik sekeras kakak-kakak saya. Mungkin karena jam kerja ibu dan bapak lebih panjang sehingga jadwal belajar saya tidak seketat Mas Aji,” cerita Dyta yang lahir di Australia ketika ibunya melanjutkan pendidikan tinggi S-2 di negeri kanguru tersebut.

Hiburan di Rumah: Buku di Perpustakaan

Aji puas membaca buku-buku di perpustakaan rumah, di antaranya buku-buku sastra klasik seperti “Layar Terkembang” dan “Siti Nurbaya”. “Saya sudah menyelesaikan membaca buku sastra klasik Indonesia itu ketika duduk di bangku SD,” kata Aji.

Dia dan adik-adiknya rutin diajak ibu dan ayahnya ke toko buku Gramedia dan biasanya mereka membaca buku komik tipis di sana. Namun setiap anak hanya boleh membeli satu buku. Sebelum pulang, biasanya mereka membeli pisang goreng. Mereka sangat jarang makan di mal.

Hiburan mereka adalah membaca buku di perpustakaan di rumah. Pengetahuan kolektif mereka relatif banyak. “Saya jarang nonton TV karena sudah terbiasa membaca buku. Bagi saya, menonton menghabiskan waktu, sedangkan membaca membuat saya bisa lebih berimajinasi,” kata Dwipa.

Dalam hal memacu anak-anaknya untuk meraih ranking atas di sekolah, ibunya mendorong anak-anaknya untuk giat belajar. Yang bisa meraih ranking I di sekolah, ibunya menghadiahkan buku Harry Potter. Saat itu Dyta yang masih duduk di bangku kelas II SD ingin membaca buku itu lebih dahulu dan dia berjuang keras agar mendapatkan ranking I di sekolahnya. Dyta berhasil dan dia membaca buku Harry Potter edisi Bahasa Inggris dalam satu minggu.

Ibu Memang Pendidik Andal

Aji termasuk beruntung karena tidak pernah mengalami masalah dalam pelajaran di sekolah. Satu-satunya mata pelajaran di SMA Negeri 8 Jakarta yang dia minta bantuan ibunya adalah Akuntansi. Aji mengakui ibunya seorang guru dan pendidik yang andal. Meskipun belajar Akuntansi hanya satu sesi, namun dia dan beberapa temannya yang belajar pada ibunya langsung memahami materinya. “Ibu bukan sekadar dosen tetapi salah satu ahli akuntansi di negeri ini,” ungkapnya.

Menurut Aji, dari semua siswa —termasuk dirinya— yang belajar Akuntansi pada ibunya, semuanya mendapat nilai 9. Sedangkan siswa yang tidak belajar khusus Akuntansi pada ibunya, tidak mendapat nilai setinggi itu. Guru SMA heran dan memanggil siswa-siswa yang mendapat angka 9. “Ibu saya guru Akuntansi,” Aji menjelaskan. Guru SMA langsung terkesima, “Ohh, oke!”

Demikian pula ketika sang ibu mengajari anak-anaknya Tata Bahasa Bahasa Inggris (*Grammar*). “Ibu hanya meminta kami mengambil kertas. Dalam satu malam, ibu mengajari kami *grammar* tanpa membuka buku. Ibu benar-benar hapal di luar kepala dan tidak pernah melupakan pelajaran yang pernah dibaca dan dipelajarinya. Ini salah satu kehebatan ibu,” tutur Aji.

Dianjurkan Kuliah di Lokasi Jauh dari Rumah

Ketika Aji dan adik-adiknya memasuki jenjang pendidikan tinggi, Sumiyati menganjurkan mereka untuk kuliah di tempat yang jauh dari rumah. “Untuk mencari pengalaman hidup sendiri di luar rumah

dan belajar hidup mandiri, kalian perlu kuliah di kota berbeda,” kata Sumiyati kepada anak-anaknya. Dari empat bersaudara, hanya anak bungsu, Andyta Nalaresi yang kuliah paling jauh, yaitu di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Semarang. Tiga lainnya, Budiaji, Dwipa Harimurti, dan Triana Mustika Rukmi kuliah di ITB Bandung di fakultas berbeda.

Aji mengaku pada malam pertama tinggal sendiri di kamar kos, dia sempat stres, terutama karena mengingatkan kehangatan yang selalu ada dalam keluarganya, dalam rumahnya. “Rumah selalu bersih. Pakaian selalu disetrika ibu, kadang juga bapak. Makanan selalu tersedia. Kalaupun tak ada, ibu sedang memasaknya. Percakapan di antara anggota keluarga pun selalu hangat. Ada *small talk*. Ketika saya tinggal sendirian di Bandung, saya merasakan sekali perbedaannya. Karena itulah saya selalu mengapresiasi apa yang ada di rumah kami selama ini,” ungkap Aji.

Setelah lulus Teknik Elektro ITB, Aji kembali ke Jakarta dan mulai bekerja. Saat itu, ibunya sudah sangat sibuk dengan pekerjaan di kantor. Ketika kuliah pun, kata Aji, dia jarang dikontak oleh ibu dan bapaknya, sebulan belum tentu satu kali. “Bapak dan ibu tidak mau mengganggu anak-anaknya. Kami memang bukan tipe anak manja,” lanjut Aji.

Setelah memiliki rumah sendiri, Aji merefleksikan dirinya. “Saya sungguh menghargai kerja keras ibu yang tetap telaten mengurus empat anaknya. Terus terang, mengurus sendiri rumah itu berat,” katanya tergelak.

Ketika Dyta diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, ayahnya sebenarnya tidak setuju anak bungsunya kuliah jauh-jauh di Semarang. Namun ibunya mengatakan Dyta perlu belajar mandiri sehingga membiarkan anak perempuannya kuliah di Jawa Tengah. Seperti juga Aji, Dyta tidak sering dikontak oleh ayah dan ibunya karena diyakini anaknya mampu mengatasi berbagai persoalan.

Menurut Dyta, dia sering sakit saat baru datang dari Australia dan dibawa ke dokter karena perbedaan kualitas udara. Setelah

mendengar cerita ibunya tentang perbandingan Australia dan Indonesia dalam hal layanan kesehatan, akhirnya Dyta memutuskan untuk kuliah di Fakultas Kedokteran.

Dyta terinspirasi oleh ibunya yang pernah menjadi asisten dosen (asdos). “Supaya memahami mata kuliah, saya harus ngajari orang lain,” pesan ibu kepada anak-anaknya. Itulah yang dilakukan Dyta dan dua kakaknya, Aji dan Tika.

Dokter Andyta Nalaresi melanjutkan pendidikan S-2 Public Health, khususnya Economic Evaluation di bidang kesehatan, di Melbourne, Australia dan mendapatkan beasiswa dari negara. “Saya terinspirasi dengan cerita Ibu, bagaimana ibu sendirian sedang hamil, tetap bersemangat mengikuti perkuliahan, dan bagaimana helpful-nya orang-orang Australia di sini. Selama 2,5 tahun saya bekerja, kadang di bidang manajemen rumah sakit, saya sharing dengan Ibu, memberi feedback. O iya, rumah sakit seharusnya tidak seperti ini,” papar Dyta.

Daya Tahan dan Etos Kerja

Membandingkan dirinya dengan ayah dan ibunya, Budiaji mengatakan, pengalaman kedua orangtuanya berbeda dengan dia dan adik-adiknya. “Bapak dan Ibu lahir di kampung. Kalau saya mendengar cerita mereka, waw, mereka sangat *taft*, sangat tangguh. Untuk keluar dari kampung, dibutuhkan tekad yang sangat kuat. Syarat keluar kampung adalah kapabilitas,” tuturnya.

Aji mengibaratkan ibunya sebagai *iron lady*. “Kalau sudah ada niat, ibu benar-benar mengejanya. Secara finansial, keluarga ibu di kampung bukan orang berada. Mbah Putri juga tak bisa membaca. Nyatanya ibu saya bisa. Bekalnya hanya lulusan SMEA. Tak sepeserpun, uang keluar untuk sekolah dan membeli buku,” kata Aji, yang lahir di Jakarta, pada tahun 1985.

Budiaji menambahkan, fisik mereka kuat dengan daya tahan bekerja sekian jam, bukan persoalan bagi mereka. “Secara genetik, kami menurun dari ibu yang memang punya daya juang dan daya tahan menghadapi persoalan kehidupan,” katanya.

Ibu juga mentor dan teman diskusi yang mengasyikkan. “Integritas Ibu tak ada duanya. Sejak kecil, kami ditanamkan bahwa integritas hal yang sangat penting,” ujar Aji.

Diajari Tanggung Jawab

Triana Mustika Rukmi adalah anak tengah, anak ketiga, dan anak perempuan pertama dalam keluarga. Ibu sering menelepon Tika —nama panggilannya— sekadar menanyakan apa yang dikerjakan. Tika yang ikut Pramuka, dilatih keterampilan dasar bagi perempuan yaitu memasak. Setiap tingkatan, tugas Tika bertambah. Misalnya di kelas IV, dia diajari cara memotong ayam. Di kelas VI, Tika sudah bisa menggoreng ayam dan siap dimakan.

Ibu juga mengajarkan Tika belajar menyeterika sendiri pakaian-pakaiannya dengan berbagai cara dan trik agar rapi.

Tika mengakui ada nilai mata pelajaran di sekolah yang rendah. Guru biasanya mewajibkan siswa untuk meminta tanda tangan ke orangtua. Beberapa siswa takut minta tanda tangan ayah dan ibu mereka karena takut dimarahi. Tetapi Tika mengatakan dia tidak khawatir dan tidak takut dimarahi.

“Mengapa aku tidak dimarahi, Bu?” tanya Tika.

“Nilai itu nilai kamu atau nilai ibu atau bapak?” ibunya berbalik bertanya.

“Nilai aku,” jawab Tika.

“Yang malu siapa kalau nilai pelajaran kecil?”

“Aku, Bu,” sahut Tika.

Ibunya memberi kesadaran kepada Tika untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan.

Menurut Tika, ada beberapa mata pelajaran yang tidak disukainya, salah satunya Kimia. Tika kemudian menelepon ibunya.

“Bu, Tika minta maaf, nilai Kimia pasti jelek. Yang penting lulus,” lapor Tika kepada ibunya setelah selesai mengikuti ujian.

Pernah suatu hari Tika menelepon ibunya dan mengatakan dia sangat lelah. Ibunya menjawab singkat, “Oke.” Tak berapa lama,

guru Budi Pekerti meminta Tika untuk menyiapkan tas. Sopir sudah menjemputnya untuk pulang ke rumah.

Ibunya juga mengajarkan anak-anaknya untuk tidak membiasakan diri mengambil cicilan saat membeli barang. “Kalau kami ingin membeli sesuatu, kami diwajibkan menabung lebih dahulu. Ini kebiasaan kami sejak kecil,” ungkapnya.

Tika juga ingat ibunya selalu meminta anak-anaknya memilih yang terbaik. Ketika dia mengambil dua pilihan untuk kuliahnya, ibunya bertanya, “jika kamu akhirnya diterima di perguruan tinggi pilihan kedua, apakah benar kami ingin kuliah di sana?” Ibu meminta anak-anaknya konsisten dan memilih yang terbaik.

Masakan Ibu yang Bikin Kangen Rumah

Aji menuturkan, ibunya berhasil membuat anak-anaknya selalu kangen rumah seluas 600 meter persegi yang penuh kehangatan dan kenyamanan. “Ketika berada di rumah, ibu selalu menyempatkan diri untuk memasak. Karena itulah saya dan adik-adik selalu kangen rumah, rindu masakan rumahan buatan ibu,” kata Aji, sarjana Teknik Elektro ITB angkatan 2002 itu.

“Etos kerja ibu sangat besar. Seringkali ibu masih rapat sampai dinihari. Tetapi ibu masih sempat memperhatikan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu. Meski anak-anaknya sudah besar, ibu tetap menyediakan makanan untuk keluarga. Itu dilakukan ibu secara konsisten. Padahal ibu tidur hanya satu-dua jam, tetapi ibu bangun dan menyiapkan makanan untuk kami,” cerita Dwipa yang selalu ingat bolu buatan ibunya saat dia masih kecil.

Makanan ibu yang membuat mereka kangen rumah adalah ayam goreng serundeng, tahu tempe, lele goreng, dicampur sayur lodeh. “Masakan ibu rasanya masih sama dan tetap tersedia di meja makan, bahkan sampai kami besar dan dewasa,” kata Budiaji.

Sedangkan Andyta suka dengan ayam ingkung (makanan tradisional jawa) — ayam opor dimasak lebih kering, presmol, dan gulai otak sapi. “Saya belum menemukan masakan jawa seenak masakan ibu,” kata Aji.

Sumiyati, “Role Model” bagi Anak-anaknya

Bagi Andyta Nalaresi, “Ibu adalah *role model* yang luar biasa, yang mampu menyeimbangkan *work life* dan *family life*. Ibu bekerja keras karena harus rapat hingga larut malam hingga dinihari. Pagi hari, ibu sudah menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Jam tujuh pagi, ibu sudah berangkat lagi ke kantor. Sesibuk apapun, ibu tetap memerhatikan keluarganya. Suatu hari jika saya sudah berkeluarga, saya ingin seperti ibu, menjadi Kartini di era modern,” katanya.

Hal yang membuat Dwipa mengagumi ibunya adalah etos kerja sebagai abdi negara dan sebagai ibu. “Kami masuk sekolah jam delapan pagi, mobil jemputan sudah tiba jam setengah tujuh. Sebelum jam enam pagi, di meja sudah tersedia makanan untuk sarapan. Padahal ibu sudah siap ke kantor. Di tengah kesibukannya sebagai abdi negara di Kemenkeu, ibu masih menyempatkan diri untuk memasak, mencuci, dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya,” terang Dwipa.

Hal ini diakui juga oleh kolega ibunya, yang menyatakan betapa briliannya seorang Sumiyati. “Ibu seorang visioner dan problem solver,” katanya.

“Ibu adalah role model yang luar biasa, yang mampu menyeimbangkan work life dan family life. Ibu bekerja keras karena harus rapat hingga larut malam hingga dinihari. Pagi hari, ibu sudah menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Jam tujuh pagi, ibu sudah berangkat lagi ke kantor. Sesibuk apapun, ibu tetap memerhatikan keluarganya. Suatu hari jika saya sudah berkeluarga, saya ingin seperti ibu, menjadi Kartini di era modern.”

— Andyta Nalaresi





CURRICULUM VITAE



Nama : Sumiyati, Ak., MFM, CA, QIA, CGIA, CGCAE
 Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, Jawa Tengah, 6 Juli 1961
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Jagur, Cipinang Melayu,
 Jakarta Timur

Riwayat Pendidikan

- D-IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
- Master of Financial Management Central Queensland University

Riwayat Pekerjaan

- Januari 2017-Juli 2021 : Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
- Februari 2015 – Januari 2017 : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
- Desember 2009–Februari 2015: Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
- Juni 2007–Desember 2009: Kepala Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan

Pengalaman Kerja sebagai Komisaris di lingkungan BUMN:

- Juli 2021-sekarang. : Komisaris Indonesia Financial Group
- Juli 2021–sekarang : Komite Audit di INA
- Juni 2020–Desember 2021 : Komisaris Utama PT Tuban Petro
- Agustus - Desember 2019 : Komisaris PT PLN
- Oktober 2015-Agustus 2019 : Komisaris Bank BTN
- September 2012 -Oktober 2015: Komisaris PT Jiwasraya

Pengalaman Kerja di Badan Layanan Umum

- 2006-2007 : Kasie Pola dan Standardisasi Pengelolaan Keuangan BLU
- Januari 2013–Desember 2015 : Dewas Pengawas LPDP
- Juli 2015–Januari 2017 : Ketua Dewan Pengawas STAN
- April 2017–2020, Mei 2021–sekarang: Dewan Pengawasan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
- November 2017–Juli 2021: “Caretaker” Pimpinan LPDP

Pengalaman di Organisasi Profesi:

- 2004 –sekarang : aktif di Komite Standar Akuntansi Pemerintah
- Oktober 2017- sekarang : Ketua Kelompok Kerja KSAP
- Februari 2017 – Juli 2021: Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)
- 2017-2021 : Anggota Komite Pengawas Pajak
- Januari 2019 – sekarang : Anggota Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DSQIA)
- September 2019–sekarang: Dewan Konsultatif KASP IAI
- Juli 2021 - sekarang : Anggota Komite Audit INA
- Januari 2022 - sekarang. : Anggota Komite Audit Kementerian Keuangan
- Agustus 2022 - sekarang. : Anggota Komite Audit Kementerian Kesehatan

Pengalaman Profesional dalam Pengelolaan Keuangan Negara:

- Sebagai anggota **Komite Pembaharuan Manajemen Keuangan (KPMK)** Kementerian Keuangan, terlibat aktif dalam pembahasan RUU keuangan Negara, RUU Perbendaharaan Negara, RUU Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya aktif dalam penyusunan Peraturan Pelaksanaan Paket UU Keuangan Negara
- Sebagai tim penyusun **Sistem Akuntansi untuk Pemerintah Daerah** yang akhirnya dipakai di hampir semua pemerintah daerah dan menjadi referensi dalam penusunan siskeudes untuk sistem akuntansi keuangan pemerintah desa.
- Sebagai **Ketua Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan** sejak tahun 2010 – 2014, selanjutnya tetap aktif dalam monitoring dan evaluasi , serta audit implementasi PUG. Adapun inisiatif yang dilaksanakan antara lain adalah advokasi, membangun kerangka kerja implementasi PUG, dari sejak melembagakan PUG di setiap unit eselon 1, menyiapkan program terkait sarana dan prasarana, pendidikan dan pelatihan *offline* dan *online*, data terpilah, menyiapkan GAP dan GBS, rekrutmen pegawai dan penempatan pegawai serta promosi pegawai yang responsif gender, remunerasi/insentif/fasilitas yang diberikan kepada pegawai, reuiv anggraan yang responsif gender dan audit implementasi PUG di lingkungan Kementerian Keuangan
- **Membangun Corporate University (Corpu) Kemenkeu**, pertama di instansi pemerintah dan **mengubah STAN menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN** sebagai Lembaga Pendidikan vokasi di bidang keuangan negara.

Pengalaman mengajar di bidang akuntansi dan keuangan:

- 1983 -1986 : di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
- 1983 -1989 : di Perguruan Tinggi YAI
- 1984 – 1995 : STIE Swadaya
- 1995 – 2009 : Universitas Indonesia

- 1995 – 2015 : Universitas Trisakti
- 2003 – 2012 : Universitas Padjadjaran

Pelatihan yang pernah diikuti:

- 2012: Oxford University, High Performance Leadership
- Australia: Performance based budgeting
- 2014: New Zealand: Performance management systems
- 2014: The Palladium Group, Enhancing The Strategy Management System Forwards Obtaining Breakthrough Results
- 2014: Coaching Indonesia, Executive Coaching
- 2014: Global Green Growth Institute, Green Economy
- 2015: General Electric: Corporate University Development and Design
- 2015: Kobe University, Risk Management
- 2016: Flemming, Corporate University
- 2016; Harvard Business School, Institutional Transformation
- 2016: London Business School, The ASEAN Global Leadership
- 2017: New Zealand: Risk Management
- 2018: Denmark: Anti-Corruption
- 2018: US, Enterprise Risk Management
- Swiss & Germany: Risk Management for Banking Industry

Penghargaan

- Penghargaan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden RI (2021)
- Qualified Internal Auditor (QIA)
- Certified Government Internal Auditor (CGIA)
- Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE)

SUMBER ISI BUKU DAN KEPUSTAKAAN

WAWANCARA

Sumiyati

29 Maret 2022; 7 dan 21 April 2022; 17 Juni 2022; 15 Juli 2022; 2, 6, 14 Agustus 2022
(via Zoom)

Empat anak Sumiyati (Budiaji Hartono, Dwipa Harimukti, Triana Mustika, Andyta Nalaresi)

2 Agustus 2022 (via Zoom)

Mulia Nasution

16 Agustus 2022 (via Zoom)

Binsar Simanjuntak

16 Agustus 2022 (via Zoom)

Sonny Loho

19 Agustus 2022 (tertulis)

Rahmadi Murwanto, Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN

8 Agustus 2022 (via Zoom)

Bambang Karuliawasto, *Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkeu*
1 Agustus 2022 di Gedung Djuanda II, Jakarta Pusat

Raden Patrick Wahyudwisaksono, *Inspektur V Kemenkeu*
1 Agustus 2022 di Gedung Djuanda II, Jakarta Pusat

Lucia Widiharsanti, *Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jabar III*
3 Agustus 2022 di kantor Kanwil Ditjen Pajak Jabar III, Bogor

Anne Serfiana, *Direktur Keuangan Umum dan Sistem Informasi*
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
8 Agustus 2022 (tertulis)

Edward UP Nainggolan, *Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara*
Kalimantan Barat
16 Juli 2022 (via Zoom)

Marudut Napitupulu, *Kepala Bagian Perbendaharaan, Biro*
Perencanaan dan Keuangan
13 Juli 2022 (tertulis)

Mei Ling, *Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, Ditjen*
Perbendaharaan
17 Juli 2022 (tertulis)

Malul Azam, *Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan; Mahasiswa*
Program Doktorat Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Belgia
15 Juli 2022 (tertulis)

Sistomo Siswoatmodjo, *sahabat Sumiyati di SMEA Sragen dan STAN*
Jakarta
26 Juli 2022 di Plaza Senayan, Jakarta Selatan

Nur Imaroatun Sholihat, *auditor Itjen; mahasiswa program Master*
of Commerce UNSW Sydney, Australia
28 Juli 2022 (via chat)

BAHAN BACAAN DAN KEPUSTAKAAN

BUKU DAN “E-BOOK”

Better Practice Guide (Penganggaran Berbasis Kinerja) Edisi 2014, Kementerian Keuangan RI, November 2014

Laporan Implementasi Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan, Tim Penggerak Implementasi Pengarusutamaan Kemenkeu, 2020

Kuangan Negara dan Peran PKN STAN Dalam Pengelolaan Keuangan Negara, Orasi Ilmiah Sumiyati dalam Dies Natalis ke-6 PKN STAN, 2021

Sejarah Politeknik Keuangan Negara STAN dan Pengelolaan Keuangan Negara, PKN STAN, 13 Juli 2021

Selamat Memasuki Masa Purnabakti Sumiyati (Kumpulan Ucapan), Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, 2021

Ramadhan KH, “*Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977*”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1992

Asti Musman, “*Bahagia ala Orang Jawa*”, Pustaka Jawi, Yogyakarta: November 2018

YOUTUBE KEMENTERIAN KEUANGAN

Sambutan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Serah Terima Jabatan Inspektur Jenderal Kemenkeu RI, 2 Agustus 2021

MAJALAH

“Kampus Ali Wardhana yang Berputar 180 Derajat”, Majalah “Edukasi Keuangan”, Edisi 20/2015

LAMAN

- Tentang PETA https://id.wikipedia.org/wiki/Pembela_Tanah_Air
- Tentang Toko Buku Tiga Serangkai di Solo bisnisukm.com
- Tentang Serat Wedhatama https://id.wikipedia.org/wiki/Serat_Wedhatama
- Tentang Nyi Ageng Serang https://id.wikipedia.org/wiki/Nyi_Ageng_Serang
- Tentang Sejarah PKN STAN <https://www.pknstan.ac.id/sejarah-pkn>
- Tentang BAKUN http://id.dbpedia.org/page/Badan_Akuntansi_Kuangan_Negara
- Tentang BPKP <https://www.bpkp.go.id/sumut/konten/48/Tugas-Fungsi-dan-Wewenang.bpkp>
- Tentang Hekinus Manao Wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Hekinus_Manao, dan Kompas.com <https://money.kompas.com/read/2016/03/22/000100826/Hari.Ini.Jenazah.Hekinus.Manao.Dimakamkan.di.San.Diego.Hills>
- Tentang Sejarah SIMDA <https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/334/Sejarah-SIMDA.bpkp>
- Tentang Kemenkeu Learning Center/KLC <https://bppk.kemenkeu.go.id/kemenkeu-corpu/kemenkeu-learning-center>
- Tentang Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK) <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/tata-kelola-data-terintegrasi-kemenkeu-dukung-satu-data-indonesia>
- Tentang “Co-Working Space” Kementerian Keuangan <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/menteri-keuangan-resmi-meluncurkan-satellite-office-dan-co-working-space>
- Tentang Whistleblowing System <https://setjen.kemenkeu.go.id/in/post/whistleblowing-system>

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 36/KMK.01/2014 tentang
Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian
Keuangan Tahun 2014-2025

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 924/KMK.011/2018
tentang Kementerian Keuangan “Corporate University”

CATATAN PENULIS

Sumiyati, Srikandi Perubahan, Inspirasi bagi Perempuan

Buku *“Sumiyati, Srikandi Perubahan, Inspirasi Bagi Perempuan — Dari Reformasi Keuangan Negara, Perencanaan dan Penganggaran, Sampai Corpu”* merupakan biografi profesional Sumiyati, perempuan pertama yang menjabat Inspektur Jenderal di Kementerian Keuangan. Sumiyati, anak desa dari Sragen,



26 Juli 2022: Penulis bersama Ibu Sumiyati

Jawa Tengah ini dalam pengabdianya selama 39 tahun 4 bulan, meninggalkan banyak *legacy* yang bermanfaat bagi insan Kemenkeu, di antaranya mendirikan Corporate University (Corpu) — yang kini menjadi *benchmark* bagi kementerian dan lembaga lain di Indonesia, dan mengubah status STAN menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN. Selain itu Penganggaran Berbasis Kinerja (*Best Practice Guide/BPG*) juga salah satu *legacy* yang sangat berharga dari kepemimpinan Sumiyati sebagai usaha penyempurnaan perencanaan anggaran di kementerian/lembaga.

Buku ini tidak hanya memuat perjalanan hidup Sumiyati yang sulit dan keras sejak awal di Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen dan perjuangannya untuk tetap mengenyam pendidikan tinggi gratis (dibiayai negara) di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di Jakarta, tetapi juga memuat testimoni dari sejumlah narasumber tentang sosok Sumiyati.

Sumiyati mewakafkan sebagian besar hidupnya untuk negara karena dia merasa berutang besar kepada negara. Pendidikan menengahnya di SMEP dan SMEA, dan pendidikan tingginya di STAN Jakarta dan S-2 di Australia, dibiayai negara. “Kalau saya tidak mendapatkan beasiswa pendidikan dari negara, saya hanyalah Sumiyati, seorang petani penggarap sawah di desa,” ungkapnya. Sumiyati selalu dinasihati orangtuanya, “untuk memperbaiki taraf hidup, kamu harus sekolah tinggi dan bekerja keras.”

Sistomo (61), sahabat Sumiyati pada masa remaja dan masa mudanya mengakui Sumiyati sejak SMEA sudah bekerja keras. “Di SMEA, ketika saya masih tidur, Sum sudah berangkat dengan sepedanya. Saya belum tiba di sekolah, Sum sudah tiba. Karenanya, saya tidak heran dengan staminanya yang tinggi, yang kuat bekerja sampai jam dua pagi. Rekan-rekan kerjanya heran — walau telah bekerja sampai jam dua pagi, jam tujuh atau delapan pagi, Sum sudah muncul di kantor lagi dengan keadaan segar. Saya tidak heran, karena sejak kecil Sum sudah terbiasa bekerja keras dan fokus,” ungkap Sistomo, kini Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Perjalanan Sumiyati yang begitu lengkap mencerminkan perjalanan perempuan yang ulet, yang memiliki integritas yang luar biasa dan profesional. “Ibu Sum yang berasal dari kota kecil, dididik oleh orangtuanya secara sangat terbatas, tetapi mempunyai tekad dan cita-cita besar, mengukir kariernya setapak demi setapak dan setiap tapakannya mencerminkan karakternya yang patut dijadikan contoh, terutama oleh kaum muda, generasi milenial, khususnya para perempuan Kementerian Keuangan. Ibu Sum memiliki keuletan yang tanpa henti, yang mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas diri sesuai bidang yang dimiliki. Pengalaman kerjanya yang beragam dan reputasi yang dibangunnya membuat Ibu Sum berwibawa dan dikagumi, sekaligus menjadi aset penting bagi Kementerian Keuangan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menurut Sri Mulyani, “Ibu Sum telah membangun keuangan negara dan memperkuat sistem pengendalian internal Kemenkeu. Terima kasih yang tulus dan hormat saya atas pencapaian perjalanan karier yang luar biasa paripurna, dan semuanya berakhir dengan indah dan baik. Ibu Sumiyati adalah contoh dan *role model* untuk seluruh insan Kemenkeu, termasuk untuk saya sendiri.”

Mulia P. Nasution, Sekretaris Jenderal Kemenkeu (2006-2011) mengenal Sumiyati sejak lebih dari 20 tahun lalu. “Dalam perjalanan waktu yang panjang, saya melihat Bu Sum salah satu contoh SDM Kemenkeu, pengelola keuangan di sektor pemerintah, yang benar-benar punya integritas, kompetensi, dan *all-out* dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Bu Sum layak menjadi contoh dan teladan bagi insan Kemenkeu dan PNS di manapun berada,” kata Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu (2004-2006) itu.

Dalam perjalanan kariernya dari eselon IV ke eselon III, Sumiyati menghadapi kendala kepangkatan. ‘Setelah itu, karier Bu Sum menanjak, dan akhirnya Bu Sum menjadi pejabat teras, yang sudah teruji, bukan hanya saat memimpin Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), tetapi juga ketika menjabat Inspektur Jenderal — suatu jabatan yang tidak mudah. Bu Sum menunjukkan, bukan hanya gelar pendidikan yang disandanginya, tetapi juga integritas — hal terpenting yang dibutuhkan dalam pengelolaan



Wawancara penulis dengan Mulia P Nasution via Zoom

keuangan negara di sektor pemerintah,” ungkap Mulia P Nasution, kini Ketua Umum Persatuan Purna Bakti Pegawai (P2PB) Kemenkeu (2019-2024), dan Wakil Ketua Umum Persatuan Werdatama Republik Indonesia (2021-2026).

Sonny Loho, Inspektur Jenderal Kemenkeu (2011-2015) memaparkan, kompetensi dan kegigihan Sumiyati untuk menyiapkan peraturan dan kebijakan sesuai kaidah-kaidah manajemen keuangan negara terbaik untuk dapat digunakan di Indonesia sangat nyata. “Kerja jauh melewati hari dan jam kantor merupakan hal yang biasa. Bu Sumiyati berperan aktif dalam tim penyusun beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah bidang keuangan negara dan selanjutnya konsisten menerapkan dalam pekerjaannya di Kementerian Keuangan,” kata Sonny, yang juga Dirjen Kekayaan Negara (2015-2017).

Binsar Simanjuntak, Deputy Kepala BPKP (2005-2017) melihat karier Sumiyati diperoleh betul-betul karena kompetensi dan integritasnya yang menjadi satu, sehingga ada *trust* dari pimpinan Kemenkeu, yang memberinya kepercayaan menjabat posisi penting hingga Inspektur Jenderal.

“Bu Sum membenahi akuntansi di Kemenkeu, bersama teman-teman lain. Dipandu pimpinan yang suportif, Bu Sum membangun sistem, dari manual dan terbelakang, menjadi modern. Kepercayaan yang didapatnya setingkat demi setingkat, mulai dari kepala seksi, kasubdit, kepala biro, dan kemudian melesat menjadi kepala badan (BPPK), dan Irjen. Itu hal luar biasa,” kata Binsar, Ketua Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2004-2017), dan kini Staf Khusus Menteri PUPR.

Edward UP Nainggolan, yang pernah tergabung dalam kelompok kerja yang merumuskan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) bersama Sumiyati —saat itu tahun 2001 adalah pengajar di Pusdiklat BPKP—, dan pernah bersama-sama di Badan Akuntansi Negara (BAKUN) Kemenkeu, menceritakan mereka banyak berinteraksi dan bersama-sama melakukan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah ke berbagai daerah terpencil di Indonesia. Pada masa itu, otonomi daerah baru dimulai, dan pemda belum memahami dengan baik pengelolaan keuangan sesuai praktik berlaku umum (*best practices*).

Edward menilai Sumiyati sangat menonjol di bidang akuntansi, *auditing* dan manajemen keuangan sehingga cepat beradaptasi terhadap perubahan manajemen keuangan baik di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Karena pengetahuan Sumiyati yang sangat luas dan dalam, julukan yang disematkan kepada Sumiyati adalah “kamus berjalan”. “Di samping itu, Sumiyati adalah pengajar yang terbaik yang pernah saya kenal karena dapat menyampaikan materi yang baru dan sulit dengan cara dan bahasa sederhana sehingga audiens dengan mudah memahami yang disampaikan,” kata Edward, kini Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Barat.

“Banyak hal dari Ibu Sum yang saya jadikan contoh dan panutan, di antaranya idealisme dan integritasnya. Juga cara Ibu Sum memperlakukan orang lain. Setinggi apapun jabatannya, Ibu Sum memperlakukan staf atau mantan staf sebagai mitra atau sahabat,” kata Edward yang mengibaratkan Sumiyati, “sebagai berlian, yang ditempatkan di lumpur pun, tetap berkemilau dan bercahaya”.

Nakhoda Biro Perencanaan dan Keuangan

Pada 2007, Sumiyati ditugasi Mulia P Nasution (saat itu Sekjen Kemenkeu) untuk menjabat Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Aklap). Pada masa itu, Bagian Aklap acapkali “tidak dianggap”. Tetapi setelah Sumiyati memimpin unit ini, Aklap menjadi bagian strategis yang mendorong reformasi di bagian keuangan dengan memperkuat audit, akuntabilitas, dan transparansi. Inilah strategi yang disiapkan Sumiyati ketika melaksanakan reformasi di bidang keuangan negara. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang sebelumnya merupakan unit kerja yang seakan tak punya harapan dan awaknya kurang bersemangat, kemudian menjadi unit kerja yang “seksi”, yang hidup dan dinamis.

Ini diakui salah satu stafnya, Malul Azam — saat ini mahasiswa Program Doktor Katholieke Universiteit (KU) Leuven, Belgia. “Bekal pengetahuannya tentang keuangan negara dan tempaan pengalamannya menjadi pendidik, Ibu Sumiyati menjadikan implementasi berbagai kebijakannya selalu diawali dengan bertutur teori/filosofi yang mendasari itu semua, termasuk perdebatan ketika kebijakan dirumuskan. Dengan demikian, staf Aklap bisa memahami intisari atau spirit dari pembuat kebijakan,” kata Azam,

Selain menjadikan Azam dan kawan-kawannya berpikir kritis, Sumiyati selalu menekankan ilmu sebelum beramal. “Teori keuangan negara yang acap membingungkan menjadi terasa lebih mudah dipahami dan dipraktikkan, seperti ketika membuat jurnal akuntansi,” katanya.

Dua tahun kemudian, pada 2009, Sumiyati menjadi “nakhoda” di Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenkeu.

Mei Ling — saat ini Tenaga Pengkaji Perbendaharaan di Ditjen Perbendaharaan — melihat besarnya peran Sumiyati dalam mengawal lahirnya Undang-Undang Keuangan Negara dan meletakkan fundamental akuntansi pemerintahan. “Ini membuat beliau menjadi salah satu pelaku sejarah reformasi keuangan negara. Ibu Sumiyati adalah salah satu tokoh utama di balik layar reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia,” ungkap Mei Ling yang menganggap Sumiyati adalah guru dan mentornya.

Sebagai salah satu ahli akuntansi keuangan sektor publik dan pionir terbentuknya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), kata Mei Ling, Sumiyati adalah sosok yang mengawal penyusunan dan penerbitan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) perdana. Tidak hanya sampai di situ, Sumiyati juga melanjutkan perjuangannya untuk mengawal penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk pertama kalinya.

Marudut Napitupulu menilai Sumiyati sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan adalah nakhoda yang bercita-cita agar Kementerian Keuangan sebagai Pengguna Anggaran BA015 tidak cukup sekadar memperoleh Opini WTP atas Audit BPK pada Laporan Keuangan Kementerian Keuangan. “Bu Sum menginginkan terciptanya Perencanaan dan Penganggaran yang berkualitas termasuk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang menghasilkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas (*value for money*) yang semakin baik,” kata Marudut Napitupulu, Kepala Bagian Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan, Setjen Kemenkeu.

Menurut Napitupulu, kesempurnaan yang sudah diperoleh Kementerian Keuangan di area hilir yaitu akuntansi pelaporan perlu diperkuat juga dengan penyempurnaan di area hulu yakni bagaimana anggaran direncanakan dengan sebaik-baiknya, karena ada ungkapan yang sangat akrab di Biro Perencanaan dan Keuangan — yang juga sering diingatkan Sumiyati yaitu “gagal merencanakan adalah merencanakan kegagalan”.

Marudut Napitupulu menambahkan, Penganggaran Berbasis Kinerja (*Best Practice Guide/BPG*) adalah salah satu *legacy* yang sangat berharga dari kepemimpinan Sumiyati sebagai usaha penyempurnaan perencanaan anggaran di Kementerian Lembaga dengan sangat humanis. Dalam proses penyusunan panduan ini, M Napitupulu sebagai salah satu kontributor menyaksikan betul determinasi, persistensi dan peran Sumiyati sebagai pemimpin yang menjadi *enabler* memberikan ruang yang sangat luas bagi pegawai yang lebih muda untuk secara aktif dan produktif memberikan kontribusi.

Anne Serfiana mengagumi Sumiyati yang memprakarsai pengarusutamaan gender (PUG) di Kemenkeu. Sejauh ini, kata Anne, sudah banyak perkembangan PUG di Kemenkeu, mulai dari sistem penganggarannya sampai pada kebijakan-kebijakan yang mendukung para perempuan, di antaranya cuti bagi suami ketika istri melahirkan, tersedianya ruang laktasi di setiap kantor dan fasilitas kantor untuk mendukung kaum disabilitas.

“Pelajaran yang saya dapat adalah Ibu Sum adalah pemimpin yang bukan *bossy*, tetapi merangkul bawahannya sebagai satu tim yang solid sebagai keluarga. Kami bebas menyampaikan pendapat dan Ibu Sum tetap mau menerima kami, bahkan setelah menjadi pejabat eselon I menjadi Irjen — yang biasanya ditakuti semua orang, Ibu Sum tetap mau menerima staf paling rendah sekalipun,” ungkap Anne, kini Direktur Keuangan Umum dan Sistem Informasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kemenkeu.

Gebrakan di BPPK: Dari Corpu sampai Politeknik Keuangan Negara STAN

Meskipun hanya dua tahun memimpin BPPK (2015-2017), Sumiyati melahirkan dua karya yang luar biasa. Pertama, menghadirkan wajah baru BPPK dengan Corporate University (Corpu) Kemenkeu yang baru pertama ada di Indonesia. Sumiyati memberdayakan dan menghidupkan kembali BPPK sehingga menjadi lembaga pendidikan dan latihan disegani di Kementerian Keuangan, dengan mewujudkan Corpu. Kedua, mengubah STAN menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN.

“Selain dua *legacy* yang dibuat Ibu Sumiyati, masih ada satu lagi yang dilakukan yaitu memperbaiki tata kelola BPPK sehingga dipercaya dan berintegritas,” kata Rahmadi Murwanto, Direktur Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN. Pada 2015, Rahmadi saat itu Kabag Ortala berperan sebagai *think tank* Sumiyati di BPPK. Itu masa paling produktif bagi Rahmadi selama dua tahun bersama Sumiyati.

Rahmadi berpendapat, karakter pejabat seperti Sumiyati jarang ada di Indonesia. “Apalagi bila melihat kemampuan dan



Penulis bersama Rahmadi Muwanto, Direktur PKN STAN

kecerdasannya yang luar biasa yang mampu membuat orang lebih mudah paham dengan apa yang disampaikan,” tambahnya.

Digitalisasi di Inspektorat Jenderal

Tahun 2017, Sumiyati ditugasi Menteri Keuangan Sri Mulyani menjabat Inspektur Jenderal Kemenkeu.

Sekretaris Itjen Kemenkeu, Bambang Karuliawasto menilai, ketika memimpin Inspektorat Jenderal, Sumiyati dengan mudah beradaptasi karena pernah menjadi auditor di BPKP pada awal kariernya, selain itu, juga pernah menjadi Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. “Sebagai Inspektur Jenderal, Ibu Sumiyati sangat detail. Kalau mereviu konsep laporan hasil pengawasan misalnya,



1 Agustus 2022: Penulis bersama Bambang Karuliawasto, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI.

FOTO OLEH TRI YULIANI

Ibu Sum sangat memperhatikan referensi peraturan perundangan serta susunan kata- katanya,” katanya.

Bambang juga mengungkapkan, peran Sumiyati sebagai Ketua Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) pada saat itu memudahkan dan menunjang pekerjaannya sebagai Irjen Kemenkeu, yang mendukung peran Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN).

Adapun Raden Patrick Wahyudwisaksono, Inspektur V Itjen Kemenkeu berpendapat, setelah menjabat Irjen Kemenkeu, Sumiyati menggagas untuk menghimpun 87 pimpinan APIP di Dhanapala, membuat *Letter of Commitment*, komitmen bersama mengawal Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP. “Ini ide Bu Sum. Beliau memikirkan bagaimana menggandeng APIP daerah, pengawas internal daerah, dengan cara menyinergikan APIP pusat dan daerah. Kebijakan ini diinisiasi Bu Sum pada 2018 untuk mengawal setiap rupiah yang dikeluarkan negara,” urai Patrick.

Sumiyati juga aktif (*ex-officio*) sebagai Ketua AAIPI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia), menggelar rapat-rapat



1 Agustus 2022: Penulis bersama Raden Patrick Wahyudwisaksono, Inspektur V Itjen Kemenkeu di Gedung Djuanda 2 Jakarta.

FOTO OLEH TRI YULIANI

koordinasi pengawasan dengan 87 koordinator auditor dari kementerian dan lembaga. Menurut Patrick, Sumiyati mendorong jajaran Itjen melakukan inisiasi redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP) dalam upaya memperbaiki pengawasan di kementerian dan lembaga.

Sumiyati mempertanyakan cara kerja auditor yang lamban, tidak cepat merespon pimpinan sehingga mencari cara untuk mempercepat cara kerja auditor agar lebih cepat. Salah satunya adalah dengan menerapkan digitalisasi 4.0. Itu berarti cara kerja yang harus berubah, tak bisa lagi bekerja dengan cara biasa-biasa lagi. Jajaran Itjen harus menggali data dan mampu menganalisis data.

Setelah menjabat Irjen, Sumiyati membedah penyebab lamban cara kerja Itjen. “Bu Sum mencari cara agar seluruh pejabat eselon I dapat menyalurkan data, dan meyakinkan berbagai pihak bahwa kebijakan Itjen untuk melayani Menteri Keuangan. Bu Sum melakukan revolusi di Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Itjen,

War Room kami. Sejak itu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang sebelumnya membatasi kewenangan Itjen mulai membuka data mereka,” urai Patrick.

Sumiyati juga mencetuskan gagasan untuk melakukan pengawasan jarak jauh (*remote auditing*). Ketika itu Sumiyati mendapatkan referensi tentang era baru (*new era*) di mana kegiatan audit dapat dilakukan jarak jauh, lebih efisien, bukan lagi dengan sampel tetapi populasi. Kalaupun turun ke lapangan, hanya hal-hal yang bersifat anomali.

“Ibu Sum selalu mengatakan kepada saya, apa artinya gelar jika tak bisa membawakan diri? Beliau selalu mengingatkan kepada semua jajaran Itjen untuk selalu menjaga integritas dan tidak korupsi karena hanya integritas-lah yang membuat seseorang punya nilai,” ungkap Patrick.

Lucia Widiarsanti yang mengenal Sumiyati sejak lama, menilai Sumiyati seorang pejabat yang egaliter, yang tidak membedakan atasan atau bawahan. “Ibu selalu ada bersama kami, dan kami selalu merasa nyaman di dekatnya. Namun Ibu Sum tetap tokoh yang kami segani dan hormati. Ibaratnya, mau nakal, eh ada Ibu. Jadi Ibu seorang yang egaliter tetapi tetap disegani. Karena ada Ibu, kami yakin semua akan baik-baik saja,” kata Lucia, kini Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat III yang berkantor di Bogor.

Lucia berpendapat Sumiyati seorang visioner. “Sebelum kebijakan *open space* diberlakukan di lingkungan Kemenkeu, Inspektorat Jenderal sudah menerapkannya di lantai 13 dan berlaku untuk seluruh pegawai Itjen. Ketika Menkeu Sri Mulyani pada 2021 memberlakukan kebijakan digital workspace di seluruh lingkungan kerja Kemenkeu, para pegawai Itjen tidak merasa asing lagi,” papar Lucia, yang pernah menjabat Inspektur I Itjen Kemenkeu.

Auditor generasi milenial, Nur Imaroatun Sholihat melihat, sebagai seorang pemimpin maupun seorang perempuan, Sumiyati meninggalkan kesan mendalam dalam pikirannya. Perjuangan masa kecil Sumiyati telah menjadi pengingat bahwa titik permulaan seseorang bisa sederhana apapun tetapi kerja keras dan kesungguhan bisa mengubah segalanya. “Kesederhanaan yang



3 Agustus 2022: Penulis bersama Lucia Widiarsanti, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat III di kantornya di Bogor.

FOTO: DOKUMENTASI ROBERT ADHI KSP

terpancar di balik deretan pencapaian Bu Sum meyakinkan saya bahwa perempuan bisa menjadi demikian ayu dan cantik dalam kesederhanaan. Saya mengagumi bagaimana beliau memancarkan aura kuat dan lembut, digdaya dan penuh kasih secara bersamaan,” ungkap Imaroatun mewakili generasi milenial Kemenkeu.

Sumiyati sebagai Istri dan Sebagai Ibu

Sumiyati sebagai perempuan Jawa menyadari betul, istri adalah *garwo* atau *sigaraning nyowo*, belahan jiwa yang harus mendampingi dan mendukung suami. Dia harus tetap mengedepankan suami sebagai pemimpin dalam keluarga di rumah. Meskipun dalam pekerjaan sehari-hari di kantor, perempuan menduduki jabatan tinggi, tetapi di rumah, perempuan adalah pendamping suami. Karena itu Sumiyati tetap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Posisi di kantor dan di rumah berbeda. Itu yang diyakininya sejak kecil, dan dia tidak mengabaikan akar budaya Jawa.

Sumiyati berulang kali menyampaikan kepada keluarga dan staf di kantornya bahwa perempuan boleh berkarier setinggi apapun,

tetapi tidak boleh membelah dirinya, misalnya 60 persen di kantor dan 40 persen di rumah. “Perempuan harus siap berbagi peran, melakukan *multitasking*, 100 persen di kantor, dan 100 persen di rumah. Ini berarti jika sedang berada di kantor, jangan memikirkan urusan rumah. Sebaliknya setelah di rumah, jangan memikirkan urusan kantor,” kata Sumiyati memberi kiat.

Meski di kantor, Sumiyati sangat sibuk, setelah tiba di rumah, dia tidak lupa menyiapkan makanan bergizi untuk suami dan anak-anaknya. Bagi anak bungsu, Andyta Nalaresi, ibunya adalah *role model* yang luar biasa, yang mampu menyeimbangkan *work life* dan *family life*. “Ibu bekerja keras karena harus rapat hingga larut malam hingga dinihari. Pagi hari, ibu sudah menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Jam tujuh pagi, ibu sudah berangkat lagi ke kantor. Sesibuk apapun, ibu tetap memerhatikan keluarganya. Suatu hari jika saya sudah berkeluarga, saya ingin seperti ibu, menjadi Kartini di era modern,” kata Dyta, dokter lulusan Universitas Diponegoro Semarang yang sedang memperdalam *public health*, khususnya *economic evaluation*, dalam pendidikan S-2 di Melbourne, Australia.

Suami Sumiyati, Hartono —teman satu desa di Sragen— bercerita, mereka tidak punya asisten rumah tangga di rumah. Sum sudah terbiasa mencuci sendiri pakaiannya dan keluarganya. “Sum mencuci, saya yang menyeterika. Kami kan anak kampung yang pernah mengalami kehidupan yang sangat sulit. Jadi untuk pekerjaan semacam ini, kami tidak pernah mempersoalkannya. Demikian juga, soal makanan, kami tidak pernah memperlmasalahkannya,” papar Hartono yang menambahkan, jika ada sisa makanan, harus diberikan kepada hewan peliharaan, ayam atau ikan.

“Ibu tak pernah lupa bahwa beliau dapat menikmati pendidikan menengahnya (SMEP dan SMEA di Sragen) sampai pendidikan tinggi (STAN di Jakarta dan S2 di Australia) karena dibiayai negara. Karena itu tidaklah heran ketika mengabdikan di Kementerian Keuangan, ibu bekerja total sepenuh hati, dan juga tidak memanfaatkan jabatannya sebagai pejabat eselon I. *Nak, kita berutang pada negara*, kata ibu kepada kami anak-anaknya berulang kali,” kata Budiaji Hartono, anak sulung, sarjana Teknik Elektro ITB 2002.

Di rumah, Sumiyati menyediakan perpustakaan di rumah sehingga empat anaknya, yaitu Budiaji Hartono, Dwipa Harimurti, Triana Mustika Rukmi, dan Andyta Nalaresi, sampai sekarang lebih senang membaca buku. “Hiburan kami adalah membaca buku di perpustakaan di rumah. Ibu menyediakan perpustakaan dengan berbagai aneka koleksi. Kami dibiasakan membeli buku di Gramedia secara rutin. Inilah yang membuat pengetahuan kolektif kami relatif banyak. Saya jarang nonton TV karena sudah terbiasa membaca buku. Bagi saya, menonton menghabiskan waktu, sedangkan membaca membuat saya bisa lebih berimajinasi,” kata Dwipa Harimurti, anak kedua, lulusan ITB.

Triana Mustika Rukmi mengungkapkan, dia dan tiga saudaranya tidak pernah tahu secara rinci pekerjaan ibunya di kantor. “Yang saya ingat adalah ketika saya masih SD, ibu bekerja ramai-ramai di satu ruangan. Setelah saya di bangku SMP, ibu mempunyai ruang kerja tersendiri dengan sekretaris. Sampai akhirnya saya menyadari jabatan ibu di Kemenkeu sudah tinggi. Ketika ibu masuk ke ruangan, semua orang berdiri. Selama ini ibu tidak menceritakan tentang pekerjaan di kantor. Ibu bahkan masih suka mengurus sendiri administrasi kependudukan ke kantor kelurahan. Kami anak-anaknya tidak merasakan perbedaan dalam kehidupan kami karena gaya hidup ibu tetap sama sejak dulu sampai menduduki jabatan eselon I,” kata Tika, juga sarjana ITB.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai penulis buku ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati yang telah menginisiasi penyusunan buku biografi profesional para pejabat Kementerian Keuangan yang sudah memasuki masa purnabakti, dan memberi kesempatan kepada saya untuk menulis biografi profesional Ibu Sumiyati. Buku ini ditulis dengan maksud agar pengalaman Ibu Sumiyati selama 39 tahun 4 bulan tidak hilang begitu saja, tetapi tetap bermanfaat bagi generasi muda Kemenkeu.

Terima kasih kepada Ibu Sumiyati, yang menyediakan waktu untuk diwawancarai —bahkan termasuk akhir pekan —, selalu bersedia “diganggu” dengan berbagai pertanyaan untuk kepentingan konten buku ini, juga terima kasih telah menyempurnakan konten buku ini.

Terima kasih kepada Pak Mulia P Nasution (Sekjen Kemenkeu 2006-2011), Pak Sonny Loho (Irjen Kemenkeu (2011-2015), dan Pak Binsar Simanjuntak (Deputi Kepala BPKP 2005-2017, sekarang Staf Khusus Menteri PUPR), yang memberi gambaran tentang sosok Ibu Sumiyati dalam Prolog di buku ini.

Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada semua narasumber buku ini yang telah menyampaikan testimoni dan berbagi cerita tentang Ibu Sumiyati, yaitu Pak Sistomo (sahabat masa remaja dan masa muda Ibu Sumiyati di Sragen), Pak Bambang Karuliawasto (Sekretaris Itjen Kemenkeu), Pak Raden Patrick

Wahyudwisaksono (Inspektur V Itjen Kemenkeu), Ibu Lucia Widiarsanti (Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jawa Barat III), Pak Edward UP Nainggolan (Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Kalimantan Barat), Ibu Anne Serfiana (Direktur Keuangan Umum dan Sistem Informasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kemenkeu), Pak Rahmadi Murwanto (Direktur Politeknik Keuangan Negara/PKN STAN), Pak Marudut Napitupulu (Kepala Bagian Perbendaharaan, Biro Perencanaan dan Keuangan - Setjen Kemenkeu), Ibu Mei Ling (Tenaga Pengkaji Ditjen Perbendaharaan), Pak Malul Azam (kandidat Doktor di Universitas Katolik Leuven/KU, Belgia), dan Ibu Nur Imroatus Sholihat, auditor generasi milenial.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Pak Hartono (suami Ibu Sumiyati) dan empat putra-putri, yaitu Mas Budiaji Hartono, Mas Dwipa Harimurti, Mbak Triana Mustika Rukmi, dan Mbak Andyta Nalaresi yang telah memberi gambaran utuh tentang sosok Ibu Sumiyati sebagai istri dan ibu.

Kepada Pak Andin Hadiyanto (Kepala BPPK) dan Pak Iqbal Islami (Sekretaris BPPK) yang menjadi *host* penyusunan buku ini, saya sampaikan terima kasih.

Kepada Mas Sugeng Satoto (Kepala Bagian Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Manajemen Pengetahuan) dan penggantinya Mas Iwan Khrisnawan, Mas Ari Sandi Robert (Kepala Subbagian Manajemen Pengetahuan), Mbak Titis Sari Putri Rahayu dan Mbak Pradina Anis Herginingtyas (staf Subbagian Manajemen Pengetahuan), Mas Ludovicus Agwin (Humas Itjen Kemenkeu) dan stafnya Mbak Tri Yuliani, serta kepada Mas Sandri Merizanta, Mas Anwar, Mas Syassi Azziz, dan Mas Agung di Bagian Umum BPPK, saya haturkan terima kasih untuk segala bantuan dan dukungan yang diberikan sehingga buku biografi profesional Ibu Sumiyati ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Sebagai penutup, saya ingin mengutip pepatah Latin, *Verba volant, scripta manent* (yang terucap akan hilang, yang tertulis tetap abadi). Berbagai *legacy* Ibu Sumiyati ini akan tetap menjadi bagian sejarah Kementerian Keuangan setelah terekam dalam buku ini—yang dapat diakses dan dibaca oleh generasi sekarang

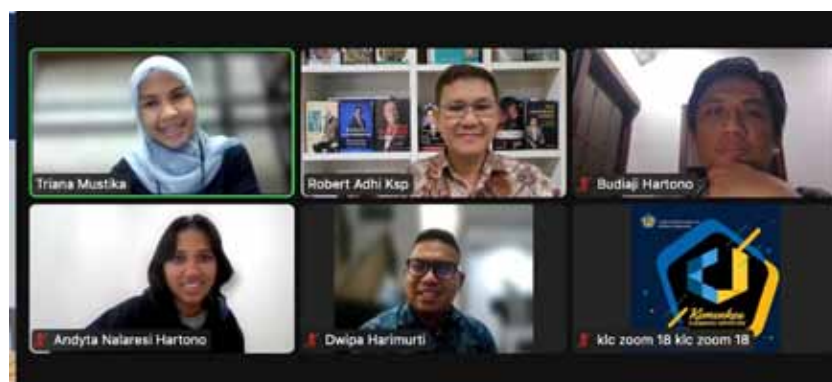


Penulis bersama Sugeng Satoto (atas), Ari Sandi dan Titis Rahayu (bawah) di kantor BPPK Kemenkeu Jakarta.

dan mendatang. Sebab jika hanya diceritakan dari mulut ke mulut dan tidak terekam dalam buku, dalam beberapa tahun ke depan, cerita ini pelan-pelan bisa saja tak terdengar lagi. *“Without words, without writing, without books, there would be no history,”* kata Oliver Goldsmith, novelis dan penyair asal Inggris. Tanpa kata-kata, tanpa tulisan, tanpa buku, tak akan ada sejarah.

Semoga buku biografi profesional *“Sumiyati, Srihandi Perubahan, Inspirasi Bagi Perempuan. — Dari Reformasi Keuangan Negara, Perencanaan dan Penganggaran, Sampai Corpu”* bermanfaat bagi pembaca. Kebahagiaan seorang penulis adalah jika buku yang ditulis memberi inspirasi bagi banyak orang.

Robert Adhi Ksp
Serpong, 21 Agustus 2022



SEKILAS PENULIS



Robert Adhi Ksp yang bernama lengkap Robert Adhi Kusumaputra adalah penulis buku. Sebagian besar buku yang ditulisnya bergenre biografi. *“Sumiyati, Srikandi Perubahan, Inspirasi Bagi Perempuan — Dari Reformasi Keuangan Negara, Perencanaan dan Penganggaran, Sampai Corpu”* merupakan buku ke-17 yang ditulisnya.

Buku-buku yang ditulis **Robert Adhi Ksp**

adalah

- ***Panggil Aku King*** (biografi pebulu tangkis legendaris Indonesia Liem Swie King, Penerbit Buku Kompas, 2009)
- ***Banjir Kanal Timur Karya Anak Bangsa*** (Grasindo, 2010)
- ***Rahasia Sukses Pengusaha Properti*** (Bhuana Ilmu Populer, 2011)
- ***Johnny Widjaja, Cuplikan Kehidupan*** (Sintesa Publisher, 2014)
- ***Andy Noya: Kisah Hidupku*** (Penerbit Buku Kompas, 2015)
- ***Bur Maras, Keturunan ke-13 Raden Patah*** (Bhuana Ilmu Populer, 2015)
- ***Tanto Kurniawan - Cash Flow is King -- Pembangunan Jaya, Paramount Serpong, Jababeka*** (Bhuana Ilmu Populer, 2016)

- ***Tony Wenas: Chief Entertainment Officer -- Work and Fun are Soulmates*** (Gramedia Pustaka Utama, 2017)
- ***Sofjan Wanandi dan Tujuh Presiden -- My Love for My Country*** (Penerbit Buku Kompas, 2018)
- ***Strela Senjaya: A Simple Woman with a Golden Heart*** (Gramedia Pustaka Utama, 2018)
- ***Jonner Napitupulu: The Inspiring Story*** (Gramedia Pustaka Utama, 2019)
- ***AB Susanto: Sang Begawan Konsultan Bisnis Keluarga -- Menapak Persada, Melintasi Cakrawala*** (Penerbit Buku Kompas, 2020)
- ***Marwanto Harjowiryo, Maestro Simfoni Perbendaharaan -- Pengawal Die-Hard APBN, Pendobrak Reformasi Birokrasi*** (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan — Kementerian Keuangan RI, 2020)
- ***M.R. Karliansyah, 30 Tahun Menekuni Pengendalian Pencemaran — Dari Amdal sampai Pemulihan Lingkungan*** (Ditjen PPKL — Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2021)
- ***Semangat Baja Ibnu Susanto*** (Penerbit Buku Kompas, 2021)
- ***Katrina, Pemersatu Keluarga Wanandi*** (Penerbit Buku Kompas, 2022)
- ***Sumiyati, Srikandi Perubahan, Inspirasi Bagi Perempuan — Dari Reformasi Keuangan Negara, Perencanaan dan Penganggaran, Sampai Corpu*** (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan - Kementerian Keuangan RI, 2022)

Robert Adhi Ksp dapat dihubungi melalui emailnya: RobertAdhiKsp@gmail.com; Facebook: Robert Adhi Kusumaputra; Twitter: @AKusumaputra16; Instagram @RobertAdhiKsp; dan laman: <http://robertadhiksp.net>



SINOPSIS

Buku “**Sumiyati, Srikandi Perubahan, Inspirasi Bagi Perempuan** — *Dari Reformasi Keuangan Negara, Perencanaan dan Penganggaran, Sampai Corpu*” merupakan biografi profesional Sumiyati, perempuan pertama yang menjabat Inspektur Jenderal di Kementerian Keuangan.

Sumiyati, anak desa dari Sragen, Jawa Tengah dalam pengabdianya selama 39 tahun 4 bulan, meninggalkan banyak *legacy* yang bermanfaat bagi insan Kemenkeu, di antaranya mendirikan Corporate University (Corpu) — yang kini menjadi *benchmark* bagi kementerian dan lembaga lain di Indonesia; dan mengubah status STAN menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN. Selain itu Penganggaran Berbasis Kinerja (“*Best Practice Guide*”/BPG) juga *legacy* yang sangat berharga dari kepemimpinan Sumiyati sebagai usaha penyempurnaan perencanaan anggaran di kementerian/lembaga.

Buku ini tidak hanya memuat perjalanan hidup Sumiyati yang sulit dan keras sejak awal di Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dan perjuangannya untuk tetap bisa mengenyam pendidikan tinggi gratis di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di Jakarta, tetapi juga memuat testimoni dari sejumlah narasumber tentang sosok Sumiyati.

“Kalau pendidikanku tidak dibiayai negara, aku hanyalah Sumiyati, perempuan penanam padi di sawah di Tanon,” kata Sumiyati, yang kemudian mewakafkan seluruh hidupnya untuk negara. Buku ini tidak hanya layak dibaca oleh generasi muda Kementerian Keuangan, tetapi juga oleh anak-anak di pelosok Indonesia.

Dalam buku ini, Sumiyati ingin menyatakan, “Jangan pernah berhenti mengejar mimpi, melanjutkan pendidikan tinggi, dan berbakti untuk negeri dengan segenap hati.”